

Sommaire

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

- 3** Didi Kwartanada, Ravando Lie, Yerry Wirawan
*Seminar Sejarah Nasional, Peringatan 60 tahun (1957-2017),
Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya, 14-16 Desember 2017*

FRANÇAIS DANS L'ARCHIPEL

- 9** Pierre Labrousse
Adolphe Combanaire (1859-1939). La gloire de l'explorateur
- 39** Daniel Perret
Jules Claine chez les Batak (1891) : un récit controversé

VARIA

- 69** Majid Daneshgar
New Evidence on the Origin of the Hikayat Muhammad Hanafiyah
- 103** Merle C. Ricklefs
The perils of hybridity in 19th-century Java: Ronggawarsita's reputation, animated debates in Bramartani, and the probable origins of Javanese acrostics; with a postscript on Purwalélana
- 129** Nawiyanto
Nature Conservation in a Frontier Region of Java during the Colonial and Early Post-Colonial Periods

TÉMOIGNAGES

- 161** Salmiah Chanafiah Pane
Mon père (Trad. et introd. par Henri Chambert-Loir)

COMPTES RENDUS

- 173 *Ming chaoben “Yingyai shenglan” jiaozhu* 明鈔本《瀛涯勝覽》校注.
By Ma Huan 馬歡. Edited by Wan Ming 萬明. Guangzhou: Guangdong renmin chubanshe, 2018. (R. Ptak)
- 176 *Suma Oriental*. By Tomé Pires. Edited by Rui Manuel Loureiro. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau and Fundação Jorge Álvares; Macau: Fundação Macau, 2017. (R. Ptak)
- 179 Sher Banu A.L. Khan, *Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641-1699*. Singapore: NUS Press, National University of Singapore, 2017. (D. Perret)
- 184 Corbey, Raymond, *Raja Ampat Ritual Art: Spirit priests and ancestor cults in New Guinea's far West*. Leiden: C. Zwartekot Art Books, 2017. (S. Couppé)
- 187 Muhammad Haji Salleh, *Pantun: The poetry of passion*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2018. (Jyh Wee Sew)

RÉSUMÉS – ABSTRACTS

© Copyright Association Archipel 2018

En couverture : Représentation de la princesse, lieu de mémoire Putri Hijau, Seberaya, Sumatra-Nord
(cliché : D. Perret, 2017)

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

Seminar Sejarah Nasional, Peringatan 60 tahun (1957-2017), Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya, 14-16 Desember 2017

Seminar Sejarah Nasional yang diselenggarakan pada Desember 2017 di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, merupakan peringatan 60 tahun *Seminar Sejarah Nasional I* yang diadakan tahun 1957. Seminar berjudul “Sejarah untuk Kebinekaan dan Ke-Indonesiaan: Refleksi 60 tahun Seminar Sejarah Indonesia, 1957-2017” ini merupakan kerjasama antara Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia (PPSI). Panitia kemudian membagi tema besar tersebut ke dalam empat sub-tema yang cukup luas, yaitu (1) Menemukan Historiografi Indonesia, (2) Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan, (3) Agama dan Negara: Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan, (4) Kapita Selekta Pendidikan Sejarah Indonesia.

Secara umum, dapat dikatakan seminar sejarah ini berhasil menarik perhatian sejumlah besar sejarawan. Hal itu terlihat dari banyaknya makalah yang dikirim. Menurut informasi panitia, yang diketuai oleh Dr. Sri Margana, mereka menerima kiriman 312 abstrak. Karena pertimbangan keterbatasan tempat dan waktu, panitia pun harus menyeleksi makalah-makalah tersebut menjadi 163 buah¹. Banyaknya jumlah peserta mengharuskan panitia

1. Prosiding dari seminar ini diterbitkan dalam empat jilid, yaitu Sri Margana, Retno Sekarningrum, Ahmad Faisol (ed.), *Prosiding 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional 1957-2017, Jilid 1: Menemukan Historiografi Indonesia Sentris*, Yogyakarta, Komunitas Ombak, 2017; Sri Margana, Sri Utami Dewi Ningrum, Abmi Handayani (ed.), *Prosiding 60 Tahun*

memperpanjang waktu seminar yang awalnya direncanakan dua hari menjadi tiga hari. Masing-masing hari berisi tiga hingga empat sesi, yang kemudian dipecah lagi ke dalam empat panel simultan, yang umumnya diisi oleh empat atau lima pemateri. Dengan penyusunan panel yang padat seperti ini, kami harus berbagi tugas agar bisa menghadiri panel-panel yang berlangsung bersamaan tersebut.

Sejarah untuk Kebinekaan dan Keindonesiaan

Pemilihan tema kebinekaan dan keindonesiaan sebagai tema utama dalam *Seminar Sejarah Nasional* 2017 penting untuk dicermati karena menunjukkan kepedulian sejarawan akan persoalan sejarah di Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, pemilihan tema ini sekaligus menunjukkan pergeseran pokok perhatian para sejarawan Indonesia bila dibandingkan *Seminar Sejarah I* yang diselenggarakan 60 tahun sebelumnya di Universitas Gadjah Mada². Bila *Seminar Sejarah I* lebih menyoroti usaha penulisan sejarah nasional pasca-penjajahan yang menekankan pada unsur nasionalisme³, maka dalam *Seminar Sejarah Nasional* 2017 ini, perhatian lebih difokuskan pada persoalan intoleransi dan anti-keberagaman yang belakangan marak terjadi di Indonesia. *Seminar Nasional* kali ini berusaha merespon persoalan tersebut dari sudut pandang sejarah. Penghargaan pada keberagaman dengan jelas dihadirkan dalam seminar ini bahkan tidak hanya dari tema tapi juga latar belakang peserta, pendekatan dan metode.

Keberagaman Isi dan Peserta Seminar

Keberagaman peserta dalam seminar sejarah sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam *Seminar Sejarah I* tahun 1957, para pemateri yang hadir juga berasal dari beragam latar belakang⁴. Namun dalam seminar

Seminar Sejarah Nasional 1957-2017, Jilid 2: Pluralisme dan Identitas, Pengalaman dan Pandangan Kebangsaan, Yogyakarta, Komunitas Ombak, 2017; Sri Margana, Sri Utami Dewi Ningrum, Abmi Handayani (ed.), *Prosiding 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional 1957-2017, Jilid 3: Agama dan Negara di Indonesia, Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan*, Yogyakarta, Komunitas Ombak, 2017; Sri Margana, Baha'Udin, Ahmad Faisol (ed.), *Prosiding 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional 1957-2017, Jilid 4: Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia*, Yogyakarta, Komunitas Ombak, 2017.

2. Panitia *Seminar Sejarah I* tahun 1957 telah menerbitkan sejumlah buku antara lain *Petunduk Seminar Seminar Sejarah I* (Yogyakarta, November 1957), *Laporan Seminar Sedjarah* (Yogyakarta, Januari 1958), *Seminar Sedjarah, Acara I dan II* (Yogyakarta, Juni 1958).

3. Tim yang bertugas menuliskan sejarah nasional gagal menyelesaikan tugasnya pada tahun 1963. Penulisan sejarah nasional dalam 6 jilid baru dimulai pada tahun 1970 (Nunus Supardi, *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013*, Jakarta, Dirjen Kebudayaan Indonesia, 2013, hlm. 314-315).

4. *Seminar Sejarah I* diikuti oleh 11 peserta dengan beragam latar belakang membahas tema-tema: Periodisasi Sejarah Indonesia, Syarat Mengarang Kitab Sejarah Indonesia yang Bercorak Nasional, Pelajaran Sejarah Nasional di Sekolah, Pendidikan Ahli Sejarah, Pemeliharaan dan Penggunaan Bahan-bahan Sejarah.

2017, keberagaman latar belakang pemateri semakin luas yang ditandai dengan terlibatnya sejumlah tokoh dari dunia seni seperti F.X. Harsono (seniman), Yuke Ardhiati (arsitek) maupun Mikke Susanto (kurator seni rupa). Keberagaman latar belakang peserta pada gilirannya menghadirkan bervariasi tema dalam seminar ini. Berbagai kajian dan pendekatan baru juga turut memperkaya penulisan sejarah Indonesia. Tercatat beberapa panel dengan kajian dan pendekatan yang relatif baru di Indonesia seperti sejarah kesehatan, sejarah kuliner, olahraga, sejarah dan manfaat film bagi studi sejarah hingga sejarah seni.

Keberagaman tersebut juga hadir dalam bentuk pendekatan dan terobosan alternatif untuk penulisan sejarah Indonesia di masa depan salah satunya berkaitan dengan dunia digital. Kresno Brahmantyo misalkan yang menawarkan konsep “Sejarah Digital” untuk menjaga dan melestarikan sejarah Indonesia. Di samping itu, ada juga Amrullah Amir yang berupaya menghadirkan polemik sejarah antara Arung Palakka dan Sultan Hasanuddin di abad ke-16, ke era saat ini melalui analisis terhadap “perang” yang terjadi di media sosial terhadap penyematan titel ‘pahlawan’ atau ‘pejuang’ terhadap kedua sosok ini.

Tema tentang Islam menduduki tempat penting dalam seminar ini yang dikaji melalui berbagai perspektif, mulai dari pembahasan mengenai historiografi Islam yang disinggung oleh Jajat Burhanudin dalam naskahnya yang berjudul “Ulama dan Islam di Indonesia: Sejarah Kajian dan Kecenderungan Metodologis”, persinggungan Islam dengan agama dan kepercayaan lain yang dibahas oleh Fitriati Harahap dalam naskahnya yang berjudul “Islam dan Kristen di Sipirok (Tapanuli Selatan) dalam Catatan Arkeologi dan Sejarah”, Islam dan pluralisme seperti yang disinggung oleh Rahim Asyik F.A. dalam naskahnya membahas Jacobs-Affaire berupa Yahudi versus Islam di Tasikmalaya pada tahun 1936. Tema Islam dan Negara tercermin dalam naskah Slamat Trisila berjudul “Hegemoni Negara terhadap (Budaya) Islam di Bali pada Zaman Orde Baru”, hingga pemikiran para tokoh Islam berpengaruh yang bisa dilihat dalam naskah Yasin Azhari berjudul “Imajinasi Nasionalisme Inklusif K.H. Ahmad Dahlan dalam Sejarah Indonesia.” Sebaliknya, pembahasan sejarah yang terkait orang Kristen dan Katolik hadir secara khusus sekurangnya dalam dua panel di hari kedua dan ketiga yang antara lain Fransiska Widyawati dengan makalahnya bersama Yohanes S. Lon tentang masyarakat Katolik di NTT dan Muhammad Sairin dengan penelitian bersama Lukman Nadjamuddin mendiskusikan masyarakat Kristen di Poso.

Pemaparan tentang sejarah maritim, sebuah tema yang sangat terkait dengan pilihan pembangunan ekonomi pemerintah Jokowi saat ini, hadir sekurangnya dalam sebuah panel dengan pembicara Singgih Tri Sulistiyyono yang membahas “Arah dan Perspektif Historiografi Maritim Indonesia”. Dalam panel ini hadir pula Susanto Zuhdi yang mendiskusikan arah dan

perspektif historiografi maritim Indonesia melalui sejarah Buton.

Periode Perang Dunia II, revolusi Indonesia dan periode sesudahnya masih mendapat perhatian mendalam dalam seminar ini dengan sebuah panel yang terdiri dari A.A. Bagus Wirawan bersama dengan A.A. Ayu Rai Wahyuni yang membahas tinjauan historiografis sejarah revolusi di Bali. Yang menarik dalam panel ini pembahasan tidak hanya dari sudut konsep Negara Kesatuan. Sebuah makalah yang disampaikan oleh Riska Anika Putri mengulas Pemerintahan Revolucioner Republik Indonesia (PRRI) berdasarkan koran Belanda.

Selain pembahasan penulisan sejarah yang bersifat nasionalis, pembahasan sejarah lokal cukup mendapat tempat dalam seminar 2017. Contohnya Tema keberagaman dalam sejarah pendidikan konteks lokal di Yogyakarta hadir dalam sebuah panel tersendiri yang terdiri dari Dwi Ratna Nurhajarini, Mutiah Amini, Baha'Udin, Asti Kurniawati. Selain itu, Abdul Karim membahas tentang pemerintahan Kerajaan Balanipa pada abad ke-16/17, Muslimin AR Effendy tentang Kesultanan Bima. Sayangnya dari sejumlah pemaparan tentang sejarah lokal, hanya ada satu yang mengulas Halmahera oleh Abdul Rahman dan tidak ada yang khusus membahas Papua.

Yang juga patut dicatat dalam seminar ini adalah pembahasan tentang sejarah perempuan hadir sekurangnya dalam dua panel di dua hari yang terpisah. Pada hari pertama Syarifah Aini membicarakan pemikiran Rohana Kudus. Sementara itu Widia Munira, Muhammad Akhyar dan Djono menulis tentang kepimpinan Ratu Safiatuddin di Aceh. Raisye S. Haghia mengulas tentang majalah *Keoetamaan Isteri*, Ita F. Nadia tentang "Identitas Perempuan Eksil". Pada hari kedua, sejarawan muda, Siti Utami Dewi mempresentasikan historiografi sejarah perempuan, dan Galuh Ambar Sasi tentang perempuan Yogyakarta pada masa Revolusi. Keduanya menunjukkan penguasaan literatur yang mendalam dan sama-sama sepakat bahwa persoalan saat ini bukan jumlah sejarawan perempuan, tetapi sensitivitas gender lebih penting bagi historiografi.

Panel tentang masyarakat Tionghoa juga hadir dalam seminar kali ini. Pada hari pertama Hendri Gunawan membahas secara singkat kajiannya tentang komunitas Tionghoa di Sulawesi Utara. Sementara itu, Yulianti menyampaikan hasil penelitiannya tentang keyakinan orang Tionghoa berdasarkan majalah *Sam Kauw Gwat Po* dan *Moestika Dharma* pada masa kolonial. Zeffry Alkatiri memaparkan hasil penelitiannya bersama Fuad Gani dan Reynaldo de Archelie tentang para pengusaha Tionghoa di Pontianak. Pemakalah lainnya yaitu Lukiyati Ningsih tentang orang Tionghoa di Kapasan, Surabaya. Di panel yang berbeda, Didi Kwartanada menyampaikan tentang kajian etnik Tionghoa pasca-1998. Tinjauan historiografis ini memberikan gambaran tentang tren perkembangan studi Tionghoa pada masa kini. Pada hari ketiga, sejarah masyarakat Tionghoa kembali hadir dalam pemaparan Dirga Fawakih tentang masyarakat tersebut di Tangerang.

Di sisi lain kami juga mencatat tema-tema yang selama ini belum banyak mendapat tempat dalam penulisan sejarah nasional seperti peristiwa 1965, ternyata masih sangat minim pembahasannya dalam seminar ini. Salah satunya yang terkait dengan peristiwa tersebut hadir dalam pemaparan Satriono Priyo Utomo tentang Universitas Rakyat 1958-1965 dan Ita F. Nadia, seperti kami telah sebutkan di atas, membahas tentang identitas perempuan eksil. Namun yang menyegarkan kajian-kajian baru hadir dalam seminar ini disampaikan oleh dua sejarawan dari Universitas Padjadjaran, yaitu pemaparan Gani A. Jailani yang menyampaikan sejarah kedokteran di Indonesia dan Fadly Rahman tentang studi sejarah kuliner sebagai kajian historiografis. Kajian kuliner lainnya yang menarik untuk disebutkan di sini adalah pemaparan Ari Budiyanto tentang soto dan jejak kosmopolitanisme.

Pembahasan tentang seni dan olahraga juga turut hadir dalam seminar sejarah ini. Beberapa cabang seni yang terwakili adalah seni rupa melalui pemaparan Mikke Susanto tentang lukisan-lukisan koleksi Istana Kepresidenan RI dan Asikin Hasan tentang Gerakan Seni Rupa Baru. Sementara itu Yuke Ardhiati mengulas tentang historiografi arsitektur dan Danang Respati Puguh tentang seni pertunjukan Jawa. Kajian film dalam studi sejarah juga mendapat perhatian melalui pembahasan Aan Ratmanto dan Fandy Hutari yang masing-masing membicarakan tentang kegunaan film dokumenter sejarah sebagai medium alternatif historiografi dan sejarah film serta sandiwara di Indonesia. Yang tidak kalah menariknya adalah pemaparan RN Bayu Aji tentang penulisan sejarah olahraga.

Pada bagian akhir, kami ingin mengulas secara ringkas pemilihan periode berdasarkan judul-judul makalah yang dikirim untuk Seminar Sejarah Nasional ini (163 judul). Dapat dikatakan bahwa tema-tema yang diangkat mencakup hampir semua periode dalam penulisan sejarah di Indonesia. Di sini kami menyajikan sebuah tabel sederhana berdasarkan periode yang merangkum judul-judul dengan tema lintas periode atau yang tematis.

Klasik	4 karya
Islam abad pertengahan	6 karya
Periode abad ke-17-18	Tidak ada
Abad ke-19	1 judul
Awal abad ke-20	27 judul
Jaman Jepang dan PD II	5 judul
Jaman revolusi	5 judul
Periode 1950an-1960an	2 judul
Periode Orde Baru	11 judul
Lintas Periode	43 judul
Tanpa periode (tematis)	59 judul

Secara sepintas terlihat bahwa tema lintas periode mendominasi dengan 43 judul. Selanjutnya terdapat 27 judul untuk periode awal abad ke-20 dan tidak ada judul untuk periode VOC. Uniknya untuk periode Revolusi dan Pasca-Perang Kemerdekaan, yaitu 1950-an dan 1960-an, masing-masing hanya terdapat 5 dan 2 judul.

Catatan Penutup

Dari *Seminar Sejarah Nasional* tahun 2017 ini kita bisa memberikan setidaknya dua catatan penutup. Pertama, melihat dari jumlah abstrak dan pemakalah, seminar ini memperlihatkan tingginya semangat dan minat menulis sejarah, tidak hanya di antara sejarawan tapi juga kalangan non-sejarawan. Kenyataan ini merupakan tanda yang baik karena menunjukkan minat terhadap studi sejarah semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kesimpulan kedua, seminar ini berhasil menunjukkan perkembangan terkini studi sejarah di Indonesia. Keberagaman tema dan metode terlihat sangat menonjol dalam pemaparan-pemaparan pemakalah yang sayangnya tidak semua tema menarik dapat kami ikuti karena keterbatasan waktu. Meskipun begitu terlihat jelas bahwa generasi muda sejarawan Indonesia masa kini telah melangkah jauh dibandingkan pendahulunya dalam menghadirkan tema-tema baru dan segar dalam penulisan sejarah. Hanya saja keberagaman tersebut terlihat seperti baru tahap hadir secara beragam tapi belum terkoneksi satu dengan yang lainnya. Studi-studi komparatif belum hadir dalam seminar kali ini. Artinya di sini, penulisan sejarah Indonesia yang lebih komprehensif masih harus menempuh jalan yang panjang. Meskipun begitu, bagi sejarawan Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa keberagaman dan kekayaan bangsa dapat terus menjadi sumber inspirasi penulisan sejarah Indonesia dengan memperhatikan kesamaan dan memahami perbedaan-perbedaan kita sebagai sebuah bangsa.

DIDI KWARTANADA, RAVANDO LIE, YERRY WIRAWAN

FRANÇAIS DANS L'ARCHIPEL

PIERRE LABROUSSE¹

Adolphe Combanaire (1859-1939). La gloire de l'explorateur.

« Je ne suis en effet que l'homme qui passe,
l'homme qui voyage, l'homme qui a vu,
l'homme qui sait et qui, sur son passage,
au hasard de la rencontre qui l'intéresse
et le sollicite, dit ce qu'il a vu et répand ce qu'il sait. »

Bul. Soc. Indo-chinoise, 1908, p. 25

La vie d'Adolphe Combanaire est plus qu'un roman d'aventures. Son exploit d'avoir traversé seul, – mais avec une dizaine de porteurs tout de même – la partie ouest de Bornéo, de Kuching au fleuve Pembuang, reste son bâton de maréchal². Pour le public il devient « l'explorateur de Bornéo » puis l'« explorateur Combanaire », et c'est paré de ce titre qu'il se présente sur la couverture de son livre de souvenirs de la Grande Guerre, *Vers la Gloire, en avant, Marche !*³, auquel il rajoute un deuxième titre, « Doyen des très vieux Poilus de l'Association des Écrivains Combattants » qui réfère à la dernière

1. Professeur honoraire, Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

2. *Au pays des coupeurs de têtes. À travers Bornéo*, Paris, Plon, s.d. [1902]. Bernard Sellato a consacré plusieurs articles à la vision de Bornéo et aux explorateurs, L'« Aventure vécue à Bornéo : un survol de la littérature », *Archipel* 33, 1987, p. 143-149. Voir son introduction à la réédition de *Au pays des coupeurs de têtes*, Singapour, Editions Pagodes, 1993. Voir aussi « Vous avez dit explorateurs ? », *Bornéo. Des chasseurs de têtes aux écologistes*, Paris, Autrement, n° 52, mars 1991, p. 31-40. Le présent article est consacré à l'environnement économique et à la fabrication des explorateurs.

3. Châteauroux, Société d'Imprimerie, d'édition et des Journaux du Berry, 1939.

partie de sa vie et à l'illustration de ses engagements patriotiques. En effet, son oncle a été fusillé par les Prussiens en 1870 et son père lui a fait jurer d'appliquer la loi du talion⁴ pour le venger. Toute sa vie l'enfant se souviendra de ce serment, à plus forte raison quand on lui mettra un fusil entre les mains pour la Grande Guerre. La vie d'Adolphe Combanaire commence comme les récits légendaires de l'enfance puis ceux de la geste des héros.

La singularité de ce personnage, –on serait souvent tenté de dire plaisamment « de cet énergumène », terme qu'il n'aurait pas désavoué – est qu'entre ces deux références : la jungle de Bornéo et les poilus du Berry, il occupe seul tout le terrain de Châteauroux à Singapour en passant par New York et l'Indochine. À la charnière du XIX^e et du XX^e siècle il est l'un des véritables aventuriers français pour qui la vie tout entière est une quête personnelle, audacieuse et dangereuse. Il n'y aura de fin que par la retraite forcée à la suite du sacrifice de son bras sur le champ de bataille⁵. Si l'on cherche d'autres aventuriers en rupture de société qui viennent dans le champ des lecteurs français, dans le monde malais, on pense à James Brooke, mais c'est au service d'une ambition coloniale, à Rimbaud à Java mais c'est un déserteur en fuite, à David de Mayrena, mais c'est un escroc. Personne n'est vraiment comparable à Adolphe Combanaire. Tous les aventuriers sont des individualistes certes, mais lui, il a pour le moins une motivation qui n'appartient qu'à lui : le patriotisme et, bien qu'il s'en défende, le désir de gloire.

« Batailleur, rouspéteur et indiscipliné »⁶

« Mes parents m'avaient envoyé en Angleterre dans une école spéciale à l'éclairage électrique alors à ses débuts. J'en revins fin 1879 pour mes cinq ans de service militaire. Sportif, batailleur et amoureux de l'indépendance, ceci me sembla très dur. Je compris cependant qu'à côté de la servitude militaire il y avait la grandeur de ceux qui défendaient la Patrie »⁷.

Le préfacier de *Vers la gloire, en avant, Marche !*, Maurice Dauray⁸, qui semble avoir bien connu Adolphe Combanaire, explique que ses parents se « désempoisonnent » très tôt – c'est-à-dire « se débarrassent » – de leur rejeton en le mettant à l'école des frères où il reste même les vacances. Au lycée, où il ne finit pas ses études classiques, ses traits de caractère s'affirment. Il est « batailleur, rouspéteur et indiscipliné » selon ses propres termes. « L'âge mûr devait tenir ce que promettaient les jeunes années » ajoute son biographe.

4. *Au pays des coupeurs de têtes*, op. cit., p. 1.

5. Voir Sylvain Venayre, *La gloire de l'aventure. Genèse d'une mystique moderne. 1850-1940*, Paris, Aubier, 2002.

6. *Vers la gloire*, op. cit., p. IX.

7. *Vers la gloire*, op. cit., p. 168.

8. Nom de plume de Maurice Brimbal, figure de la vie intellectuelle castelroussine. Sa préface de *Vers la gloire* est la principale source biographique sur Adolphe Combanaire.

Physiquement il est râblé, énergique et plein de vitalité mais il ne prendra pas femme. Il n'est pas homme à s'embarrasser.

On passe un peu vite sur sa prime jeunesse, faute d'archives pour cette période. Il naît le 15 novembre 1859. À ce moment-là Chateauroux est devenu un carrefour économique actif sur la ligne Paris-Toulouse. Son père possède l'hostellerie du Chêne vert, place Lafayette, qui s'est maintenue jusqu'à une date récente, puis l'hôtel de la Gare. On est au début des liaisons ferroviaires et l'enfant voit défiler des gens célèbres, dont George Sand que son père connaît bien, et ses invités à Nohant⁹. On peut imaginer qu'il y avait déjà en germe à Chateauroux un appel du monde auquel Combanaire répondra d'autant plus vivement qu'il est poussé vers d'autres ailleurs.

Ses parents l'expédient à Londres pour se former au commerce et sans doute mettre quelque distance entre lui et eux. Cet exil ne semble pas l'affecter outre mesure. Il apprend bien sûr l'anglais qui lui servira dans ses explorations en Malaisie. De là il gagne New York à bord d'un bateau d'émigrants, à l'insu de sa famille. Il acquiert un titre d'ingénieur électrique et une formation, au terme de laquelle il réapparaît en France en 1879 pour répondre à la conscription de cinq années, avec deux mois de retard.

Il sait que la hiérarchie militaire n'est guère compatible avec son tempérament mais il sait aussi qu'il peut disposer à présent d'une situation confortable aux États-Unis, si nécessaire, comme solution de repli. Dans l'armée, il choisit son camp, celui des sous-officiers, corps dans lequel il voit les véritables patriotes. « Pour m'évader d'une contrainte qui me pesait affreusement, je m'efforçai de me libérer d'une partie de l'autorité des gradés »¹⁰. Mais il est toujours aussi rétif, tête brûlée et pris d'une fureur irrépressible devant les malhonnêtétés et les injustices. Son livret matricule s'épaissit rapidement d'une page supplémentaire de punitions. Sans conséquence d'ailleurs car ses rébellions sont toujours pour la bonne cause. Il est envoyé à l'école de tir de Châlon et devient sergent-major, dès les deux ans de service accomplis. Il se porte candidat pour la guerre du Tonkin, mais le corps expéditionnaire est déjà au complet.

Entre temps, en octobre 1882, il reçoit une médaille de sauvetage pour avoir sauvé, en prenant de grands risques, un couple de vieilles personnes dans un incendie boulevard de Charonne à Paris, où périt accidentellement le lieutenant-colonel Froidevaux.

À l'issue de son service militaire durant lequel il a tiré les leçons de survie en opération qu'il mettra en pratique à Bornéo et durant la guerre de 14-18, il devient voyageur de commerce mais pas pour longtemps. On le voit mal se plier à la sollicitation des clients. On sait qu'il participa à la mise en scène de pièces au Théâtre des Variétés dont l'atmosphère lui plut fort. Il en garda

9. George Sand évoque l'hôtel du Chêne vert dans le roman *Marianne* (1876, dans la *Revue des deux mondes*).

10. *Vers la gloire, op. cit.*, p. 168.

la mémoire de chansons à la mode et un goût pour le théâtre : paraître, parler haut, répliquer habilement, interloquer son interlocuteur, autant de traits de son caractère et du théâtre de boulevard qui vont le sauver à Bornéo. Puis il est recruté comme ingénieur dans une compagnie parisienne d'éclairage électrique, tout en suivant des cours à l'école des Arts et Métiers. C'est là qu'il entend le professeur Émile Jungfleisch (1839-1916), un chimiste réputé qui enseignait dans cet établissement. Il attirait l'attention sur l'importance de la gutta-percha, évoquait les risques de pénurie pour la fabrication des câbles sous-marins, affirmant que la gutta-percha pouvait être extraite aussi bien des feuilles que du tronc.

Pour Adolphe Combanaire ce fut le déclic et le début d'une véritable histoire d'amour, sans que l'on comprenne bien le pourquoi d'une passion dont de Jouffroy d'Abbans, son ami, a bien saisi l'originalité¹¹. Toujours est-il qu'un nouvel horizon s'ouvrait à lui en Asie du Sud-Est. Il y avait dans ce désir de gutta-percha des promesses d'exotisme, d'aventure, de périls et de gloire, pour le progrès des sciences et de l'exploration.

Panique pour la gutta-percha

L'attirance d'Adolphe Combanaire pour la gutta-percha ne relève pas d'une lubie quand il tire le signal d'alarme qui sera vite entendu parce qu'il n'est pas le seul. On touche au cœur des réseaux nécessaires au développement de la communication¹². Le premier câble sous-marin télégraphique de Douvres à Calais avait été posé en 1851. Les câbles finissaient par se rompre. Mais la téléphonie était devenue le phare des grands projets industriels. On était prêt à tout mettre en œuvre pour vaincre les obstacles. On avait découvert que la gutta-percha était un excellent isolant. Cette substance avait la particularité de devenir malléable à la chaleur, puis de durcir par refroidissement. C'est, entre autres usages, le matériau habituel pour les obturations canalaire des dents. Aux yeux des industriels, la crise de la gutta-percha n'était rien moins que la perte du « système nerveux de l'univers » !

Le problème c'est que contrairement à l'hévéa, l'extraction se faisait par abattage de l'arbre que l'on découpaient ensuite. C'étaient de grands dégâts forestiers pour un résultat insignifiant. « C'est comme si l'on brûlait une maison toutes les fois qu'il s'agirait de cuire une omelette » commente un journaliste du *Figaro*. La pénurie pointait depuis 1850. Les plantations de

11. « Ce fanatique de la gutta faisait plus que contempler les dichopsis : il les sentait, les flairait, les palpait, les caressait » observe le Comte de Jouffroy d'Abbans, « La gutta-percha et le caoutchouc en Malaisie. Conférence de M. le Comte de Jouffroy d'Abbans », *L'Agriculture pratique des pays chauds, Journal du Jardin Colonial et des jardins d'essai des colonies françaises*, juillet 1902-juin 1903, p. 598.

12. Helen Godfrey, *Submarine Telegraphy and the Hunt for Gutta Percha. Challenge and Opportunity in a Global Trade*. Leiden, etc., Brill Academic Pub., 2018, p. 73-74 sur Adolphe Combanaire.

Singapour étaient surexploitées alors que l'habitat des palaquiums est restreint à la zone des détroits, entre Sumatra, la Malaisie et Bornéo. Qui plus est cet espace était tenu par les Néerlandais et les Britanniques qui avaient pris le monopole avec la Compagnie anglaise de la Gutta-percha, ce qui, de toute façon, ne leur donnait qu'un modeste répit pour tomber dans la même pénurie que leurs concurrents. En fait la gutta-percha est la première prise de conscience et le premier cri d'alarme écologique (avant l'invention du terme). Notons l'inquiétude identique pour une espèce dont on craint qu'elle ne soit en voie de disparition : les oiseaux de paradis qui ornent le chapeau des élégantes¹³. Le Comte de Jouffroy d'Abbans de retour à Singapour après une absence de vingt ans parle, à propos de la gutta, d'un « massacre ». « À peine débarqué, j'entends comme un cri de détresse : « Il n'y a plus de gutta, c'en est fait des câbles » on coupe chaque année deux millions d'arbres pour 3 à 5 000 tonnes de gutta. La production moyenne est de 2 kg par arbre. »¹⁴

En 1898 on prend conscience que la demande en téléphonie est telle que les stocks de gutta-percha ne suffiront jamais.

« L'inquiétante vérité, est que c'en est fait des câbles sous-marins. Dans dix ans, plus tôt même peut-être, une irréparable brèche va troubler le réseau sans fin qui enveloppe le globe d'une sorte de filet continu aux mailles serrées, et les messages électriques s'arrêteront au bord des abîmes de la mer, qu'ils ne sauront plus franchir. Un détail, un rien, aura suffi, pour désorganiser sans merci l'économie du système, et frapper de paralysie la circulation télégraphique universelle. Ce détail, ce rien, dont personne n'a l'air de prendre souci, c'est l'épuisement de la gutta-percha »¹⁵.

Les projets industriels buttent sur ce problème quand Combanaire entre dans le débat. Lui, il arrive à la gutta-percha par les câbles électriques et télégraphiques. Il est déjà très écouté pour sortir de cette impasse où les industriels se trouvent sans solution. On cherche d'autres variétés de palaquium, mais aucune n'est aussi bonne que la gutta-percha. D'ailleurs on ne s'y retrouve plus dans tous les arbres à gomme, à résine, à latex. On pense qu'il est possible d'extraire la gomme des feuilles, mais pour l'instant on ne sait pas faire¹⁶. Les arbres poussent par bosquets discontinus ce qui pose le

13. J. Forest, « Contributions ornithologiques de la Nouvelle-Guinée ou Papouasie à l'industrie de la mode », *Revue des sciences naturelles et appliquées*, 1894 (1), p. 49-60, 199-213, 289-296, 352-360, et 1894 (2), p. 14-27, 109-117, 160-171. Ce commerce était monopolisé par des métis néerlandais de Ternate. Ce thème et celui de la gutta-percha apparaissent aussi dans le roman de Maurice Maïdron, *Les Chasseurs d'oiseaux de paradis. Aventures d'un savant en Nouvelle-Guinée*, Tournai, Casterman, s.d. [1891].

14. Comte de Jouffroy d'Abbans, *op. cit.*, juillet 1902-juin 1903, p. 586-603.

15. *Journal des économistes*, t. L, juillet-août 1902. Compte rendu du livre de A. Combanaire, p. 125-129.

16. L'abondance de publications sur le sujet est particulièrement révélatrice. Voir Octave J.-A. Collet, *Etudes pour une plantation d'arbres à caoutchouc*, Bruxelles, Falk fils, 1902 ; Henri Jumelle, *Les plantes à caoutchouc et à gutta*, Paris, Challamel, 1903 ; Pieter van Romburgh, *Les plantes à caoutchouc et à gutta-percha cultivées aux Indes néerlandaises*, Batavia, G. Kolff & Co., 1903.



ADOLPHE COMBANAIRE

Fig. 1 – Portrait d'Adolphe Combanaire en frontispice de *À travers Bornéo* (1902)

problème de leur aptitude à la plantation. Et tout programme de régénération des forêts, comme on le tente à Singapour, fera perdre un temps long et précieux, et qui coûte cher, à l'exemple du projet de câble Amérique-Japon qui fait immédiatement flamber les cours de la gutta-percha de 50%. Les regards se tournent alors vers Adolphe Combanaire. Il est écouté parce qu'il a déjà arpентé la zone de Sumatra à l'Indochine, à la barbe et au nez des Néerlandais et des

Britanniques. Il est péremptoire : les pallaquiums ne peuvent être acclimatés que dans une zone de quelques centaines de lieues autour de Singapour. Mais pénétrer à l'intérieur de Bornéo à la recherche de nouvelles zones encore mythiques de gutta-percha est une audace que personne n'a encore eue. Enfin Combanaire arriva pour se lancer dans un défi à sa mesure, qui suscitait en lui toute l'excitation d'une chasse au trésor.

Gutta-percha est l'adaptation du mot malais *getah* qui signifie « gomme, latex, résine » et de *perca*, terme qui n'est pas bien défini. Ce qui n'a pas échappé au Hobson-Jobson¹⁷. Au sens étroit, *gutta perca* désigne le *Pallaquium Gutta* et la gomme du même arbre qui est à feuilles persistantes et produit un latex brun. Les synonymes sont nombreux avec des variantes régionales : *balam* dans les composés *balam merah*, *balam tembaga*. *Taban* semble être le terme ancien courant pour référer au *Pallaquium Gutta*. *Percha* serait donc le latex du *taban*. Citons encore *nyatuh*, pour nous limiter aux dénominations les plus courantes. Mais un terme vernaculaire peut recouvrir plusieurs espèces. Le mot *damar* « résine » a un sens proche de *gutta* mais peut désigner aussi une autre série d'arbres à résine comme les agathis. Enfin Sumatra est couramment évoqué par la périphrase *pulau perca* « île des arbres à gomme » qui prouve l'abondance, sinon la présence, de diverses sortes de latex. En résumé, la forme *gutta-percha* serait relativement moderne et semble s'être imposée sur *taban* à la fin du XIX^e siècle portée par la vogue et le débat des résines industrielles.

Cette complication des végétaux et de leurs appellations vernaculaires explique les tâtonnements d'Adolphe Combanaire dans ses équipées forestières : identifier les espèces, observer le développement des variations entre un plant et un arbre adulte, évaluer sa capacité à produire une résine à vocation industrielle, poser les bonnes questions aux habitants, tel est le défi dans lequel l'explorateur Combanaire s'engage.

Prospections françaises en Asie du Sud-Est

Le développement mondialisé de l'économie industrielle suscite, sur le terrain des contrées mal connues, des recherches actives. La France participe à ce mouvement en deux temps. Une première partie des recherches commence avec des explorateurs qui sont financés par le gouvernement. Les projets passent par un premier crible qui est celui d'institutions qui règnent sur l'exploration

17. « The history of G.P. is, however far from well known », London, John Murray, 1903, p. 404-405. Plusieurs hypothèses sont avancées, en particulier celle suggérant que *perca* serait en fait Sumatra, donc la *gutta-percha* est la « gomme de Sumatra ». Voir aussi K. Heyne, *De nuttige Planten van Nederlandsch Indië*, Buitenzorg, Departement van landbouw, 1927, t. II, p. 1234-1235. R.J. Wilkinson donne *taban* pour l'arbre et *getah taban* pour la « gomme de *taban* », *A Malay-English Dictionary*, London, Macmillan, 1959, t. II, p. 885.

officielle : la Société de géographie et les missions scientifiques du ministère de l'Instruction publique. Une deuxième vague plus individualiste succède pour qui la question est de savoir ce qui est exploitable et comment passer à la phase industrielle.

De 1891 à 1914, Adolphe Combanaire redouble d'activité, circule dans l'Asie du Sud-Est. On a de la peine à le suivre. Ce séjour est interrompu par la création de plusieurs usines en France : à Chécy à l'est d'Orléans, une deuxième à Lembeq près de Bruxelles, la troisième au Havre. En France, l'industrie de la gutta emploie 125 ouvriers¹⁸. Adolphe Combanaire a découvert une méthode d'extraction avec de l'éther de pétrole et la récupération à basse température. Il a déposé une licence avec Jean de la Fresnaye. On discute pour savoir s'il vaut mieux traiter des feuilles vertes ou des feuilles sèches. Dans un premier temps, il traverse les Détroits pour chercher la gutta-percha à Sumatra. Son idée est de passer en franc-tireur, sans s'embarrasser des autorisations britanniques ou néerlandaises. Les Néerlandais sont déjà englués dans la guerre d'Aceh et se souviennent de l'assassinat des Français Guillaume et Wallon qui s'étaient engagés sans escorte militaire à l'intérieur, sur la côte ouest, à l'insu des Néerlandais¹⁹. Il faut rappeler leur fureur quand ils découvrent que Charles Courret arrive sans aucun contrôle à Sumatra Nord en venant de Padang par la mer²⁰. Si l'on songe aux formalités, aux précautions, aux autorisations qu'a dû solliciter Brau de Saint Pol Lias, il fallait de l'audace ou de l'inconscience pour se lancer dans pareille aventure. Mais Combanaire ne manque ni de l'une ni de l'autre. On ne sait pas par où il s'engage dans Sumatra Nord en compagnie d'un Français nommé Lasserge, ancien communard, mais il raconte, avoir rencontré, à Kutaraja, Teuku Umar qui lui aurait proposé d'acheter des armes contre cent mille francs de poivre blanc. Combanaire rétorquant : « Un Français ne mange pas de ce pain-là ! »²¹ Toujours est-il qu'il peste quand il comprend que ses projets sont dans l'impasse. L'enjeu est de trouver soit de nouvelles réserves de pallaquium, soit des nouvelles variétés propres à l'exploitation industrielle. Il ne revient cependant pas les mains vides car il rapporte aussi de Java, du Jardin botanique de Buitenzorg, des graines de ficus et d'hévéa qui sont à l'origine des plantations indochinoises.

On le retrouve en 1893, de retour en Asie du Sud-Est, prospectant la péninsule malaise où il s'intéresse aux gisements d'étain et fait de bonnes

^{18.} Pierre Kropotkine, *Usines et Ateliers. L'industrie combinée avec l'agriculture, et le travail cérébral avec le travail manuel*, Paris, P.-V. Stock, 1910. Version numérisée Bibliothèque Anarchiste, Internet.

^{19.} P. Labrousse, « Brau de Saint Pol Lias à Sumatra (1876-1881). Utopies coloniales et figures de l'explorateur », *Archipel* 77, 2009, p. 98.

^{20.} Charles Courret, *À l'Est et à l'Ouest de l'océan Indien*, Paris, A. Chevalier-Marescq, 1884.

^{21.} *Mensonges et Vautours coloniaux*, Châteauroux, Librairie Badel, 1910, p. 163. Teuku Umar était à la tête de la rébellion d'Aceh. Les Néerlandais surveillaient étroitement le trafic d'armes dans les Détroits.

affaires. Il va au Siam et en Birmanie. Il aurait découvert du pétrole à Bornéo. Il se rend aux États-Unis : San Francisco, Chicago, New York sur un navire où il fraternise – c'est-à-dire s'adonne au jeu et à l'alcool – en compagnie de nihilistes russes, de forçats échappés des bagnes de l'île de Sakhaline et de cow-boys qui viennent de livrer des mulets aux plantations de canne à sucre²².

Puis il revient pour réaliser son chef-d'œuvre d'explorateur : la traversée de Bornéo en 1898 en solitaire. Son individualisme le pousse vers ces contrées où les Européens n'ont jamais pénétré. Après cette épreuve, on sait qu'il explore les côtes occidentales du Siam ainsi que le sud de la Birmanie. Il se rend aussi au Cambodge et à Saïgon. Il s'intéresse à la culture des huîtres perlières et à l'exploitation du teck, activité dans laquelle on le trouvera en 1914, au moment de la déclaration de guerre. Adolphe Combanaire n'est pas seul à s'intéresser à la gutta-percha. Dans la colonie française en Indochine, il y a un petit groupe de planteurs français, parmi eux Léopold Chassériau, un Bordelais, qui a développé une plantation de 14 000 arbres à Malakoff Estate (péninsule malaise), en 1902, et achète aussi les feuilles pour en extraire la gutta-percha²³. Dans un article, le consul, Comte de Jouffroy d'Abbans, que Combanaire tient en grande estime, cite encore Donnadieu, planteur qui a été tué par les pirates, et Simon qui a installé les sucreries. Ils forment un noyau de planteurs français qui commencent à Singapour puis migrent vers la péninsule malaise.

Bornéo ou le théâtre de l'exploration

« M. Combanaire n'est pas un explorateur ordinaire. C'est un de ces modestes dont on ne saurait trop louer la généreuse initiative et qui, ne comptant que sur leurs propres moyens et sur leurs seules ressources, vont hardiment de l'avant et se vouent tout entiers, avec fougue, à leur entreprise, non pour la gloire, mais pour l'unique satisfaction de la tâche accomplie »²⁴.

C'est ainsi que le présente le *Journal des Voyages* quand il passe à la relation de ses aventures.

Au printemps de 1898, il est tenté par l'idée de traverser diamétralement Bornéo, du nord au sud, en passant par le cœur de l'île, ce que peu de personnes avaient jusqu'à présent réussi²⁵. Avant lui, l'Autrichienne Ida Pfeiffer s'était illustrée par deux tours du monde. Au cours de son second voyage (1851-1855), elle avait tenté et réussi une traversée sud-ouest, de Kuching à Sintang et Pontianak. Elle avait attiré l'attention sur les Dayaks dont elle avait dit,

22. Maurice Dauray, dans l'introduction de *Vers la gloire*, op. cit., p. XV.

23. Maxime Pilon, Danièle Weiler, *Les Français à Singapour de 1819 à nos jours*, Singapour, Éd. du Pacifique, 2011, p. 81-83. Voir aussi « Léopold Chassériau, planteur à Singapour », *ibid.* Une biographie de Chassériau se trouve dans : <ongong.canalblog.com/archives/2010/09/09/19017818.html>

24. J. Beuzon, *Journal des voyages*, n° 313, 30 nov. 1902, p. 466.

25. Sur les voyageurs à Bornéo, voir Bernard Sellato, op. cit., *Archipel* 33, 1987.

comme pour les Bataks d'ailleurs, le plus grand bien. La deuxième narration qui fit connaître Bornéo aux Français est celle du Dr Schwaner qui parut conjointement à celle d'Ida Pfeiffer dans *Le Tour du monde*²⁶. L'itinéraire de Schwaner restait dans le cadre du territoire néerlandais, de Banjarmasin à Pontianak. La revue retint son exploration du fleuve Kahayan. Un autre périple de 1881 avait aussi retenu l'attention, celui du Norvégien Carl Bock²⁷, *Chez les cannibales de Bornéo*, première relation authentique sur l'intérieur de cette île. Le récit de Perelaer qui se présente dans le style d'un roman d'aventures, avait été publié par le Comte Meyners d'Estrey qui fut le grand passeur de la littérature néerlandaise sur l'Insulinde en France à la fin du XIX^e siècle²⁸.

Combanaire lui, est à la recherche de variétés d'arbres ou de lianes à résine qui permettraient de sortir de cette pénurie de gutta-percha dont les réserves fondent à vue d'œil. Au point que les entreprises qui l'utilisent commencent à constituer progressivement un stock pour garantir que leur projet pourra être mené à bien.

Il examine avec attention la résine que les Dayaks apportent sur la côte pour faire du troc. Les collecteurs de gutta-percha avaient l'habitude de tricher en mélangeant la gutta avec des résines de médiocre qualité, dans la proportion de un à quatre. Il recrute une douzaine de porteurs. Dans leur barda, les bouteilles d'alcool ont une part et un poids considérables.

Le titre donné à sa relation, *Au pays des coupeurs de têtes*, a quelque chose d'effrayant qui laisse imaginer des périls multiples, des attaques de sauvages et des morts violentes. Cependant, à lire attentivement le récit d'Adolphe Combanaire, par-delà les exagérations narratives inhérentes au genre et à l'auteur, ce n'est pas une tartarinade qui en ressort, mais une extrême prudence. Il ne faut pas oublier qu'il a un diplôme d'ingénieur. C'est un homme avisé qui progresse avec méthode, se renseigne, écoute les conseils et sait prendre les bonnes décisions. Il veille à bien préparer son itinéraire et se garde de toute situation trop conflictuelle. Il veille aussi à la régularité de ses transactions et s'acquitte scrupuleusement de ses dettes. Il n'y a rien en lui de supérieur. Il découvre, s'intéresse, questionne. Il aime boire certes, mais après avoir noué des relations de confiance, et résolu les crises, quand les interlocuteurs n'ont plus rien à se cacher. Alors il peut se lâcher. Comme au cours de cette rencontre avec un prospecteur anglais dans la jungle de Bornéo, qui finit par lui avouer un meurtre²⁹. Mais est-ce une histoire vraie, une histoire légèrement romancée

26. « Voyages dans l'île de Bornéo », *Le Tour du monde*, 1862 (1), p. 129-166. Première édition 1857.

27. *Chez les cannibales de Bornéo. Première relation authentique sur l'intérieur de cette île*, Tours, Alfred Mame et fils, 1886. *Le Tour du monde*, « De Koutei à Bandjirmasin. Voyage à travers Bornéo », 1890(2), p. 337-352, 353-368.

28. Colonel Michael-Théophile-Hubert Perelaer. *À travers Bornéo. Aventures de quatre déserteurs de l'armée indo-néerlandaise*, Paris, Librairie Hachette, 1891.

29. *Journal des Voyages*, « Souvenirs de Bornéo. Le prospecteur d'or », n° 440, 7 mai 1905,

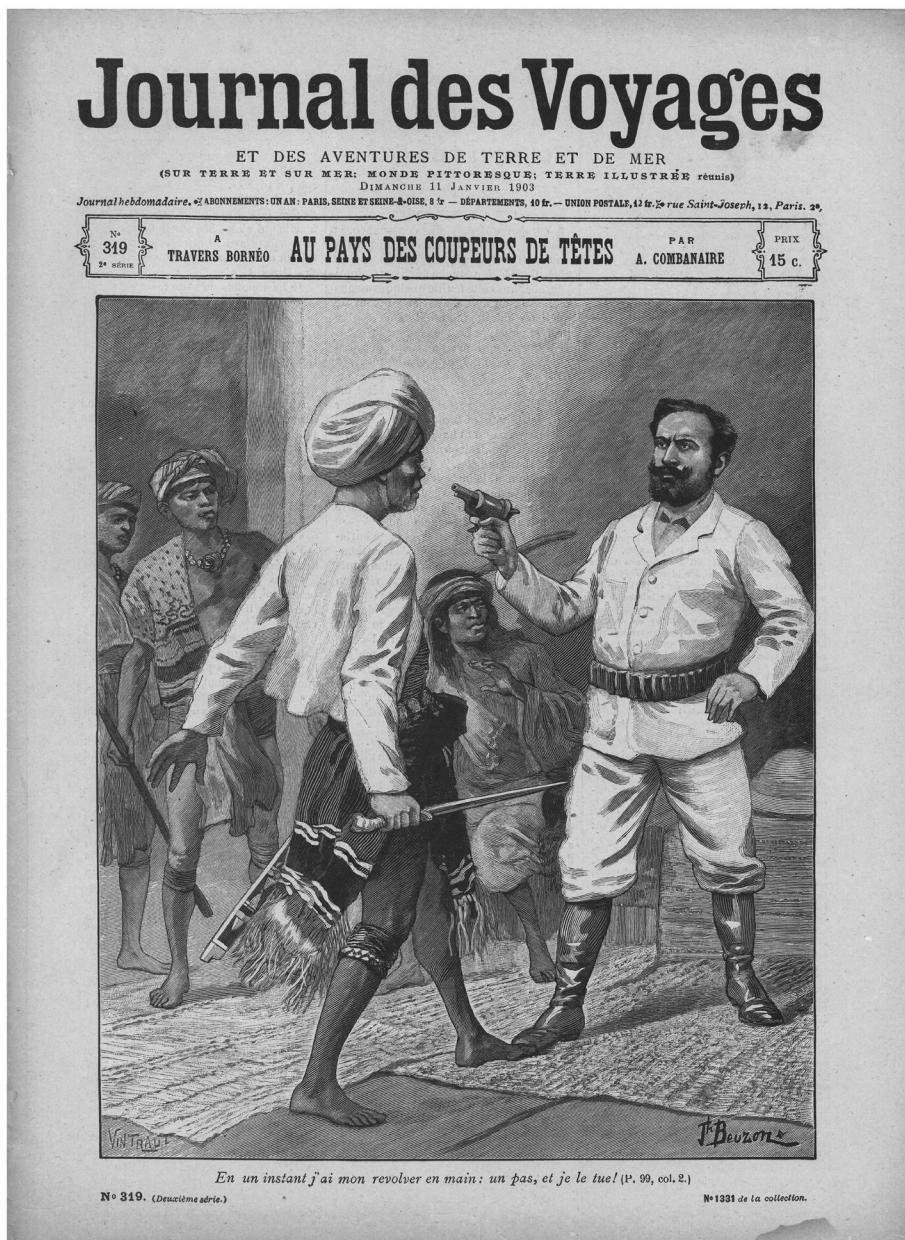


Fig. 2 – L'auteur affrontant le Malais Ali (*Journal des voyages*, couv. du n° 319, 11 janvier 1903)

p. 394-396, suite et fin n° 441.

ou une affabulation ? Autant de questions qui se posent pour la plupart des romans d'aventure vécue.

La traversée de Bornéo ne se fait pas en ouvrant une piste à travers la jungle. C'est, surtout en plaine, une succession de remontées de rivières, suivies d'un portage de village en village jusqu'au bassin fluvial suivant. Et quand il arrive sur le versant néerlandais, il n'a plus qu'à se laisser glisser au fil de l'eau jusqu'à la mer. Les porteurs n'accompagnent Combanaire que pour passer d'un fleuve à l'autre. Ensuite ils reviennent chez eux et Combanaire continue en pirogue, avec un nouvel équipage. Il se trouve donc en contact permanent avec des populations sans cesse renouvelées. Et chaque étape s'accompagne de son lot d'anecdotes car il est un excellent observateur et sait très bien lire un paysage. Au fur et à mesure qu'il avance, les plants d'arbre à gutta-percha prennent la place des bouteilles d'absinthe. Jusqu'à l'étape finale où il se laisse entraîner, à demi-mort vers la mer avec Auguste à qui il doit la vie. Mais le résultat est là : il a pu sélectionner les plants de gutta-percha qui serviront aux essais de plantation en Indochine et dans le Jardin colonial de Nogent-sur-Marne³⁰.

La première évidence est que la jungle est loin d'être impénétrable et ne ressemble guère à l'idée reçue que les étrangers s'en font. Elle est parcourue par toutes sortes de gens qui s'inquiètent surtout de la rumeur qu'il va falloir payer des impôts au *Radja* de Sarawak. Il y a d'abord les Dayaks qui communiquent de village à village et, le cas échéant, comme c'est le cas ici, se font la guerre en provoquant alliances et trahisons. Ils se rendent sur la côte pour faire du troc. Combanaire scrute leurs chargements de gutta, pour découvrir les espèces qui poussent dans l'arrière-pays. Il trouve des Chinois qui ont parfois des plantations et sont installés à demeure, ou qui vivent assez convenablement du commerce entre les Dayaks et la côte. Il rencontre des Malais qui sont dans un rapport de méfiance réciproque, et même d'hostilité avec les chefs dayaks. Il trouve un prospecteur d'or anglais dont nous avons parlé. Sans oublier Combanaire lui-même qui appartient à la race inconnue des *orang didong* qui ne sont pas des Anglais³¹. Il y a deux ou trois sommets dans le suspense. Il croise un Malais, Ali, qui cherche à séduire le *Radhen* des Dayaks de Songkong et réserve à Combanaire un accueil méfiant et même franchement hostile, en le faisant prisonnier. Il est difficile à Combanaire d'expliquer ce qu'il vient faire, car cela dépasse l'entendement pour ses interlocuteurs. Il s'en tire par un mensonge prétendant qu'il est un émissaire du *Radja* de Sarawak, ce qui ne convainc pas Ali qui l'accuse de mensonge. L'un dégaine son kriss, l'autre son pistolet. La tension est à son comble, entre lui, le *Radhen*, Ali et la foule des curieux qui forment une arène de curiosité, car il est évident que

30. Sur ce jardin bien oublié, Thomas B. Reverdy et Sylvain Venayre, *Jardin des colonies*, Paris, Flammarion, 2017.

31. Il rapporte probablement de son passage à Aceh ce terme qui désigne les Français.

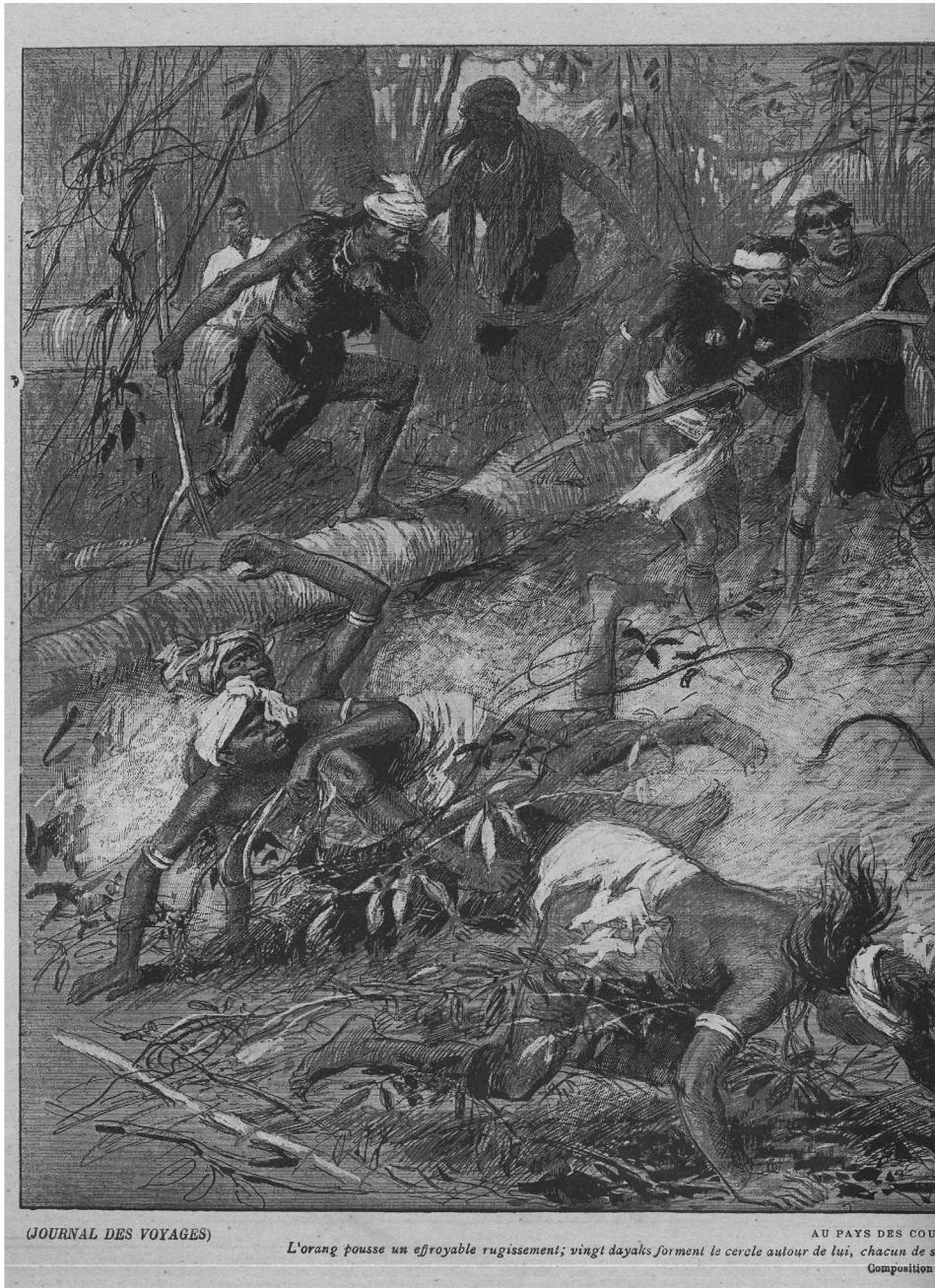
la vie de Combanaire ne tient plus qu'à un fil [cf. fig. 2]. Théâtralement – comme au Théâtre des Variétés –, il affiche alors une grande colère, éclate de fureur, insulte Ali, brandit son revolver et... retourne la situation. À la suite de quoi Ali disparaît on ne sait où. Combanaire peut déboucher quelques bouteilles d'alcool pour fêter le dénouement, distribuer du tabac dont il a des réserves qui semblent inépuisables et palabrer avec le *Radhen*. Lorsqu'il s'agit d'illustrer le récit de Combanaire dans *Le Journal des voyages*, les artistes Vintraut et Beuzon ne s'y tromperont pas qui choisiront cet épisode pour la couverture de la revue, avec le récit mouvementé de la capture d'un orang-outan [cf. fig. 3]. L'exploration est aussi un théâtre où sont ritualisés les aléas de la rencontre des hommes et de la mort. Combanaire en a parfaitement saisi les ficelles. Et il en joue.

L'ambiance tout au long du périple reste toujours très tendue. Le premier contact des individus et des groupes est empreint de méfiance et de précaution. Les Dayaks ont leur coupe-coupe à la ceinture. Ils le manient facilement. Il y a des situations locales d'hostilité, des dissensions personnelles, ou même des cas de désœuvrement qui donnent l'impression que les têtes peuvent voler à tout moment et sans raison précise. Mais Combanaire a mis au point son entrée en scène : il apostrophe dans la langue malaise que tout le monde comprend grossso modo, se fait passer cette fois pour un médecin et distribue alcool et tabac. Il joue de l'effet de surprise car la vue de ce Blanc surgissant de la forêt a pour premier effet de pétrifier ses interlocuteurs³². Combanaire a bien appris à jouer sur l'effet de surprise dans ce genre de situation.

À travers Bornéo a un autre mérite. C'est la qualité de son observation. Les détails y paraissent si véridiques que le lecteur peut se demander comment Combanaire a-t-il pu rédiger de façon si détaillée le récit de son exploration. La densité et la personnalisation de son aventure donnent à son style un effet prenant. Mais les comptes rendus du livre portent plus sur les curiosités qu'il a rencontrées et les notations naturalistes. Quand il n'est pas dans l'emphase patriotique ou dans l'invective, Adolphe Combanaire, qui a vécu des sensations fortes, sait aussi les transmettre à ses lecteurs. Il y a d'excellents passages. Nous retiendrons l'évocation des bruits nocturnes de la nature tropicale. Exercice auquel il se livre à plusieurs reprises et qui est lié à sa propension à jouir du sentiment de solitude dans la jungle³³. Le récit d'exploration est aussi un genre littéraire et théâtral.

32. Comme Ida Pfeiffer sortant de la jungle à Sintang.

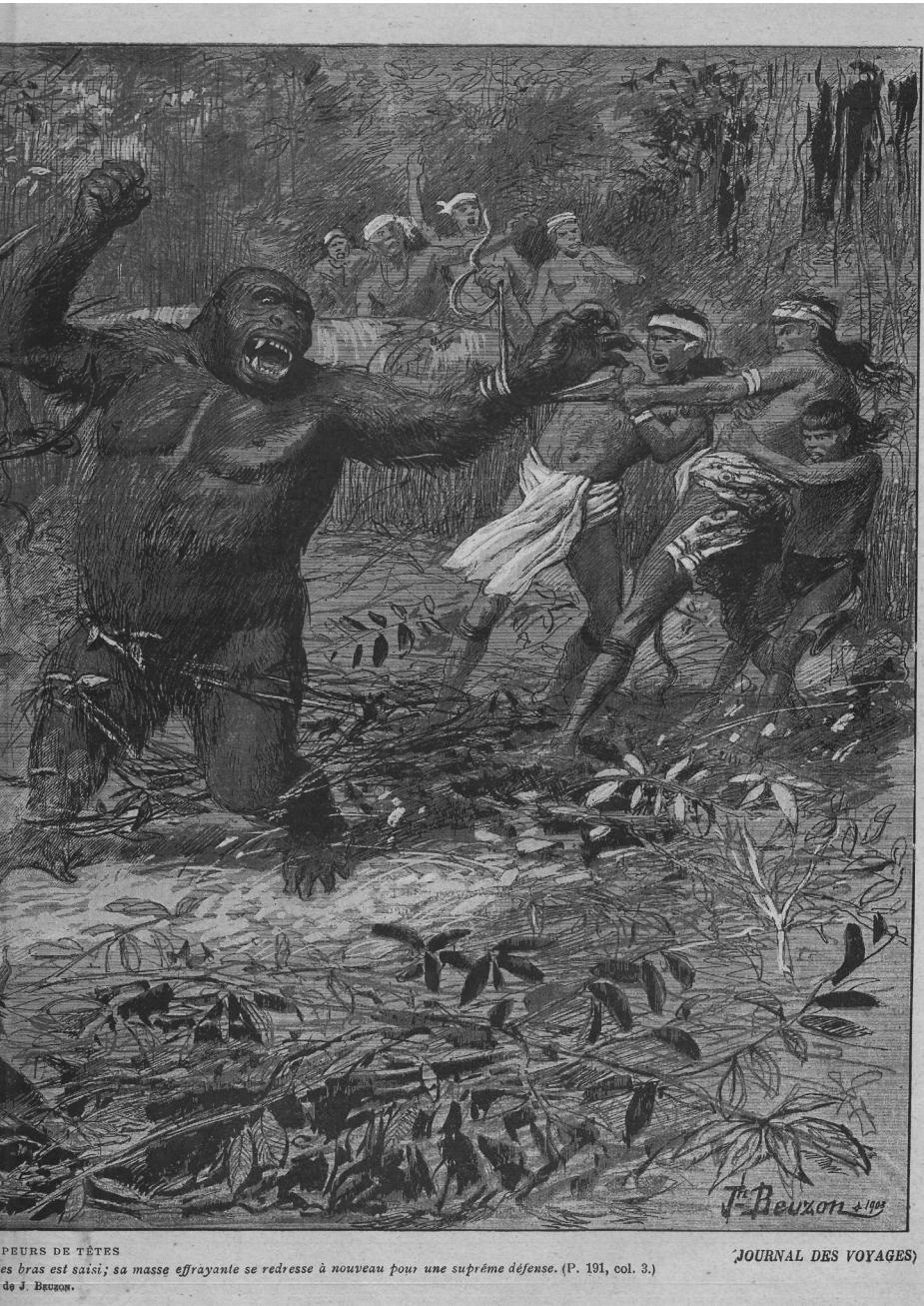
33. *Au pays des coupeurs de tête*, op. cit., p. 190-191.



(JOURNAL DES VOYAGES)

AU PAYS DES COUPES
L'orang poussé un effroyable rugissement; vingt dayaks forment le cercle autour de lui, chacun de ses bras tenant une longue lance.

Fig. 3 – Capture d'un orang-outan à laquelle a assisté Adolphe Combanaire (*Journal des voyages*, n° 324, 1903, p. 192-193)



PEURS DE TÊTES
les bras est saisi; sa masse effrayante se redresse à nouveau pour une suprême défense. (P. 191, col. 3.)
de J. BEUZON.

JOURNAL DES VOYAGES

La fabrique des explorateurs

L'année 1842 avait déjà marqué un tournant par la mise en place d'une politique d'encouragement des voyages et de la recherche par le ministère de l'Instruction Publique. L'administration de ces aides avait été renforcée par une Commission des missions en 1874. Au total une vingtaine de missionnaires avaient été bénéficiaires de cette aide officielle³⁴ dans le monde malais, comme John Errington de La Croix, Achille Raffray, Antoine Cabaton, Xavier Brau de Saint-Pol Lias...

Adolphe Combanaire, qui n'appartient pas à ce monde, écrit à la Société de géographie de Paris pour faire une conférence³⁵. Exercice qui vaut reconnaissance officielle. Sans résultat semble-t-il. Il ne cesse de pester contre « les explorateurs officiels », « les baladeurs royalement appointés ». Seul Pierre Savorgnan de Brazza trouve grâce à ses yeux. Adolphe Combanaire publie sa relation chez Plon à Paris, assez rapidement car le livre paraît en 1902. Il est bien accueilli. Les récits de voyage sont à la mode et sur ce thème viennent se greffer des revues qui jouent sur la dramatisation du récit d'aventure et sur l'introduction d'une illustration d'abord en noir et blanc, puis en couleurs, puis photographique.

La plus prestigieuse était *Le Tour du monde* lancée par Édouard Charton qui commença en janvier 1860 sous l'égide de la Librairie Hachette et dura jusqu'en 1895. Elle était vendue soit au numéro dans les gares ou reliée en semestre dans les librairies. C'est une revue avec une illustration abondante et de qualité, y compris celle du papier. Mais les auteurs devaient contribuer à la dépense et certains devaient y renoncer, faute de moyens. Le monde malais est présent avec une vingtaine d'articles et des auteurs connus dans le monde scientifique, comme le naturaliste anglais Alfred Russell Wallace, l'Italien Luigi Maria D'Albertis, Joseph Montano, Cotteau, Auguste de Molins... Bref l'élite de l'exploration et de l'aventure.

Par contre Combanaire peut accéder à la deuxième revue, *Le Journal des voyages et des aventures de terre et de mer*, hebdomadaire (1877-1949). Elle est en concurrence avec *Le Globe-Trotter* qui s'intéresse marginalement à Combanaire.

Elle n'a pas la qualité de la précédente. Sa particularité est de mélanger des récits de voyage et d'exploration bien réels avec des romans d'aventure où se distinguent des auteurs comme Louis Boussenard (*Les aventures d'un gamin de Paris en Océanie*, 1882 ; *L'Archipel des monstres*, 1907, qui se passe en

³⁴. Armelle Le Goff, Ministère de l'Instruction publique – Service des Missions – Missions scientifiques et littéraires. Index nominatif des voyageurs et index géographique des destinations de leurs missions, Paris, Centre Historique des Archives nationales, 2005.

³⁵. Les archives de la Bibliothèque nationale conservent trois lettres de 1902 au sujet de son voyage à Bornéo et de la conférence qu'il voudrait faire à la Société de géographie. <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb387940026> (consulté le 9/10/2018)

Nouvelle-Guinée), Louis Jacolliot (*Perdus sur l'océan*, 1892) ou encore Jules Lermina (*To-Ho le tueur d'or*, 1905). Entre documentaire sur les voyages et aventures romancées, il est difficile de distinguer la dose de fiction. Surtout la revue a une illustration de couverture qu'on n'oublie pas. Elle s'inspire d'un épisode à sensation du récit, en pleine page, souvent en couleurs, en le dramatisant par un graphisme vigoureux. À l'époque de Combanaire, les auteurs maison sont Frédéric Vintraut le graveur et Joseph Beuzon (1864-1940)³⁶. Ce dernier joue un rôle important puisque c'est lui qui correspond avec Adolphe Combanaire pour le démarrage de la série.

Au pays des coupeurs de têtes est publié en feuilleton dans le *Journal des Voyages* du 14 décembre 1902 au 22 février 1903. Adolphe Combanaire a droit à quatre fois la une avec les illustrations de Joseph Beuzon. « Le chemineau des jungles », comme il se qualifie lui-même, réapparaît dans la même revue en 1907 pour son aventure cambodgienne, avec une couverture où il est représenté, à bout de force, prêt à plonger la tête dans une nappe d'eau providentielle³⁷.

L'éditeur de son livre *A travers Bornéo*, Plon et Nourrit, est certes connu et peut lui assurer une audience nationale, mais il est clair que c'est par le truchement du *Journal des voyages* que l'« explorateur Combanaire », comme on l'appelle maintenant, a acquis sa célébrité et a été intronisé comme tel. Il doit sa célébrité autant par la relation écrite de ses aventures que par l'intégration d'une imagerie qui accentue le sensationnel des situations.

Errances indochinoises

Les aventures indochinoises d'Adolphe Combanaire se divisent en deux expériences majeures. La première est une invraisemblable imprudence dont il se tire par miracle, la seconde est une série de charges contre la société coloniale, plus précisément contre la société saïgonnaise qu'il accable de sa vindicte dans un livre paru en 1910, *Mensonges et Vautours coloniaux*³⁸. Le titre brode sur le thème antique d'une Indochine « moderne Prométhée dévoré par d'insatiables vautours qui sont ses prédateurs »³⁹.

36. Joseph Bozon a couramment œuvré avec son frère. Il semble que la signature J.-L. Beuzon recouvre souvent un travail collectif.

37. *Journal des voyages* n° 541, 14 avril 1907, p. 325.

38. *Mensonges et Vautours coloniaux*, 1910.

39. *Ibid.*, op. cit., p. 201.

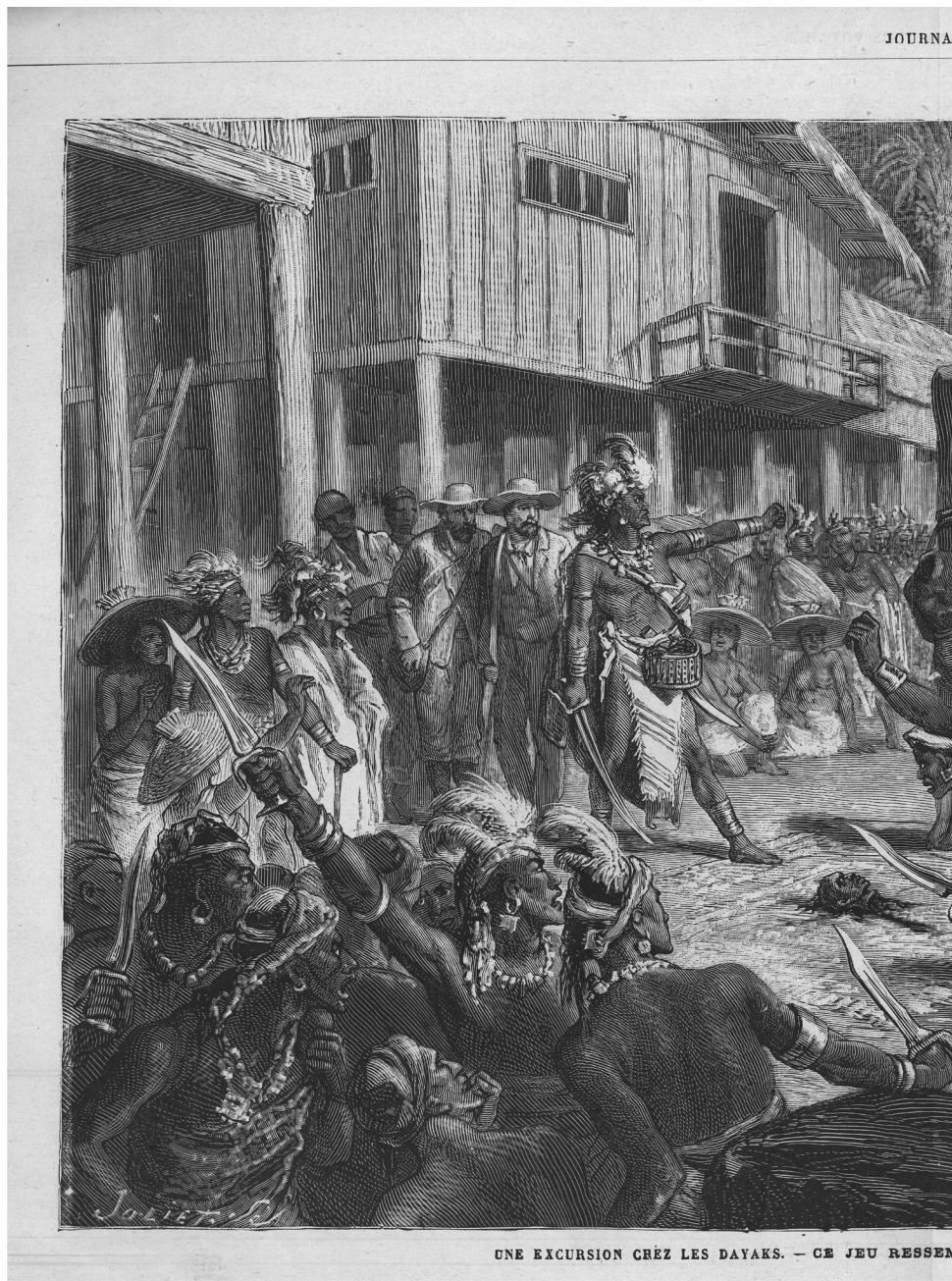


Fig. 4 – Fête chez les Dayaks, illustration d'une aventure romancée de Richard Cortambert (*Journal des voyages*, n° 161, 8 août 1880, p. 72-73)

L DES VOYAGES



SEMBLAIT A UN BALLET FANTASTIQUE. (Page 76, col. 3.)

Mais d'abord, en observant la carte du Cambodge, il est fasciné par les taches blanches des régions inconnues qui n'ont pas été explorées. « Un explorateur digne de ce nom doit aller chercher dans la chaîne de l'éléphant son bâton de Maréchal. Tout y est mystère et légendes »⁴⁰. En juillet 1905, il débarque à Saïgon avec l'intention d'examiner ce qui pourrait être profitable à la colonie. Il remarque d'abord que les terres de culture sont épuisées. La rumeur évoque la présence de roches phosphatées dans la région ouest du Cambodge. Il part trois mois, passe par le Tonlé Sap. Sans résultat. Mais au moment de boucler ses valises il s'avise que le Cambodge produit des quantités dérisoires de caoutchouc alors qu'il découvre des lianes d'excellente qualité non exploitées. Il décide donc d'aller voir à l'intérieur du pays en remontant le Mékong d'abord jusqu'à Kratié, dernier poste français. Le résident l'aide dans son exploration en lui fournissant deux éléphants avec les cornacs et un interprète.

Après une soirée de beuveries et de chansons comme Adolphe Combanaire les aime, il part dans cet équipage. Au bout de quelques jours, il renvoie les éléphants et s'enfonce dans la jungle avec des charrettes. À l'étape chez les habitants, on lui fait les honneurs de l'alcool de riz. Combanaire connaît bien le rituel que ses compatriotes affrontent avec appréhension. « La capacité de mon estomac m'a toujours permis d'avoir un gros succès à cet égard ». Partout où il passe, il méduse ses hôtes : « j'avoue sans nulle honte que rien ne plaît mieux notre cause que la façon dont j'engloutissais leur boisson nationale »⁴¹.

Il a un compagnon de voyage nommé Barbat qu'il trouve malade. Ce dernier ne peut continuer sans un médicament qui permet à la quinine d'agir. Combanaire s'offre à revenir au village pas très loin où il a laissé la caisse de pharmacie. Il part, juste équipé d'un bâton et de sa pipe, en déclinant l'offre d'un accompagnateur pnong. Mais, au retour, il ne reconnaît plus le chemin par lequel il est passé. Et peu à peu, il doit se rendre à l'évidence : il s'est complètement égaré et ne parvient pas à retrouver, dans la jungle et les hautes herbes, le fil conducteur qui le ramènerait à son point de départ. Alors commence une longue errance qui devient de plus en plus périlleuse et angoissante. Qui plus est les gens partis à sa recherche reviennent bredouilles, mais ils ont découvert des traces de tigre derrière les siennes. Finalement, huit jours après, il sort de la forêt et débouche sur une piste, « hâve et dépenaillé, sans chemise ni souliers », à bout de force. La première personne qu'il rencontre s'enfuit. Mais le calvaire est fini. « Comment pareille chose a-t-elle pu arriver à un homme tel que vous ? » s'étonne le résident. Adolphe Combanaire a survécu grâce à sa forte constitution et à son expérience de survie dans la jungle. [cf. fig. 5]

40. *Ibid., op. cit.*, p. 164.

41. *Journal des voyages*, n° 543, 28 avril 1907, p. 359.



Fig. 5 – Le nouveau récit d'Adolphe Combanaire, « En détresse dans la grande forêt cambodgienne » (*Journal des voyages*, couv. du n° 541, 14 avril 1907)

Il réserve au *Journal des voyages* la relation de cette aventure. Pour la première fois son récit est agrémenté de photographies de l'explorateur dans son palanquin. La revue annonce sa relation⁴² « En des pages vécues, alertes et colorées, en un récit vibrant où passe comme un grand souffle de vaillance et d'énergie, l'audacieux voyageur va conter lui-même à nos lecteurs les dramatiques épisodes, les torturantes misères de ses pérégrinations. »

Il est quasiment impossible de retracer de 1898 à 1914 les péripéties de sa carrière. Il furette dans un rayon de 500 lieues autour de Singapour, à l'affût de tout ce qui pourrait être converti en entreprise. Il s'intéresse à tout. Il est resté assez longtemps à Saïgon et lui, l'homme de « la folle aventure », il soulève les rideaux partout où il passe et clame haut et fort ce qu'il a découvert. Qui plus est, rien ne semble l'arrêter et surtout pas la crainte d'une riposte ou d'une vengeance. Il l'a déjà dit lui-même : il a « tous les défauts de l'humanité à l'exception de la peur ». L'énumération de ses activités est longue et difficile à vérifier : guano de chauves-souris, nids d'hirondelles, cuivre, prospection des sables aurifères, huîtres perlières, exploitation forestière. Les sources de ses aventures se trouvent dans la préface de *En avant marche !* écrit une trentaine d'années après les faits.

Durant les années 1908-1910 il a des contacts avec la Société des études indo-chinoises qui lui décernera une médaille en 1910, fait des conférences sur la gutta-percha et ses explorations. Il rédige un curieux article : *Les peuples préhistoriques du Grand Lac du Cambodge et de la région d'Angkor*⁴³ qui est une sorte de nouvelle préhistorique qui semble relever de sa fantaisie littéraire personnelle.

En 1910, il commet le livre très polémique *Mensonges et vautours coloniaux* et s'en prend aux milieux coloniaux décadents de Saïgon, chapitre par chapitre. Non seulement il dénonce les abus, les exactions et les exploitations, mais chaque fois il propose ce qui devrait être fait pour redresser la situation. Bref un pamphlet contre la déliquescence de la société coloniale suivi d'un véritable programme politique agressif. Il y a de quoi provoquer la fureur des uns et les ricanements des autres. Il pourfend « l'ignorance crasse des Français rhéteurs, sectaires doublés de banquistes, des rêveurs nébuleux [qui] font miroiter, devant les yeux d'une pseudo-élite de Byzantins décadents ou d'une masse abêtie par l'alcool, l'absurde paradoxe de l'association ou de l'assimilation avec un peuple conquis dont nous sépare un abîme de mentalité atavique »⁴⁴. Le ton est rude pour les administrateurs, en particulier le gouverneur Klobukowski⁴⁵, qui est particulièrement maltraité. Il y a certes des travers à corriger mais la violence de Combanaire n'est pas toujours fondée sur des arguments bien étayés. On est entre les dénonciations hâtives et les

42. *Journal des voyages*, n° 540, 7 avril 1907.

43. Voir bibliographie *in fine*.

44. *Ibid.*, p. 200.

45. Gouverneur de 1908 à 1911.

arguments de café du commerce. Et il en rajoute : « Il en coûte annuellement 182 000 francs pour que l’École française d’Extrême-Orient apprenne des langues inutiles à un scalpé, deux pelés et trois tondus »⁴⁶. Sa fureur l’emporte, même s’il se défend que « les écuries d’Augias ne sauraient être nettoyées avec un plumeau »⁴⁷. Mais la charge contre les coloniaux ne signifie pas une sympathie accrue pour les colonisés. Il fait preuve d’un grand puritanisme dans le catalogue des désordres coloniaux et peste contre l’« encongaillement par la femelle annamite du mâle européen qui dès lors abdique toute pudeur et toute dignité »⁴⁸. Il oppose la femme française : « Vénus de France, fille du vrai peuple, celui de la charrue et de l’enclume, dont les hanches bien cambrées donnent l’espoir, jamais déçu, de maternités fécondes »⁴⁹. Visiblement Adolphe Combanaire est plus à l’aise dans la jungle que dans la société saïgonnaise et ce n’est pas l’idée d’échanger l’Alsace-Lorraine contre l’Indochine qui est faite pour l’apaiser.

Salut les braves ! Les vrais de vrai !⁵⁰

En France, la déclaration de guerre fait vibrer sa fibre patriotique alors qu’il est au Siam dans une exploitation de teck. Il revient immédiatement et décide à 56 ans de s’engager comme combattant volontaire dans le 95^e régiment d’infanterie, un régiment de Berrichons, posté à Bourges. Par son âge, il tranche sur les jeunes recrues et inspire curiosité et respect. Il se sent mieux à l’aise parmi ses compatriotes. Bien qu’il ne fasse pas état de ses périples à travers le monde, les gradés savent qui il est, et le consultent car il a une expérience irremplaçable du terrain et sait analyser la situation. Son expérience de la jungle le sert. Il a appris d’une part à lire et à tirer profit des avantages du terrain, d’autre part il est à la guerre comme à Bornéo : un œil sur l’ennemi, un autre sur le ravitaillement, particulièrement la gnôle. Il prélève dans les convois qui passent tout ce qui peut servir au confort de la troupe qui a reçu pour cela des instructions précises : alcools, conserves, couvertures, etc. Il sait tirer parti de l’environnement pour construire les abris, progresser à couvert. Les injustices l’indignent toujours et il le dit bien fort, chacun en prenant pour son grade. Car il a souvent raison. C’est à ce titre qu’il se révèle indispensable.

46. *Mensonges et Vautours coloniaux*, op. cit., p. 140.

47. *Ibid.*, op. cit., p. 201.

48. *Ibid.*, op. cit., p. 93.

49. *Ibid.*, op. cit., p. 23.

50. *Vers la gloire*, op. cit., p. 263.



Fig. 6 – Adolphe Combanaire avec son sabre de sergent-major par le dessinateur Bernard Naudin, connu comme illustrateur de la vie des poilus. Frontispice de *Vers la gloire* (1939).

Son régiment est cantonné au village d'Apremont-la-forêt dans la Meuse⁵¹. Dans la hiérarchie il est sergent-major et porte le sabre [cf. fig. 6⁵²]. C'est là sa véritable famille. Il essaye de se libérer de l'autorité des gradés en s'appuyant sur les sous-officiers dans lesquelles il veut voir les patriotes authentiques dans une France « envahie quatre fois en moins d'un siècle ».

C'est au cours d'une offensive au petit matin, qu'il a rendez-vous avec le destin. Il fonce en tête à l'assaut des lignes allemandes puis, se retournant, se rend compte que ses troupes n'ont pas suivi. Il fulmine : « je n'étais pas revenu de 3 000 lieues pour me battre avec de sales foireux »⁵³. Puis, pris d'une idée qu'il qualifie d'« idée de fou », il hurle « Pour la Patrie ! En avant ! » et se met, en s'époumonant tout seul, à simuler une attaque des lignes allemandes en mitraillant à tout va. Avec des résultats immédiats, il fait mouche car l'effet de surprise est total... jusqu'à ce que les Allemands se reprennent et réagissent vigoureusement. Pour Combanaire, il est temps de déguerpir avec les troupes qui l'ont enfin rejoint. Mais c'est à ce moment-là que sa vie bascule. Un obus lui fracasse l'humérus. « J'avais, au cours d'une existence aventureuse, craché à plusieurs reprises sur le nez de la Camarde, mais cette fois elle allait prendre sa revanche »⁵⁴.

Le « vieux rigolo du 95 » – c'est ainsi que l'appelle un infirmier – est renvoyé à l'hôpital de Commercy et subit des interventions d'autant plus douloureuses que la plaie s'infecte et nécessite une nouvelle intervention. Le chirurgien procède à la désarticulation et à l'amputation de son bras. La guerre est finie pour lui. Il reçoit une deuxième médaille militaire, avec le commentaire suivant dans son dossier : « A fait preuve des plus belles qualités militaires en entraînant sa section à l'attaque d'une tranchée allemande fortement défendue ; n'ayant pu y parvenir sous la violence du feu, a reformé sa troupe et l'a entraîné une seconde fois. Est tombé grièvement blessé. »

Replié sur Nice pour sa convalescence, il reçoit la visite du comte Jouffroy d'Abbans, ancien consul à Singapour qu'il connaît bien, qui l'a encouragé dans ses diverses entreprises et l'a proposé pour la Légion d'Honneur.

Au cours de ses nuits d'insomnie, il raconte qu'il a reconstitué les chansons de Montmartre, avec un prédisposition pour la *Complainte du Macchabée*, souvenir de sa jeunesse parisienne – qu'il demande, comme faveur, de pouvoir chanter en salle d'opération pour accompagner son anesthésie. Il faut en effet le réopérer d'une gangrène gazeuse que les traités de médecine qualifient de gravissime et fulminante. Les chirurgiens, incrédules, attendent donc l'effet

51. Voir *Transcription du journal des marches et opérations*. 95^e régiment d'infanterie, Campagne 1914-1919.

52. Voir la conférence de Bernard Gagnepain à l'Académie du Centre, au campus Balsan de Châteauroux, « Bernard Naudin illustrateur de la Grande Guerre » (20 mars 2018).

53. *Vers la gloire*, op. cit., p. 183.

54. *Ibid.*, op. cit., p. 181.

de leur anesthésie, avec l'accompagnement vocal de leur patient qui pousse une chanson de salle de garde sarcastique :

« Le major, bonasse,
Fit une grimace
En voyant ma face
Et, d'abord se tut ;
Puis, vers son interne
Tournant son œil terne,
Dit : pour ma gouverne
Je le crois fichu. »⁵⁵

L'effet n'est pas immédiat. Combanaire finit tout de même par sombrer dans l'anesthésie à la troisième application.

Evidemment, il se remet très vite, à grand renfort d'alcool et de bouffées de pipe qui scandalisent médecins et religieuses. Il fait le mur souvent, achète un costume présentable, accepte des conférences sur les grands fauves pour distraire les convalescents⁵⁶. « Je n'eus garde d'oublier nos frères inférieurs : les orangs-outangs, avec lesquels j'ai longtemps vécu en bonne camaraderie, parce que j'estimais à tort ou à raison, que, par leurs mœurs douces et familiales, ils sont plus près du Créateur que les trois-quarts des hommes se prétendant civilisés »⁵⁷.

Mais pour Adolphe Combanaire la guerre est bien finie. Il revient dans son Berry natal, amer et désabusé. Il passe par Marseille qui est comme Paris, le seul endroit où l'on peut, selon lui, se fondre dans l'anonymat des foules exotiques. Mais il ne trouve plus la même ambiance. Il a des jugements sévères sur la ville. L'équilibre cosmopolite de Marseille est rompu : « Le Levant avait vomi toute la raclure de mercantis, d'usuriers, de fripouilles, de souteneurs et de prostituées »⁵⁸.

Le retour à Bourges est douloureux. Il a perdu sa mère, sa sœur et nombre de ses anciens camarades. Mais il est connu et respecté d'autant plus qu'il emploie toute son énergie à défendre les poilus, ses frères d'armes, dans les associations d'anciens combattants et dans l'Association des écrivains combattants. En témoigne cette *Simple requête pour que 350 « poilus de la grande espèce » français, anglais et belges, fassent partie, en costume civil, des 40 000 soldats du grand défilé de la victoire*⁵⁹. À la fin de son livre *Vers la gloire*, il propose la création d'une « véritable décoration » réservée à ceux qui ont risqué leur vie, qu'il nomme « Étoile de l'héroïsme militaire ».

55. Paroles de Gabriel Montoja, musique de Gaston Maquis.

56. *Vers la gloire*, p. 225.

57. *Ibid.*

58. *Ibid.*

59. Châteauroux, s.d. [1919], 4 p.

C'est le retour au réel que connaissent les aventuriers. On lui aurait proposé en 1915 un poste de gouverneur du Cameroun, puis un poste de percepteur à Lyon. Aucune proposition ne trouve grâce à ses yeux. Il refuse, il a vieilli mais cela ne l'empêche pas de se replonger dans la mêlée localement et de se présenter aux législatives de 1932. Son adversaire, Louis Deschizeaux le traite par le mépris et juge sa candidature fantaisiste⁶⁰. Combanaire écrit dans les gazettes locales des articles sur la faune de l'Asie du Sud-Est⁶¹. Et surtout il rédige ses mémoires de la Grande Guerre, *Vers la gloire, en avant, Marche !* Le livre qu'il considère comme une « moderne chanson de geste » paraît in extremis, l'année même de son décès, le 22 juillet 1939. Sur la tombe de la famille Combanaire au cimetière Saint-Denis de Châteauroux, ses amis ont accroché une palme avec cette inscription « Les écrivains combattants à leur camarade Adolphe Combanaire ».

Sur la fin de sa traversée de Bornéo, il s'interroge : « De quel droit, après tout, moi obscur et ignoré, ai-je voulu mener à bien ce qui aurait peut-être fait reculer les meilleurs ? Quels étaient mes titres à devancer ceux qui trouvent le moyen de récolter ce que beaucoup de gens appellent La Gloire tout en moissonnant, à larges mains, l'argent et les honneurs ? »⁶² Adolphe Combanaire réunit certains des traits d'un aventurier. Il est dans une errance perpétuelle, toujours curieux de l'Autre et du monde extérieur. Mais lui, il sait ce qu'il cherche. C'est un touche-à-tout de génie qui a le don de transformer en entreprise tout ce qu'il touche. Et plus encore, en entreprise rentable. Il est vrai qu'il en dissipe une bonne partie à faire la fête mais, confronté aux résultats des chargés de mission de l'Instruction publique, il est celui qui présente un bilan des plus éclectiques, mais en même temps le plus productif. Sa vie semble fondée sur deux rencontres, sur deux engagements déterminants. Le premier est le serment fait à son oncle de le venger des Allemands, qui semble enracer sa fibre patriotique, avec un goût de revanche largement partagé dans la société française. Cette relation-là commence et finit dans le versant castelroussin de son existence. Le second engagement est sa singulière relation à la gutta-percha qui, on l'a bien compris, est devenue pour lui quasiment une histoire d'amour. Mais c'est un amour aussi plein de générosité qui recherche la gloire dans les prouesses de l'exploration au service des autres. Si la gutta-percha est bien « le système nerveux de l'univers », alors Adolphe Combanaire est le sauveur de l'humanité...

60. Christine Méry-Barnabé, *Célèbres en Berry. Les personnalités de l'Indre*, Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, 2006 (Notice Combanaire, p. 112). Louis Deschizeaux était député de l'Indre (1932) et maire de Châteauroux (1935).

61. *Le Gargailou*, n° 95-96, avril-mai 1933, sur les éléphants, ou encore dans *Je sais tout*, n° 28, 1907, « Seigneur tigre ! par l'explorateur Combanaire ».

62. *Au pays des coupeurs de tête*, op. cit., p. 378.



Fig. 7 – Tombe de la famille Combanaire au cimetière Saint-Denis à Châteauroux (cote 24 1180), col. priv.

Bibliographie d'Adolphe Combanaire

- *Journal des voyages*, « Au pays des coupeurs de tête », paru en feuilleton, du n° 315, 14 déc. 1902, p. 26-29, au n° 325, 22 fév. 1903.
 - *Au pays des coupeurs de têtes. À travers Bornéo*, Paris, Plon, s.d. [1902].
 - *Journal des Voyages*, « Souvenirs de Bornéo. Le prospecteur d'or », n° 440, 7 mai 1905, p. 394-396, suite et fin n° 441.
 - *Journal des voyages*, « En détresse dans la grande forêt cambodgienne », n° 541, 14 avril 1907, p. 325-329 à n° 547, 26 mai 1907.
 - « Conférence de M. Combanaire sur la télégraphie sous-marine et la gutta-percha », *Bulletin de la Société des études indo-chinoises de Saïgon*, 1908 (1), p. 25-41.
 - « Exploration scientifique et Monographie des régions françaises du golfe de Siam », *Bulletin de la Société des études indo-chinoises de Saïgon*, n° 56, 1909 (1), p. 3-30.
 - *La vérité sur la Cochinchine et sur la mission du lieutenant-colonel Bernard*, Saïgon, F.H. Schneider, 1909.
 - *Mensonges et Vautours coloniaux. L'Indo-chine en déliquescence*, Châteauroux, Librairie Badel, 1910.
 - « Les peuples préhistoriques du Grand Lac du Cambodge et de la région d'Angkor », *Bulletin de la Société des études indo-chinoises de Saïgon*, 1910 (1), p. 1-28.
 - *Châteauroux pendant la guerre de 1870*, Châteauroux, Librairie Badel, 1928.
- Combanaire et J. de la Fresnaye, *Vers la gloire, en avant, marche !*, Châteauroux, Société d'imprimerie, d'édition et des journaux du Berry, 1939.

DANIEL PERRET¹

Jules Claine chez les Batak (1891) : un récit controversé

Le 3 septembre 1891, à Londres, le neuvième congrès des orientalistes est le théâtre d'une communication qui fait sensation. Tout juste rentré d'une expédition au nord de Sumatra, un explorateur français annonce en effet qu'il est le premier Européen à avoir pénétré une région peuplée de Bataks-Karos républicains et lettrés. Chaque chef y tiendrait notamment une chronique des événements sociaux importants de son temps et l'explorateur a pu rapporter en Europe un vieux grimoire relatif à une épidémie, illustré en particulier de dessins curieux, qui semblent montrer qu'il y a deux siècles les médecins batak avaient anticipé la « théorie moderne des germes et bacilles. »² Cette découverte jugée étonnante est reprise dans plusieurs journaux et revues britanniques, qui publient d'autres détails qu'il n'est pas possible d'authentifier comme émanant directement de l'auteur de la communication lors du congrès ou de possibles interviews par des journalistes locaux. L'explorateur aurait ainsi « *break through the belt of the cannibalistic Bataks, in order to find an indigenous civilisation* » et le traité médical en question « *proved beyond the possibility of doubt that the theory of the development of disease microbes was propounded many centuries since* », « *in medical science they have attained considerable proficiency, keep a manuscript register of doctors, and no one is*

1. Directeur d'études, École française d'Extrême-Orient, Université PSL.

2. *The Illustrated London News*, 12 septembre 1891 (www.britishnewspaperarchive.co.uk, accédé le 9 mars 2018), qui reprend un texte titré « A Visit to the Independent Batak-Karo Tribes of Sumatra » donné à la revue par l'explorateur en question. Ce même texte est republié par la revue *T'oung pao* (vol. 2, 1891, p. 416-418).

eligible for the highest political office who is not inscribed on the register »³. Les organisateurs du congrès décernent à l'auteur de la communication la plus haute distinction sous la forme d'une médaille d'honneur et d'un diplôme. Ajoutons que l'explorateur avait soigné sa médiatisation, puisque trois semaines avant l'événement, quatre autres journaux britanniques avaient annoncé l'exposition du fameux manuscrit lors du congrès⁴. Ce que l'explorateur n'avait pas anticipé, c'est la critique acerbe du récit présenté au congrès publiée six mois plus tard par un membre de l'expédition.

L'explorateur en question est Jules Claine, à propos duquel nous tenterons d'abord ici de retracer le parcours avant cette expédition sumatraise, puis d'examiner en détail les différentes versions publiées de son récit d'expédition ainsi que ses résultats. Nous nous intéresserons ensuite au contre-récit produit quelques mois plus tard, puis à la suite de la carrière de Jules Claine. Nous partirons enfin sur les pas de Claine pour livrer quelques observations suite à nos récents passages dans plusieurs villages du plateau au nord du Lac Toba que Claine a visités.

Le contexte de l'expédition

Jules Claine naît aux Essars-le-Vicomte (Marne) le 31 juillet 1856 d'un père émouleur, portant également le prénom de Jules et d'une mère couturière⁵. Après cette naissance dans un milieu ouvrier, on le retrouve suivant des études artistiques aux cours du soir des écoles supérieures de commerce et de dessin, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris. Dès l'âge de vingt ans, il parcourt l'Europe (Belgique et Pays-Bas), puis visite l'Algérie (1883), l'Angleterre (1884), avant de séjourner plus de cinq ans en Amérique, entre 1884 et 1889. Il se rend aux États-Unis, au Canada et prend notamment part à deux expéditions scientifiques organisées par le gouvernement mexicain. Il parcourt l'Egypte en 1890⁶.

3. *Yorkshire Post and Leeds Intelligencer* (West Yorkshire, England), 4 septembre 1891. Voir également le *London Evening Standard*, le *Morning Post* et le *Bristol Mercury* du même jour, *The Illustrated London News* du lendemain, ou encore le *Morning Post* du 7 septembre (www.britishnewspaperarchive.co.uk, accédé le 9 mars 2018).

4. Le *East Anglian Daily Times* (Suffolk, England) du 10 août, *The Star* (Guernesey) du 11 août, le *Falkirk Herald* du 12 août, ainsi que le *Congleton & Macclesfield Mercury, and Cheshire General Advertiser* (Cheshire, England) du 15 août (www.britishnewspaperarchive.co.uk, accédé le 9 mars 2018).

5. <http://archives.marne.fr/ark:/86869/a011310543782IiYdlH/1/1>, p. 225. Nous remercions Jean-Michel Perret de nous avoir indiqué cette plateforme. L'émouleur est un ouvrier qui aiguise des lames sur une meule.

6. Georges-François Mugnier, [portrait annoté de Jules Claine, avant mai 1890], Paris, Société de Géographie (gallica.bnf.fr, accédé le 13 octobre 2017); « Mémoires, Notices : Excursions à travers les Antilles espagnoles et le Mexique par M. Jules Claine », *Bulletin de la Société normande de géographie*, 1894, p. 221 ; *Compte rendu des séances de la société de géographie* (Paris), 1890, p. 283-284 ; C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains: contenant les notices des membres de l'Institut de France, du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de médecine..., tome 5*, Paris, Office général d'éd. de librairie et d'impr., 1906, p. 69.

À notre connaissance, Jules Claine a publié cinq versions différentes sur son expédition au nord de Sumatra : la première est parue en anglais dans *The Illustrated London News* (Londres) du 12 septembre 1891⁷ (p. 335), abrégé *ILN* dans la suite ; la seconde dans la revue *Le Monde Illustré* du 7 novembre 1891 (p. 291-295)⁸, abrégé *MI* dans la suite ; la troisième dans la revue *Le Tour du Monde* du premier semestre 1892 (p. 369-384), abrégé *TdM* dans la suite⁹ ; la quatrième dans le *Journal des voyages et des aventures de terre et de mer*, également du premier semestre 1892, dans deux livraisons du texte intitulé « A travers les îles malaises » (p. 267-268, 278-279), abrégé *JV* dans la suite ; la cinquième dans le volume 28 de la revue *De Aarde en haar Volken* paru en 1892 (p. 241-254), abrégé *AV* dans la suite¹⁰.

Claine se contredit sur les dates de son expédition au nord de Sumatra. On sait qu'il quitte Paris en mai 1890 et lui-même précise qu'il débarque à Singapour un mois plus tard, ajoutant qu'il part peu après pour le nord de Sumatra (*MI*). Or, dans *TdM*, il raconte que cette expédition débute le 12 mars [1891], date confirmée par un autre participant, qui précise qu'elle se déroule du 12 au 22 mars 1891, soit huit mois après l'arrivée de Claine à Singapour. Les récits de deux autres expéditions effectuées par Claine dans la région permettent de compléter en partie l'emploi du temps. D'août à début octobre 1890, il se trouve dans la partie sud de Sumatra¹¹. Il se rend en effet à Palembang, puis remonte le fleuve Musi et son principal affluent, la Lematang. Traversant le plateau de Pasemah, il part à la rencontre des « orang Oeloe », emprunte à nouveau le fleuve Musi avant de retourner à Palembang¹². De là, il rejoint Singapour, puis se rend à Penang. On sait par ailleurs qu'en mai 1891, il est en péninsule malaise qu'il traverse à dos d'éléphant entre Kedah et Singgora

7. Ce texte a été repris en totalité dans *T'oung pao* (2, 1891, p. 416-418). La communication de Claine est par ailleurs résumée et commentée dans *Tijdschrift van Nederlandsch-Indië* (2, 1891, p. 312-317).

8. Où curieusement une partie des illustrations concerne son séjour de l'autre côté du détroit de Malacca, notamment à Penang.

9. La même version a été republiée dans le *Bulletin de la Société des Etudes coloniales et maritimes* d'août-septembre 1892, p. 209-224.

10. Le texte est la traduction fidèle de celui publié dans la revue *Le Tour du Monde*, mais les illustrations y sont moins nombreuses. Il y manque notamment le portrait de Claine, la carte du trajet de l'expédition, ainsi que les objets rapportés par l'auteur.

11. La fin du récit de l'expédition au nord de Sumatra du *Monde Illustré* du 7 novembre 1891 (p. 295) offre un autre exemple de cette confusion chronologique, puisque Claine y raconte qu'il rentre à Penang pour repartir au sud de Sumatra visiter les « Orang Oeloes ». De même dans *AV*, le récit concernant le sud de Sumatra succède à celui concernant le nord de l'île sans que Claine en précise l'année. Sur la succession des expéditions, voir également *Compte rendu des séances de la société de géographie* (Paris), 1891, p. 505-507.

12. On trouvera le récit de cette expédition dans *Le Monde Illustré* du 14 novembre 1891 (p. 307-310), dans « A travers les îles malaises », *Journal des voyages et des aventures de terre et de mer*, 31, juillet 1892, p. 210-212, 234-236, 247-250, ainsi que dans la revue *De Aarde en haar Volken*, 28, 1892, p. 254-259.

(l'actuelle Songkhla)¹³. Qu'a-t-il fait en Asie du Sud-Est entre novembre 1890 et début mars 1891 ? Pourquoi ces erreurs et omissions chronologiques sur son séjour au nord de Sumatra ?

Claine est peu disert sur la ou les raisons de cette expédition au nord de Sumatra, indiquant simplement que les Bataks étaient apparemment « la plus ancienne des différentes races de l'île », ajoutant que la « peuplade des Bataks-Karos indépendants » en particulier l'avait intéressé par le peu d'informations dont on disposait sur elle à l'époque. Dans *MI* (p. 293), il précise qu'il souhaite ensuite traverser le Lac Toba pour visiter les Batak Toba et de là rejoindre Padang.

Claine est tout aussi muet sur le financement de son expédition. Une source néerlandaise de Medan note qu'il se présente comme explorateur, voyageant pour le compte d'une revue française illustrée¹⁴. Un compte rendu de la Société de géographie de Lyon rapporte qu'il était « chargé d'une mission »¹⁵.

Lorsqu'il débarque à Belawan, la région de Deli achève alors la troisième décennie d'une véritable révolution socio-économique. C'est en effet en 1863 que Jacob Nienhuys y ouvre la première plantation occidentale de tabac. Deux ans plus tard, deux planteurs suisses et un planteur prussien s'installent à Deli et se lancent dans les plantations de tabac, muscadiers et cocotiers¹⁶. En 1869, Nienhuys crée la fameuse *Deli-Maatschappij*. À sa fondation, elle couvre déjà 7 000 hectares¹⁷ et se concentre principalement sur la culture de tabac. L'année suivante, elle emploie 1 200 coolies chinois. En 1875, sur la superficie totale de 1 100 000 hectares des sultanats de Langkat, Deli et Serdang, 77 000 hectares sont concédés à des plantations occidentales (essentiellement de tabac), soit

¹³. Sur cette expédition, voir le même numéro du *Monde Illustré* (p. 310-311), ainsi que dans la revue *De Aarde en haar Volken*, 28, 1892, p. 259-264.

¹⁴. K. Th. Engelbert van Bevervoorde, « Een bezoek aan de bataksche hoogvlakte », *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van de Koninklijk Instituut* XLI, 1892, p. 611. J. Guicciardi-Khing mentionne qu'en 1889 au plus tard, il a réalisé au moins une mission sous l'égide du Ministère de l'instruction publique (Histoire des collections malaises et indonésiennes du Musée de l'Homme des origines à la deuxième guerre mondiale, Paris, EHESS, thèse de doctorat, 1986, tome I, p. 50). Dans un travail plus récent, le nom de Claine ne figure pas parmi les voyageurs bénéficiaires d'une subvention pour une mission à Sumatra. Il en a par contre bénéficié lors de son séjour en Birmanie (Armelle Le Goff, Ministère de l'Instruction publique – Service des Missions – Missions scientifiques et littéraires. Index nominatif des voyageurs et index géographique des destinations de leurs missions, Paris, Centre Historique des Archives nationales, 2005. Cf. http://www.garae.fr/IMG/pdf/CTHS_Missions_scientifiques_et_litteraires.pdf, consulté le 22 juillet 2018).

¹⁵. « Sumatra et la presqu'île de Malacca », *Bulletin de la Société de Géographie de Lyon*, X, 1891/92, p. 527.

¹⁶. J.A.M. van Cats Baron de Raet, « Vergelijking van de vroegeren toestand van Deli, Serdang en Langkat met der tegenwoordigen », *Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* XXIII, 1876, p. 31.

¹⁷. K.J. Pelzer, *Planters and Peasant, Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra (1863-1947)*. 's Gravenhage, Nijhoff, Verhandelingen van de Koninklijk Instituut 84, 1978, p. 38-39.

7%¹⁸. En 1939, sur le même espace, 520 000 hectares sont exploités par des plantations occidentales, soit 47%¹⁹.

Sur le plan administratif, la reconnaissance de l'autorité du gouvernement de Batavia par Siak en 1858 fait de ce sultanat et ses dépendances (dont les sultanats de la côte nord-est) un *afdeeling* de la *Residentie* de Riau. La soumission des sultanats de la côte nord-est s'accompagne de l'installation de cinq *controleurs* dans cette région en 1864, y compris un à Labuhandeli. Vingt-trois ans plus tard, Medan devient capitale de la *Residentie* de la Côte Est (*Oostkust*). De nombreux sièges administratifs de plantations ainsi que des sociétés commerciales et de transport s'y implantent. La ville attire également rapidement des migrants venus notamment de Chine, de la péninsule malaise, de Singapour, de diverses régions de l'Archipel et du sous-continent indien. La population de la côte nord-est passe ainsi d'une centaine de milliers d'individus en 1860 à près d'un million et demi en 1930.

Claine livre brièvement ses impressions sur la ville de Medan : une population de 7 000 à 8 000 habitants²⁰, une activité économique reposant sur le succès des plantations de tabac (figs. 1, 2), une abondante main-d'œuvre chinoise maintenue sur place par sa passion du jeu qui engouffre toutes ses économies. Claine ajoute que les Chinois ont par ailleurs le monopole sur le commerce de détail dans cette ville dont la prospérité se lit dans le confort des habitations, les nombreuses banques et les hôtels.

Claine offre deux versions concernant son plan pour mener à bien l'expédition. Dans les deux premiers textes, *ILN* et *MI*, il insiste sur le fait qu'il s'est immédiatement mis en rapport avec les autorités coloniales. Or dans *TdM*, une fois débarqué au port de Belawan, il se rend directement à Lubukpakan, situé à l'époque à une vingtaine de kilomètres de Medan, où réside un Français lui ayant offert l'hospitalité et disposé à lui faciliter l'accès à l'arrière-pays. Cette information laisse à penser que Claine a eu des contacts préalables dans la région afin de préparer son expédition. Il pourrait s'agir soit de A. de Giovanni, planteur de Lubukpakan, qui lui fait visiter sa plantation de café²¹, soit de

18. P.J. Veth, « Het landschap Deli », *Tijdschrift van de Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* II, 1877, p. 166.

19. Pelzer 1978, p. 105-106.

20. Ce chiffre est plausible dans la mesure où d'autres sources indiquent que la ville atteint 10 000 habitants durant la dernière décennie du XIX^e siècle. En 1900, elle compte près de 13 000 habitants, dont un peu plus de 500 Européens et Japonais, près de 8 000 Chinois, un peu plus de 3 000 autochtones, le reste étant composé d'« autres étrangers asiatiques. » (cf. D. Perret, *La Formation d'un Paysage Ethnique : Batak & Malais de Sumatra Nord-Est*, Paris, Presses de l'École française d'Extrême-Orient, Monographies, no. 179, 1995, p. 216-221).

21. Un état officiel des plantations coloniales des îles hors Java pour 1897 nous apprend d'ailleurs qu'un certain A. de Giovanni était *ondernemer* (administrateur) de deux plantations dans le royaume de Serdang. L'une se trouve à Tanahbang (346 *bouws*), l'autre à Kotosan (500 *bouws*). *Koloniaal verslag van 1898* [Nederlandsch (Oost-) Indië, Bijlage DDD.]. Overzicht over 1897 betreffende de verschillende in de buitenbezittingen gevestigde ondernemingen van landbouw...,

G. de Montbrun qui, dans la même région, exploite une plantation de tabac, *Gallia Estate*²², que Claine a également l'occasion de visiter. Il ajoute qu'il a l'occasion de parcourir plusieurs autres plantations exploitées par des Français, dont certains très fortunés. Claine rencontre également B. Hagen, qui s'est déjà rendu à deux reprises sur le plateau dans l'arrière-pays.

En raison de troubles causés par la présence de combattants acihais au voisinage du Lac Toba, où souhaite se rendre Claine, le *controleur* du district l'enjoint d'obtenir préalablement une autorisation du Résident Michielsen²³ basé à Medan. Initialement réticent au projet de l'explorateur de se rendre chez les « Bataks indépendants », le Résident lui remet une lettre d'introduction destinée au *controleur* des « Bataks soumis », un certain Westenberg.

p. 7, 8. (<http://resolver.kb.nl/resolve?urn=sgd%3Ampeg21%3A18981899%3A0001680>, accédé le 30/05/2018).

22. Le souvenir de cette plantation, située en amont de Bangunpurba, subsiste dans des jetons émis par la société, dont l'usage en tant que monnaie devait être limité à cette plantation, jetons prisés aujourd'hui par les numismates (cf. par exemple un jeton en cuivre où l'on lit « G. de Montbrun & Co » sur le pourtour et la mention « Gallia Serdang » au centre d'une face (revers), alors que l'autre face indique en français et en chinois « bon pour cinquante cents » sur le pourtour et le chiffre 50 au centre de l'autre face (avers) (<http://www.noble.com.au/auctions/lot/?id=82760&i=3&ret=1> ; accédé le 19 juin 2018). Les mêmes mentions apparaissent sur un jeton de 20 cents (http://www.tokencatalog.com/token_record_forms.php?action=DisplayTokenRecord&td_id=270641&inventory_id=226480&attribution_id=275766 (accédé le 19/06/2018)). Le nom de A.J.A.G. de Montbrun figure toujours parmi les habitants mâles européens de Serdang dans une liste officielle publiée en 1900 (*Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijken stand*, Batavia, Landsdrukkerij, 1900, p. 271). Dix ans plus tard, Gallia a déjà changé de main : la plantation fait alors partie de l'*Algemeene Cultuur Maatschappij*, dirigée par J.G.C. Vriens. Le tabac a disparu, probablement remplacé par l'hévéa. Le domaine est loué au sultan de Serdang sur la base d'un contrat expirant en 1965 (J. Bos (comp.), *The S.E.C. (Sumatra-East-Coast). Rubber Handbook 1911*, Medan, Deli Courant, [1911], p. 9).

23. W.J.M. Michielsen (1844-1926) entame alors sa troisième décennie de séjour dans l'archipel. Débarquant à Java en 1861, il travaille d'abord dans une plantation de tabac, puis se lance dans une carrière de fonctionnaire des Indes néerlandaises sept ans plus tard avec un premier poste à Menado. On le retrouve *controleur* successivement dans le territoire de la Côte Ouest de Sumatra et à Aceh. Il est *assistant-resident* de Kutai (Bornéo) en 1881, puis revient à Sumatra en tant qu'*assistant-resident* de Deli entre 1883-1886. Après un long congé aux Pays-Bas, Michielsen retourne à Medan en 1888 comme *assistant-resident* à disposition du Résident de la Côte est de Sumatra. Il occupe le poste de Résident entre 1889 et 1894, une période marquée par une longue amitié avec le fameux Tjong A Fie (1860-1921), major des Chinois de Medan (W.R. Hugenholtz, *Een buitenbezittingse radja: herinneringen van W.J.M. Michielsen (1844-1926)*, Hilversum, Verloren, 2015, p. 16, 314). Ce Hakka devient le premier capitaine des Chinois de la région en 1887 et va jouer un rôle économique, social et politique très important dans la région et surtout dans le développement de Medan. Il meurt en 1921 (on trouvera une étude récente sur Tjong a Fie dans Dirk A. Buiskool, « The Chinese Commercial Elite of Medan, 1890-1942: The Penang Connection », *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 82 (2), 2009, p. 113-119. Queeny Chang, l'une de ses filles, lui consacre une partie de ses mémoires - *Memories of a Nyonya*, Singapore, Eastern Universities Press, 1981, cf. compte rendu de Myra Sidharta dans *Archipel* 25, 1983, p. 221-223).

Claine raconte qu'il est cordialement accueilli par Westenberg, ce dernier heureux à l'idée d'avoir un compagnon de voyage durant la tournée qu'il prépare dans l'arrière-pays jusqu'aux confins des territoires des « Bataks soumis ».

L'expédition sur le plateau

Le résumé de l'expédition présenté ici est basé sur la version longue (*TdM*), complété au besoin par des éléments figurant uniquement dans les autres versions et dûment signalés. Ce récit débute par une heure de train jusqu'à « Déli-Touah » (l'actuelle Deli Tua), puis deux heures et demie en carrioles individuelles tirées chacune par un petit cheval jusqu'à l'extrémité d'une route accidentée²⁴. C'est là que commence le trajet à pied. Le groupe décrit par Claine comprend Westenberg, *contrôleur* des « Bataks soumis », le colonel A.H. van de Pol, commandant du district militaire²⁵, ainsi qu'une douzaine de porteurs.

La première étape est « Pertoembokem », atteint à la mi-journée, où selon Claine, le *contrôleur* a donné rendez-vous à plusieurs chefs afin de leur verser la redevance annuelle, à la charge du gouvernement colonial, en compensation des terres concédées aux planteurs de tabac sur leur territoire. Claine précise que cette rencontre a lieu en présence d'un représentant du sultan de Deli dans les pays batak et d'un interprète. Il n'est pas très inspiré par cette première étape, jugeant la population trop peu nombreuse pour la rendre intéressante, habitants dont la proximité avec les plantations de tabac en a diminué l'authenticité²⁶. Il observe néanmoins la grande fréquence des goitres, les gros ornements d'oreilles en argent massif portés par la plupart des femmes, les amulettes en bambou des enfants portant des « signes cabalistiques », un combat de coqs, ainsi que des spécificités architecturales et d'aménagement intérieur des maisons. Sans préciser la manière dont il obtient ses informations, Claine rapporte que les chefs croient que l'âme humaine est immortelle et reste sur terre après la mort, que ce soit dans la végétation ou en s'incarnant parfois dans des animaux tels le bouc ou le crocodile. Il réalise par ailleurs une série de clichés de groupes grâce à l'assistance du *contrôleur*²⁷.

24. Dans *MI* -p. 291, le train les transporte vers une plantation proche du pays batak, et de là, ils prennent de petites voitures locales pour Deli Tua, à l'extrémité d'une route carrossable. Dans *JV* – p. 267, il n'est pas question de train : c'est en « carrière locale » que Claine se rend de Medan à Deli Tua où l'attendent les porteurs.

25. Il s'agit probablement d'Alexander Henri van de Pol, surtout connu pour avoir mené une expédition à Tamiang, un territoire d'Aceh, expédition qui lui vaudra une haute distinction militaire en 1898 (cf. http://www.wikiwand.com/nl/Lijst_van_Officieren_in_de_Militaire_Willems-Orde, accédé le 16 juillet 2018).

26. *MI* p. 292: « Je parlerai peu de ce peuple, dont le type est trop mélangé pour avoir conservé les caractères distinctifs de la race, me réservant d'étudier ceux qui, restés indépendants, n'ont pu s'altérer au contact des peuples qui les entourent. »

27. C'est uniquement dans *JV* (p. 267) qu'il signale la remise au *contrôleur* par l'un des chefs présents d'une déclaration de guerre sur lames de bambous trouvée près de son village.

Après trois nuits passées à « Pertoembokem », Claine explique que le chef de l'étape suivante, Buluh Hawar, ayant envoyé son sabre en signe de reconnaissance ainsi qu'une lettre sur bambou expliquant que la menace acihaise a diminué sur le plateau, l'expédition peut repartir avec un nombre de porteurs qui a doublé. À « Boulou-Hauwer », trois structures attirent l'attention de Claine. Tout d'abord le *jambur*, une maison à deux niveaux, résidence des garçons avant le mariage. Claine décrit longuement le *batang mati*, qui abrite une bière en forme de pirogue creusée dans un tronc d'arbre à l'intérieur de laquelle sont placés les cadavres des membres de la famille des chefs jusqu'à décomposition complète des tissus et des viscères qui s'écoulent par un orifice percé sous la bière. A la fin du processus, les parents détachent le crâne conservé dans un coffre suspendu dans la maison, alors que le reste du squelette est enterré. Claine fait ouvrir l'un des coffres avec l'intention de l'acquérir avec son contenu, mais renonce finalement en raison du mauvais état de conservation des crânes. Le troisième type de structure décrit par Claine est le grenier à riz qui ici a la particularité d'être cylindrique.

La troisième étape est « Tjingkem », que Claine qualifie de misérable *kampung* et dernier village des « Bataks soumis », au pied du col de « Tjingkem » qui donne accès au plateau²⁸. Il livre deux versions sur les événements qui marquent cette étape. Dans *TdM* et *JV*, il explique qu'il rencontre là l'un des chefs des « Bataks indépendants », qui s'offre à lui servir de guide jusqu'au village le plus proche sur le plateau. Après une nuit à « Tjingkem », l'expédition serait repartie, guidée par le jeune chef en compagnie d'un interprète et d'une vingtaine de porteurs. Dans *ILN* et *MI*, Claine explique qu'il a dû attendre plusieurs jours à « Tjingkem » le retour des messagers envoyés chez les chefs du plateau par le *contrôleur* afin d'obtenir la permission de pénétrer et de se déplacer sous protection sur le plateau. Un messager aurait apporté le sabre du chef de « Boulou-Hauwer » avec une lettre écrite sur bambou donnant la permission de pénétrer sur le plateau sous la protection d'un jeune chef envoyé du plateau avec des porteurs.

Claine décrit le col de « Tjingkem » comme « un passage à peine assez large en certains endroits pour laisser passer un homme un peu gros » marquant la frontière du sultanat de Deli et de la zone d'influence néerlandaise. Arrivé sur le plateau, la première impression de Claine est révélatrice de la vision de l'époque: « [...] j'aperçus devant moi cette vaste plaine située à 900 mètres d'altitude, entourée de hautes montagnes qui en protègent mieux les heureux habitants que toutes nos fortifications [...] » (*TdM*, p. 374)²⁹ (fig. 3). Il y a une

²⁸. À l'époque, trois autres cols situés dans le royaume de Deli permettent de rejoindre le plateau (Bekantjang, Bekalla et Negri ou Senemba), mais ils sont beaucoup plus difficiles d'accès (Engelbert van Bevervoorde, 1892, p. 612).

²⁹. Un autre explorateur français, Xavier Brau de Saint Pol Lias, a eu la même réflexion quelques années auparavant : « [...] le centre de l'île jusqu'à la pointe d'Aceh renferme des peuplades aussi inconnues, aussi isolées du reste du monde que celles qu'on peut avoir à découvrir encore

importante mention supplémentaire à ce niveau dans *ILN*: « [ces montagnes] guarding a land never before trodden by the foot of any European traveller. »³⁰ Toujours dans *ILN* (ainsi que dans *MI* p. 292), le récit laisse à penser que les autres Occidentaux n'accompagnent pas Claine sur le plateau.

La quatrième étape est « Djawa ». Claine affirme que les villages du plateau sont situés sur des îlots au milieu de lits de rivières asséchées, entourés de fossés profonds, rendus inaccessibles sans guide en raison de sentiers détournés et d'un véritable système de défense en bambous. Dans *ILN*, il ajoute même « often by dark tunnels ». Le lendemain, Claine y rencontre le « *sibrayac* », le grand chef du plateau venu pour le guider jusqu'à « sa capitale », personnage qui avait eu l'occasion de rencontrer à Medan les Néerlandais du groupe³¹. Forte cette fois de quelques 150 individus, l'expédition repart en direction du village de « Boekit » où elle passe la nuit.

La cinquième étape est « Sirbaya », présentée par Claine comme la capitale du plateau, une agglomération d'une soixantaine de maisons (située près du Lac Toba dans *ILN*), où vivent quelque 3 000 habitants (7 000 dans *ILN* et *MI*)³², réunissant sept villages séparés par des palissades et des sentiers particuliers avec des noms et des chefs distincts. Claine décrit à nouveau assez longuement les maisons « qui peuvent être considérées comme l'expression la plus pure du style de ce peuple » (*TdM*, p. 376). Il s'attarde également sur les aménagements comportant des troncs troués destinés au décorticage du riz.

Dans le récit de l'expédition, cette étape de « Sirbaya » (l'actuel Seberaya) où il séjourne quelques jours, est l'occasion pour Claine de livrer des considérations générales sur la « race batak », considérations dont on perçoit qu'elles sont choisies pour l'effet sensationnel qu'elles auront sur un public occidental. Il ne précise pas ses sources (« *Here I made a complete study of the Batak-Karo nation* », *ILN*).

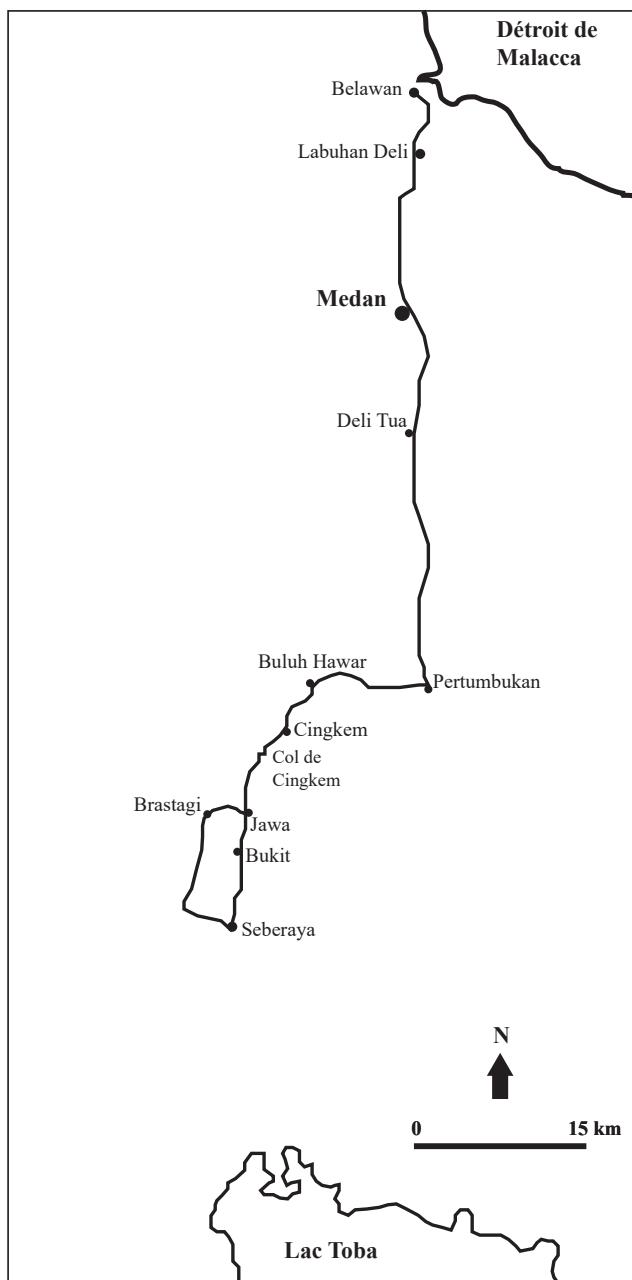
Il y explique notamment que cette « race » est divisée en cinq familles dont celle des Bataks-Karos, forte de 20 000 à 25 000 individus, où il se trouve, la seule à avoir pratiquement totalement répudié le cannibalisme, et ce depuis longtemps. Ce qui ne serait pas le cas des Pakpak, « la famille la plus sauvage », qui pratique l'engraissement des personnes âgées mangées lorsqu'elles n'ont plus

dans les profondeurs du continent africain : ce sont des tribus Battaks, les Gaïoux, les Allas, et enfin les Karo [...] » (« Atché et Pétrak », *Bulletin de la Société de Géographie de Paris*, 1885, p. 496). Sur l'évolution de la carte des populations autochtones entre le milieu du XIX^e siècle et la fin du XX^e siècle, cf. Perret 1995, p. 49-52.

30. Le passage est plus nuancé dans *MI* (p. 293) : « [...] les volcans Pisoeh-Pisoeh et Singgelang semblent autant de tours protectrices de ce peuple dont le sol est encore à peu près inconnu des Européens! »

31. Dans *MI* (p. 293) et *JV* (p. 268), Claine raconte qu'il tente de faire comprendre aux chefs qu'il n'est ni Hollandais ni officier, mais venu pour visiter leur pays dans « un esprit scientifique et amical ».

32. Claine donne aussi le chiffre de 7 000 habitants pour Medan.



Trajet suivi par Claine (d'après Claine, *Le Tour du Monde*, 1892, p. 373)

la force de grimper dans leurs maisons. Il signale sur le plateau un traitement des cadavres différent de celui décrit à « Boulou-Hauwer » : là les corps sont parfois déposés à l'air libre sur des plateformes pour être déchiquetés par des rapaces. La description physique des individus met l'accent sur l'habitude du limage des dents jusqu'aux gencives, pratique qui serait destinée à éviter d'avoir des dents ressemblant à celles des chiens. Il décrit la pose irréversible de l'imposant ornement d'oreille en argent des femmes, ainsi que la fabrique de bracelets de guerriers ornés des lèvres séchées des chefs décédés.

On y apprend également que les femmes mariées ne sont pas cloîtrées mais connaissent une condition analogue à celle des femmes européennes, alors qu'une grande liberté est laissée aux filles avant le mariage.

Claine signale l'existence d'un système d'écriture propre aux Batak-Karo, qui ont « littérature assez avancée » comprenant notamment poésie et annales historiques (« *Every village chief writes a chronicle or record of important social events, which is transmitted to his successor. Wars and epidemic diseases naturally find large place in this local history* » - ILN). Leur organisation politique est qualifiée de « républicaine et socialiste » (« *The political constitution of the Batak-Karos is republican* » - ILN ; « L'organisation politique est presque communiste [...] » - MI p. 295 ; JV p. 278), les chefs de famille élisant les chefs de villages, qui eux-mêmes élisent le *sibayak*, le grand chef du plateau. Mais tous ces chefs sont contrôlés par les habitants et disposent par conséquent d'une autorité limitée. Les croyances religieuses des Batak-Karo ne nécessitent ni lieu de culte, ni officiants. Médecine et sorcellerie sont l'affaire des *guru*, qui enseignent la lecture et l'écriture aux jeunes et rédigent des ouvrages de formules médicinales (« *I was presented with an ancient book, which I have brought to Europe, containing an account of some plague, and this book is illustrated by very curious drawings, which seem to show that the Batak physicians, two centuries ago, had anticipated the modern theory of germs and bacilli.* » - ILN ; « [...] ils ont depuis plusieurs siècles la perception de l'origine parasitaire des maladies épidémiques, ainsi que le démontrent les illustrations contenues dans un manuscrit que je possède. » - MI p. 295). Cette société ne connaît ni la pauvreté, la terre étant cultivée en commun, ni les divisions politiques ou religieuses, ni la peine de mort en raison de la rareté des crimes³³.

Finalement empêché de poursuivre son chemin jusqu'au Lac Toba en raison des conflits opposant Batak Karo et Acihais alliés à des Gayo, « ayant réussi à acheter à peu près tout ce qui pouvait s'emporter dans le pays », Claine se dirige vers Brastagi. Sur le trajet, il complète ses achats sur un marché temporaire : *kain*, armes, briquets, etc. Cette frénésie d'achats déclenche une

33. « La peine de mort n'existe pas chez eux ; d'ailleurs l'occasion de mal faire est rare, puisque personne ne connaît la misère et que rien de particulier ne peut être désiré par un autre, qu'il ne puisse faire ou obtenir en échange de ses services [...]. » (MI p. 295).

rumeur sur le plateau qui voit Claine assailli à son arrivée à Brastagi par des vendeurs de « toutes sortes de curiosités », un avant-goût du centre touristique qu'est devenu cette ville depuis le début du XX^e siècle³⁴.

Le contre-récit de Westenberg

L'expédition de Claine à Sumatra nord est probablement l'un des rares exemples d'expédition dans l'Archipel au XIX^e siècle à avoir donné lieu à la publication d'un contre-récit par un autre membre de l'expédition. Son auteur est C.J. Westenberg, le premier *controleur* pour les affaires Batak (*voor de Batak aangelegenheden*), nommé en 1888. Chargé de nouer et d'entretenir de bons rapports avec les chefs des Batak indépendants, il doit aussi assurer la protection des Batak du piémont (*dusun*) face aux agissements jugés arbitraires des chefs de territoires (*datuk*) et face aux planteurs occidentaux. Westenberg, qui occupera ensuite la fonction d'*assistant-resident* de l'*afdeeling* Simalungun en Karolanden, s'inscrit comme le pionnier de la recherche ethnographique dans le piémont et les régions voisines au nord et à l'est du Lac Toba³⁵.

Le texte de Westenberg, daté de décembre 1891, paraît l'année suivante dans la revue de la Société de géographie néerlandaise, *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*³⁶. Le sous-titre indique clairement qu'il a été rédigé à la suite de la communication faite par Claine début septembre au congrès des orientalistes de Londres. Son titre « *Wetenschap of Humbug* » (science ou boniments/balivernes) annonce le ton violemment critique du contenu.

Westenberg précise d'abord le contexte de l'expédition, puis commente le trajet suivi. Début mars 1891, il s'apprête à réaliser le projet envisagé depuis longtemps d'une visite de l'*urung*³⁷ indépendant de Sukapiring sur le plateau, le but étant une mission de reconnaissance de ce territoire et de cartographie du col de « Tjinkem ». Les chefs des zones à visiter avaient déjà été prévenus. C'est à ce moment-là que Claine se présente à lui avec la lettre de recommandation du

34. À partir de 1906, le Gouvernement de la Côte Est entreprend la construction d'une route reliant Medan à Kabanjahe sur le plateau, route passant par Brastagi. Elle est achevée trois ans plus tard. Les trois jours de trajet nécessaires jusque-là sont alors réduits à quelques heures en voiture. Avec l'ouverture de cet axe, Brastagi va profiter de l'intérêt que lui portent les Européens pour la beauté de son site et la fraîcheur de son climat. La première maison européenne de villégiature y est bâtie dès 1907 (Perret 1995, p. 225).

35. Sur le rôle de Westenberg dans les découpages géo-ethniques de la région, voir Perret 1995, p. 170-171.

36. « *Wetenschap of Humbug ? Geschreven naar aanleiding eener door den heer Jules Claine op het Orientalisten-Congres te Londen gehouden lezing over eene door hem gemaakte reis in de Karo-landen* », *Tijdschrift van de Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* IX, 1892, p. 49-70. Westenberg publie une page de réaction immédiate à la lecture de *ILN* dès la livraison de 1891 de la même revue (« *Schrijven van den heer Westenberg aan de Redactie* », *Tijdschrift van de Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* VIII, 1891, p. 1046).

37. Fédération de *perbapaan*, ce dernier étant l'ensemble formé par un *kuta* et ses colonies, les *dusun*.

Résident pour participer à l'expédition, une demande acceptée par Westenberg et Van de Pol. Le *controleur* et Claine quittent Medan le 12 mars en compagnie d'un individu non mentionné par Claine, à savoir l'*aspirant-controleur* H.P. Wagner. À « Pertoemboeken »³⁸, qui compte moins de vingt habitants, ils sont rejoints par Van de Pol³⁹ et un autre individu également absent des récits de Claine, l'adjudant sous-officier Freiherr von und zu Egloffstein. À partir de « Pertoemboeken », l'expédition compte ainsi cinq Occidentaux, dont quatre membres de l'administration coloniale. La seconde étape est « Bulu Auer », le « Boulou-Hauwer » de Claine, qui compte une quarantaine d'habitants, parmi lesquels un missionnaire néerlandais, H.C. Kruijt⁴⁰. À « Tjinkem », le « Tjingkem » de Claine, Von Eglofstein établit un relevé topographique du col. À « Djawa », contrairement au récit de Claine, ce n'est pas le grand chef du plateau qui arrive en personne, mais les principaux chefs de l'*urung* de Sukapiring, à savoir les *pengulu* de « Sebraja », « Boekit » et « Sampoen », les chefs de « Sebraja » étant les *raja* les plus puissants de l'*urung*. Westenberg estime la population de « Sebraja » à quelque 2 500-3 000 habitants⁴¹. Il précise bien que les cinq Européens de l'expédition se trouvent ensemble sur le plateau. Il confirme que Claine a acheté des objets à « Sebraja » et sur un marché avant d'atteindre cette dernière localité, ajoutant une information omise par ce dernier, à savoir que Claine a apporté toutes sortes de bibelots à troquer (chaînettes, bagues, médailles, etc.), objets beaucoup moins prisés par les locaux que les dollars. Plus curieusement, le trajet de retour décrit par Claine diffère de celui décrit par Westenberg : alors que Claine explique qu'il est passé par Brastagi, le *controleur* mentionne qu'après avoir quitté « Sebraja », les Occidentaux retournent à « Boekit » et leurs routes se sont séparées peu avant « Tjinkem », lui-même et Wagner prenant la direction de

38. Westenberg précise qu'il s'agit du *kuta* de « Pertoembokem » en amont de Deli Tua, à ne pas confondre avec le village du même nom sur le territoire de Serdang. Ce dernier est aujourd'hui une petite ville au sud de Lubukpakan, dont l'entrée est marquée par un curieux monument officiel indiquant « Pertumbukan city » !

39. L'information donnée par Claine sur ce personnage est inexacte. Selon Westenberg (1892, p. 49), A.H. van de Pol est en réalité lieutenant-colonel, commandant militaire de la Côte Est de Sumatra. Il faut signaler ici qu'à son retour Van de Pol a rédigé un rapport accompagné d'une carte du col de « Tjinkem » à destination du Haut commandement militaire. K. Th. Engelbert van Bevervoorde (1892) a publié des extraits de ce rapport dans lequel Claine est mentionné à plusieurs reprises.

40. Kruijt, le premier missionnaire envoyé par la *Nederlandsche Zendelinggenootschap*, arrive à Deli en avril 1890. Il choisit de s'installer à « Bulu Auer » surtout afin de pouvoir se greffer sur le réseau des marchands de chevaux et des porteurs de sel qui descendent en grand nombre par le col de « Tjinkem » vers les basses terres. La mission baptise ses premiers indigènes en 1893 et la première église du piémont (*dusun*) est inaugurée fin 1899 à « Bulu Auer » (pour un aperçu de l'histoire de la mission dans la région, voir Perret 1995, p. 202-210).

41. Selon Van de Pol, « Sibraja » compte quelque 70 maisons abritant chacune sept à huit familles de cinq membres en moyenne (Engelbert van Bevervoorde 1892, p. 613).

« Boekoem » afin d'y rencontrer des chefs de Senembah, alors que Claine, Van de Pol et Von Eglofstein repassent le col pour rejoindre Medan via la plantation de Petani⁴².

C'est ensuite que Westenberg (1892, p. 62sqq) en vient à une critique violente du contenu de la communication de Claine au congrès des orientalistes, communication dont il a pris connaissance de la version, sans doute résumée, mais de sa main, publiée dans *The Illustrated London News*. Il en énumère ce qu'il considère comme des « *leugens* » (mensonges).

Le premier concerne l'affirmation de Claine selon laquelle aucun Européen n'aurait pénétré sur le plateau avant lui⁴³. Westenberg reprend sur ce point un article paru dans le *Nieuwe Rotterdamsche Courant* du 16 septembre 1891 à propos de l'intervention de Claine, soit 13 jours après le congrès. L'auteur, J.C. Neurdenburg, y réagit déjà à cette affirmation en citant sept noms d'Européens ayant précédé Claine. Westenberg ajoute cinq noms et Engelbert van Beervoerde (1892, p. 609-610) quatre. Seize Européens sont par conséquent connus pour avoir visité le plateau au nord du Lac Toba avant Claine. Il faut préciser que certains s'y sont même rendus à plusieurs reprises avant 1891. Dans l'ordre chronologique des expéditions qui débutent 25 ans avant celle de Claine, ces individus sont : J.A.M. van Cats baron de Raet en compagnie d'Albert Breker et de C.H. Sheppard⁴⁴, Nienhuijs⁴⁵, C. De Haan et F. Feilberg⁴⁶, G. Meissner⁴⁷, B. Hagen⁴⁸, G. Meissner en compagnie de G.E.

42. Cette version est confirmée par Van de Pol (Engelbert van Beervoerde 1892, p. 615). Petani est le Betany de Claine.

43. Claine apparaît même dans certaines notices biographiques comme le premier Européen à avoir traversé entièrement l'île de Sumatra (C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains...*, 1906, p. 69).

44. « Reize in de Battaklanden in December 1866 en Januarij 1867 », *Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 22, 1875, p. 164-219. Entre décembre 1866 et janvier 1867, ce *controleur* franchit le col de « Tjinkem » en compagnie d'Albert Breker, d'un militaire britannique basé à Penang, C.H. Sheppard, et de Radja Moedin, un représentant du sultan de Deli. Ils passent notamment par Seberaya avant de rejoindre le Lac Toba.

45. Engelbert van Beervoerde (1892, p. 609) est le seul à signaler la visite sur le plateau d'un certain Nienhuijs en 1868, sans plus de précisions. Peut-être s'agit-il du fameux Jacob Nienhuijs qui ouvre la première grande plantation de tabac à Deli en 1863.

46. « Verslag van eene Reis in de Bataklanden », *Verhandelingen van de Bataviaasch Genootschap* 38(2), 1875, p. 1-57. Le *controleur* De Haan visite le plateau en septembre – octobre 1870, en compagnie du sultan de Deli et du photographe F. Feilberg. Comme Claine, ils passent à « Boeloe Auer », « Tjingkem » et « Sibraya ». De là, ils se rendent à « Naga Sariboe » non loin du Lac Toba.

47. Administrateur d'une plantation de la *Deli-Maatschappij*, G. Meissner se rend une première fois sur le plateau en 1881.

48. B. Hagen a publié deux récits, respectivement sur son expédition de 1881 et sur celle de 1883, au cours desquelles il emprunte un même trajet situé à l'est de celui de Claine : « Eine Reise nach dem Tobah-See in Zentralsumatra », *Petermann's Mittheilungen*, Heft II, 1883, p. 41-53, 102-104, 142-149, 167-177 ; « Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See », *Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 31, 1886, p. 328-382. Voir aussi « Zu den Wanderungen der Battas », *Das Ausland*

Haarsma, H. Herrings et Von Mechel⁴⁹, baron Freiherr von Brenner et H. von Mechel⁵⁰, Schadt et Brenkman⁵¹, Westenberg en compagnie de l'ingénieur des mines Fennema et de W. van Lingen⁵², et enfin H.C. Kruijt⁵³.

La seconde critique violente de Westenberg concerne la description de l'étape de « Tjingkem ». Selon lui, les messagers, le sabre, la lettre écrite sur bambou, le jeune chef et les porteurs envoyés du plateau sont uniquement le fruit de l'imagination de Claine. Par ailleurs, le chef de « Boeloe Auer », un village situé en aval de « Tjingkem » n'a rien à voir avec les affaires du plateau. Le *controleur* note aussi que Claine donne l'impression d'être le seul Européen du groupe à avoir poursuivi l'expédition après « Tjingkem », alors qu'ils étaient bien tous les quatre avec lui, et remarque : « Un homme à qui la mémoire joue de tels tours est à plaindre, et je crains qu'un asile pour aliénés soit un lieu plus adéquat pour lui que l'intérieur de Sumatra ou une chaire de conférencier dans un congrès d'orientalistes. »⁵⁴

La langue de communication est autre point soulevé par Westenberg, qui dénonce la vanterie de Claine mentionnant la présence d'un interprète local qui l'accompagne sur le plateau. Westenberg fait remarquer d'une part qu'à Deli, il n'y a pas d'autochtone parlant à la fois une langue européenne et une langue du plateau, et d'autre part que Claine ignore tout de la langue malaise, excepté le « *bagus* » (bien, beau) employé à tout propos.

Le *controleur* signale de nombreuses erreurs factuelles dans la communication de Claine au congrès de Londres. Sur le plateau, les villages ne sont absolument pas situés au milieu de lits de rivières asséchées, mais près de ravins. Contrairement à ce qu'affirme l'explorateur français, il n'y a pas de chef portant le titre de *sibayak* dans l'*urung* de Sukapiring, où le titre le plus élevé est celui de « *pengoeloe* ». De même, « Sribaya » n'est pas vraiment à proximité du Lac Toba, puisque de là une petite journée de

01/1883, p. 9-13. En 1883, il est accompagné de deux *raja* du plateau, celui de Nagasaribu et celui de Tongging. Dans *JV* (p. 279), Claine note très curieusement que lors d'une rencontre avec ce même Hagen à Labuhan, Hagen lui aurait dit qu'il n'avait jamais pu se rendre chez les Karos et lui aurait assuré ne connaître aucun Européen ayant effectué l'exploration que Claine venait de mener sur le plateau !

49. Expédition conduite en 1883. G. Meissner visite à nouveau le plateau deux ans plus tard.

50. Expédition conduite en 1887, qui passe en particulier à Seberaya (J.F. von Brenner, *Besuch bei den Kannibalen Sumatras: erste Durchquerung der unabhängigen Batak-Lande*, Würzburg, Woerl, 1894).

51. Expédition conduite en 1888 ou 1889.

52. Expédition conduite en juillet 1889.

53. « Bezoockreis op het plateau van Deli (Karo-land) », *Mededeelingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootschap* 35, 1891, p. 309-411. Ce missionnaire de la Société Biblique néerlandaise visite le plateau en 1890. Comme Claine, il passe par Tjinkem, Bukit et Seberaya.

54. « Een man wien het geheugen zulke parten speelt is wel te beklagen, een asyl voor hersenlijders zou, vrees ik, eene geschiktere verblijfplaats voor hem zijn dan de binnenlanden van Sumatra of het redenaarsgestoelte van het Orientalisten-Congres. » (Westenberg 1892, p. 64).

marche est encore nécessaire pour l'atteindre. Westenberg ne comprend pas comment Claine peut affirmer une telle chose, puisque le Résident lui a offert une « excellente » carte de l'intérieur du pays, établie par F.J. Haver Droeze, le capitaine de l'état-major général. Quant aux maisons, elles n'ont pas de plafond en planches et les occupants ne s'attardent pas sur les plateformes aménagées devant l'entrée.

Westenberg dénonce également les passages dans lesquels Claine donne l'impression d'être en danger quasi constant, alors qu'à l'exception des premières heures passées dans le village de « Djawa », avant d'apprendre la défaite des combattants acihais sur le plateau, l'expédition s'est déroulée dans la plus grande tranquillité.

Mais la goutte d'eau qui a certainement fait déborder le vase pour le *controleur*, c'est lorsque Claine a affirmé au congrès qu'il avait réalisé à « Sirkaya », « une étude complète de la nation Batak Karo ». Or le groupe n'a passé que 20 heures sur place. Le terme même de « nation » est inadapté, le territoire étant divisé en « oeroeng » totalement indépendants les uns des autres, tandis que le chiffre de la population avancé par Claine ne serait qu'une estimation à l'aveugle, le chiffre réel étant probablement dix fois supérieur. Quant à l'organisation politique, si Westenberg admet l'existence d'un esprit démocratique, il souligne que le gouvernement est théoriquement aristocratique. Contrairement à ce que prétend Claine, le système des élections est inconnu. C'est le principe héréditaire qui prévaut. Ce qui dit Claine sur la littérature des Batak Karo n'échappe pas non plus à la critique sévère du *controleur* : mentionner l'existence d'annales historiques est une absurdité, de même la connaissance ancienne relative à l'origine des maladies⁵⁵.

La conclusion de Westenberg est sans appel : « Au final dans tout le récit de Claine, il n'y a pratiquement pas une phrase qui tient debout, et il en résulte un fort soupçon que ce bizarre pionnier de la science a tout simplement voulu se payer la tête de tout le congrès des orientalistes. »⁵⁶ À la lecture de ce texte, on peut imaginer que si Westenberg n'avait pas lui-même participé à l'expédition, il en aurait probablement réfuté l'existence⁵⁷.

⁵⁵. D'où Claine a-t-il tiré cette idée, qui a fait sensation à Londres : peut-être de sa rencontre avec Hagen à Labuhan ?

⁵⁶. « *Is er dus in het geheele reisverhaal van den heer Claine bijna geen enkele volzin die steek houdt, de slotphrase moet ook bij leeken een sterk vermoeden doen ontstaan dat deze zonderlinge pionier der wetenschap eenvoudig met het heele Orientalisten-Congres een loopje heeft willen nemen.* » (Westenberg 1892, p. 67) Dès avril 1892, un journal d'Irlande du Nord relate l'article de Westenberg et en conclut : « *Mr. Claine's discoveries are reduced to dimensions less than infinitesimally small.* » (*Northern Whig*, Antrim, Irlande du Nord, 04/04/1892) (www.britishnewspaperarchive.co.uk, accédé le 9 mars 2018).

⁵⁷. Le souvenir de cet épisode, probablement unique jusqu'alors dans la région, est rappelé dix ans plus tard dans un journal de Medan (*De Sumatra Post*, 27 août 1900).

Le *controleur* termine par une réflexion générale sur la recherche géographique et ethnographique à la fin du XIX^e siècle en condamnant les « explorateurs » professionnels. Pour lui, la meilleure garantie pour assurer une collecte de données de qualité afin de livrer un aperçu général de pays, de gens, de situations, d’usages et de coutumes, c’est de s’adresser à des Européens qui vivent depuis longtemps sur place, plutôt que de s’en remettre à des individus ignorant pratiquement tout avant d’arriver et qui ne retiendront de leur voyage que des impressions superficielles. C’est pour des études spécifiques que ces gens de terrain doivent s’assurer la collaboration d’un ou plusieurs savants chargés de différents points de l’enquête.

Ce n’est certainement pas un hasard si l’année même de la publication de cette critique acerbe, Westenberg publie un long texte sur les croyances religieuses des Batak Karo⁵⁸.

Les retombées de l’expédition

Claine est de retour en France fin juin 1891⁵⁹. Du nord de Sumatra, il rapporte une collection ethnographique destinée au musée du Trocadéro ainsi que des photographies. Cette collection comprend « armes, manuscrits, instruments de musique, bijoux, fétiches, étoffes, etc., ainsi qu’une superbe canne ornée d’or et d’argent, des lettres sur bambou, des déclarations de guerre, des cruches à vin de palmier. » (*MI*, p. 295)⁶⁰. Un mois plus tard, il expose tout ou partie de cette collection à la Société de géographie à Paris⁶¹. C’est peut-être la même exposition qui est présentée à Londres le 3 septembre de la même année dans le cadre du congrès des orientalistes (*ILN*, p. 335)⁶².

58. « Aanteekeningen omtrent de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks », *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van de Koninklijk Instituut* 5, 1892, p. 208-253. L’année précédente, il a déjà publié un texte sur les territoires batak indépendants (« Nota over de onafhankelijke Bataklanden », *Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 34, 1891, p. 105-116). Ce texte est daté de janvier 1890, donc antérieur de plus d’un an à l’arrivée de Claine.

59. *Journal des débats*, 8 novembre 1891.

60. Cette collection est cotée *coll. 92.14* au Musée de l’Homme (J. Guicciardi-Khing 1986, tome I, p. 175 ; tome II, p. 379, 387-388, 398-402). Elle a été depuis transférée au Musée du Quai Branly avec la cote 71.1892.14. Quelques armes rapportées du nord de Sumatra par Claine ont été étudiées par Aurélie Méric (Les armes d’Insulinde conservées au musée du Quai Branly : vers une mise en valeur de la collection... Mémoire de muséologie, École du Louvre, 2007, notamment p. 17 et annexes p. 79, 84, 88, 90).

61. *Le Radical* (23/07/1891) ; *Le Petit Journal* (25/07/1891); *Algemeen Handelsblad* (26/07/1891) (<https://www.delpher.nl>, consulté le 9 mars 2018).

62. Il existe plusieurs clichés de cette collection. La Société de géographie possède des documents intitulés respectivement « Déclaration de guerre et manuscrits Bataks-Karos », « Collection ethnographique rapportée de Sumatra par J. Claine en 1891 », « Manuscrits des Bataks-Karos indépendants ». Une page du fameux manuscrit est reproduite dans *The Asiatic Quarterly Review* (new series – vol. III, Jan.-April 1892 : entre les pages 158 et 159). La Société d’anthropologie de Paris possède trois reproductions sur papier intitulées « Déclaration de vengeance et de guerre de Bataks-Karos indépendants de Sumatra » (Cote : SAP 155 (3) /28), « Manuscrits des Bataks-Karos indépendants de Sumatra » (Cote : SAP 155 (3) /29),

Il est clair que tous les objets rapportés du nord de Sumatra par Claine n'ont pas intégré les collections du musée de l'Homme au Trocadéro⁶³. En effet, depuis 1936, la ville d'Epernay (Marne) conserve trois manuscrits rapportés par Claine, respectivement sur bambou, sur os et sur papier⁶⁴.

La Société de géographie de Paris conserve 43 clichés, probablement des plaques de verre, de cette expédition⁶⁵. Fin 1891, Claine adresse aussi à la Société de géographie de Toulouse un ensemble de photographies destinées au Musée des arts décoratifs en formation au collège Saint-Raymond⁶⁶.

La première communication de Claine sur son expédition semble être celle faite au congrès de Londres le 3 septembre 1891 dans la section « Malayan and Polynesian »⁶⁷. Comment a-t-il eu accès à la tribune de cette manifestation scientifique ? Peut-être via la Société de géographie de Paris dont il est déjà membre avant de partir pour Sumatra. Il y donne une conférence deux mois plus tard⁶⁸. En décembre, il présente une communication intitulée « l'île de Sumatra et la presqu'île de Malacca » à la Société de géographie commerciale de Bordeaux⁶⁹. Fin janvier 1892, il est en Belgique où il livre une brève communication à la Société royale belge de géographie à Bruxelles⁷⁰, puis une conférence à la Société de géographie d'Anvers⁷¹. Le mois suivant, il

^{63.} « Sumatra. Lettres des Bataks-Karo, Pots à tabac, instruments de musique, calendriers, boîtes à chaux » (Cote : SAP 155 (3) /30).

^{64.} Vers l'an 2000, ce musée détient 49 objets provenant du plateau karo, reçus de Claine en 1892 (C. Pelras, « Les collections d'Insulinde du Musée de l'Homme. Inventaire sommaire d'un trésor méconnu (1^{re} partie) », *Archipel* 62, 2001, p. 174, 193).

^{65.} Ces trois documents se trouvent aujourd'hui à la médiathèque d'Epernay : Ms 295, tube de bambou gravé, 185 mm, Batak 1, fonds Claine ; Ms 296, amulette en os, forme triangulaire, long. 125 mm, gravée de signes et frises sur les deux faces, Batak 2, fonds Claine ; Ms 297, manuscrit sur papier avec couverture en peau, folios en accordéon, Batak 3, fonds Claine. La médiathèque conserve également cinq manuscrits ramenés de Birmanie par Claine. Nous remercions la médiathèque et tout particulièrement Marieke Brocard de nous avoir permis d'examiner ces manuscrits le 4 janvier 2018.

^{66.} Ces clichés ont été reproduits sur microfilms aujourd'hui conservés au département des images et cartes de la Bibliothèque nationale de France. De ses trois expéditions à Sumatra et en péninsule malaise, Claine adresse 116 photographies à la Société de géographie (*Compte rendu des séances de la société de géographie* (Paris), 1891, p. 512).

^{67.} *Bulletin de la Société de géographie de Toulouse*, no. 11 et 12, 1891, p. 449.

^{68.} Il y a dans l'assistance quatre des fondateurs du Congrès des orientalistes : Madier de Montjau, Léon de Rosny, le baron Textor de Ravisi et Emile Guimet (H. Cordier, « The Statutory Ninth International Congress of Orientalists », *T'oung Pao* 2(5), 1891, p. 413-414).

^{69.} Le 6 novembre 1891 (voir *Compte-rendu des séances de la Société de géographie*, 1891, p. 505-507). Probablement l'une des conférences avec projections, très fréquentées entre 1875 et 1900, que la Société organisait avec la participation du célèbre Molténi, dans son hôtel du Boulevard St Germain (France Duclos, *Les voyageurs photographes et la Société de géographie, 1850-1910*, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1998, p. 3).

^{70.} *Bulletin de la Société de géographie commerciale de Bordeaux*, 15 février 1892, p. 123-125.

^{71.} *Compte rendu des actes de la Société royale belge de géographie*, 16, 1892, p. 44-45.

^{72.} *Bulletin de la Société royale de géographie d'Anvers*, 16, 1891-1892, p. 264-265.

communique à la Société de géographie de Lyon⁷² puis au théâtre de Bourg-en-Bresse pour une conférence sur Sumatra, semble-t-il organisée par la Société de géographie de l'Ain⁷³. En juin, il livre une conférence sur Sumatra et la péninsule malaise à l'Institut Rudy⁷⁴ ainsi qu'à la Société des études coloniales et maritimes. Il exploite ses données sur Sumatra jusqu'en 1924 au moins, année au cours de laquelle il participe à un congrès international d'anthropologie à Prague⁷⁵.

Suite de carrière

On retrouve Claine au Mexique en 1892, chargé de missions scientifiques et commerciales⁷⁶. Il se rend également à Porto Rico et à Cuba⁷⁷. C'est probablement courant 1894, qu'il est nommé vice-consul de France, chargé de la résidence de Fort-Dauphin à Madagascar⁷⁸. Début 1895, Claine est vice-consul de France au Cap⁷⁹ où il en profite pour se rendre en Cafrerie britannique et au Zoulouland cette même année 1895 ainsi que l'année suivante⁸⁰. Il est en poste en Argentine entre 1896 et 1900, d'abord vice-consul de France à La Plata, puis à Rosario⁸¹. De 1900 à 1903, il est consul de France à Rangoon, où il en profite pour explorer la Birmanie⁸². En 1904, il est consul de seconde classe à Bakou et compte alors

^{72.} « Sumatra et la presqu'île de Malacca », *Bulletin de la Société de Géographie de Lyon*, X, 1891/92, p. 527-531. Le compte rendu de la communication mentionne curieusement les « Batta Karos, peuple de formation récente, issu de Malais et de Siamois [...]. Ce peuple [...] conserve des manuscrits sur des livres en feuilles de bananier [...]. »

^{73.} *Bulletin de la Société de géographie de l'Ain*, 1892.

^{74.} Situé à l'époque 7, rue Royale, cet « institut de langues vivantes » avait été fondé en 1860 par un Américain, Charles Rudy (1838-?). Ce polyglotte est à l'origine de l'organisation de conférences en vingt langues, très suivies, sur le mouvement littéraire contemporain (*Le Panthéon de l'industrie*, 16/12/1883, p. 385-386).

^{75.} « Note relative à un bracelet Batak », Institut international d'anthropologie, 2^e session, Prague, 14-21 septembre 1924, 1926, p. 550.

^{76.} C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains...* 1906, p. 69.

^{77.} *Bulletin de la Société languedocienne de géographie*, 15, 1892, p. 597 ; « Excursions à travers les Antilles espagnoles et le Mexique », *Bulletin de la Société normande de géographie*, 1894, p. 221-241, 293-310 ; « Porto-Rico », *Le Tour du Monde*, 46, deuxième semestre 1893, p. 417-432 (cf. également *Porto-Rico*, Paris, Hachette et Cie, 1893, 16 p.).

^{78.} *L'Univers illustré*, 15 décembre 1894, p. 791.

^{79.} *Journal officiel de la République française*, 27(53), 1895, p. 1019 (23 février 1895).

^{80.} *Journal officiel de la République française*, 1904, p. 5014 (10 août 1904).

^{81.} *Journal officiel de la République française*, 32(97), 1900 (8 avril 1900).

^{82.} *Journal officiel de la République française*, 1904, p. 5014 (10 août 1904). C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains...* 1906, p. 69. Le *Moniteur officiel du Commerce* du 5 décembre 1901 publie en supplément un rapport de Claine sur la situation économique et le commerce en Birmanie (« Rapports commerciaux des agents diplomatiques et consulaires français. Supplément no. 67, Possessions anglaises d'Asie : Birmanie. Situation économique et commerce général de la Birmanie pour l'année fiscale commençant le 1^{er} juillet 1899 et se terminant le 30 juin 1900 »). Il présente le contenu de ce rapport à la Société de Géographie Commerciale en novembre 1903 (*Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de Paris*,

dix ans de service hors d'Europe⁸³. Il est en poste en Russie au moment de la révolution. En 1906, il est chargé du consulat de France à Corfou⁸⁴. En août 1909, il est nommé au consulat de France à Helsingfors (Helsinki)⁸⁵, qui sera son dernier poste à l'étranger⁸⁶. Retraité en 1917⁸⁷, il bénéficie l'année suivante d'une pension civile (pour infirmité grave) après plus de 26 ans de service aux Affaires étrangères⁸⁸. Récompensé de la Légion d'honneur en 1904 (chevalier)⁸⁹, il accède au grade d'officier en 1920⁹⁰.

Claine est membre de la Société de géographie de Paris depuis 1889⁹¹. C'est en 1891, probablement à son retour de Sumatra, qu'il devient membre de la Société d'anthropologie de Paris⁹². Trente ans plus tard, il est nommé membre titulaire de la Société des Américanistes⁹³ et l'année suivante il devient membre de la Société Préhistorique Française⁹⁴. En 1924, il devient membre de l'Association française pour l'Avancement des Sciences⁹⁵. On sait qu'il sera également membre de la Société académique Indo-chinoise et de la Royal Asiatic Society⁹⁶.

25, 1903, p. 763, 778 ; cf. également « La Birmanie, sa situation économique. Le Commerce français », *Bulletin Commercial de l'Asie française*, juin 1903, p. 272 ; novembre 1903, p. 514). Par ailleurs, Claine constitue une collection birmane à l'intention de l'École française d'Extrême-Orient, collection destinée à une exposition qui s'ouvre à Hanoi en novembre 1902 (« L'École française d'Extrême-Orient depuis son origine jusqu'en 1920 : historique général », *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 21(1), 1921, p. 21).

83. *Journal officiel de la République française*, 1904, p. 5014 (10 août 1904).

84. *Journal officiel de la République française*, 1906, p. 7215 (25 octobre 1906).

85. *Journal officiel de la République française*, 1909, p. 8582 (8 août 1909).

86. Il quitte son poste en août 1916 (*Journal officiel de la République française*, 1917, p. 2765 [8 avril 1917]) ; Unio Sarlin, *Corps consulaire en Finlande. I: 1779-1917*, Turku, Suomen Sukutukimuseuran Julkaisuja Genealogiska Samfundets 1 Finlands Skrifter XXVIII, 1972, p. 56 (<https://fi.ambafrance.org/IMG/pdf/20170201122204218.pdf?2670>, accédé le 25 juillet 2018).

87. *Journal officiel de la République française*, 49 (155), 1917 (10 juin 1917).

88. *Journal officiel de la République française*, 1918, p. 1176 (2 février 1918).

89. *Journal officiel de la République française*, 1904, p. 5014 (10 août 1904).

90. *Journal officiel de la République française*, 1920, p. 13086 (7 septembre 1920).

91. Il y est présenté par L. Voisson et Brau de Saint-Pol Lias, son prédécesseur français le plus connu sur la côte nord-est de Sumatra (cf. *Compte rendu des séances de la société de géographie (Paris)*, 1889, p. 337, 379). Sur les activités de Brau de Saint-Pol Lias dans la région, voir Pierre Labrousse, « Brau de Saint-Pol Lias à Sumatra (1876-1881). Utopies coloniales et figures de l'explorateur », *Archipel* 77, 2009, p. 83-116.

92. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, I (1), 1900, p. xvi.

93. *Journal de la Société des Américanistes*, 14, 1922, p. 185 (séance du 6 décembre 1921).

94. *Bulletin de la Société préhistorique de France*, 19 (12), 1922, p. 253.

95. *Bulletin mensuel de l'Association française pour l'Avancement des Sciences*, 61, janvier 1925, p. 30.

96. C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains* 1906, p. 70.

Dès 1900 au moins, il réside à Paris, puis à Chatou lorsqu'il n'est pas en mission à l'étranger. En janvier 1894, il épouse Jensina (Jane) Elise Wilhelmina Gernandt (1862-1944), une écrivaine scandinave, qui a publié romans et nouvelles, ainsi que de nombreux articles dans les principaux journaux de Suède et de Norvège⁹⁷. Jules Claine décède le 7 septembre 1939⁹⁸.

Sur les pas de Claine à Sumatra Nord

Claine reconnaîtrait peu des éléments du paysage immédiatement visibles aujourd'hui sur le plateau. Si les reliefs sont bien sûr toujours là, le reste du paysage a été complètement humanisé. Alors que Westenberg décrit un plateau couvert d'un manteau unicolore d'herbes et d'*alang-alang* sur des sols peu fertiles, avec des bosquets épais autour des villages, et un bétail abondant composé de buffles, bœufs et chèvres, ainsi que nombre de chevaux (1892, p. 55, 59), on y voit aujourd'hui avant tout une multitude de jardins et vergers généralement bien entretenus. L'histoire de ce terroir débute vingt ans après le passage de Claine.

C'est en effet en 1911, que le *Bataksch Instituut*, fondé trois ans plus tôt à Leiden dans le but de développer les « pays Batak », envoie un agronome sur le plateau afin d'y enseigner les méthodes rationnelles de cultures maraîchères dont les produits alimenteront le marché de Medan. Cette stratégie est directement liée à l'existence de la route qui relie Kabanjahe à Medan depuis 1909. Dès 1914, la production mensuelle de pommes de terre sur des champs situés entre Brastagi et Kabanjahe atteint 150 tonnes. Deux ans plus tard, plus de 2 000 tonnes sont exportées vers Singapour, Penang et d'autres îles de l'Archipel. C'est au cours de cette même année 1916 qu'est lancée la culture du chou. Il semble qu'au début elle soit surtout pratiquée par des Chinois attirés par le succès de la culture de la pomme de terre. Dix ans plus tard, Belawan exporte plus de 2 000 tonnes de choux en provenance du plateau⁹⁹.

Aujourd'hui, des monticules de choux et de carottes tout juste récoltés attendent au bord des routes d'être transportés dans des entrepôts avant d'être acheminés vers Medan ou d'autres villes de Sumatra. Par ailleurs, deux fruits sont devenus les emblèmes de la région : le *jeruk* Medan (*Citrus sp.*)¹⁰⁰ (fig. 5),

97. C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains...* 1906, p. 70. *Le Figaro*, 5 janvier 1894 (p. 4). Jane Gernandt-Claine a publié en français : *Notre Christine. Une vierge au pays des Vikings*, Paris, éditions de la « Revue mondiale », 1925 ; *Le cœur en voyage*, Paris, éditions de la « Revue mondiale », 1928.

98. *La Géographie : bulletin de la Société de géographie (Paris)*, LXXII, oct.-déc. 1939, p. 197.

99. M. Joustra, *Kroniek 1913-1917*, Leiden, S.C. van Doesburgh, Uitgave van het Bataksch Instituut no 15, 1918, p. 22 ; M. Brouwer, *Memorie van overgave, onderafdeeling Karolanden*, 1927, p. 42-43.

100. Westenberg (1892, p. 61) mentionne déjà que diverses sortes de *jeruk* de bonne qualité poussent

un agrume que l'on retrouve jusque sur les étals de Malaisie, et le *markisa* (*passiflora edulis*), une espèce de fruit de la passion.

Les pratiques funéraires ne sont plus celles décrites par Claine. La population, majoritairement chrétienne, parsème ses terres agricoles de tombes, semble-t-il librement (fig. 6). Les maisons et autres constructions décrites par Claine ont pratiquement totalement disparu (fig. 4) et dans les villages seules les églises reprennent certains éléments du patrimoine architectural local (fig. 7).

Présenté par Claine comme la capitale du plateau, Seberaya demeure un gros village¹⁰¹, supplanté par Kabanjahe et Brastagi. L'explorateur français n'est pas conduit par hasard à Seberaya qui, à l'époque, représente l'un des pôles symboliques de l'espace politique du sultanat de Deli. Un rôle symbolique, qui trouve son fondement dans la légende de Puteri Hijau, la princesse verte, dont la mémoire populaire veut qu'elle soit née à Seberaya¹⁰². La vigueur de cette tradition orale se reflète dans la construction récente d'un édifice dédié à cette héroïne régionale (fig. 8).

Selon une tradition, deux frères de la *merga* Sembiring Meliala, descendants de Tamouls, résident à Seberaya. Le plus jeune descend s'installer le long de la rivière Deli et fonde Deli Tua. Son frère meurt, laissant une épouse enceinte, qui met au monde trois enfants célèbres dans la région : Puteri Hijau et ses deux frères Dewa Naga et Dewa Meriam. Puteri Hijau épouse le raja de Seberaya, mais contrainte de quitter le village avec ses deux frères, ils rejoignent leur oncle à Deli Tua. Puteri Hijau aurait alors étendu le territoire du *kerajaan*¹⁰³. La tradition orale veut que le sultan d'Aceh envoie une délégation afin de la demander en mariage. La demande étant rejetée, le sultan décide de conquérir Deli Tua. Après un mois de siège, il demande à l'un de ses subordonnés d'inventer un stratagème susceptible de faire céder l'adversaire. Cette ruse va consister à lancer de l'argent avec un canon en direction de l'ennemi. L'armée de Deli Tua se précipite alors sur la manne, oubliant de défendre la place. Alors que le frère aîné de Puteri Hijau s'enfuit, le plus jeune frère se transforme en canon et inflige de lourdes pertes dans les rangs acihais. Mais le canon éclate à force de chauffer, permettant aux Acihais d'envahir la place fortifiée, de se saisir de Puteri Hijau, qui est emmenée à Aceh par bateau. C'est

sur le plateau, néanmoins sans précision permettant de les identifier avec les *jeruk* actuelles.

101. D'après le recensement effectué en 2010, le *kecamatan* (district) de Tigapanah, où se trouve Seberaya, comprend près de 30000 habitants (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=337&wid=1211000000>, consulté le 22 juillet 2018).

102. La légende de Puteri Hijau est connue de la région d'Asahan jusque dans le pays Gayo, une région dans le sud d'Aceh (W. Middendorp, « The administration of the outer provinces of the Netherlands Indies », in B. Schrieke (éd.), *The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago*, Batavia, Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 1929, p. 158. Sur l'aspect politique de cette légende, voir Perret 1995, p. 123.

103. Brahma Putro, *Karo dari Zaman ke Zaman*, jil. I, Medan, Yayasan Massa, 1981, p. 214-223.

en abordant à Aceh qu'elle est sauvée par son frère transformé en serpent¹⁰⁴. La beauté légendaire de Puteri Hijau pourrait expliquer la présence a priori curieuse d'une armoire de toilette devant l'édifice devenu lieu de mémoire.

Conclusion

Les données fragmentaires sur la biographie de Jules Claine suscitent plusieurs interrogations. Comment un enfant issu du monde ouvrier au milieu du XIX^e siècle se retrouve-t-il étudiant aux Beaux-Arts à Paris, multiplie les voyages à l'étranger et part pour l'Amérique à moins de trente ans ? Pourquoi a-t-il choisi Sumatra et la péninsule malaise alors qu'il ne s'est encore jamais rendu en Asie ? Comment a-t-il organisé et financé ces expéditions ? La Société de géographie de Paris, dont on sait qu'il est membre avant son départ, ou l'une (ou plusieurs) des revues qui vont publier son récit, ont-elles joué un rôle ? Est-ce par négligence qu'il livre des informations contradictoires sur la chronologie de ses trois expéditions dans la région et qu'a-t-il fait durant les quatre premiers mois ?

Une chose est certaine : si Claine se préoccupe de la couverture médiatique de son expédition au nord de Sumatra, il est moins soucieux de contrôler la cohérence ainsi que la véracité du contenu des divers textes publiés. Quelle personnalité scientifique prend alors le risque de le parrainer pour qu'il participe au congrès des orientalistes à Londres dès son retour de Sumatra ? Il est très probable que s'il s'en était tenu à la publication dans des revues de voyages et à des conférences grand public ou destinées à des sociétés savantes françaises, le *contrôleur* Westenberg n'aurait pas publié son texte critique. Curieusement, cette violente réaction d'un fonctionnaire néerlandais ne semble avoir nui en rien à la suite de la carrière de Claine, alors qu'il est certain que l'information circulait entre les sociétés savantes européennes. Dans ce contexte, il est tout aussi étonnant qu'une revue néerlandaise publie une traduction en néerlandais de l'une des versions de son récit d'expédition au nord de Sumatra.

Comme si de rien n'était, Claine multiplie les adhésions à des sociétés savantes, repart rapidement en Amérique, avant d'entamer une carrière diplomatique sur plusieurs continents qui durera plus de 26 ans.

104. A. Rahman (éd.), *Sja 'ir Puteri Hidjau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1955 (1^{ère} éd., 1924). Pour une revue récente des différentes versions relatives à Putri Hijau, cf. Irwansyah, « Syair Putri Hijau : Sebuah Telaah Filologi », *Logat, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra* (USU Medan), IV(2), 2008, p. 78-89.

Liste provisoire des publications de Jules Claine relatives à l'Asie du Sud-Est maritime¹⁰⁵

1891

- « A Visit to the Independent Batak-Karo Tribes of Sumatra », *The Illustrated London News*, 12 septembre 1891, p. 335.
- « A Visit to the Independent Batak-Karo Tribes of Sumatra », *T'oung pao*, 2, 1891, p. 416-418.
- « L'île de Sumatra et la presqu'île de Malacca », *Comptes rendus de la Société de géographie de Paris*, p. 505-507.
- « Sumatra », *Le Monde Illustré*, 7 novembre 1891, p. 291-295.
- « Sumatra [suite] », *Le Monde Illustré*, 14 novembre 1891, p. 307-311.
- « The Oeloes of Sumatra (being extracts from the diary of J. Claine) », *Asiatic Quarterly Review*, ser. 1, vol. ii, octobre, p. 227-233.

1892

- « Un an en Malaisie », *Le Tour du Monde*, 1^{er} semestre 1892, p. 369-384.
- « Un an en Malaisie », *Bulletin de la Société des Études coloniales et maritimes*, 17^e année, août-septembre 1892, p. 209-239.
- « Sumatra et la presqu'île de Malacca par M. Jules Claine », *Bulletin de la Société de géographie de Lyon*, X, p. 527-531.
- « À travers les îles malaises », *Journal des voyages et des aventures de terre et de mer*, 31, juillet 1892, p. 210-212, 234-236, 247-250, 267-268, 278-279.
- « La presqu'île de Malacca », *Journal des voyages et des aventures de terre et de mer*, 31, juillet 1892, p. 306-307, 330-331.
- « Een jaar onder Maleiers », *De Aarde en haar Volken*, vol. 28, 1892, p. 241-264 ; également *Een jaar onder Maleiers*, Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 24 p.

1893

- « Les funérailles chinoises : un enterrement à Pinang », *Journal des voyages et des aventures de terre et de mer*, 33, juillet 1893, p. 28-29.

1924

- « Note relative à un bracelet Batak », Institut international d'anthropologie, 2^e session, Prague, 14-21 septembre 1924, 1926, p. 550.

105. Claine a collaboré à de nombreuses revues grand public telles le *Petit Journal*, le *Magasin pittoresque*, l'*Illustration*, la *Revue socialiste*, la *Nouvelle Revue*, la *Science illustrée*, etc. (C.E. Curinier (éd.), *Dictionnaire national des contemporains...1906*, p. 70). Nous n'avons pas consulté ces revues qui pourraient avoir publié des textes de Claine relatifs à l'Asie du Sud-Est maritime.

Travaux sur Jules Claine à Sumatra et en péninsule malaise + collections afférentes

1891

- L.B. « The Batak-Karo (Sumatra). MS [of J. Claine] on the “Microbe” », *Asiatic Quarterly Review*, ser. 2, vol. iii, p. 158. (non consulté)

1986

- « Jules Claine : à la recherche des Batak », in J. Guicciardi-Khing, Histoire des collections malaises et indonésiennes du Musée de l’Homme des origines à la deuxième guerre mondiale, Thèse de doctorat 3^e cycle, Paris, EHESS, 1986, tome I, p. 172-176.

1992

- « Claine (Jules) 1956-1933 (?) », in Numa Broc, *Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIX^e siècle, II Asie*, Paris, Éditions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, p. 98-100.

2007

- Méric, Aurélie. Les armes d’Insulinde conservées au musée du Quai Branly : vers une mise en valeur de la collection..., Mémoire de muséologie, École du Louvre.

2012

- Dellatolas, Marie. Recueil de documents sur Jules Claine entre 1890 et 1915, Mémoire de Conservation-restauration d’Arts Graphiques, promotion 2012 – École de Condé. (non consulté)



Fig. 1 – Medan-Deli – Hangar de tri d'une plantation de tabac, circa 1890 (KITLV - 100581 - Stafhell & Kleingrothe ; Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies and Leiden University Library/Wikimedia Commons).



Fig. 2 –Medan – Klambir Lima, hangar de tri d'une plantation de tabac datant de la période coloniale (Photographie : D. Perret, mars 2013)



Fig. 3 –Volcan Sinabung (Photographie : D. Perret, juin 2018)



Fig. 4 –L'un des rares vestiges de bâtiments anciens encore visibles sur le plateau – Desa Nagori Cingkes (Photographie : D. Perret, oct. 2017)



Fig. 5 – Hangar à agrumes, région de Seberaya (Photographie : D. Perret, oct. 2017)



Fig. 6 –Mausolée d'un « *tokoh adat karo* », région de Seberaya (Photographie : D. Perret, oct. 2017)



Fig. 7 – Église du village de Bukit (Photographie : D. Perret, mai 2018)



Fig. 8 – Lieu de mémoire Putri Hijau, Seberaya (Photographie : D. Perret, oct. 2017)

MAJID DANESHGAR¹

New Evidence on the Origin of the *Hikayat Muhammad Hanafiyah*

Introduction: Early Hypotheses²

It is a commonly-held view amongst scholars that the *Hikayat Muhammad Hanafiyah*³ (henceforth *HMH*) is one of the oldest Islamic popular romances of Malay Islamic literature and culture. According to the 23rd chapter of the *Sejarah Melayu*, for example, this story was recited by Malaccans at the time of the Portuguese siege of Malacca in 1511⁴. This in turn suggests that Malays were familiar with *HMH*'s features and qualities (*khawāṣṣ*) by that time, and they could use it during wars, conflicts, and disasters. Scholars have been investigating the contribution of *HMH* to the Islamization of the Malay World since the turn of

1. Freiburg Institute for Advanced Studies, University of Freiburg, Germany.

2. This work is part of a larger research project at the Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), University of Freiburg, Germany, where I work as a Junior Fellow and Marie S. Curie Fellow of the European Union. This article would not have been possible without the kind support of the FRIAS and Johanna Pink (from the Orientalisches Seminar, University of Freiburg). I also thank Edwin Wieringa (University of Cologne) for reading the draft of this article and providing me with his helpful comments. My thanks go to Michael Lecker (Hebrew University of Jerusalem) and Andreas Goerke (University of Edinburgh) for sharing valuable information about Muhammad b. al-Hanafiyah with me. I also thank the University of Leiden Library (the Netherlands), the Ganj baksh Collection Library (Pakistan) and the Sir George Grey Special Collections, Auckland Libraries (New Zealand) for granting permission to access their collections and use images of their manuscripts.

3. In written form, “Hanafiyah” is sometimes rendered “Hanafiyya” or “Hanīfah.”

4. *Sejarah Melayu or Malay Annals. An annotated translation by C.C. Brown, with a new introduction by R. Roolvink*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1970, pp. 162-163.

the 20th century; they have believed that the more we understand of *HMH*'s origin, the more we will be able to understand about Islam in this region. According to Edwin Wieringa, this story "was not only received into Malay literature at an early period, but it has remained popular a long time, [since the 19th century] one of the best-sellers of the indigenous press."⁵

Van Ronkel was one of the first scholars to attempt to uncover the origin of *HMH*. In the late 19th century, he connected this story to sources in Persian; going through the *HMH* manuscripts held in the Cambridge University Library, he noted the existence of various Persian terms throughout the text. Later, he expanded his theory by referring to Charles Rieu's catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum (now in the British Library), in which manuscript Add. 8149 is listed.⁶ This Persian manuscript was copied in the Murshidabad region of Bengal in 1134-5/1721 and is composed of two parts. Van Ronkel concluded that the Malay *HMH* is a rendering of these two Persian parts: (i) *Qissa-yi amīr al-mu'minīn Hassan va Ḥusayn* (fols. 1-28); and (ii) *Hikāyat-i Muḥammad Hanafiyah* (fols. 29-82).⁷ Winstedt agreed, stating that "though in Arabic there are biographies of Muhammad Hanafiyah, only in Persian is there a special *hikayat*".⁸

However, scholars have been unsure as to whether both the Persian and the Malay versions were "one unified text, consisting of two or more parts, or [...] two or more *originally independent* fragments which have been combined."⁹ Winstedt, Voorhoeve, and Brakel¹⁰ have all pointed out that some Malay versions of *HMH* are prefaced with another mystical story about the creation of Muḥammad and his light, known as *Hikayat Nur Muḥammad* (henceforth *HNM*), which is not found in the Persian version.¹¹ As such, Brakel suggested that the Malay romance includes three sections: (a) *Hikayat Nur Muḥammad*; (b) *Hikayat Hasan dan Husain*, "mainly about these two sons of 'Alī, up to their death"; and (c) *HMH*, "describing the war of 'Alī's third son Muḥammad

5. Edwin Wieringa, "Does Traditional Islamic Malay Literature Contain Shi'itic Elements? 'Alī and Fātimah in Malay Hikayat Literature," *Studia Islamika* 3/4, 1996, pp. 93-111.

6. Ph. S. van Ronkel, "Account of six Malay manuscripts of the Cambridge University Library," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 46/1, 1896, pp. 1-53; see also Winstedt, *A History of Classical Malay Literature*, Singapore, Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 1939, p. 106.

7. Charles Rieu, *Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum*, London, The British Museum, 1881, vol. 2, p. 819; V. Braginsky, *The Heritage of Traditional Malay Literature: A Historical Survey of Genres, Writings and Literary Views*, Leiden, KITLV Press, 2005, pp. 181-182.

8. Winstedt, 1939, p. 107.

9. L.F. Brakel (a), *The Hikayat Muhammad Hanafiyah: A Medieval Muslim-Malay Romance*, Berlin, Springer, 1981, p. 16.

10. Hence, Brakel is the one who provided readers with the most comprehensive edition of the Malay *HMH*; this article inevitably refers to his works frequently.

11. Winstedt, 1939, p. 107; Brakel (a), p. 16. See also P. Voorhoeve, "Les manuscrits malais de la Bibliothèque Nationale de Paris," *Archipel* 6, 1973, pp. 42-80.

ibn al-Ḥanafiyah with Yazīd,” the son of Mu‘āwiya, the founder of the Umayyad dynasty.¹²

Additionally, Brakel found that one of the oldest manuscripts of the Malay *HMH*, from the 17th century, includes a colophon that says “*tammat hikayat maqatil Husain dan MH*” (“the story of Ḥusayn’s death as well as Muhammad Ḥanafiyah is finished”).¹³ Following Bausani, Brakel declared that the term *maqtal*,¹⁴ which is very common in Middle Eastern literary works and refers to the killing of Ḥusayn at Karbala in 680 CE, has been known in the Archipelago since the 16th century. Brakel also highlighted the commonalities between the Persian and Malay *HMHs*. In short, he, along with most other scholars, believes that the Malay version of *HMH* was not only influenced by Persian literary works but seems to be a direct translation of a Persian work probably written in the 14th century. The two most important conclusions about the date of the British Library Persian manuscript Add. 8149, as presented by Brakel, are that:

- The Persian manuscript includes terms, names, and phrases found in Firdawsi’s (d. c. 1020 CE) *Shāh-nāma* or the *Satire on Maḥmūd of Ghazne*. Therefore, it must have been influenced by Firdawsi’s writing.
- The city of Tughan Turk, Tabriz, whose name is mentioned in both the Persian and Malay stories of Muhammad Ḥanafiyah, was the capital of Ghazan Khan from 1295 until 1304 CE¹⁵.

Therefore, *HMH* must have been written after these dates. In order to prove his findings, Brakel produced an edition and translation of the Malay *HMH* entitled *The Story of Muhammad Hanafiyah* in 1977. He believed that chapters 2-4 and 21-26 of Part I and chapters 1-17 and 20-21 of Part II “could be traced in the Persian” manuscript Add. 8149.¹⁶

However, Brakel and other scholars remained uncertain about: (a) various aspects of the Persian original, such as its author, date, and main features¹⁷; and (b) whether or not *Hikayat Hasan dan Husayn* or *maqtal* (part I) was originally associated with *HMH* (part II), or with *HNM*. This article seeks to build on previous studies of *HMH* by shedding some light on details of

12. Brakel (a), p. 16.

13. Ibid., p. 24.

14. *Maqātil* is the plural form of *maqtal*.

15. Brakel (a), p. 54.

16. L.F. Brakel (b), *The Story of Muhammad Hanafiyah*, Leiden, Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1977, p. v.

17. Brakel (a), p. 54.

the Persian original. The following sections will discuss the background of the Persian text the author has seen and its relationship with the Malay *HMH*. In order to achieve the latter, the following subjects will be examined:

- The similarities between various types of the Persian original (prototype) and the chapters in Brakel’s edition of the Malay *HMH*, which are traced in Add. 8149;
- The common points between our Persian prototype and Brakel’s edition of the Malay *HMH* that are not found in Add. 8149.
- A discussion of the arguments of former scholars of *HMH* in the light of the Persian prototype.

The Persian Prototype

While compiling a catalogue of Islamic writings kept in various libraries in New Zealand,¹⁸ I came across several manuscripts of one text. It is called *Durr al-Majālis*, also written as *Durr-i Majālis* (“The Jewel of Remembrance Sessions,” henceforth *DMJ*) and was written by Sayf al-Dīn Zafar Nawbahārī Bukhārī,¹⁹ a religious and mystical figure from the late 7th century AH/13th century CE²⁰. As part of the present study I consulted all full or partial manuscripts of *DMJ* that are preserved in libraries around the world (see the appendix). The work has 33 chapters, although the titles, order, and length of these vary from manuscript to manuscript. Upon reading them, it became apparent that a number of chapters have titles or parts of stories that are similar to those of the Malay *hikayat*, such as: “*Dar Ḥikāyat-i [Sultān] Ibrāhīm Adham*” (“The Story of [Sultan] Ibrāhīm Adham”); “*Dar Ḥikāyat-i Amīr al-Mu'minīn 'Alī raḍī Allāh 'anhu bā Khātūn-i Qiyāmat Fātimah Zahra*” (“On the Story of the Commanders of the Believers, 'Alī, and the Lady of the Judgment Day, Fātimah”)²¹; *Dar Faḍīlat-i Yūsuf* (“On the Virtues of Joseph”);

18. See Majid Daneshgar, *Middle Eastern and Islamic Manuscripts Held at Sir George Grey Special Collections Auckland Libraries New Zealand*, Auckland, N.Z., Sir George Grey Special Collections, Auckland Libraries, 2018; Majid Daneshgar and Donald Kerr, *Middle Eastern and Islamic Materials in Special Collections University of Otago*, Dunedin, N.Z., Special Collections, University of Otago Library, 2017.

19. His name is rendered slightly differently in some copies, as Sayf al-Dīn Zafar Bothohārī, Nūr-Bahārī, Tothohārī or Pothohārī, Sayf al-Dīn Zafar b. Burhān, Sayf Zafar 'Alī, and, on one occasion, very differently, as Yūsuf Zafar Abū Tāhir.

20. Sayyid Mahmūd Mar'ashī Najafī, *Fihrist-i Nuskha-hā-yi Khattī-yi Kitāb-khāna-yi Buzurg-i Āyatullāh Mar'ashī Najafī*, Qum, Kitāb-khāna-yi Buzurg-i Āyatullāh Mar'ashī Najafī, 1383/2004, vol. 32, no. 12750, and no. 10680, p. 405; Muhammad Hossein Nūrī-nī et al. *Fihrist-i Nuskha-hā-yi Khattī*, Mashhad, Sāzmān-i Kitāb-khāni-hā, Mūzi-hā va Markaz-i Asnād-i Āstān-i Quds-i Razavī, 1388/2009, Manuscript no. 40539, p. 75.

21. An alternative title is: “*Dar Ḥikāyat Amīr al-Mu'minīn 'Alī Karram Allāh Wajhah bā Khātūn-i Jannat Fātimah Zahra*” (“On the Story of the Commanders of the Believers, 'Alī, and the Lady of the Paradise, Fātimah”).

“*Dar Hikāyat-i Mard-i Sakhī va Zan-i Bakhīl*” (“On the Story of the Generous Man and Miserly Woman”); “*Dar Faḍīlat-i Peyghāmbar-i Mā, Haḍrat-i Muḥammad*” (“On the Virtue of Our Messenger, the Prophet Muḥammad”); “*Haqq-i Yatīmān*” (“The Orphans’ Rights”); “*Dar Ḥikāyat-i Māriyah Qibtiyah*” (“The Story of Māriyah Qibtiyah”); “*Dar Faḍīlat-i Khālid b. Walīd*” (“On the Virtues of Khālid b. Walīd”); “*Dar Ḥikāyat-i Shaykh Barsīsā*” (?) (“On the Story of Shaykh Barṣīsā”), and so on. A full assessment of the connection between the aforementioned stories with those found in various Malay texts will be the subject of a future study. Interestingly, the Pashto works of *Tawallud-nāma* (“The Story of the Birth and Lives of Ḥassan and Ḫusayn”) and *Jang-nāma-i Imāmayn* (“The Battle and Killing Story of the Two Imāms in Karbala”) by, for example, Ghulām Muḥammad Gagyānī/Gigyānī in the late 18th and early 19th century, were written “on the basis of the account in the Persian [work of] *Durr-i Majālis* by Sayf ul-Zafar Naw-bahārī.”²²

The oldest manuscripts of *DMJ* I consulted are Or. 565, preserved in Leiden University Library in the Netherlands (henceforth OL), and dated Ṣafar 972/1564, and PAK-001-0770 (henceforth OP), kept in the Ganj bakhsh Collection, Islamabad, Pakistan, and dated 1092/1681 (fig. 1). This study will focus on one of the last chapters of *DMJ*, entitled “*Dar Maqtal-i Amīr al-Mu’minīn [Imām] Ḥassan va [Imām] Ḫusayn*” (“On the Killing of the Commanders of the Believers Ḥassan and Ḫusayn”). The 31st chapter of OL (folios: 214-226) and OP (folios: 267-302), entitled “*dar maqtal-i/qatl-i Imām/Amīr al-Mu’minīn Ḥassan va Ḫusayn Raḍī Allāh*,” are identical to each other,²³ and their content and length largely resemble that of most *DMJ* manuscripts. However, they are considerably shorter and incomplete compared to two other copies of *DMJ* that were apparently copied in the late 18th or early 19th centuries: (a) GMS 170, The National Library of Auckland, New Zealand (henceforth GA); and (b) PAK-001-1498, Ganj bakhsh Collection, Pakistan (henceforth NP).

It was the existence of the similarities between this one chapter of *DMJ* and the Malay manuscripts of *HMH* that led me to write this article.

22. See James Fuller Blumhardt and D.N. MacKenzie, *Catalogue of Pashto Manuscripts in the Libraries of the British Isles*, London, The Trustees of the British Museum and the Commonwealth Relations Office, 1965, pp. 108-114.

23. Nonetheless, the table of contents shows it as “*dar maqātil-i Amīr al-Mu’minīn Ḥasan va Amīr al-Mu’minīn Ḫusayn Raḍī-allāh ‘anh.*”

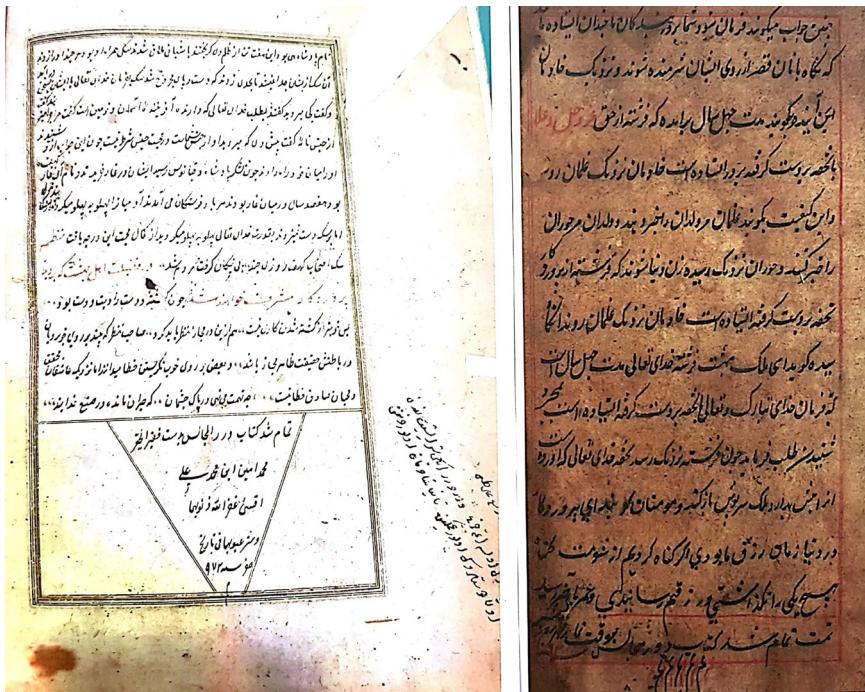


Fig. 1 – From left to right: the colophons of OL and OP

For instance, different copies of *DMJ* start part I with titles such as:

- / بر مقالل امیر المؤمنین حسن و امیر المؤمنین حسین رضی الله عنہ (OL/OP)

“On the Killings of the Commander of the Believers Hasan and the Commander of the Believers Husayn, May God Be Pleased with Him [Them]”

- / در مقتل امیر المؤمنین (امام) حسن و (امام) حسین رضی الله عنہ (GA and NP)

“On the Killing of (Imām) Ḥasan and (Imām) Ḥusayn, May God Be Pleased with Him”

- / در مقتل امیر المؤمنین حسین (1959 Vienna)

“On the Killing of the Commander of the Believers, Husayn”

- / در حکایت معلویه (PAK-001-1506)

“On the Story of Mu‘āwiya”

Malay *HMH* MSS D5, preserved in the British Library, includes the following titles for the first part:

- این حکایه محمد حنفیه (D 5) /
“This is the Story of Muḥammad Ḥanafiyah”
- (Brakel): /
“This is the Story of the Killing of Ḥusayn”

On another occasion, the interest of Hasan and Husayn in the fruits brought to them by *Dihyah al-Kalbī* is seen in both the Persian and Malay texts²⁴:

(OL/OP)

رسول علیه السلام گفت...
هر بار که دهیه قلبی / وحیة کلبی بر من می آید
جهت این چیزی می آرد

(D 5)

مک سبد رسول الله تونهمب این دسقکن حیاة الکلبی در فد قوم نبی...
بار غکالی داتخ ادلہ سسوآه بوه ۲ هن دباوان اکن حسن دان حسین

This is despite the fact that *Dihyah al-Kalbī*'s name is misspelt in the Persian texts (OL/OP) and in the Malay version (D 5). Gabriel then brings them heavenly fruit—only a pomegranate (*anār*) in the Persian version, both a pomegranate (*delima*) and a grape (*anggur*) in the Malay.

There are also references to Hasan's and Husayn's demand for the feast garment. Hasan received a green one, symbolizing his death with poison, and Husayn had the blood-red one, reflecting his murder in Karbala²⁵:

(OL/OP)

جامه سبز بیرون آمد آنرا به حسن داد...
و جامه لعل گشته به حسین داد

(D 5)

مک دامبل اوله حسن فکاین يغ هیجو ...
کمدين مک دامبل اوله حسین فکاین يغ میره ...

The Story of Husayn's Death in DMJ: General Overview

In manuscripts OL and OP, the chapter begins with the death of Mu'āwiya

24. English translations are found in the table, below.

25. English translations are found in the table, below.

and Yazīd's attempts to destroy Ḥassan and Ḥusayn and ends with the captivity of Ḥusayn's family and their presence in Yazīd's palace. Not only do GA (fols: 129-47) and NP (fols: 449-88) contain OL's/OP's stories, but they also add a number of events and elements to them (part I). Regarding the first part of this chapter in the *DMJ* manuscripts, a number of points should be highlighted:

- In most manuscripts, excluding GA and NP, this chapter concludes with a scene in the palace.
- In most manuscripts, except GA, this scene ends with the unsuccessful attempt by a specific servant (whose name, according to some *DMJ* copies and Add. 8149, was Śāliḥ) to kill Yazīd and his subsequent wanderings, unhappy and overburdened by the disasters of life. OP, for example, says: “[...] *chun ghulām īn sukhan bishnīd, dast bi tīgh kard va bar sar-i Yazīd zad. Ammā qadā’ taqdīr-i Yazīd-i La ‘īn narasīda būd hīch kār nakard. Ghawghā barkhāst va chihil nafar-i Yazīd rā ghulām bi-kusht, āngāh khud ham kushta shud va ta madām ki Yazīd-i nā-ba-kār dar jahān būd hargiz khud khushdil nashud va mardūd-i dīn va dunyā būd*” (“when the servant heard this, he drew his sword and struck Yazīd’s head. However, he was unsuccessful because the accursed Yazīd’s death had not yet been predetermined. Pandemonium ensued as the servant killed 40 of Yazīd’s followers; then he, too, was killed, and for as long as Yazīd was alive in this world he was never again happy, and was rejected by both religion and the world”).

However, the most important difference relates to an additional part found in both GA (fols: 147-54) and NP (fols: 489-517) (part II). This is the second part of the story, where it dramatically moves on to recount how Muḥammad Ḥanafiyah, the half-brother of Ḥassan and Ḥusayn, became determined to avenge their enemies and kill Yazīd. In both GA and NP, part II of the story comes immediately after part I. Interestingly, part II is (clearly) separated from part I in GA by a single phrase, “*bāz qīṣṣā az sar bayān kunam*” (“Now a new story begins”), which is similar to the phrase *al-qīṣṣā* (القصة) employed in the Malay *HMH*, which means “the story is that.” In NP, while part I finishes with the death of the servant and wanderings of Yazīd, part II starts with the heading “*Khabar shudan-i Imām Ḥanīfah va Intiqām az Yazīdi-yān Badbakhtān Giriftan*” (“News of Imām Ḥanīfah and the Revenge on Yazīd’s Wretched People”), written in a different hand and with a different paper quality.

In the two manuscripts, part II begins as follows:

- GA: “*ān-rūz ki amīr al-mu’minīn shahādat yāft...chun ghulām [-i amīr al-mu’minīn Ḥusayn] dar Kūfa āmad dar ānjā namānd, dar Makka dar-āmad shādiyāna-yi Yazīd mizadand va ān ghulām dar Madīnah dar āmad, ānja ham shādiyāna-yi Yazīd zadand [...]’*

of the martyrdom of the Commander of the Believers, ... the servant [of the Commander of the Believers, Husayn] arrived in Kufa and he then left there. He went to Mecca and saw people celebrating Yazīd's [victory], and then the servant went to Medina. There, he also saw that people were celebrating Yazīd's [victory]"').

- NP: “*al-Qiṣṣa: ammā Ḥusayn rā ghulāmī būd az qadīm [...] ān ghulām ‘alam-i adhārā basta bi-jānib-i Kūfa ravāna gardīd [...] shādiyāna bar-pā kardand [...] az ānjā ravāna-yi Makka-yi mu’azzam gardīd, dar ānjā nīz shādiyāna-hā barpā shud*

The rest of the story is more or less similar, full of repetitions, in GA and NP. Their part II (which is the last part of the chapter) is also very similar to that of the Malay *HMH*, and ends as follows:

- GA: “[...] *Yazīd bugrikht dar qaṣr āmad chun Muḥammad Ḥanīfah rā dīd az asp furūd āmad va dar ṭasht-khāna dar āmad va miyān-i palīdī ghūṭa khurd. Muḥammad Ḥanīfah radī Allāh ‘anhu farmūd tā ātash gardānand va ba’dī guyand ki sang-i siyāh shud gird bi gird-i kūh-i Qāf bi-gardad tā Rūz-i Qiyāmat nashusta (?) khāhad būd ba’d az ān fatḥ shud va ‘Alī Asghar dar Dimishq va Imām Zayn al-‘Ābidīn dar Shām bi-Khilāfat nashāndid*26
- NP: “[...] *Yazīd chunīn alīvāl dīd, ū nīz bugrikht va afrād-i (?) ū parākanda shudand va jumla az tars-i jān-i khud bi Yazīd bad miguftand. Imām Muḥammad Ḥanīfah bi dunbāl-i Yazīd rānd va dar ṣaf-i mu’minān ṭabl-i shādī zadand va Yazīd-i nābikār dar khāna dar-āmad. Dar khāna jāy-i qaḍā-yi ḥajat būd dar ājnā dar āmad, har chand dar khāna ū rā talab kardan hargiz nayāftand. Imām Muḥammad Ḥanīfah farmūd... ātash dar damīd...tā bi khāna-yi ū ātash girift. Bi qudrat-i Parvardgār Yazīd bi-ṣūrat-i sag-i zard shud va baḍī mī-gūyand bi ṣūrat-i gurg shud va*

²⁶. It is odd that both ‘Alī Asghar and Zayn al-‘Ābidīn will rule the same regions. This also gave Winstedt the idea that “Zain al-‘Abidin is installed ruler of Damascus in Indo-Malay Muslim fashion, seated on a throne with a Sanskrit name [...]” Winstedt, 1939, p. 107.

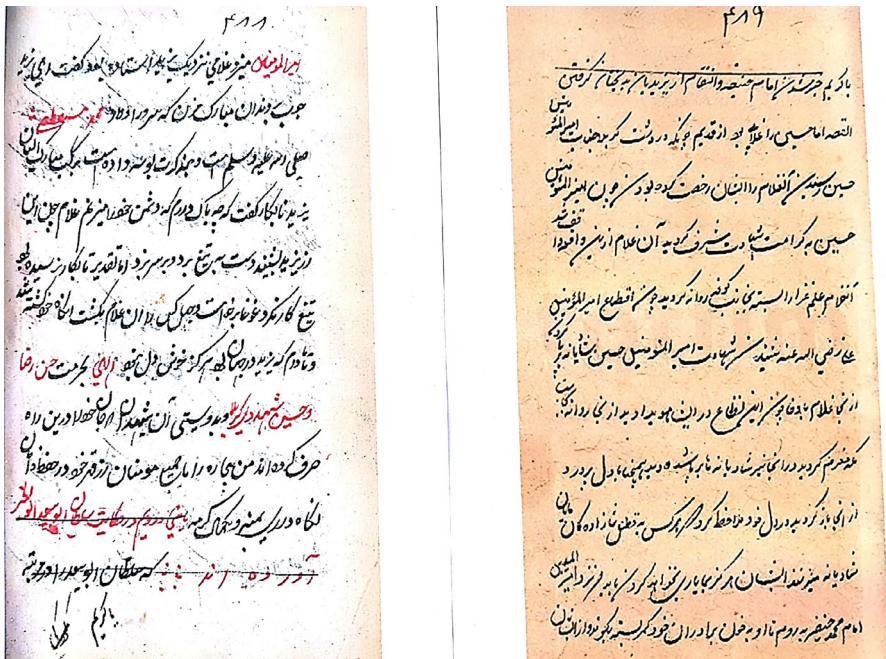


Fig. 2 – From left to right: the end of the part I and the beginning of the part II in NP. The different hands are obvious. Part II starts with the heading “*Khabar shudan-i Imām Ḥanīfah va Intiqām az Yazīd-ān Badbakhtān Girifstan*.”

bi-gardāgard-i kūh-i Qāf migardad va tā bi-rūz-i Qiyyāmat tashna khāhad būd va ‘Alī Asghar rā bi-khalāfat-i Dimishq nashānd, har yik bi mulk-i khud raft (“When Yazid understood the situation, he ran away [...] and his people were scattered, and they all cursed [talked badly about] Yazid in order to save their lives. Imām Muhammad Hanīfah went to find Yazid. The believers banged drums of joy and the evil Yazid went into [his] house. There was a toilet into which Yazid entered. Although they tried hard to find him, they could not. Imām Muhammad Hanīfah ordered a fire be lit [...] and his [Yazid’s] house burnt down. Due to God’s will, Yazid became as a yellow dog, while some say that he became like a wolf and will run around the mountain of Qāf until Judgment Day while suffering terribly from thirst. And [Muhammad Hanīfah] appointed ‘Alī Asghar as the ruler of Damascus; everyone went towards his kingdom [...]”).

It seems clear that there are two versions of chapter 31 (generally known as “The Story of the Killing of Ḥassan and Husayn”): (a) the shorter version, part I only, which ends with Yazid’s failure in religion and the world; and (b) the longer version, which includes parts I and II, the latter of which details the

revenge of Muḥammad Ḥanafiyah. Due to the existence of variant versions of this chapter, it can be suggested that, although parts I and II are connected, copyists often tried to produce or re-write only part I of the story, in which Muḥammad Ḥanafiyah does not play any major role. This is obvious in NP: a different writer, with different handwriting and using other paper, added part II into the body of chapter 31 after part I (fig. 2).

Muḥammad Ḥanafiyah as an Indigenous Spiritual Leader: Challenging Hurgronje's Hypothesis

In MS Malay B 6 (f. 93v) and MS Malay D 5 (f. 49v), both preserved in the British Library, Muḥammad Ḥanafiyah is said to have been from Boeniara/Buniara (بنيارا), which, according to Snouck Hurgronje, is “a subdivision of the Kingdom of Medina”²⁷. According to him, Muḥammad Ḥanafiyah of Boeniara was able to kill Yazid (Yazīd). Then, “a small remnant of Yazid’s followers took refuge in a cave. At this moment the cave closed of its own accord, and the holy man and his horse are still there, awaiting patiently the day appointed for their resurrection”.²⁸ However, he does not provide any reference that mentions the name of Boeniara as the residence of Muḥammad Ḥanafiyah. Also, a number of experts I consulted had never heard of the name Boeniara/Buniara as either a subdivision of Medina or the residence of Muḥammad Ḥanafiyah. Likewise, the earliest Islamic historical sources, such as Ahmad b. Yahyā al-Balādhurī (d. c. 892 CE), do not have Boeniara as either a subdivision of Medina or Muḥammad Ḥanafiyah’s place of residence. In his *Ansāb al-Ashrāf* (Genealogies of the Nobles), al-Balādhurī opens up new sections dealing with Muḥammad Ḥanafiyah after the story of the killing of Husayn (*maqtal al-Husayn b. ‘Alī*). In these sections, which also include references from Muhammad b. ‘Umar al-Wāqidī (d. c. 823 CE), a well-known early Arab historian, the main cities related to Muḥammad Ḥanafiyah are Medina, which is also his place of death, and al-Baqī‘, where his grave is located.²⁹ Nonetheless, there is a place in Medina called al-Buwayra that, according to Michael Lecker, is related to the “Jewish Naḍīr.” Apart from the obvious difference between the orthography of al-Buwayra and Boeniara, the map of the markets of Medina on the eve of Islam created by Lecker³⁰ as well as the reference by ‘Alī b. Ahmad al-Samhūdī’s (d. c. 1505) *Wafā’ al-Wafā’* to the house of Muḥammad Ḥanafiyah clearly demonstrate that he was living near

27. C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Leiden & Batavia, E.J. Brill & Landsdrukkerij, 1894, vol. 2, p. 180.

28. Ibid.

29. al-Balādhurī, *Kitāb Jumal min Ansāb al-Ashrāf*, Beirut, Dār al-Fikr, n.d., vol. 3, pp. 395-487. There are even disagreements on the birthdate of Muḥammad b. al-Ḥanafiyah, either thirteen or twenty one years after Hijrah.

30. Michael Lecker, “On the Markets of Medina (Yathrib) in Pre-Islamic and Early Islamic Times,” *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 8, 1986, pp. 133-147.

“Baqī‘ al-Gharqad, the cemetery of Medina,” close to the Prophet’s mosque, and far from al-Buwayra.³¹

However, we should bear in mind that the name of Muhammad Hanafiyya’s residence figures prominently in part II of the story, which, according to Brakel, is purely legendary.³² Thus, it is highly likely its name will not be found in any historical or traditional sources of Islam. Instead, more attention should be paid to how his residence is introduced in other versions of this story, in different languages.

Islamic epics present a lion-hearted and chivalric image of Muhammad Hanafiyyah, who is displayed as the Imām of his age as well as a messiah. Traces of stories (Pers. *Qīṣas va ḥikāyāt*) dedicated to him can be found in various corners of Western Asia, particularly in the Middle East, in places such as Kharg Island, in Bushehr province or Guilan of Iran, where a tomb ascribed to him (*Buq‘a-yi Mīr Muḥammad-i Ḥanafīyyah* and *Imāmzāda-yi Muḥammad-i Ḥanafīyyah*, respectively) is located.³³ It is said that sailors from South Asia used to visit his tomb on Kharg Island in the Persian Gulf as well. The messianic facet of Muhammad Hanafiyyah has been underscored for many years in the Bamyan Valley of northern Afghanistan, where an area is dedicated to the “dragon slayer” Hazrat-i ‘Alī.³⁴ Local people believed that Emir (*Shahzāda*) Hanafiyya, the son of ‘Alī, is waiting in an underground passageway to reappear and fight for peace, along with his horse and his beloved wife, Bībī Ḥanīfah.³⁵ Indeed, the legends of this region present Muhammad Hanafiyya as *al-Mahdī al-muntaẓar* (“The Awaited Mahdī”), which is an important principle of Twelver Shi‘īsm. Indeed, calling Muhammad Hanafiyya the Mahdī “was initiated by some Shi‘ite sects which claimed that he had not died but was only hiding in mountains and which expected his ‘second coming’ before long.”³⁶

Following Marc Gaborieau, Calmard says:

the cult and legendary accounts of Muhammad b. Ḥanafīyya seem to have penetrated into India following the Ghaznavid expedition in the Panjab. A legend centered on Ghāzī Miyān (identified as a certain Sālār Mas‘ūd, a nephew of Maḥmūd of Ghazna) became very popular in Northern India. Ghāzī Miyān becomes a sort of avatar of the “twin” brothers Hassan

³¹. I am grateful to Michael Lecker for drawing my attention to this point.

³². Brakel (b), p. v.

³³. It should be noted that some reports suggest that his grave is located in other places, such as Medina.

³⁴. Jean Calmard, “Mohammad b. al-Hanafiyya dans la religion populaire, le folklore, les légendes dans le monde turco-persan et indo-persan,” *Cahiers d’Asie centrale* 5/6, 1998, pp. 201–220.

³⁵. Ibid.

³⁶. Braginsky 2005, p. 181. The followers of Kaysāniyyah believed that Muhammad b. Ḥanafīyya is their Imām who is alive and hidden in the mountains of Raḍwā, near Medina. W. Madelung, “Kuraybiyya,” *Encyclopaedia of Islam*, 2nd ed., ed. P. Bearman et al., Leiden, Brill, 1979, vol. 5, pp. 433–434.

and Ḥusayn. Muḥammad Ḥanafiyya (or rather Ḥanīfah or Ḥanīf or Ḥambiya Muḥammad) appears as avenging his brothers killed by a Hindu raja.³⁷

Perhaps unsurprisingly, every author or copyist of the saga of Muḥammad Ḥanafiyya tried to indigenize and present him as one of his own people (e.g., a South Asian or Indian Muslim, a Malay Muslim). As such, the copyist of GA, Shaykh Dawūd Mirdkir, says that the servant of Ḥusayn, upon leaving Medina, decided to visit Muḥammad-i Ḥanīfah, “*khalīfa-yi pahlavān-i ākhir al-zamān va shīr-i pāk-i ‘ālam*” (“The Brave Caliph of the End of Time and the Most Chivalric of the Universe”), to inform him of the death of his brother in Karbala. The servant then travelled for three months over a considerable distance before arriving at Muḥammad Ḥanīfah’s headquarters in the city of Bamyan³⁸; In the NP version, copied by Muḥammad Sharīf, the son of Mullā Quraysh Ākhund Zādah,³⁹ in order to visit “*pahlavān-i dīn, Imām al-ashja ‘īn*” (“The Hero of the Religion, the Leader of the Brave People”), i.e. Imām Muḥammad-i Ḥanīfah, the servant sets off for the city of Banil, which refers to the region of Banil Kalle in Pakhtunkhwa, which had been conquered earlier by the Ghaznavids. More importantly, in the Persian manuscript of the British Library, Add. 8149, also previously examined by scholars, the servant travelled to Anbaz(i), a city outside the Arabian Peninsula, to visit *Amīr al-Mu’mīnīn* Muḥammad Hanafiyya.⁴⁰

These points clearly demonstrate the resemblance of the Malay *hikayat* of Muḥammad Hanafiyya (mainly those introduced by Hurgronje) with those of Central and South Asia, and particularly of the Bamyan valley. Furthermore, another Malay version of this story, MS 12377, also preserved in the British Library, suggests the headquarters of Muḥammad Hanafiyyah is not Boeniara but another city, one derived from the letters b-n-t-y-a-r:

pergi membawa surat kepada saudaranya ke benua b-n-t-y-a-r

Whether it reads as Bentara, Bentiar or Bentyar, it is clear that the scribe of this version of *HMH* did not identify Boeniara as the headquarters of Muḥammad Hanafiyya. This signifies that local Malays also tried to indigenize his story. On this subject, it is further possible that the reference to Boeniara in some Malay *HMH* refers to a district with the same name in Southeast Asia,

^{37.} Marc Gaborieau, “Légende et culte du saint musulman Ghâzî Miyân au Népal occidental et en Inde du Nord,” *Objets et Mondes* 15/3, 1975, pp. 289-310. Jean Calmard, “Popular Literature under the Safavids,” in *Society and Culture in the Early Modern Middle East: Studies on Iran in the Safavid Period*, ed. Andrew J. Newman, Leiden & Boston, Brill, 2003, pp. 316-339.

^{38.} Or Banyan, which is a title used for Indian merchants who traded between India and the central and southern parts of Persia.

^{39.} There is a city called Akhond Zādah in contemporary Afghanistan.

^{40.} See for example, fl. 28 v and 29. However, further evidence is required to arrive at firm answers in this respect (i.e. Anbaz(i)).

than to a subdivision in Medina, Arabia. In addition, it might be possible that the name of Boeniara in Java was taken from “a foreign-derived” *HMH*.⁴¹

However, as the Safavids (r. 1501-1736) established the Twelver Shī‘ī school of Islam as the religion of their empire, storytellers tended to—or had to—produce more works that would decrease and marginalize the messianic and leadership significance of Muḥammad Ḥanafiyya. Thus, on the basis of earlier stories, they produced new or revised older “epico-religious” texts such as the *Junayd-nāma*, and *Mukhtār-nāma*, among others, in which Muḥammad Ḥanafiyya is just a warrior while Zayn al-Ābidīn instead is the main figure of the story, one who is presented as the only Imām of his age⁴², the one who, according to the Safavids, can transfer the genes of ‘Alī and Fāṭimah to the next Shī‘a Imām.

Analyses

A Comparison of HMH and DMJ

Brakel declared that the structure of both the Persian and the Malay texts is largely similar⁴³. Both works include the two main parts of (part I) the *Maqta*, on the death of Ḥassan and Ḥusayn, and (part II) the *Hikayat* of Muḥammad Ḥanafiyya, which relates the revenge story. As mentioned previously, Brakel used an unspecified Persian manuscript, Add. 8149, dated 1721 AD. In his comparison, he discovered that 9 out of 26 chapters from part I and 19 out of 22 chapters from part II of *HMH* can be traced back to the Persian text.

In this section, the following will be examined:

- The similarities between *DMJ* and Brakel’s *HMH* found by Brakel in Add. 8149;
- The similarities between *DMJ* and Brakel’s *HMH* NOT found by him in Add. 8149.

This comparison will lead to conclusions in two distinct areas: (a) how far *DMJ* influenced *HMH*; and (b) how this article can build on the work of previous scholars.

As this essay seeks to support previous scholarly work on the origins of *HMH* it will employ the Romanized and the English versions of *HMH* produced by Brakel as a composite text, which has elicited some debate among philologists, as well as various other manuscripts. It may be questioned whether the original manuscripts of *HMH* should be employed in this study. In response to this, it should be noted that I went through the two original Malay *HMH* that are preserved in the British Library (D5 and B6), and found that, as Brakel himself reported, the aspects found in his critical edition are seen in most other Malay manuscripts. Unfortunately, however, lack of space

41. Personal comm. Edwin Wieringa, 30 January 2018.

42. Jean Calmard, “Popular Literature under the Safavids”, 2003, pp. 316-339.

43. Brakel (a), p. 64.

precludes the inclusion of details from all the Malay manuscripts. Hopefully we will publish a full study on this in the near future.

The main *DMJ* mss. consulted were OL/OP and GA. The OL and OP mss. are the oldest versions of *DMJ* available to me, while the GA ms. provides the most detailed version of the story. In addition, other versions of *DMJ*, particularly NP, will be used where it is deemed necessary. Although I wanted to examine whole pages of Add. 8149 – the Persian source examined by Van Ronkel and Brakel – this was not possible⁴⁴; however, this should not pose a problem since OL and OP were copied in 1564 and 1681 AD respectively, i.e. much earlier than Add. 8149.

(A) Similarities between DMJ and HMH on the Basis of Add. 8149

Part I

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
Chapter 2a: Dahyat al-Kalbī's habit of bringing fruit to Hassan and Ḥusayn and their seeking fruits in his sleeves	“ <i>Jibra’ il az Rasūl pursīd Husayn dar āstīn-i man chi mikhāhad. Rasūl guft ey barādar Jibra’ il tu nazdīk-i man bi-ṣūrat-i Dahiya Qalbī mi-āyī va har bār ki Dahiya Qalbī bar man mi-āyad bi-jahat-i īn chīzī mī-ārad va bar-ān khīyāl āstīn-i tu mībinad [...]</i> ” (“Gabriel asked the Messenger what Ḥusayn was seeking in his sleeve. The Messenger said ‘O my brother, you look like Dahiya Qalbī while you are in my presence. And whenever Dahiya Qalbī approached me, he used to bring something with him. As such, Ḥusayn is seeking your sleeve [...]’”)	--	With the exception of GA, this story is found in other versions of this chapter in <i>DMJ</i> , including NP. According to the Malay <i>HMH</i> , Gabriel brought a pomegranate and a grape from heaven for Hassan and Ḥusayn. However, in <i>DMJ</i> 's chapter, Ḥusayn is the only grandson of Muhammad who seeks the sleeve of Gabriel, who brings him a pomegranate. Nonetheless, GA refers to the food sent to Hassan and Ḥusayn, via Gabriel, from heaven.

⁴⁴ I only had the chance to examine parts of this manuscript. Following other scholars, I will rely on Brakel who went through Add. 8149 completely.

Brakel's edition of <i>HMH</i>	OL/OP	GA	Additional Comments
Chapter 2 b: Hassan's and Husayn's interest in wearing the feast-day garments and how the Prophet gave them what they wanted. Later, the green one was chosen for Hassan and red one for Husayn.	“[...] <i>Fātimah</i> guft yā peyghāmbar-i khudāy, emruz id ast; jāma-yi <i>Hassan</i> va <i>Husayn</i> [...] kuhna shuda-and va ishān mi-giryand ki mā-rā jamā-yi khüb bidī [...] jāma-yi sabz birūn āmad, ān-rā bi <i>Hassan</i> dād; duyum karrat dast-i mubārak az āb gīrad <i>Husayn</i> rā kashid guft tu-rā chi rang bāyad. Ú guft marā la'l rang mī-bāyad. Peyghāmbar dast-i mubārak az āb birūn kashid va jāma-yi la'l ghashta bi <i>Husayn</i> dād [...]” (“Fātimah [while sad] said: ‘O, Messenger of God, today is the feast day. The garments of Hassan and Husayn are threadbare, and they are crying and saying that they want a suitable garment’ [...] the green garment came out and the Messenger gave it to Hassan; for the second time, Muhammad took out his sacred hand from the water and asked Husayn, ‘what color is yours?’ He replied, ‘mine is blood-red’. The Messenger took out his sacred hand and gave Husayn the red-colored garment [...]”).	--	This story is seen in other Persian versions, including NP. Unlike the Persian version, the Malay <i>HMH</i> says that Muhammad received two garments for Hassan and Husayn from a chest brought by Gabriel. However, in GA, it is Gabriel who pours green onto the handbook (?) of Hassan (<i>sabz bar takhta-yi Hassan</i>) and ruby red onto that of Husayn (<i>Yāqūt-i surkh bar takhta-yi Husayn</i>)
Chapter 2c: an angel with burnt wings sat on Gabriel's shoulder; Hassan and Husayn rubbed her shoulders; thus, she was healed and could fly away.	“ <i>Firishta</i> bar bāzū-yi Jibra'il nishasta va nazdīk-i Rasūl rasīd. Peyghāmbar nigāh bar-vey gardid ki har-du bāzū-yi <i>firishta</i> sukhta ast [...] bugū/bigū har du dast-i <i>Husayn</i> bar du bāzū-yi īn fereshta furūd īyad...nīkū gasht va dar zamān, fereshta bi-havā parid [...]” (“the angel sat on the shoulder of Gabriel while he approached the Messenger. The Messenger looked at her and observed that her wings were burnt [...] Husayn's hands touched the shoulders of the angel [...] it was healed, and then she flew away”).	--	This story is seen in other Persian versions, including NP. In contrast to the Malay version, which says that Hassan and Husayn touched the shoulder of the angel, Persian texts only mention the name of Husayn.

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
Chapter 3: The Prophet gave a bottle with earth in it to Ummi Salamah	<p>“Jibra ‘il ‘alayh al-salām bi-dasht-i Karbalā raft va qadrī khāk biyāvard va burd dast-i mihtar-i ‘ālam bi-dād va guft har-gāh ki in khāk bi-rang-i khūn shavad, kushtan-i Ḫusayn nazdīk ast va guft ey Ummi Salamah, in khāk dar shīsha bi-kun va nigāh-dār [...]” (“Gabriel, God’s mercy be upon him, went to the Karbala Plain and picked up some of its earth, gave it to the Messenger [the best of the universe], and said that when this earth turns red, the killing of Ḫusayn is close. And the Prophet told Ummi Salamah to put the earth into the bottle and keep it [...]”).</p>	<p>“[Muhammad] guft yā Jibra ‘il qadrī khāk az dasht-i Karbalā biyār. Jibra ‘il ‘alayh al-salām rafta az-ān khāk āvarda; Rasūl ṣallī Allāh ‘alayh wa-sallam dar qārūra andākht va bi-man dād va guft Ummi Salamah...chun in khāk khūn khāhad shud, vaqt-i marg-i Imām Ḫusayn nazdīk rasīda [...]” (“[Muhammad] told Gabriel to fetch some of Karbala’s earth. Gabriel, mercy be upon him, went and got some earth; the Messenger (peace be upon him) put it into a bottle and gave it to me and said: ‘O Ummi Salamah [...] when this earth gets blood red, Imām Ḫusayn’s death is close [...]’”).</p>	<p>Other Persian manuscripts express the story as do OL/OP. In both GA and the Malay HMH, this story is prefaced with the Prophet’s concern about the loneliness of Hassan and Husayn at the time of their deaths. In this regard, the GA version says that Muhammad said: “vāy Ḥassan vay Husayn; vāy gharībān; vāy yatīmān” (“Poor Hassan, poor Husayn; my two poor lonely children, my poor orphans”).</p>
Chapter 4: Mu‘āwiya’s (unsuccessful) attempt not to have intercourse with a woman and “to remain childless,” as per Muhammad’s recommendation, is seen after he was bitten by a scorpion.	<p>“Peyghāmbar [bi-Mu‘āwiya] farmūd az pusht-i tu farzandī peydā shavad, kushanda-yi Hassan va Husayn-i man ū bāshad. Mu‘āwiya guft ey peyghāmbar-i Khudāy dar jahān, hīch pisarī nadāram va ba‘d az in sowgand mīkhuram ki gird-i ‘awrat nagardam tā marā hīch farzandī nashavad...Mu‘āwiya shabī barkhāst tā bowl kunad, ba‘d az bowl kardan istinjā bi dīvārī kard va dar dīvār kazhdum nishasta</p>	<p>“ān hazrat farmūd az pusht-i tu farzandī āyad ki farzandān-i man bi-nā-haqq kushad. Mu‘āwiya guft ki zan na-mīkunam, az in sabab Mu‘āwiya zan nakardī tā bi-taqdīr-i Allāh ta‘ālā kazhdum āvīkhta shud; tabībān guftand ‘alāj-i ān bi-zan kun ta nīkū shavī. Dard-i ū ghālib shud [...] kanīzakī dāsh [...] bar ū ‘alāj kard...az ān ‘alāj Yazīd dar shikam-i ān kanīzak mānd [...]” (“Muhammad said [to Mu‘āwiya], ‘From your loins will come a child</p>	<p>Brakel said that he could not find a parallel for “the birth of Yazīd” in Add. 8149*. However, all available Persian versions of DMJ have the story from OL/OP. Furthermore, intercourse with a slave is found</p>

* Brakel (a), p. 7.

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
	<p><i>būd, sar-i ālat-i Mu‘āwiya nīsh zad [...] hakimān guftand ki tu bā ‘awrat nazdīk bu-kun tā zahr-i ālat-i tu rīkhta gardad va nīkū gardī. Mu‘āwiya [...] nazdīk kard va Yazīd-i la‘īn dar shikam-i Mādar qarār girift [...]”</i> (“The Prophet said [to Mu‘āwiya]: ‘from your loins a child will appear who will be the killer of my Hassan and Husayn.’ Mu‘āwiya said: ‘O Messenger of God of the universe, I do not have any son, and hereafter I promise not to have intercourse with any woman in order not to have a child’ [...] Mu‘āwiya woke up one night to urinate. He cleaned his penis on a wall in which there was a scorpion, and it bit the head of his penis [...]. Doctors said to Mu‘āwiya, ‘you should have intercourse with a woman in order to extract the poison and be cured.’ [...] So Mu‘āwiya had sex [...] and the accursed Yazīd was placed in his mother’s womb”).</p>	<p>who will unjustly kill my children.’ Thus, Mu‘āwiya did not get married until, in accordance with the divine predestination of God Almighty, he was bitten by a scorpion, and doctors said that his healing would depend on him finding a wife. His pain increased [...] he had a female slave [...] she became his healing [...] [and], from that intercourse, Yazīd was placed in the womb of that female slave”.</p>	<p>in HMH: “<i>Tabib berketa: Hay Mu‘awiyah!</i> <i>Jika tiada engkau kepada perempuan, tiadakan sembah penyakit itu!</i> <i>[...] Maka daripada sangat tiada menderita sakitnya, maka disuruhnya cahari seorang perempuan tuha lagi Habsi [...]”</i> (p. 124). See the discussion in the final section of this article.</p>
<p>Chapter 21: (a) Yazīd’s desire to marry ‘Abdullah Zubair’s wife “who was particularly beautiful”</p> <p>(b) Mu‘āwiya’s suggestion to ‘Abdullah Zubair that he gives his former’s daughter to ‘Abdullah Zubair and the latter becomes the ruler of Egypt.</p>	<p>“Mu‘āwiya bar Yazīd āghāz kard man ki chandīn ranj va mashiqat dīdam vakhīlāfat bi-dast āvardam az bahr-i tu kardam, aknūn ey farzand hīch raghbāti va āruzūt dar khātīr dārīt ki ān-rā bi tu bi-rasānam?; guft ey (sic) ‘Abdullāh Zubair zanī dāsh, zanī sāhib-i jamāl dārad ki dar shahr bi jamāl-i ān zan hīczanī na-mīrasad va āruzū-yi man ānast ki ū imrūz marā bāshad. Rūz-i dīgar Mu‘āwiya ‘Abdullāh Zubair rā bi-khānd va khalvat bi-kard [...] dar haqq-i tu mikhāham lutf’ kunam va dukhtar-i khud rā bi tu daham va vilāyat-i Miṣr rā ḥavāla-yi tu gardānam, ‘Abdullāh Zubair bi-dīn chīz-hā fariṣṭa kard [...] Mu‘āwiya Mūsā Ash arī rā ṭalab numūd [...] va bā-vey guft man tu-rā az bahr-i ān khāndam ki bar zan-i ‘Abdullāh Zubair bar-</p>	<p>“Va ān-chinān būd ke Mu‘āwiya (RA) rā mawt nazdīk shud chashm pur āb kard va guftand ey Mu‘āwiya girya īn chīst: guft marā hamīn yīk pisar buvad [...] Mu‘āwiya Yazīd rā jahd bisyār numūd, Yazīd bīrūn āmad va dūstān-rā jam‘ kard guft: ey yārān kudām dukhtar khub-tar ast? Hama guftand ki ey khālīfa hīch zanī dar jahān khūbtar nīst tā az Shahr-Bānū va ū zan-i ‘Abdullāh Zubair ast agar hīla kunī ‘Abdullāh Zubair ān-rā ṭalāq dahad hīch zan az ān khub-tar-nīst. Yazīd az zabān-i Mu‘āwiya jānib-i ‘Abdullāh Zubair maktūb nīvisht ki mā-rā bā tu kārī ast [...] Yazīd guft ey Mu‘āwiya marā bar ‘Abdullāh Zubair vaṣīyyat kun tā ba‘d az tu rūy az man na-gardānad [...] Yazīd bar ‘Abdullāh guft mi-khāham ki tu-rā khāhar bi-zanī khā-kunām [...]</p>	<p>This story is found in other versions of DMJ. However, the GA version introduces the wife of ‘Abdullāh Zubair as Shahr-Bānū. Moreover, GA tries to excuse Mu‘āwiya and ascribes the cuckolding of ‘Abdullāh Zubair to Yazīd.</p>

Brakel's edition of <i>HMH</i>	OL/OP	GA	Additional Comments
(c) Mu'āwiya sent Mūsa Ash'arī to the wife of 'Abdullāh Zubair, to propose his son to her. (d) The wife of 'Abdullāh Zubair rejected Yazīd and instead accepted Husayn's proposal, who, according to Mūsa Ash'arī, also wanted her.	<p>āvar ān-bi-jahat-i pisar-i man bi-dīd bi-khāh [...] ['awrat] dar zamān guft nikāḥ-i man bar Husayn bar-khān [...]” (“Mu'āwiya told Yazīd ‘I worked hard and suffered a lot and obtained the caliphate and give it to you. Now, my son, do you have any desire in your mind which I can grant to you?’ [Yazīd said] ‘this 'Abdullāh Zubair has a wife, a beautiful wife that no woman’s beauty in the town can compete with. My desire is that she will be mine today’. Some day later, Mu'āwiya called for 'Abdullāh Zubair and talked alone with him [...] [Mu'āwiya told him] ‘I want to do a favour to you, to give you my daughter and give you the governorship of Egypt’. He tricked 'Abdullāh Zubair with such things [...] Mu'āwiya asked Mūsa Ash'arī [...] and said to him: ‘I asked you to go to 'Abdullāh Zubair’s wife and to see her and get her for my son [...]’ [the wife] promptly told [Mūsa Ash'arī]: ‘Marry me to Husayn’”.</p>	<p><i>ba 'd az vafāt-i Mu'āwiya Yazīd rā bi-khilāfat -i pādshahī nishāndand va Mūsa Ash'arī rā bi Shahr-Bānū risālat firistād barāy-i munākihat-i khūd [...] Shahr-Bānū guft Imām Husayn rā bi-khāh [...]</i> (“And so it was that death was close to Mu'āwiya (RA) and his eye was full of tears, and it was said to him ‘O Mu'āwiya, why are you crying?’ He said: ‘I have only this son’ [...] Mu'āwiya tried to convince Yazīd (to marry). Yazīd came out and gathered his companions and said: O my followers, which girl is better? All said ‘O Caliph, no woman in the world is better than Shahr- Bānū. She is the wife of 'Abdullāh Zubair; if you trick 'Abdullāh Zubair he will divorce her. No woman is better for you than her [...] Yazīd, on behalf of Mu'āwiya wrote to 'Abdullāh Zubair, saying ‘I want to talk to you’ [...] Yazīd then said ‘O Mu'āwiya, command 'Abdullāh Zubair not to refuse me’ [...] Yazīd told 'Abdullāh: ‘I want to give you my sister’ [...] After the death of Mu'āwiya, Yazīd was given the caliphate and he sent Mūsa Ash'arī to Shahr- Bānū to get her to marry him [...] [however], Shahr- Bānū chose Imam Husayn as her husband [...]”.</p>	
Chapter 22: (a) Mu'āwiya dies (b) Yazīd asks the leader of Medina to kill Ḥassan and Husayn; “[he] replied that he was not capable of fighting openly against Husayn”.	<p>“tā āvarda-and chun Mu'āwiya dar jahān namānd, khilāfat bar Yazīd girift va ān bad-bakht rā dar khāṭir uſiād ki Ḥassan va Husayn rađī Allāh ta'ālā tā bi-makr az miyān dūr-kunam va quwwat-i yik-dīgar az īshān bishkanam. 'avrātī zālī rā bar zan-i Amīr al-mu'minīn Ḥassan rađī Allāh 'anhu firistād va guft [...] tu Ḥassan rā az pīsh dūr kun ta man tu-rā dar nikāḥ-i khud dar āvaraṁ va tā tu malaka-yi haram bāshī [...] ān rūz garmā-yi sakht būd va dar vaqt-i iftār-i rūza qadāh-i zahr ta 'biya kard [...] va Amīr al-</p>	<p>“Yazīd qaṣd-i kushtan-i imāmayn kard va maktūb bar valī-yi Madīnah ki 'Utbah b. Walīd būd nivisht ki Imām Ḥassan va Husayn rā bikūshī. 'Utbah /b.J. Walīd javāb nivisht ki man išhān-rā kushtan natvānam ki ahl-i Madīnah hama ānhā rā dūst mī-dārand. Agar man išhān-rā bikusham dar hāl īshān marā bi-kushand [...] chun shab shud 'Utbah pinhān bar Imām Ḥassan va Husayn dar āmad va khidmat kard va dast-basta istāda shud va girīstan girift [...] Yazīd maktūb-i dīgar firistād ki ey 'Utbah marā ma lūm shudi</p>	<p>According to both Malay <i>HMH</i> and Persian stories of <i>DMJ</i>, Yazīd tried to kill Ḥassan and Husayn after the death of his father, Mu'āwiya. OP's story resembles that of NP, too.</p>

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
(c) persuades Hassan's wife to kill him with poison "with the promise that he would marry her and make her a ruler".	<i>mu'minīn Hassan ān-rā bi-khurd va bi-mujarrad-i khurdan zahr dar kār shud va haftād parkāla/purkāla az jigar bi-ufstād [...] Amir al-Mu'minīn Ḥusayn biyāmad, halat-i barādar bi-naw'i dīgar bi-dīd [...] [Ḥassan] guft: aknūn dast-i shafaqqat az sar-i farzandān-i man bāz-nadārī ki yatimān dil shikasta bāshand [...] ba'd naql-i marā dar rawdā-yi jaddam barīd [...] yik-pāya jināza Ḥusayn bigrift va dīgar pāya Muḥammad Junayd girift. Khāstand tā bi-hazīra-yi rasūl barand, Yazīd-i badbakht bar madīna bi-guft nakhāham ki Ḥassan rā dar hazīra-yi peyghāmbar ṣal'am dafn kunand [...] Ḥusayn-i 'Alī khāst tā bar īshān jang kunad, 'Abdullāh Mas'ūd dar-āmad va guft ey yādgār-i Rasūl Allāh [...]</i>	<i>ki dūstdār-i pisarān-i 'Alī rađī Allāh 'anhu hastī, sākhta bāsh, imrūz yā fardā sar az tan judā mīkunam va agar kheyriyat-i khud mīkhāhī, pisarān-i 'Alī rā bi-har hīla ki dānī va tavānī ishān-rā bukhush [...] ['Utbah] 'awratī būd dar Madīnah, sāhirah nām [...] talab kard pīsh-i ū hizār dīnār-i surkh nahād [...] ān zan-i bad-bakht chun zar dīd farīsta shud [...] yik ghulūlah dar-ū kard va dar-ū zahr ta 'biya kard va nazd-i zan-i Imām Ḥassan, zanān-i bisyār karda būd, āmad [...] ki nām-i ān Quttāmah/Qatīmah būd [...] ayyām-i tābistān būd, Imām Ḥassan dar khāna khud āmad ki bānū istāda shud [...] ba'd az sā'at āb talabīd [...] ān sharbat bi-nūshīd, balki shū'la-yi ātash būd, bi-mujarrad-i nūshīdan shūrī dar vujūd-i mubārak ufstād [...] pisar-i khud, Qāsim, rā guft ki ey nūr-i dīda-yi man barādaram talabīda biyāvar [...] Imām Ḥassan [bi Ḥusayn] guft: [...] az sabab-i kasī ki hāl-i man chunīn shuda ast, ū rā naranjānī ki man avval ū rā shīfā'at khāham kard va bi ziyyārat-i man bisyār āy va nażar-i shafaqqat az Abū al-Qāsim darīgh nadārī [...]</i>	It is clear that the different stories outlined in HMH on the death of Ḥassan are seen in both OP and GA.
(d) Hassan is killed when he breaks his fast with the poisoned water.			In other Persian manuscripts of DMJ (e.g. Ms. 853 in Michigan), the name of Ḥassan's wife is mentioned as Asmā, which is the case according to most Islamic traditions.
(e) Before his death, Ḥassan asks Ḥusayn to "bury him by the tomb of the Envoy!", which is refused by Yazīd.			
(f) 'Abdullāh Mas'ūd intervenes and does not allow Ḥusayn to attack Yazīd, because Ḥusayn was "the only surviving descendant of the Prophet"			Unlike both Persian and Malay stories, Shī'ī traditions suggest that Quttāmah is the one who tempted Ibn Muljam to kill 'Alī b. Abī Tālib.

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
	<p>permit you to bury Ḥassan in the tomb of the Messenger (peace be upon him) [...]. Ḥusayn went to fight them, but ‘Abdullāh Mas’ūd intervened and said: ‘O the only memory of the Messenger of God [...]”).</p>	<p>‘Alī by every trick you know and can implement [...]. [‘Utbah] called for a witch named Sāhirah, in Medina, and gave her one-thousand red dinars [...] that shiftless woman was tempted upon seeing the coins [...] [so] she made a bag/ball of medicine, in which she placed some poison. She took it to one of Imām Ḥassan’s many wives, whose name was Qaṭṭāmah/Quṭṭāmah [...]. This all happened during the summer; Imām Ḥassan entered his house and his wife was standing there [...]. After a while, he demanded some water [...] He drank the liquid, and it was like the flame of a fire [inside him]. Upon drinking it, his sacred body’s condition was changed [...] and he said to his son, Qāsim, ‘O the light of my eyes, ask my brother to come [...]’ Imām Ḥassan said [to Imām Ḥusayn]: ‘[...] Do not punish whoever has made me this [poison], as my intercession will cover her at the outset, and visit my tomb regularly (more and more) and do not leave your kind attention from Abū al-Qāsim”’).</p>	
<p>Chapter 23: (a) “Yazīd sent a letter to Utbah [...] in which he informed him that all the Arabs had already paid homage to him as Caliph. When Utbah conveyed the letter to Ḥusayn, the latter became enraged and wondered whether the Arabs had perhaps forgotten that the Prophet had destined Yazīd for Hell.”</p>	<p>“[Yazīd] nāma dar Madīnah bar ‘Utab (sic) firistād ki Husayn ‘Alī rā dar bay’at-i man bi-khān, Walīd nāma bar dast girift va dar masjid-i peyghāmbar ṣal’am dar āmad va nāma pīsh-i Amīr al-Mu’mīnīn Ḥusayn nahād. Va Amīr al-Mu’mīnīn Ḥusayn ān-rā bi-khānd va dar khashm dar-āmad va guft man dar bay’at-i ū chigūna dar-āyam ki ū az ahl-i dūzakh ast. [Yazīd] bār maktubī dīgar bar Walīd ‘Utab (?) firistād: har-gāh ki chūn in nāma-yi man bi-tu rasad chinān kunī ki sar-i Ḥusayn judā gardānī va bi-nazdīk-i man firistī [...]” (“Yazīd sent a letter to ‘Utbah in Medina asking Ḥusayn b. ‘Alī to pledge. Walīd got the letter and entered the mosque of the</p>	<p>“‘Utbah Walīd bar Imām Husayn guft ki ay makhdūm-zāda-yi man (?) Yazīd bar man har bār mī-nivīsad barā-yi bay’at shumā; banda chikunam: Imām Husayn barābar-i muhibbān mashvirat kard ki chi ittisāq kunī...marā yik şavāb uftād ki man az Madīnah tark gīram va sukūnat-i Makka ikhtiyār kunam va Makka rā hīch kas faīh nakarda ast magar peyghāmbar [...]” (“‘Utbah b. Walīd told Imām Ḥusayn: ‘Yazīd frequently sends me letters to get your pledge. What should I do?’ Imam Ḥusayn consulted his followers about what can be done [...] ‘I can do one good thing, move from Medina to settle in Mecca. Mecca was not conquered by anyone except the Prophet [...]”)</p>	<p>The resemblance between DMJ OL/OP and the Malay versions are more obvious than in the GA copy.</p>

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
(b) "Yazīd asked Utbah to bring him Husayn's head in return for a reward."	Prophet (peace be upon him) and placed the letter before Ḥusayn. The Commander of the Believers Ḥusayn read the letter and became enraged and said, 'how can I pledge with Yazīd when he is one of the people of Hell?' Yazīd sent another letter to 'Utbah b. Walīd [saying]: When you get this letter of mine, chop off the head of Ḥusayn and bring it to me [...]"		
<p>Chapter 24:</p> <p>(a) Shamīr (Simir) went forward to behead Husayn;</p> <p>(b) [Emir] Husayn asked him to show his chest</p> <p>(c) Shamīr's chest was black and he had the nipples of a dog</p> <p>(d) Husayn recalled the Prophet's statement about his killer's physical features;</p>	<p>"Shibr-i** (Shamīr) mal 'un az asp furūd āmad, bar sīnah-yi Amīr al-Mu'minīn Ḥusayn binshāst va tīgh kashīd tā sar-i mubārak judā kunad [...] [Husayn rađī Allāh 'anhu guft] ey mal 'un tu sīnah-yi khud bāz kun ki kushanda-yi marā jaddam nīshān gufta ast. Shibr-i bad-bakht sīnah-yi khud gushād va Amīr al-Mu'imīn dar sīnah-yi ū nigāh kard va bi-guft [...] rāst guft peyghāmbar-i khudāy ki kushanda-yi tu-rā dar sīnah qiyās-i varam-i pīsī bāshad [...] [Shibr] sar az tan judā gardānidah [...]'" ("The accursed Shamīr dismounted the horse, and sat on the chest of the Commander of the Believers, Ḥusayn. He took out his sword to cut off the holy head [...] [Husayn said]: 'O accursed one, bare your chest, as my grandfather (the Prophet) informed me about my killer's signs'. The Commander of the Believers looked at his chest and said '[...] the Prophet was right, you have the sign of leprosy on your chest'. [...] [Shamīr then] cut off his head [...]").</p>	<p>"Shamīr-i badbakht bar sīnah-yi mubārak nishasta [...] Imām Ḥusayn guft [...] sīnah-yi khud bāz kun [...] ān bad-bakht sīnah rā bāz kard, dāgh-i baraş bar sīnah būd; Imām Ḥusayn guft şidq shanīdam az jadd-i khua, Muhammadi Muṣṭafā ki kushanda-yi Ḥusayn kaśī bāshad ki dāgh-i baraş bar sīnah-yi ū bāshad [...] va sarash bi-burīd ("The wretched Shamīr sat on the holy chest [...] Imām Ḥusayn said '[...] bare your chest' [...] that poor man showed his chest, which had signs of leprosy. Imām Ḥusayn said 'I have heard the truth from my grandfather, Muhammad Muṣṭafā (peace be upon him) who said that the killer of Husayn has the sign of leprosy on his chest [...] Shamīr then cut his head off [...]').</p>	<p>The death scene of Ḥusayn in HMH largely resembles that in DMJ.</p> <p>Although none of the available versions of DMJ mention that Shamīr had the nipples of a dog, the only available Persian document frequently copied from the 16th to 19th centuries is "The Garden of the Martyrs" ("Rawdat al-Shuhadā") (c. 1503), the magnum opus of Kamāl al-Dīn Ḥusayn Wā'iz Kāshīfī. According to this work, Husayn observed that Shamīr's teeth had turned into those of a pig and that his chest was afflicted with leprosy***.</p>

** The name of Shamīr was written as Shibr in the *Abū Muslim-nāma*, too. See Jean Calmard, "Popular Literature under the Safavids", 2003, p. 318.

***Kamāl al-Dīn Ḥusayn Wā'iz Kāshīfī, *Rawdat al-Shuhadā*, Lucknow, Munshi Newal Kishore, 1873.

Brakel's edition of HMH	OL/OP	GA	Additional Comments
<p>Chapter 25: (a) Upon the death of Husayn, Ja'far the son of Abū Bakar stayed in Mecca where he performed the <i>tawāf</i>. There he saw a masked man who was seeking God's forgiveness as he had wanted to get the jewel on the belt of Husayn's corpse.</p> <p>(b) He cut off both Husayn's hands; then he heard a voice.</p> <p>(c) Angels washed Husayn's corpse.</p> <p>(d) The appearance of Noah, Abraham, Ismail, Miriam, Eva, Sarah, Hagar, and Isaac.</p>	<p>“Va Ja'far Muhammad Sādiq guft ān rūz dar Makka būdam ke Amīr al-Mu'minīn Ḥusayn Shahādat yāft. Dawr-i tawāf-i Ka'ba āvāzī shanīdam ki mardī mīguft yā Rabb ma-rā bi-yāmurz [...] dīdam shakhṣī nīmī-rūy-i ū siyāh gashta va zār-zār migiryad [...] [guft]man rikāb-dār-i Amīr al-Mu'minīn Ḥusayn va dahum az māh-i Muḥarram rūz-i ‘Āshūrā Ḥusayn shahīd shud va dar izār-i band-i Amīr al-Mu'minīn Husayn gowhar-i qaymati-yi kharāj-i vilāyat būd va marātama'-i ān gowhar dar sar uftād ki az band-i Amīr al-Mu'minīn bistānam [...] shayṭān dar khātīr talqīn bi-kard ki dast bi-bur sar-i angushtān, kārd kashīdam bar dast bar andām va judā kardam [...] [ṣadāy guft]: natarsīd va az fardāyi Qiyāmat va az rūy-i peyghāmbar (saw) sharm nadāshīt [...] fowjī az āsimān firishtigān firūd āmadand va basātī gustardand [...] va tan-i Amīr al-Mu'minīn Husayn rā bi-mushk va za'farān va gulgāb bi-shustand [...] [chahār howdaj dar ta'ziyat-i Husayn] dar ān [...] mihtar Ādam va Ḥawwā būd, va dar duyyum [...] mihtar Nūh būd va dar siyyum [...] Ibrāhīm va bībī Sārah būd va dar chahārrūm peyghāmbar” (“And Ja'far Muhammad Sādiq said: ‘I was in Mecca the day when Husayn was martyred. While performing <i>tawāf</i>, I heard a man's voice saying, ‘O my lord, forgive me’ [...] I observed a man, half of whose face was black, crying [...] [he said] ‘I am the servant of Husayn and it was on the 10th of the month of Muḥarram, the day of ‘Āshūrā, that Husayn was martyred. And there was a wealthy jewel of the caliph in the loincloth of Husayn's belt and I was tempted to take it from Husayn's belt [...] Satan tempted me to cut the hand and fingers (?). I took a knife and chopped it [...] [a voice said]: ‘won't you be afraid and won't</p>	<p>“Va Ja'far Muhammad Sādiq guft ān rūz dar Makka būdam ke Amīr al-Mu'minīn Husayn Shahādat yāftih, az tawāf-i Ka'ba āvāzī shanīdam ki mardī mīguft bāri bar man rahmat kun. Nazdīk-i u shudam [...] ki shakhṣī nīmī-rūy siyāh gashta va zārī mīkard [...] Muḥarram rūz-i ‘Āshūrā Husayn shahid shud va dar izār-i band-i Amīr al-Mu'minīn Husayn gouhar-i qaymati-yi kharāj-i vilāyat būd va marātama'-i ān gouhar dar sar uftād ki az band-i Amīr al-Mu'minīn bistānam [...] shayṭān dar khātīr talqīn bi-kard ki dast bi-bur sar-i angushtān, kārd kashīdam bar dast bar andām va judā kardam [...] [ṣadāy guft]: natarsīd va az farda-yi Qiyāmat va az rūy-i peyghāmbar (saw) sharm nadāshīt [...] fowjī az āsimān firishtigān firūd āmadand va basātī gustardand [...] va tan-i Amīr al-Mu'minīn Husayn ra bi-mushk va za'farān shustand [...] [dar ta'ziyat-i Husayn] dar ān basātī mihtar Ādam va Ḥawwā būd, va dar duyyum [...] mihtar Nūh būd va dar siyyum [...] Ibrāhīm va bībī Sārah būd va dar chahārrūm peyghāmbar” (“And Ja'far Muhammad Sādiq said: ‘I was in Mecca the day when Husayn was martyred. While performing <i>tawāf</i>, I heard a man's voice saying, ‘O my lord, forgive me’ [...] I observed a man, half of whose face was black, crying [...] [he said] ‘I am the servant of Husayn and it was on the 10th of the month of Muḥarram, the day of ‘Āshūrā, that Husayn was martyred. And there was a wealthy jewel of the caliph in the loincloth of Husayn's belt and I was tempted to take it from Husayn's belt [...] Satan tempted me to cut the hand and fingers (?). I took a knife and chopped it [...] [a voice said]: ‘won't you be afraid and won't</p>	<p>This story is found in almost every version of DMJ. As Brakel says: Ja'far bin Abī Bakar in the Malay text is “of course a corruption of Ja'far as-Sadiq b. Muhammad al-Bakir (the famous Imam), as confirmed by the Persian account” of Add. 8149 and other DMJ versions.</p>

Brakel's edition of <i>HMH</i>	OL/OP	GA	Additional Comments
	<p>to take it from Husayn's belt [...] Satan tempted me to cut the hand and fingers (?). I took a knife and chopped it [...] [a voice said]: 'won't you be afraid and won't you the Day of Judgment when facing the Prophet?' [...] a group of angels came down from heaven and began a feast [...] and washed the corpse of Husayn with mushk and saffron and rosewater [four <i>howdah</i> come to commemorate his death]. At this event Prophet Adam and Hawwa, second Noah, third Abraham and Sarah, and fourth the Prophet himself were in attendance").</p>	<p>you be embarrassed on the Day of Judgment when facing the Prophet?' [...] a group of angels came down from heaven and began a feast [...] and washed the corpse of Husayn with mushk and saffron [to commemorate his death]. At that event Prophet Adam and Hawwa, second Noah, third Abraham and bibi Sarah and fourth the Prophet himself were in attendance").</p>	
<p>Chapter 26: (a) Angels, along with Adam, Khadija, Fatimah, and Mary paid the final honours to Husayn's corpse. (b) The women in Husayn's army were captured by Yazīd's army. (c) A believer in Damascus left the city and saw the women of the Prophet's family having their veils removed. (d) The believer introduced himself as Saleh.</p>	<p>"Dar-īn miyān muhāfah-yi Fātimah Zahrā az havā peydā gasht va firishtigān anbūh anbūh muhāfah va jumla jāmi-hā-yi mātam pūshīda [...] ham da-rīn miyān 'Alī Murtadā bā firishtigān zārī-kunān rasīd, tan-i farzand rā kinār girift [...] va khalq-i Amīr al-Mu'minīn rā bigirifstand [...] mardī dar Dimishq in vāqi' khāndān shanīd, chandān bigirīst az girya bī-hūsh shud. Chun be-hūsh bāz-āmad bīrūn-i shahr shud dīd Ahl-i Bayt-i nubuwat rā sarhā-birahna va piyāda mī-ārand, Ahl Bayt Ḥusayn chun ān mard rā mihrabān dīdand pursīdand tu kīstī guft man dustdār-i khāndān-i Peyghāmbar-i khudāy-am, guftand chi nām dārī? Gut nām-i man Ṣālih ast [...]" ("In the meantime, the <i>howdah</i> of Fātimah Zahra appeared in the sky and many angels were consumed with grief [...] in the meantime, 'Alī Murtadā, crying, arrived with the angels and hugged his son's corpse [...] and the followers of Husayn were imprisoned [...] a man in Damascus heard what happened, and he cried so much he became unconscious. After he recovered he came out and saw the People of the Prophet's House coming, being un-veiled while they were walking [...] when</p>	<p>"Dar-īn miyān muhāfah-yi Fātimah Zahrā az havā peydā gasht va firishtigān anbūh anbūh muhāfah va jumla jāmi-hā-yi mātam pūshīda [...] ham da-rīn miyān 'Alī Murtadā bā firishtigān zārī-kunān rasīd, tan-i farzand rā kinār girift [...] va khalq-i Amīr al-Mu'minīn rā bigirifstand [...] mardī dar Dimishq in vāqi' khāndān shanīd, chandān bigirīst az girya bī-hūsh shud. Chun be-hūsh bāz-āmad bīrūn-i shahr shud dīd Ahl-i Bayt-i nubuwat rā sarhā-birahna va piyāda mī-ārand, Ahl Bayt Ḥusayn chun ān mard rā mihrabān dīdand pursīdand tu kīstī guft man dustdār-i khāndān-i Peyghāmbar-i khudāy-am, guftand chi nām dārī? Gut nām-i man Ṣālih ast [...]" ("In the meantime, the <i>howdah</i> of Fātimah Zahra appeared in the sky and many angels were consumed with grief [...] in the meantime, 'Alī Murtadā, crying, arrived with the angels and hugged his son's corpse [...] and the followers of Husayn were imprisoned [...] a man in Damascus heard what happened, and he cried so much he became unconscious. After he recovered he came out and saw the People of the Prophet's House coming, being un-veiled while they were walking [...] when</p>	<p>Although GA is silent on the role of Ṣālih, NP presents it as very similar to that in other <i>DMJ</i>'s as well as Add. 8149 and Malay <i>HMHs</i>. In most <i>DMJ</i> versions, following the incarceration of Husayn's family the story of a monk who was asked to hold the head of Husayn overnight is told, which is also not in the Malay edition of Brakel.</p>

Brakel's edition of <i>HMH</i>	OL/OP	GA	Additional Comments
	the Household of Husayn found the man they asked him: ‘Who are you?’ He replied that he was a friend of the family of the Prophet of Islam. They asked, ‘what is your name?’ He said, ‘my name is <i>Sāliḥ</i> [...]”)		

As such, it can be said that all the similarities between Brakel’s *HMH* and Add. 8149 can be found in the different versions of *DMJ*.

Part II

Brakel noted that similarities between *HMH* and the Persian manuscript (Add. 8149) are also present in part II. As mentioned earlier, he said that chapters 1-17 and 20-21 of the second part are found in MS Add. 8149 in the British Library. And this is also the case when *HMH* and *DMJ* are compared. For instance, the first chapter of part II of Add. 8149, as well as of GA and NP, starts by telling how a servant informed Muhammad Hanafiyah of the death of his brother(s), after which Muhammad Hanafiyah tore his clothes.⁴⁵

Also, in both GA and NP, the names of people and events are largely similar to those of *HMH*; for instance, in both the Persian and Malay versions, Muhammad Hanafiyah sent messages to his brothers who were living in various parts of the world:

- GA: “*maktūb bi-jānib-i Mashīb bi-Kāqah nivisht va dar ‘Irāq firistād [...] yik maktūb bar Tughān Turk, Amīr-i Tabrīz nivishta [...] va yik maktūb bi-taraf-i ‘Umar ‘Alī, Tālib- va ‘Aqīl ‘Alī nivishta dar Shām firistād [...]*” (“[he] sent letters to Mashīb bi-Kāqah (?) in Iraq [...] one letter [was] sent to Tughān Turk, the ruler of Tabriz [...] and one letter he sent to ‘Umar ‘Alī, Tālib ‘Alī and ‘Aqīl ‘Alī in Shām [...]”).
- NP: “[Muhammad Hanīfah] farmūd ki tā dabīr-i dānā [...] maktūb bi-jānibi-i Masīb Qa‘qa‘ah bi-nivīsad [...] nāma bi jānib-i Masīb Qa‘qa‘ah dar ‘Irāqfiristāda shud, [...] va yik maktūb bi-jānib-i Ibrāhīm [Ashtar] nivishta karda dar shahr-i Najaffiristād [...] maktūb-i siyyum bi jānibi-i Tughān Turk samt-i Tabrīz nivishta kard [...] va maktūb-i chahārum bi-jānib-i [...] ‘Umar ‘Alī, Matlab ‘Alī va ‘Aqīl ‘Alī dar Shām firistād [...]” (“[He] told his wise secretary to write a letter to Masīb Qa‘qa‘ah [...] the letter was sent to Masīb Qa‘qa‘ah in Iraq [...]”).

45. L.F. Brakel (b), p. 51.

and one letter was written to Ibrāhīm [Ashtar] and sent to Najaf [...] the third letter was written to Tughān-i Turk in Tabriz [...] and the forth one was sent to ‘Umar ‘Alī, Maṭlab ‘Alī and ‘Aqīl ‘Alī in Shām [...]).

- HMH: “[...] sembilan kami bersaudara: seorang namanya Umar Ali [...] Talib Ali, Akil Ali benua Baghdad [...] Sebermula anak-anakan bapaku Syahi Mardan Ali, Masib Kaka namanya, [...] benua Irak [...] Bermula Ibrahim Astar, anak raja benua Tuj‘ah [...] Tughan Turk dan Mughan Turk, benua Tabriz [...]”⁴⁶ (“[Muhammad Hanafiyyah and ‘Alī Akbar] addressed our [i.e. their] nine brothers: ‘Umar ‘Alī, Ṭalib ‘Alī and Aqīl ‘Alī in Baghdād [...] the son of my father, Shah Mardan Ali, whose name is Masib Kaka [...] in Iraq [...] Ibrāhīm Astar, the son of the king of Tuj‘ah [...] Tughan Turk and Mughan Turk from Tabriz”).

It seems that Mughan Turk, who accompanies Tughan Turk in the revenge story in HMH is known as Sayalān/Saylān Turk in GA and Asad Turk in NP.

There is yet another similarity: the animals that appear in both HMH and DMJ are the same: e.g. horse, elephant, camel, etc. Furthermore, the names of the allies of Yazīd, Marwān and ‘Utbah b. Walīd are largely similar:

- GA: *Khāqān-i Chīn, Ḥabashī* (from “Khaqan of China and Abyssinia”)
- NP: *Khāqān-i Chīn; Zang-bār, Ḥabashī* (from “Khaqan of China, Zanzibar and Abyssinia”)
- HMH: *Feringgi, Cina, Habsi, Zanggi* (Franks [Portuguese(?)], China, Abyssinia, Zanzibar)

Although the Franks are not listed as allies of Yazīd in the versions of DMJ here examined, the rest of the story in GA calls the enemy of Muhammad Hanafiyyah *Khārijī-ān*, which means “Franks.”

B) Common Points between DMJ and HMH which are NOT found in Add. 8149

Brakel stated that chapters 1 and 5-20 of part I and chapters 18-19 and 22 of part II of the Malay HMH are not found in the Persian manuscript Add. 8149. However, it will be seen that the stories from these Malay chapters are, on the other hand, found in the DMJ versions. Examples include:

46. Ibid., pp. 206-207.

Part I

Brakel's edition of <i>HMH</i>	GA	Additional Comments
Chapter 1: Muḥammad is unable to recite but Gabriel instructs him to do so. It is expressed that Gabriel is henceforth as a brother to the Prophet.	“[...] ey farzandānam man dar aşl nivishtan nimidānam [...] Jibra’ıl ‘alayh al-salām dar-rasīd” (“O my children, I, indeed, cannot read and write [...] Gabriel then came”).	Muhammad’s illiteracy is clearly explained in GA when Hassan and Husayn show their handwriting to Muḥammad. Also, throughout OP, Muḥammad frequently addresses Gabriel as his brother (<i>barādar/akhbār</i>).
Chapter 6: Muhammad becomes ill; his close companions understand about the approaching death of the Prophet; the Companions’ responsibilities during the funeral are detailed.	“Chun hadrat-i risālat panāh rā nīz shahādat rūzī gardānd bi-sabab-i zahr dādan [...] zahr rā farmān shud dar pāshna-yi pāy bāsh, tā sar-i vaqt-i vafāt, Haqq Ta‘alā zahr rā dar vujūd-i mihtar-i ‘ālam bi-junbānad va az ān sabab shahid shud” (“Whereas the martyrdom of the Prophet by poison was predetermined ... the poison was ordered to stay in the heel of the Prophet until the time of death, when God Almighty allowed the flow of the poison into the body of the Prophet; due to that poison, the Prophet was martyred”).	Although <i>DMJ</i> talks about the death of Muḥammad, its quality differs from that of <i>HMH</i> . However, the GA ms. starts with a qur’anic verse about martyrdom: “And do not say about those who are killed in the way of Allah, ‘They are dead.’ Rather, they are alive, but you perceive [it] not”. Later, it talks about the death/killing of the Companions and the first four caliphs, whose names and deaths are mentioned in the 6th, 9th, 13th, 14th, 15th, and other chapters of part I of <i>HMH</i> . Nonetheless, different stories about the death of Muḥammad and the Companions’ roles are found in other chapters of <i>DMJ</i> , which will be discussed in subsequent studies.
Chapters 8 and 9: the death of Fātimah after seeing her father, Muḥammad, in a dream; how ‘Alī and his sons buried Fātimah; the Companion’s demand for the body; how ‘Alī “became furious and put on battle-dress [...]”, as well as the Prophet’s recommendation to Abū Bakr that “all of mankind together was no match for ‘Alī when dressed like this.”	“Mu‘āwiya guft [...] Rasūl farmūd ana Madīnah al-ilm wa ‘Aliyyun bābu-hā [...]” (“Mu‘āwiya said [...] the Prophet (peace be upon him) said that ‘I am the city of science and ‘Alī is its door’”).	Although the death of Fātimah and her funeral are not discussed in this chapter of <i>DMJ</i> , the story is found in another <i>hikāyat</i> of <i>DMJ</i> entitled “on the story of ‘Alī and Fātimah”. In this <i>hikāyat</i> , Fātimah first dreamed about her father and then she died. However, interestingly, all the Companions were allowed to carry the coffin of Fātimah, a point which is mentioned in Brakel’s commentary. The only prophetic <i>hadīth</i> in GA regarding ‘Alī relates to his knowledge, which is expressed by Mu‘āwiya to his fellows.
Chapter 12: Shahr-Banū wanted to choose her husband; she rejected Hassan because he was a polygamist.	“Imām Hassan zanān-i bisyār dāsht va rahā karda būd; guyand haftād-u du tan zan karda [...]” (“Imām Hassan had many wives and he left them/divorced them; it is said that he had 72 wives [...]”).	GA does not refer to the Ḥassan’s interest in Shahr-Bānū; however, there are several references to his polygamous lifestyle, which caused his wife to give him a poisoned drink.

Part II

Brakel's edition of <i>HMH</i> in Part II	GA	Additional Comments
Chapter 18 “Tughan Turk and Mughan Turk had set out to intercept the army of the Zanggi”	“Va Tughān-i Turk va Sayalān-i/ Saylān-i Turk bā chihil hizār savār muqābil-i Ḥabashī shudand” (“And Tughan Turk and Sayalān/ Saylān Turk, along with their 40,000-strong army, intercepted the army of Abyssinia”).	
Chapter 19: A mighty battle between Yazīd and Muḥammad Ḥanafiyah and “the fighting became still more violent”	“Va Amīr al-Mu'minīn Muḥammad Ḥanafiyah raḍī Allāh 'anhu jānib-i Dimishq ravān shudand va Yazīdān dah lak savār būd va bā ān-hā dar maydān dar-āmadand va jang mī-kardand va du pās-i rūz tīgh rafta” (“And Muḥammad Ḥanafiyah (may God be pleased with him) moved towards Damascus. The followers of Yazīd were in ten groups, and they encountered them on the battlefield and they fought and attacked each other with swords for two days.”)	

Further Discussion of Earlier Literature

Discussion of Earlier Arguments

The above sections have tried to show the strong connection between *DMJ* and *HMH*. However, this section provides readers with more analysis of recent literature:

1. The references to Tughan Turk, the Emir of Tabriz, in *DMJ*'s 31st chapter on the death of Hassan and Husayn confirms the claim of both Brakel and Bausani that this story must originally have been written when Tabriz was the capital of Persia under Ghaza Khān in the 13th and early 14th century⁴⁷. Also, the name of Zahrāb as the one who killed Husayn's infant, as found in the *DMJ* copy in Michigan, had been already mentioned in Firdawsī's *Shāh-nāma*. A couplet by Sa'dī

47. Brakel (a), pp. 54-55.

is also found in *DMJ*'s manuscripts. These details put together help us to conclude that *DMJ* was probably composed in the 13th century.

2. As mentioned above, this article seeks only to uncover the possible origins of *HMH*, rather than to discuss the process by which it was translated from Persian or the production of *HMH* and additions made by Malay scribes. However, it should be noted that *DMJ*'s account of Hassan and Ḥusayn's death and of Muḥammad Hanafiyah may disagree with both Brakel and Braginsky, particularly in the second part.
 - a. Brakel stated that he was unable to find a parallel for [I4:] how Mu'āwiya's son, Yazīd, was conceived. As such, he stated that *HMH* "exempted Mu'āwiya from any blame. Yazīd is reviled again and again because of his illegitimate birth [...]."⁴⁸
 - b. Braginsky argued that:

Another peculiarity of the tale, which is largely a Malay innovation, is the strict division of its characters into two camps. The first of them, headed by Muḥammad Hanafiyah, is connected with the divine world, as is indicated by prophetic dreams of the main hero and wonderful events that happen to him. The second, headed by Yazīd, is connected with the demonic world, as is testified to, for instance, by Yazīd's begetting of Mu'awiah, poisoned by a scorpion's venom, and an old black Ethiopian woman [...].⁴⁹

These scholars believed that the episode of Mu'āwiya and the scorpion was not found in Persian sources. Yet, as seen previously, Yazīd's connection "with the demonic world" is clearly shown in the *DMJ* mss.; indeed, all available *DMJ* manuscripts state that Mu'āwiya was poisoned by a scorpion's (*kazhdum*) venom and that then, to cure himself, he was advised to have sex with a woman, an event which ultimately led to the birth of Yazīd. GA in particular presents Yazīd's mother as an insignificant female slave (*kanīzak*). Interestingly, this infelicitous image of Yazīd's birth is also seen on fl. 51 of a poetic Bengali version of *Jang-nāma-i Imām Husayn* (Isl. Ms. 853), preserved in the special collections of the University of Michigan.

It is true that *HMH* tried to portray Mu'āwiya as a faithful Companion of Muḥammad, although it did not come to the attention of earlier scholars that part I of the *DMJ* mss. in general, and of the GA in particular, is replete with stories that exempt Mu'āwiya from any wrongdoing. For instance, on fol. 132 of GA, there is a report that highlights Yazīd's mistake and then says:

"[...] in makr-i Yazīd būd va ba'dī bar Mu'āwiya idāfat mīkunand, bizih-kār mīshavand zīrā-ki Mu'āwiya az kibār-i Sahābah būd va kātib-i vahy būd va Rasūl Allāh 'Alayh wa-sallam gufī harkas bi-dhikr-i nīk yād kunad ašhāb-i man, ū rā ast bihisht pas har-ki Mu'āwiya rā bi badī yād kunad ū bizih-kār shavad [...]" ("it was a trick played by

48. Brakel (b), p. 7.

49. Braginsky, 2005, p. 183.

Yazīd, however, one which some people ascribed to Mu‘āwiya, though they are sinners, as Mu‘āwiya was one of the Companions and the writer of the revelation, and the Prophet of God said ‘whoever remembers my Companions well, he deserves Paradise’; thus, anyone who remembers Mu‘āwiya badly is a sinner [...]).

Brakel also agreed that only an Acehnese manuscript—Or. 8667—mentions both Yazīd and Mu‘āwiya “as fellow Muslims”. However, there is a point worth mentioning regarding GA: when Mu‘āwiya learned about the pregnancy of his female slave he wanted her to have an abortion because Yazīd was cursed, “however, the opinion of Sunnis is not to curse Yazīd, and this is the true opinion” (“*va qawl-i ahl-i Sunnat va Jamā‘at īn ast ki Yazīd rā la ‘nat nakunad ki hamīn sahīh ast*”).

Also, in both GA and NP manuscripts the Muhammad Hanafiyah section not only starts with a letter carried by the servant but it is also bolstered by a prophetic dream in which Muhammad told him:

(GA, fol. 149) “[...] ey farzandān, ū rā bikush ki man bā tu hastam va hīch khaṭā va uft va nikbatī bar tu nakhāhad rasīd va tu-rā fatḥ va nuṣrat khāhad shud” (“Oh my children, kill him [Yazīd] and know that I am with you and you will not receive blame, loss and misery, and you will be victorious [...]”).

(NP, fol. 495) “[...] ammā fatḥ va nuṣrat bi-nām-i nāmi-yi tu bar lawh-i azal nivishta-and va dar zadan-i dushman-i khānah-dān va asīr numūdan-i īshān dirang makun” (“but your conquering and victory has been carved on the eternity plate [or: on the plate of eternity], and do not be patient in beating and capturing the enemies of the family [...]”).

1. As mentioned earlier, Winstedt, Voorhoeve, and Brakel have all pointed out that some Malay versions of *HMH* are prefaced with another mystical story about the creation of Muhammad and his light, i.e. *Hikayat Nur Muhammad* (*HNM*), which is not found in Add. 8149. Indeed, they are still uncertain whether part I (the killings of Hassan and Husayn), part II (the Muhammad Hanafiyah revenge story), and *HNM* are found in one manuscript or whether both the Persian and Malay versions were “one unified text, consisting of two or more parts, or [...] two or more originally independent fragments which have been combined.”⁵⁰

To provide an answer to such uncertainties, and before referring to *DMJ*, Brakel’s statement should be examined:

In Acehnese literature these three [I. *HNM*; II *Hikayat Hasan dan Husain* (= part one); III *HMH* (= part two)] are still found separately. In Malay, one finds separate copies of the *HNM* (in many different redactions) but perhaps only one ms. of a separate *Hikayat Hasan dan Husain*, and as far as I know no separate mss. of the *Hikayat Muh. Hanafiyah* proper. II and III at least are translations from Persian, and they are already found combined in a ms. of the Persian original (Br. Mus. Add. 8149) [...] in our ms. however the beginning of III is clearly marked⁵¹.

50. Brakel (a), p. 16.

51. Ibid.

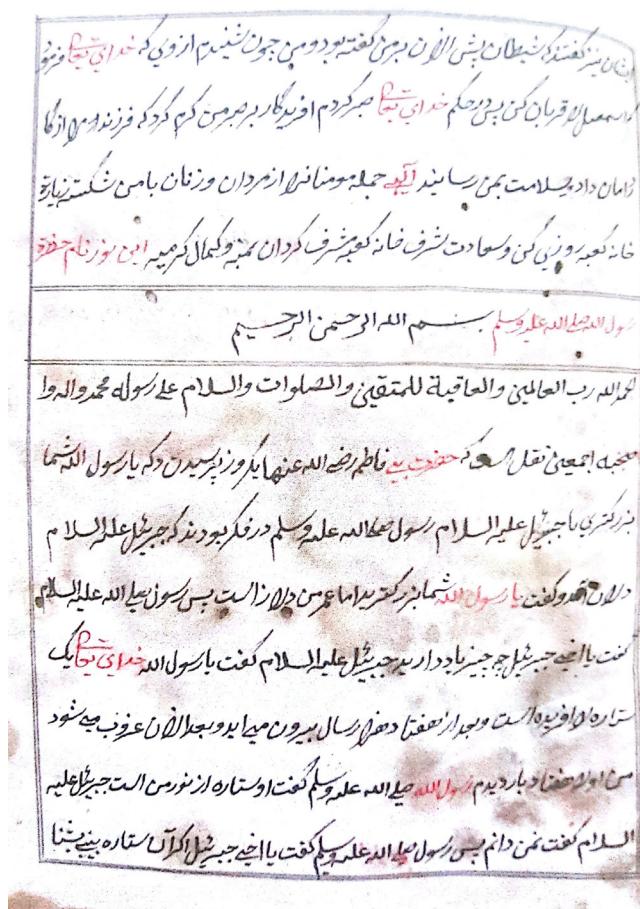
Now, let's discuss it as follows:

- a. The above structure described by Brakel is found in *DMJ*, as well. In most of the *DMJ* manuscripts, *The Story of the Killing of Hassan and Husayn* (part I) is separate from that of *Muhammad Hanafiyah* (part II). In some cases, however, as in GA and NP, it is not.
- b. Although there are many paragraphs in *DMJ* that highlight the creation of Muhammad, the GA ms. ends with a story called *Nūr-nāma-yi Ḥadrat-i Rasūl Allāh* ("The Book of the Light of the Prophet") (part III) (fols: 158-62), which is about the creation of Muhammad from light. This work is largely similar to the Persian, Arabic, and Malay *HNM*. It starts with a conversation between Gabriel and Muhammad in which the latter tells the former: *ī sitārah az nūr-i man ast* ("that star is from my light"). The story ends by mentioning the existence of 990 copies of *Nūr-nāma* during the lifetime of Muhammad Ghazālī and references to the particular attention that Mahmūd of Ghazna had paid to it (fig. 3).
- c. Also, other versions of *DMJ*, such as 14248, preserved in the library of the Parliament in Tehran, are bound with other stories, such as the *Wafāt-nāma*; these stories are largely similar to that of Muhammad's death as it appears in *HMH*.

Obviously, whether part I, II, and III are or are not separate can be seen in the various *DMJ* MSS. Malay scribes seem to have followed or been influenced by the way in which *DMJ* was written or copied by Muslims in Central or South Asia.

Final remarks

This study has shown how Muhammad Hanafiyah, whose role is frequently seen in the legendary part of the text (part II), was indigenized and established as the hero of a particular region. It shows that scribes tried to localize Muhammad Hanafiyah to make him one of their own, ruling a territory that was not limited to Boeniara. Moreover, although Brakel and other scholars opined that *HMH* is based on the Persian manuscript Add. 8149 in the British Library, this article has shown the possibility that *HMH* was dependent on the Persian text *DMJ*, which has been studied for the first time here. Interestingly enough, not only is *DMJ*'s story older but it is also more detailed than the Add. 8149 manuscript, so that those chapters of *HMH* whose parallels Brakel could not find in Add. 8149 do appear in *DMJ*. Furthermore, the final question posed by earlier scholars regarding the link between *HNM* and parts I and II of *HMH* has been answered, as *DMJ* manuscripts also place part I and II of *HMH* alongside *HNM*. Finally, this essay has tried to build on earlier literature to shed more light on the Persian origin of *HMH*.

Fig 3 – *Nur-nāmah-yi Ḥadrat-i Rasūl Allāh*, GA ms.

Appendix

The *DMJ* manuscripts available to the author

1. MS Or. 565, Leiden University Library, Leiden
2. MS Or. 877, Leiden University Library, Leiden
3. MS 170, Auckland Libraries, Auckland
4. MS 853, University of Michigan Special Collections Library, Michigan
5. Cod. Pers 187, Staatsbibliothek, Munich
6. Cod. Pers 188, Staatsbibliothek, Munich
7. MS 29, The National Library of Iran, Tehran
8. MS 258, The National Library of Iran, Tehran
9. MS 27641, The National Library of Iran, Tehran
10. MS 33429, The National Library of Iran, Tehran
11. MS 14248, Iranian Parliament Library, Tehran
12. MS 19495, Iranian Parliament Library, Tehran
13. MS 53, Talaat Library, Cairo
14. PAK-001-0770, Ganj Bakhsh, Islamabad
15. PAK-001-1043, Ganj Bakhsh, Islamabad
16. PAK-001-1471, Ganj Bakhsh, Islamabad
17. PAK-001-0487, Ganj Bakhsh, Islamabad
18. PAK-001-1180, Ganj Bakhsh, Islamabad
19. PAK-001-1506, Ganj Bakhsh, Islamabad
20. PAK-001-1666, Ganj Bakhsh, Islamabad
21. PAK-001-1498, Ganj Bakhsh, Islamabad
22. PAK-001-2123, Ganj Bakhsh, Islamabad

The Catalogue-based examination of *DMJ* Manuscripts

23. MS 40539, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
24. MS 40550, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
25. MS 40551, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
26. MS 27706, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
27. MS 46429, SOAS Library, London
28. MS 1959, Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien, Vienna
29. MS 26/1, Library of Dargah Aliyah Mahdaviyah, Palanpur, Gujarat
30. MS Corpus, No. 88, Libraries of the University and Colleges of Cambridge, Cambridge
31. MS Egerton 1026, British Museum (now British Library), London
32. Nos. 1762 and 1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, India Office Library, London
33. MS 40539, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad

34. MS 40550, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
35. MS 40551, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
36. MS 27706, Central Library of Astan Quds Razavi, Mashhad
37. Sh. 211, National Library of Tajikistan, Dushanbe
38. Sh. 201, National Library of Tajikistan, Dushanbe
39. Cod. 19, The Russian State Library/V. I. Lenin State Library of the USSR, Moscow
40. Cod. 20, The Russian State Library/ V. I. Lenin State Library of the USSR, Moscow
41. Cod. 2870, Academy of Sciences of Turkmenistan, Ashgabat
42. MS B 1006, The Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences/ Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences, Moscow
43. MS 12750, Mar 'ashi Najafi Library, Qum
44. MS 10680, Mar 'ashi Najafi Library, Qum
45. MS 54, McGill University Persian Manuscripts, Québec
46. MS 5777, Imam Sadiq University, Tehran
47. MS 544, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
48. MS 545, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
49. MS 546, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
50. MS 547, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
51. MS 548, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
52. MS 549, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
53. MS 550, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
54. MS 551, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan
55. MS 552, Nikolay Lobachevsky Scientific Library, Kazan

*M.C. RICKLEFS*¹

The perils of hybridity in 19th-century Java: Ronggawarsita's reputation, animated debates in *Bramartani*, and the probable origins of Javanese acrostics; with a postscript on Purwalēlana²

In mid-1866 a sequence of events led to an extraordinary exchange of correspondence in the Javanese weekly newspaper *Bramartani*. The death of his son left the paper's editor, the Indo-European F.W. Winter, in such despair that he evidently lost interest in, and gave up personal control of his paper. A friend contributed material to fill its pages, from which flowed a heated controversy that occupied much of the space in the publication for many weeks. Only in early February 1867 did Winter reassert control and bring the controversy to an end. In the meantime, it had revealed not only divisions about what, in the new colonial age in Java, constituted good literature, but also about what, in the pages of the new medium of a newspaper, constituted proper manners. The Surakarta poet Ronggawarsita (1802-73), now commonly regarded as the last of the great Javanese poets (*pujingga*), was not so regarded in 1866-7 and became a target of withering criticisms in *Bramartani*. Reading this correspondence probably also suggests, *en passant*, how the Javanese use of acrostics may have found its origins in a popular Dutch song.

In 19th-century Java, the elite, literate *priyayis* – a tiny proportion of the whole Javanese population – faced a rapidly changing cultural environment³.

1. Professor Emeritus, The Australian National University.

2. An earlier version of this paper was presented at an international symposium “On Hybrid Times” in Jakarta, 9-10 June 2012, sponsored by the Goethe Institute.

3. The general context of this period is discussed in my book *Polarising Javanese society: Islamic and other visions, c. 1830-1930* (Singapore: Singapore University Press; Honolulu: University of Hawai'i Press; Leiden: KITLV Press, 2007).

From the religious realm came reforming Islamic movements. These caused major changes in Javanese society but seem to have had little attraction for the *priyayis*. Indeed, by deepening the Islamisation of a part of Javanese society, these reform movements may have enhanced the social and cultural gulf between the *priyayis* and other social sectors. Of greater direct impact upon the *priyayis* were the new cultural experiences and horizons that accompanied Dutch colonial rule. We should remember that very many *priyayis* were employees of the colonial regime and that all had to accommodate themselves to the reality of its presence – unlike some religious leaders who sought to isolate themselves from or indeed resist that regime, often at the cost of their own freedom or lives.

Crucial insights into the changing cultural environment at the level of the literate elite may be had from the Javanese newspaper *Bramartani*. This began to be published in Surakarta in 1855, the first indigenous-language newspaper in what was one day to become the Republic of Indonesia. Its editorship remained for many years in the hands of the Winter family, who were of mixed European and Javanese descent and had worked as translators and cultural mediators in Surakarta since the late 18th century. Not until 1873 was there a Javanese editor of the paper, when F.L. Winter handed over to a local school teacher named Surana.⁴ The newspaper failed in 1856 but was revived in 1864, for several years thereafter using the title *Jurumartani*,⁵ but we will stick with *Bramartani* in this discussion to avoid confusion. The paper was published weekly, and sometimes biweekly, until 1932, one of the longest success stories in the history of early Indonesian journalism.

Other changes were also taking place in the world of literature. The very use of printing was a significant innovation. The Dutch missionary Carel Poensen, who lived for some 30 years in Kediri, noted in 1869 that those Javanese who could read classical Javanese verse (*macapat*) preferred to read it in hand-written manuscripts rather than in printed versions,⁶ but elsewhere the new world of print was embraced more enthusiastically, as we shall

4. *Bramartani* (hereafter *BM*) 1 May 1873, 3 July 1873. Surana was a teacher at the teacher-training school in Surakarta and was sent to the Netherlands for further education in 1874; *BM* 12 Mar. 1874.

5. Ahmat B. Adam, *The vernacular press and the emergence of modern Indonesian consciousness (1855-1913)* (Ithaca, New York: Cornell University Southeast Asian Program, 1995), pp. 16-19. Adam is wrong to treat *Bramartani* and *Jurumartani* as if they were different publications when he says (p. 19) that “the paper did not reappear until 1871.” Except for the change of masthead – which actually took place in 1870, not 1871 – they were the same newspaper, as will be seen in the discussion about its title below.

6. C. Poensen, “Bijdragen tot de kennis van den godsdienstigen en zedelijken toestand der Javanen: Eene beschouwing van den inhoud der Javaansche litteratuur,” Archief Raad voor de Zending (held in the Utrecht city archives, het Utrechts Archief) no. 261; also in *Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap* (with slightly different title), vol. 13 (1869), pp. 153-236 (esp. p. 154), 313-56; vol. 14 (1870), pp. 259-90.

see in the account of the correspondence in *Bramartani* below. *Bramartani* frequently serialised works in *macapat* verse – often from publications that were available for purchase at the printer’s shop – but most of the newspaper was in prose. Writing in prose may have been a challenging new literary task for some *priyayis*.

It was not only the printed newspaper and its prose format that represented change: equally revolutionary were new forms of *belles-lettres* and the ideas encapsulated in them. Behrend has written about the Yogyakarta Pangemanan (prince) Suryanagara (b. 1822, d. c. 1886), whose writings, done mainly in the period 1845–76, reflect “the accommodation of Dutch science, or perhaps better, the incorporation of certain European ways of thinking, within the larger world of Javanese thought.”⁷ Suryanagara’s works included “studies of language and literature and the associated arts of manuscript decoration, encyclopedic compendia of facts, *belles-lettres*, history and didactic/moralistic *piwulang*” and often included the innovation of glossaries of obscure vocabulary items, “in a sense desacralising the language of priest-poets and their fellow purveyors of secret meanings, the puppet masters.”⁸

Among the most famous of the purveyors of new forms of Javanese literature in which a certain European influence could be seen was Raden Ngabei Ronggawarsita (1802–73) of Surakarta, now remembered as the last of the great classical poets (*pujongga*). His works indeed include some that are regarded as classics of Javanese verse, above all his *Sérat Kalatidha*, to which we will return below. He collaborated with prince Mangkunagara IV (r. 1853–81), himself a major *littérateur*.⁹ But Ronggawarsita also wrote and published works in prose, and that challenged older Javanese perceptions of what good literature was. His most ambitious, innovative and contentious work was a pair of made-up historical chronicles which he entitled *Paramayoga* (The exalted age[?]) and *Pustakaraja Purwa* (Book of the kings of ancient times). These take the difference, which by then was recognised, between the Javanese lunar calendar and the Western solar calendar – with years that differed by 10–12 days from each other in length, and thus centuries that differed by three years – to concoct a fake double chronology beginning with a hypothetical year 1. Thus,

7. T.E. Behrend, “The writings of K.P.H. Suryanagara: Shifting paradigms in nineteenth-century Javanese thought and letters,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van de Koninklijk Instituut*, vol. 155/3, 1999, p. 404.

8. Ibid., pp. 390, 393, 406, 410.

9. See the four-volume collection of his works in Mangkunagara IV, *Sérat-Sérat anggitan-dalém Kangjéng Gusti Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara IV* (Jakarta: Kolép [Kolff], 1953). There is also a three-volume collection, also entitled *Sérat-Sérat anggitan-dalém Kangjéng Gusti Pangeran Adipati Ariya Mangkunagara IV*, edited by Th.G.Th. Pigeaud and published in Soerakarta by the Java Instituut in 1928.

something innovatively “scientific” – dating events and using two calendars to do so – was coupled to a vast collection of distinctly unscientific legends about Java’s past, to produce a voluminous new pseudo-historical work.

The earliest version we now know of *Pustakaraja Purwa* is in fact ascribed to Mangkunagara IV. This appears to have been written in the period 1853-8.¹⁰ When the version ascribed to Ronggawarsita was written is not known, and so far no detailed comparison has been made of the Mangkunagara IV and Ronggawarsita versions. Day thinks that Ronggawarsita did his version also in the 1850s, because the first reference to it is from 1855, when “a lady courtier recomposed or copied an unpublished section of the *Pustaka Raja* in verse.”¹¹ This could, however, have been taken from the Mangkunagara IV version. Ronggawarsita’s versions of *Paramayoga* and *Pustakaraja Purwa* were only published in full in 1884, both in Yogyakarta.

In 1866, Ronggawarsita’s work suddenly became a topic of discussion in *Bramartani*. Newspapers were an entirely new innovation and thus this new medium in itself offended no established literary norms in Javanese. But Javanese *belles-lettres* was a very different matter. There were long-standing traditions of writing literature in Java reaching back to Hindu-Javanese times and aesthetic standards were well developed and widely accepted. Since the time when Modern Javanese supplanted Old Javanese as the literary language, many thousands of manuscripts had been written – histories, romances, mystical speculations, and so on – and anything considered serious literature was written in verse.¹² Now Javanese *literati* began to experiment with writing prose and with new sorts of subject matter, which sparked debates about whether this was serious literature at all. *Bramartani* provided an innovative new platform for those debates. We will paraphrase this debate below and allow it to unfold in sequence, as readers of *Bramartani* followed it at the time.

In several issues of *Bramartani* in 1866, a writer named Raden Panji Puspawilaga filled the newspaper’s pages with serialised stories, written in prose, concerning one Raden Jaka Panirat in Kadilangu in the time of the 16th-century kingdom of Děmak, plus episodes from a work called *Cariyosipun Candhi Maling ing rēdi Kēihu* (the story of the thief’s temple

10. See Ricklefs, *Polarising Javanese society*, p. 147. This MS is Mangkunagara IV, *Sérat Pustakaraja*, written at the wish of Pakubuwana VII, containing several texts, including (pp. 1-73), *Sérat Pustakaraja* covering the years *surya sangkala* 1 to 800/ *candra sangkala* 1-824 and *Sérat Pustakaraja Puwara* for years 801-1400/825-1442; ending with the succession of Pakualam II, the exile of Pakubuwana VI and accession of Pakubuwana VII in *surya sangkala* 1705/ *candra sangkala* 1757 [AJ 1757/AD 1829-30]; the whole MS is [iv] + [589] pp. 31.5 x 19.5 cm; KITLV MS D Or.661, now held in Leiden University Library.

11. John Anthony Day, *Meanings of change in the poetry of nineteenth-century Java* (PhD dissertation, Cornell University, 1981) pp. 221-2.

12. Prose was used for translations from Arabic originals written in prose, for some other religious works, sometimes for date-lists (*babab sēngkala*), for mundane documents such as population lists, etc.

at Mount Kēthu) in the time of the pre-Mataram kingdom of Pěngging¹³. We will soon discover – as did the readers of *Bramartani* – that this writer was an adopted brother of Ronggawarsita whose work became a topic of discussion along with Ronggawarsita's.

Puspawilaga was already known, at least to some aficionados of Javanese literature. When A.B. Cohen Stuart published a text of the *Bratayuda* in 1860, he said that he was “inclined to ascribe” his MS “B” to “the invention of Radèn Panji Puspåwilågå.”¹⁴

Puspawilaga's link with Ronggawarsita was also evident; Cohen Stuart also had a MS ‘G’ consisting of “a few loose pages containing a part of the *Bratajudå Kawi* with explanation in Javanese prose, undertaken for me by the above-mentioned Radèn Panji Puspåwilågå, assisted by Radèn Ngabèi Rånggå Warsitå, the same who assisted Dr. Van der Vlis in interpreting the inscriptions of Soekoh and Tjetå.” The first part of “G” was, he wrote, “mostly based on the information of Rånggå Warsitå.” Cohen Stuart was not impressed with this material. He described the second part as “no more than a draft. [...] The reliability of the translation certainly leaves much to be desired. Generally it seems to be little more than a weak attempt to guess the meaning from a few known words or sounds, often even taken from a corrupted text, and supplemented or altered according to traditional conceptions. Not infrequently the interpretation itself seems to be devoid of all sound sense.”¹⁵ Cohen Stuart also found fault in the understandings of the late C.W. Winter, Sr. (d. 1859, the father of F.W. Winter), “the usual information-bank for anyone who wants to contribute something to Javanese language studies.” Again, Ronggawarsita was fingered as the ultimate source of the problem. Cohen Stuart said that Winter “often had to restrict himself to passing on the explanation of natives – particularly of Rånggå Warsitå, his teacher in *kawi* – for the accuracy of which he himself could not vouch, and which all too often were subject to the suspicion of having been made up or distorted to meet the needs of the local context.”¹⁶

Such doubts about Ronggawarsita's competence were also held by Javanese literati and soon erupted with considerable brio in the pages of *Bramartani*. Within a few weeks, someone named Wignya Panitisrastra of Kudus had a letter published in *Bramartani* which opened an exchange over several months concerning both Puspawilaga's works and those of Ronggawarsita. Several of those who contributed to this controversy used *noms de plume*. Wignya

13. Beginning, respectively, in BM 2 Aug. 1866 and 4 Oct. 1866, and continued in subsequent issues. I am unable to locate Mount Kēthu; it will be seen below that it was said to be in the Mangkunegaran domains.

14. A.B. Cohen Stuart (ed.), *Bråtå-Joedå, Indisch-Javaansch heldendicht* (Batavia: Lange & Co., 1860), vol. I, p. 24. I am grateful to an anonymous reader of an earlier version of this article for alerting me to Cohen Stuart's comments.

15. Ibid., pp. 25-6.

16. Ibid., p. 37.

Panitisrastra may have been such a pseudonym, for it means “wise, skilled in the study of literature” or “[...] in the (the book) *Panitisrastra*.¹⁷

Wignya Panitisrastra wrote¹⁸ that he had long heard of a *priyayi* in Surakarta named Ronggawarsita, who was famed for his command of *kawi* (i.e., Javanese literary language) and of many tales. But he professed amazement that there was not yet any confirmation that this fame was deserved. By contrast, Puspawilaga was clearly a master of literature, as one could see from the stories of Jaka Panirat and *Candhi Maling ing rēdi Kēthu* that he had contributed to *Bramartani*. Of Ronggawarsita, however, there was not yet clear evidence that he was competent in or enjoyed the study of literature. If that were true, there should have been evidence in *Bramartani* long before. Wignya Panitisrastra declared that he himself much loved literature.

Wignya Panitisrastra’s preference for the work of Puspawilaga over that of Ronggawarsita was, however, perhaps rather equivocal at this stage and would soon be abandoned, as we will see. In the same edition of *Bramartani*, his first letter was followed by a second also by him which expressed surprise about Puspawilaga’s *Cariyosipun Candhi Maling ing rēdi Kēthu*. He had never heard of such a work in his whole life, said Wignya Panitisrastra, being now 58 years old and having read almost all of Javanese literature – a remarkably immodest claim. So he had asked an older person where this story came from, for it was not to be found in *Babad Tanah Jawi* (Chronicle of the land of Java).¹⁹ He got the reply that probably Puspawilaga had taken it from a work by the Alfuru²⁰ or the Bugis, or had drawn upon his own memory, for many

¹⁷ Nancy Florida (email of 16 June 2018) has wondered whether this might be a pseudonym of Cakraningrat V/Purwalēlana, who was *bupati* of Kudus and had just published his own *Lampah-lampahipun*, discussed below. Against this is Wignya Panitisrastra’s claim to be 58 years old in 1866. But the suggestion remains intriguing.

¹⁸ BM 8 Nov. 1866. Two sets of transcriptions from *Bramartani* are available online that contain all or much of the correspondence discussed in this article. One was done from printed copies of the newspaper held in the National Library of Indonesia (PNRI). These transcriptions are available at <http://lampje.leidenuniv.nl/KITLV-docs/open/TS/Bramartani/bramartani.html>. The URL for this database has, however, changed from time to time; if this URL is non-functional, readers should search for the database by turning to <http://catalogue.leidenuniv.nl> and searching for “Bramartanie Javaansch dagblad.” Users are advised to consult the Introduction/Prakata to these materials before using them, for these translations contain errors of transcription and typing. They are ideally used as finding aids, guiding one to the original passages in the printed version. Most (but not all) of the exchange of correspondence discussed here is also available, in higher-quality transcriptions, at <http://www.sastraweb.org/arsip-dan-sejarah/61-umum/237-candhi-maling-jurumartani-1866-67-297>. The two versions are clearly based on differing sets of the newspaper, the sastraweb.org set perhaps being preserved in Surakarta, and some parts missing in one are found in the other; they have been used here to supplement each other.

¹⁹ This is a generic term for works generally beginning with Java’s mythical past and extending into historic times, such works having a variety of individual titles.

²⁰ In this period, this term was generally used for animist interior- or mountain-dwelling peoples of eastern Indonesian islands, sometimes including the indigenous people of West Papua. The implication here was that these were backward heathen. See J. Paulus *et al.* (eds.), *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* (2nd ed., 8 vols; ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff,

people dreamed of strange things and, upon waking, thought them to have been real. So Wignya Panitisrastra asked Puspawilaga directly (a) how old he was and (b) what work he did, for he wanted to know the source of the story *Cariyosipun Candhi Maling ing rēdi Kēthu*. If he was an older person like Wignya Panitisrastra himself, then – since older persons were obliged in all that they did to give good instruction to those who were younger – what was the instructional value of the story? He also asked whether Puspawilaga was the person who, it was said, had once travelled to the Netherlands, but he didn't think that was possible.

In November 1866 this initial correspondence was enlivened by the intervention of one Abdulatip of Sēmarang.²¹ I know nothing about this person except that he was prominent among those whose letters were published in *Bramartani* and his opinions were firmly held and bluntly expressed.²² He wrote that he had read Wignya Panitisrastra's disdain for Ronggawarsita's abilities, to which he had to respond. Ronggawarsita's abilities were famed throughout the world, he insisted. Wignya Panitisrastra's disdain rested on the fact that Ronggawarsita had never published anything in *Bramartani*, unlike Puspawilaga, whose writings often appeared there. But, wrote Abdulatip, Puspawilaga's writings that appeared in the newspaper did not demonstrate that he had full command of Javanese literary skills. As for Ronggawarsita, the fact that he did not publish in *Bramartani* did not show that he lacked those skills. He may have published there without using his true name. Abdulatip advised Wignya Panitisrastra to read the *Pustakaraja* which was published in the 1866 *Javaansche Almanak* (*sérat pananggalan taun 1866*).²³ There he would find the name Ronggawarsita, but it was hidden within the Javanese characters of the text. This was the work of a true *pujongga*, concealing his name from the masses. Abdulatip was surprised, he said, that Wignya Panitisrastra did not correct his ignorance and, with regard to his discussion of Puspawilaga, how little he knew of Javanese literary matters was again displayed, for Puspawilaga's writings were clearly identified as his own creations. Clearly the *Candhi Maling* story did not come from Puspawilaga's dreams, for Abdulatip claimed to have once encountered this story, but never so clearly told as in Puspawilaga's version.

This is the first reference in this correspondence to an innovation in Javanese letters, the use of an acrostic to reveal while simultaneously concealing the author's name. To the best of my knowledge acrostics are unknown in Javanese literature before this time. But where might the idea have originated

Leiden: E.J. Brill, 1917-39), vol. 1, p. 30.

21. BM 15 Nov. 1866.

22. See Ricklefs, *Polarising Javanese society*, pp. 158, 159, 170, 173-4.

23. I have not been able to consult a copy of this publication. It is safe to presume that what was published there was just an extract from *Pustakaraja Purwa*, which is a very large work.

of using an acrostic to conceal an author's name in the words of a work of literature? The answer almost surely lies in Ronggawarsita's interactions with Dutchmen and his interest in the modern innovations they might offer, of which the dual dating system of *Paramayoga* and *Pustakaraja Purwa* was an example. While acrostics are known in other cultures, the one most likely to have been known in colonial Java was to be found in the Dutch song *Het Wilhelmus*, popular then and later adopted as the Netherlands national anthem in 1932. This was in praise of William of Nassau, Prince of Orange. The first letter of each stanza spelled out his name in the form 'Willem van Nassov'. In colonial Java, we may assume, members of the Javanese elite were aware of such Dutch songs from their interaction with local Europeans. *Bramartani* of 10 January 1867, for example, welcomed the arrival of the new Governor-General (1866-72), Pieter Mijer, by invoking the then-Netherlands national anthem, in Javanese dubbed *Win Nerlanse Blut (Wien Neérlands Bloed)*. In the absence of any other obvious source of inspiration, we may reasonably conclude that knowledge of the *Wilhelmus* probably inspired Ronggawarsita to adopt the use of an acrostic for his own name.

Abdulatip claimed to have more information about Puspawilaga. He had indeed once been to Europe²⁴ and was now, Abdulatip estimated, around 60 years old. He was therefore older than Wignya Panitisrastra as well as more expert in literary matters. Abdulatip believed that Puspawilaga had also been to England, France and Germany, and on his trip home was hit by a storm in which most on board died. Puspawilaga survived and reached land at Novaya Zemlya, but some of this adventure was unclear to Abdulatip himself (and, we might add, this tale implied a distinctly strange itinerary on the way home). He had not met Puspawilaga often but had encountered him twice in the Puspanagaran (in Surakarta), and it was clear that he was a great *pujingga*. He spoke Javanese interspersed with Dutch, French, English and German words, but that was just based on Abdulatip's guesswork, for he himself did not understand those words.

Wignya Panitisrastra fired back a week later with a long letter in *Bramartani*.²⁵ He had read that Abdulatip disagreed with his questioning both the abilities of Ronggawarsita and the source of the *Candhi Maling* story. He now asked Abdulatip if he was not aware that one could judge someone's abilities only when the latter made his or her work available to others in *Bramartani* or elsewhere: how could one judge the abilities of someone who concealed his work? Abdulatip wished to defend the abilities of others

24. Puspawilaga went to the Netherlands in the company of the missionary J.A. Palm in 1835, where he oversaw the production of typefaces for Javanese script; Harry A. Poeze, with contributions from Cees van Dijk and Inge van der Meulen, *In het land van de overheeser I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950* (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde vol. 100; Dordrecht and Cinnaminson: Foris Publications, 1986), p. 15.

25. BM 22 Nov. 1866.

although his own abilities were not yet in evidence, Wignya Panitisrastra rudely added. Abdulatip was evidently amazed that Ronggawarsita could conceal his name in a stanza of verse as an acrostic; did Abdulatip not think that other persons knew where this name could be found? In Kudus there were many people who knew about Ronggawarsita's name being given there. Ronggawarsita's *Pustakaraja* as printed in the 1866 *Javaansche Almanak* was good, but not terribly impressive, for someone of minor capacity could write that. Abdulatip had asked how people in Kudus knew of Ronggawarsita's reputation, which Wignya Panitisrastra said was easy to explain. In Kudus, it was the *ulama* (implicitly, not the *priyayi*) who regarded Ronggawarsita as a man with comprehensive knowledge of *kawi* and of Javanese tales. There were several *hajis* who went to Surakarta in the month of Mulud to join in *dhikir Maulud* (group performance of Sufi litanies to commemorate the birth of the Prophet) in the Great Mosque there. While in Surakarta, one of them met Ronggawarsita, who received him hospitably and told and explicated the story of *Ande-ande lumut* (a folk tale set in the pre-Islamic age of Raden Panji), mixing his presentation with *kawi* words. The *haji* returned home to Kudus greatly impressed. But Wignya Panitisrastra dismissed this as being like a dog barking without biting, for the *haji* was praising Ronggawarsita's use of words of which the *haji* himself had no knowledge. How could *hajis* know *kawi* words, for this was not their task? This was like a dog barking. As for Abdulatip's arguments, where was there a person who wore clothes that fit someone else (i.e., why was Abdulatip responding on behalf of Ronggawarsita and Puspawilaga)? Wignya Panitisrastra had only queried the capacities of a person regarded as able when there was not yet any supporting evidence and had asked where the *Candhi Maling* story was from. Neither people in Kudus nor his acquaintances in the Mangkunegaran knew of this story, yet Mount Kéthu was in the Mangkunegaran domains: how was it possible that even the local people did not know of this tale? As for Abdulatip's tale of Puspawilaga ending up on Novaya Zemlya, off Russia's north coast, whereas the Netherlands faced the Atlantic, this Wignya Panitisrastra regarded as unbelievable. There was no point, he thought, in responding further to Abdulatip's letter, for readers would recognise that Abdulatip's mind was not entirely in order. Thus did Wignya Panitisrastra reach new heights of rudeness.

In the same issue of *Bramartani*,²⁶ Puspawilaga himself responded briefly to Wignya Panitisrastra. He said that an answer would take up much space over three issues of *Bramartani*; would not the *priyayi* from Kudus become bored? He asked what part of Kudus Wignya Panitisrastra was from, for at the age of 17, he had frequently gone on pilgrimage to the grave of Sunan Kudus, and he knew many of the *kyais*, *hajis* and senior *priyayis* there. He also knew many of the ancient stories of Kudus, some of which agreed with his own stories and

26. BM 22 Nov. 1866.

some of which did not. He went on to explain that in June 1866 the 17-year-old son of the editor of *Bramartani*, F.W. Winter, named Ehrens (*Erëns*), had died. His father was so greatly distressed that he lost his will to carry on with the newspaper. He asked Puspawilaga to provide a story that would take up pages in the paper, and he did so, merely as a way of helping a friend who had lost his child. So the story was true, not made up, but the date given there for the death of the *pandung sakti*²⁷ was wrong; it should have been (Šaka) 1201 (=AD 1279-80). As for its didactic value, it was about being true until death and intending only the good. He attached his own name to all his stories, he said, not liking to use an alias. There were no further details of his work or life and no tales of shipwreck and rescue on Novaya Zemlya.

Abdulatip returned to this increasingly testy exchange in *Bramartani* of 29 November 1866.²⁸ He was, he said, obliged to reply to Wignya Panitisrastra, whose own reply had not dealt with all the matters at issue. He did not deny that a person's abilities could only be judged from his writings. He had merely meant that Puspawilaga's writings in the pages of *Bramartani* did not constitute proof that he fully mastered Javanese literary skills, for these writings were not so amazing. Ronggawarsita's concealing of his name (as an acrostic) in a verse of his work merely showed that he had a character that was *andhap-asor* (self-affacing, a desirable style for elite gentlemen). But he suspected that, before he mentioned the presence of Ronggawarsita's name in the verse, Wignya Panitisrastra had not recognised that it was there. That was like the story of Columbus, who challenged his friends to make an egg stand upright upon a table. They all confessed that they could not. So Columbus tapped on the egg to flatten one end slightly and stood it upright. His friends all said that they could do that, too. Abdulatip said that he was reminded of this story upon observing Wignya Panitisrastra's clearly inadequate knowledge. Other feisty responses to the latter's letter flowed from Abdulatip's fluent pen. If Wignya Panitisrastra sought to judge the works of Ronggawarsita and Puspawilaga, he should ask himself whether he was able to make creations like the works of those two *priyayis*. In asking whether the *Candhi Maling* story came from Alfuru or Bugis sources or from his dreams, he was being rude, offending rules of proper conduct. And so on.

Puspawilaga had another letter published in the same issue of the newspaper, continuing his own response to Wignya Panitisrastra. He said that when the Susuhunan's court was still great (*agëng*, evidently meaning reaching back to pre-Islamic times or perhaps implying the time of Sultan Agung, r. 1613-1646), it had received reports about its lands, monuments, and such-like from across the length and breadth of its domains, which were written down and preserved by court officials. There was a vast number of such books of stories,

27. The thief with supernatural powers, but perhaps to be taken as a proper name: Pandung Sakti.

28. BM 29 Nov. 1866.

which were kept by the *pujonggas*. If the monarch wanted a book written, the *pujonggas* would do that and such books were called *babads* (chronicles) or didactic works (*sērat wēwulang*). The story of *Candhi Maling* had been left out of *babads* because it was a small and insignificant tale. Such stories that were left out of these other works, including those concerning royal or court secrets, were kept by the *pujonggas* in books called *Buk Nitik* or *Buk Nukil* (books of scrutiny or books of extracts).²⁹ Puspawilaga wrote that he knew a little of these stories because his mother was the daughter of a *pujongga*, so he was the grandson of a *pujongga*, but (expressing the self-deprecation appropriate to his cultural context) a most ignorant one, for there was another grandson of a *pujongga* in Surakarta more able than he, in the direct line of male descent who had inherited the supernatural inspiration of a poet (*wahyuning kapujanggan*). Puspawilaga said that he was a mere companion (*panakawan*) to such a person. This was Ronggawarsita, *abdi-dalēm ēmpujongga* (royal servant and master poet) of Surakarta.

Wignya Panitisrastra was back in the pages of *Bramartani* a week later³⁰, contributing to the increasing length of these letters. Now he and Abdulatip were both bristling at any question or choice of expression by the other. One can't help wondering how many readers of the newspaper found the exchange edifying or entertaining, despite its increasing similarity to a cock-fight. It is not clear to me whether Wignya Panitisrastra was now trying to reduce the heat or had decided that irony was a powerful debating ploy. In any case, he now added a new element to the combustible mix: the question of Dutch influence, which he brought up in order to deny it. Wignya Panitisrastra wrote that whether his own writing in *Bramartani* was equal to that of Puspawilaga or Ronggawarsita was for others to judge. In his view, he said, the latter two had no "Dutch ideas" (expressed in Dutch: *Hollandsē idhe*), that is to say, they did not think like Dutchmen but still thought like Javanese, even though – according to Abdulatip – Puspawilaga had been to Europe. On the basis of Puspawilaga's response, he now regarded Ronggawarsita as a *pujongga*. The reason he had asked where the *Candhi Maling* story came from was based on comments by elderly people in Kudus: after all, many able people commanded foreign languages, so probably Puspawilaga knew the Alfuru and Bugis languages. The reason he had dared to doubt Ronggawarsita's abilities was because he was disturbed by what he had been told by the *haji* who visited Ronggawarsita; Puspawilaga's explanation had now put him at ease. So he

29. On these "inside stories," see Theodore G.Th. Pigeaud, *Literature of Java: Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public collections in the Netherland* (4 vols; The Hague: Martinus Nijhoff; Leiden: Bibliotheca Universitatis Lugduni Batavorum; Leiden: Leiden University Press, 1967-80), vol. I, pp. 160-1.

30. BM 6 Dec. 1866.

asked of Puspawilaga and Ronggawarsita that they should continue to publish stories in *Bramartani* about villages, forests, mountains, waterways and so on which were not to be found in the *babads*.

A fourth correspondent now entered the fray: one Raden Laraitēm (evidently a female name) of Yogyakarta.³¹ She was increasingly amazed that Wignya Panitisrastra dared to question the abilities of Ronggawarsita and to challenge the writings of Puspawilaga. She would not be disturbed, however, if Wignya Panitisrastra's abilities exceeded those of Ronggawarsita and Puspawilaga. So she asked to be instructed by Wignya Panitisrastra about those Alfuru and Bugis works that might be the source of the *Candhi Maling* story. Was Wignya Panitisrastra a Bugis *priyayi* himself and could he report what was in those Bugis works? What was the work of Bugis *pujonggas* like? Laraitēm herself already knew that the story of *Candhi Maling* of Mount Kētu was taken from *Pustakaraja* and chronogram chronicles (*sērat babad sēngkala*). Where did the Alfuru and Bugis stories come from? She would like a clear answer which she would then compare with what she had learned from Ronggawarsita and Puspawilaga.

Puspawilaga contributed to the same issue of the paper, explaining to Wignya Panitisrastra about his own ancestry and the origin of his stories. He shared a grandfather with Ronggawarsita, he explained, who was a tenth-generation descendant of the Sultan of Pajang,³² this being the great Surakarta poet Raden Ngabei Yasadipura II, also known as Raden Tumēnggung Sastranagara. Puspawilaga was a cousin of Ronggawarsita, his mother being the younger sister of the latter's father. His own father died when he was young, so he was raised in the household of his grandfather Yasadipura II as the youngest son. As for those books of stories, very many were lost at the fall of Mataram (in 1677 to Trunajaya, when the court was plundered)³³ and of Kartasura (in 1742 – a time of terrible plundering twice over of court treasures).³⁴ When young, Puspawilaga had enjoyed reading the old stories, but Yasadipura II's own residence had burned down three times, taking books of stories and other works with it and leaving only fragments behind. He wrote that Wignya Panitisrastra seemed surprised that a thief should be buried (at *Candhi Maling*) but Puspawilaga then told of *Candhi*

31. Ibid.

32. On the ancestry of the Yasadipura line, as depicted by his descendants, see also Sasrasumarta, Sastrawaluya and Yasapuraya, *Tus Pajang: Pengētan lalampahanipun swargi Raden Ngabehi Yasadipura I, abdi-dalēm Kaliwon Pujongga ing Surakarta Adiningrat* (Surakarta: Pangēapan Budi Utama, 1939).

33. See M.C. Ricklefs, *War, culture and economy in Java: Asian and European imperialism in the early Kartasura period* (Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 1993), pp. 40-1. When Trunajaya's capital at Kediri was taken in 1678, whatever remained there of captured court treasures was looted by the victors; *ibid.*, pp. 53-4.

34. See M.C. Ricklefs, *The seen and unseen worlds in Java, 1726-1749: History, literature and Islam in the court of Pakubuwana II* (St. Leonards NSW: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin; Honolulu: University of Hawai'i Press, 1998), esp. pp. 268-273, 289-291, 336.

Asu at Mount Ijo, south of the Ratu Baka ruins, where a dog was buried, and other curious temple ruins.

A week later another new contestant entered the lists, one Raden Ngabei Sumanggengkarsa (evidently a pseudonym, meaning “whatever you wish”), who described himself as a *mantri kadipaten* (i.e. official in the crown prince’s service), but it is not clear of which court.³⁵ His contribution was from a different angle and probably meant to be ironic and witty. He expressed surprise that Wignya Panitisrastra still had his wits and fiery energy at his age. As for Ronggawarsita, he was clearly much superior to Wignya Panitisrastra (who might have been feeling a bit friendless by now).

Abdulatip – never, it seems, a man of great patience towards opponents – by now had even less. He wrote³⁶ that he would only reply briefly (something already established as highly improbable). The endless back-and-forth answers, he said, were like a dog barking at its own echo (about as rude a simile as one could use in Java). Wignya Panitisrastra argued like children who just ridicule each other, a sign of someone who was without character (*budi*).³⁷ Abdulatip reviewed their exchange at some length and then told Wignya Panitisrastra that his intelligence extended no further than the length of his nose.

Wignya Panitisrastra replied to this affront in the 20 December 1866 issue.³⁸ In response to the accusation that he was like a dog barking at its own echo, he said that Abdulatip was like thunder without rain. And perhaps he was infected by *Hollandsē idhe*, but Wignya Panitisrastra wasn’t yet sure of this. What argument did they have? It was Abdulatip who wanted to have an argument about things that were not his affair, not Wignya Panitisrastra. Abdulatip was just eager to have arguments (which, it must be said, his multiple letters to *Bramartani* on this and other subjects suggest was true). At the end of a longish letter, Wignya Panitisrastra said that he would respond to Abdulatip no further, for if he carried on he would be unable to reply to Sumanggengkarsa, who would be exasperated if his letter was not replied to.

Puspawilaga contributed a response to Wignya Panitisrastra in the same issue of the paper. He referred to Ronggawarsita as his relative (*sadherek kula*). As for the question of whether he had *Hollandsē idhe*, he replied that he was a pure Javanese who lived under the government of the Netherlands, but he worked in the court of Surakarta. If he wrote in Javanese of course he

35. BM 13 Dec. 1866.

36. Ibid.

37. *Budi* is a difficult term to translate, with a wide range of possible translations (all with positive connotations) in English such as “mind, intellect, reason, genius, wit, discretion, judgment, wisdom, aptitude, character, disposition, sense,” and also “desire, longing,” and so on. See J.F.C. Gericke and T. Roorda, *Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek* (Revised ed.; ed. A.C. Vreede and J.G.H. Gunning; 2 vols; Amsterdam: Johannes Müller; Leiden: E.J. Brill, 1901), vol. II, p. 694.

38. BM 20 Dec. 1866.

used Javanese thoughts, but if he wrote in Dutch (which would make him one of the few at that time who could) he used Dutch thought. Similarly, he used both Dutch and Javanese customs as appropriate. He illustrated his views with quotations from the didactic text *Niti Sruti*.³⁹ As for Wignya Panitisrastra's wish that he should continue to publish stories in *Bramartani*, Puspawilaga asked to be excused for he was already old, his strength for writing was gone and his eyes were failing.

The 20 December 1866 issue of the paper also printed an intervention into the debate by one Danasatata of Surakarta, a brave man stepping into dangerous middle ground. He referred to Abdulatip's simile of a dog barking at its own echo, chastising him for using such an improper, unmannerly expression. He went on at length on such issues, then said that he guessed from Abdulatip's (Arabic-sounding) name that he had probably been on the *hajj* to Mecca, and must therefore have a sound knowledge of Islam. So he should know that he should not be arrogant. He said that his own aim was to stop their debate about the abilities of Ronggawarsita and Puspawilaga. Otherwise the contestants would become enemies of those who praised these writers. He himself was clearly of the view that the two writers were outstanding. Abdulatip and Wignya Panitisrastra should recognise that Javanese *pujunggas*, unlike Dutch *pujunggas*,⁴⁰ could not publicly promote their fame. To Wignya Panitisrastra he said that his concern about the abilities of the Javanese *pujunggas* suggested that he was mocking them and was insulting. As for Abdulatip, he was replying frivolously, such as his claim that Puspawilaga had been to England, France, and Germany and had been shipwrecked and saved at Novaya Zemlya, and that Abdulatip himself had met Puspawilaga in the Puspanagaran, all of which was untrue.

Wignya Panitisrastra returned fire at Sumanggengkarsa in *Bramartani* of 27 December 1866.⁴¹ The latter had waffled on about the age of a person, but this was a discussion without merit, wrote Wignya Panitisrastra. Unable to resist an opportunity to be insulting, he said that Sumanggengkarsa seemed rather ignorant. Wignya Panitisrastra declared himself advanced in age but young in mind and character (*budi*).⁴² There followed another letter from Wignya Panitisrastra replying to Puspawilaga which raised the rudeness standard of this correspondence to new heights and invoked an old and negative ethnic stereotype.

³⁹. *Niti Sruti* (or *Sruti*) is a poem which, Pigeaud observes, was "very much studied at court by erudite gentlemen who took [...] pride in being well versed in classical Javanese literature [...]. The poem contains lessons especially referring to good behaviour and statecraft"; Pigeaud, *Literature of Java*, vol. 1, pp. 105-6.

⁴⁰. The idea that there could be European *pujunggas* may seem a bit odd to some readers. They may note that when A.B. Cohen Stuart died in 1876, *BM* 17 Feb. 1876 reported his death as the loss of "a great *pujungga* of Javanese, Malay etc. and other most difficult fields" (*pujungga agéng ngatasing témbung Jawi, Malajéng sapanuggilanipun utawi liyaning kamémétan*).

⁴¹. *BM* 27 Dec. 1866.

⁴². See n. 37 above.

“Awful! Awful!” he wrote, “I’ve been taken in by a shaved Chinese and am at my wit’s end!” He had read Puspawilaga’s letter in *Bramartani* of 20 December 1866 with its improper and unmannerly expressions. “O, taken in by a shaved Chinese! [...] You were said to be a competent person, but it has become abundantly clear that you are not up to it. O, misfortune, mate! I thought wrongly and have been taken in by a shaved Chinese!” After further intemperate comments, Wignya Panitisra went on, “O, taken in by a shaved Chinese! Now I know that your aspiration is just to be praised by the many, so you like being praised, but your conduct is off-course. Indeed, if you carry on you’ll become a laughing-stock.” And his final admonition to Puspawilaga: “Seeing that you are old, you should just concentrate on religious obligations. Don’t seek praise in this world, but rather save up goodness in the world to come.”

We should pause to explicate this phrase “taken in by a shaved Chinese” (*kalébon Cina gundhulan*, literally “entered by a shaved Chinese”). It is translated by Robson and Singgih Wibisono as “to get cheated”⁴³ and is found in no other dictionary so far as I am aware. The term “shaved Chinese” goes back to previous centuries and is found in Dutch East India Company documents. It was then used for someone of Chinese ethnicity who had cut off his queue, the Manchu-imposed sign of ethnic Chinese subservience, converted to Islam and usually adopted a Malay or Javanese name. The explanation and implication of Wignya Panitisra’s 19th-century usage is probably that – just as a “shaved Chinese” convert to Islam with a Javanese name was not really Javanese – so also Puspawilaga was not what he had seemed to be. He was not, as Wignya Panitisra claimed initially to have believed, a person of ability. The use of the exclamation *kalébon Cina gundhulan* thus tells us something about contemporary ethno-centrism in Java as well as about the coarse, abrupt, rude debate going on in *Bramartani* among aficionados of Javanese literature.

A new contestant also appeared in the issue of 27 December 1866, clearly using a pseudonym playing on the name Wignya (“skillful, wise”) by calling himself Tanpawignya (meaning “without skill, unwise” but also of course “without Wignya”). He had read the correspondence between Abdulatip and Wignya Panitisra. The latter, whom he familiarly (i.e. demeaningly) called “Mas Sastra,” was just being obstinate. He should go and study with Puspawilaga and Ronggawarsita.

And so the new year of 1867 opened with tempers evidently fraying on all sides and little even in the way of a veneer of gentlemanly conduct, all because Wignya Panitisra of Kudus had dared to ask questions about the writings of Puspawilaga and Ronggawarsita. In the first issue of the new

43. Stuart Robson and Singgih Wibisono, with the assistance of Yacinta Kurniasih, *Javanese-English dictionary* (Singapore: Periplus, 2002), p. 155.

year,⁴⁴ Wignya Panitisrastra replied to the letter from Danasatata. Danasatata had sought to reconcile Abdulatip and Wignya Panitisrastra, by asking the latter to cease questioning the abilities of Ronggawarsita and Puspawilaga. Wignya Panitisrastra thanked and praised him. But there was nothing wrong with discussing the abilities of someone, he said, and it was true that he rather doubted the quality of Ronggawarsita's work. As a lover of the truth, Wignya Panitisrastra would accept correction if he was wrong, without taking offense. He regarded Ronggawarsita as superior, given his publication (from *Pustakaraja* in the *Javaansche Almanak*) of 1866-1867, but this was not yet at the standard of a *pujongan*. Nevertheless, it was very different from the work of Puspawilaga, which was not up to standard, probably because he was old and becoming forgetful. Yet Wignya Panitisrastra hoped that Ronggawarsita and Puspawilaga would continue to publish their tales.

Wignya Panitisrastra also blasted Tanpawignya: "Lo," he wrote, "here comes another shaven-headed Chinese, if I am not mistaken, called Tanpawignya!" whose stupidity was, he said, evident from his letter. His name was also very stupid. Rather than Wignya Panitisrastra going off to study with Puspawilaga and Ronggawarsita, it was Tanpawignya who should study with Wignya Panitisrastra himself, as also should Laraitém and Sumanggengkarsa, all of whom were not up to their task.⁴⁵

In the same issue, Abdulatip, too, responded to the Danasatata intervention.⁴⁶ He said that he was not surprised that the latter was confused by the correspondence, with which he had only sought to test the intelligence of others. Danasatata's intervention was useless. After all, it was not he, Abdulatip, who questioned the standard of Ronggawarsita and Puspawilaga, whom he regarded as *pujonggas*. He had told the story of Puspawilaga's shipwreck on Novaya Zemlya and visit to Germany, France, etc., on the basis of what he had heard, and it was true that he had met Puspawilaga in the Puspanagaran.

A rather curious *kyai* appeared in these pages, too, possibly one who had something less than full mental capacities, to judge from the oddities of what he had to say. This was one Kyai Kerata (a very odd name) from Panaraga (still being written Pranaraga at this time). The letter⁴⁷ was written in *ngoko* ("low Javanese"), as one would speak to children, inferiors or close friends, whereas the bulk of this correspondence was in more proper *krama* ("high Javanese"). Kyai Kerata addressed Wignya Panitisrastra and Abdulatip as his grandchildren and explained that he was their most elderly ancestor. He admonished them to end their fruitless dispute and to stop hurting the feelings of Puspawilaga, who probably had to deal with the two of them arguing in his

44. BM 3 Jan. 1867.

45. Ibid.

46. Ibid.

47. Ibid.

dreams. He himself, said the *kyai*, had no aim but to fulfill his obligations as an older person and seek the welfare of his grandchildren. We may be sure – in case any reader of this is unsure – that Kyai Kerata of Panaraga was not in fact the grandfather of the central disputants.

Into the fray came yet another *priyayi*, as the whole business became something of a *cause célèbre*. A rather effusive Raden Tuménggung Purwawinata of Mataram (the Yogyakarta area) responded to Danasatata's intervention in the battle between Abdulatip and Wignya Panitisrastra. He praised Danasatata for his comments and expressed the hope that the court of Surakarta would long support officials proficient in Javanese literature, so that it would remain clear that the Susuhunan of Surakarta was still a great king. And he hoped that Allah would bless Danasatata.

In this same issue of *Bramartani*,⁴⁸ Ronggawarsita himself had a brief letter published but it had nothing to do with the controversy surrounding his reputation, from which he stayed entirely aloof. Rather, he conveyed a command from Susuhunan Pakubuwana IX (r. 1861–93) that the newspaper should change its name. We have been calling it *Bramartani* here because that was the name used during most of its history, but from its revival in 1864 to 11 August 1870 it in fact used the title *Jurumartani*. Now the Susuhunan wanted the title changed back to *Bramartani* because he intended to give the name *Jurumartani* to a prince of his court. F.W. Winter replied that the large characters needed for the new masthead would take time to be made. In fact the paper did not change its name back to *Bramartani* until over three years later. Ronggawarsita's letter, however, does confirm – if any uncertainty should exist about the matter – that he was well aware of *Bramartani* and, no doubt, must have followed the increasingly ill-tempered correspondence about his abilities.

Danasatata, who had sought to dampen the controversy, came back to the fray with a very long letter in the issue of 10 January 1867⁴⁹. He said that he only hoped to stop the conflict between Abdulatip and Wignya Panitisrastra about the abilities of Ronggawarsita and Puspawilaga. In Surakarta there were many who studied with or went to those two for explanations of words. Danasatata was averse to useless controversies, unless someone forced him to take part, as Abdulatip had done. But he said that because Abdulatip had used the exclamation “*i i i iya jagad dewa bathara*” (a Hindu-style expression of the kind found in the *wayang* theatre) he was obliged to ask whether Abdulatip was of Hindu descent. He wanted Abdulatip to tell him candidly, for Danasatata must be fearful if Abdulatip was a *pandhita* (a learned one, implicitly of a Hindu style), astrologer and magician with a command of spells that could do harm – undoubtedly meant as a sarcastic blast at the

48. Ibid.

49. BM 10 Jan. 1867.

pompous Abdulatip. Perhaps Abdulatip already realised that he might win in the conflict but be disliked by many. Indeed he had confessed to not knowing proper conduct. And so on it went, with Danasatata providing further lessons in proper behaviour. Wignya Panitisrastra replied to Danasatata in the same issue of the paper in predictable style.

A more interesting letter in the issue of 10 January 1867 was Puspawilaga's final contribution to the controversy, responding to Wignya Panitisrastra.⁵⁰ Here the elderly *pujongga* chastised Wignya Panitisrastra for his rude and unmannerly words. "If it needs to ask a question of someone, the Honoured Dutch Government which holds all of the East Indies, does not use such ill-mannered words," he wrote, invoking the ultimate example, it seems. "I am ending my replies to Wignya Panitisrastra: from now on, you can put on your weapons, like a thousand parakeets, published in *Bramartani*, but you will get no further response from me, for I'm going to take no notice of Wignya Panitisrastra." He advised others who had replied to Wignya Panitisrastra also to cease doing so, for they could not come to a reconciliation even if they went on for ten years. "The weapons used in reply are dirty words, as bad as faeces, published in *Bramartani* [...] Is this not improper in *Bramartani*, which is read by the elite of all of Java, that dirty words should appear there?," he asked.

In the issue of 17 January 1867, Danasatata responded to Wignya Panitisrastra.⁵¹ He repeated that he had no wish to be in conflict with Wignya Panitisrastra or Abdulatip. It was Wignya Panitisrastra who had begun the controversy by questioning the abilities of Ronggawarsita and Puspawilaga, and by using objectionable words. Then there was Abulatip who pretended to answer on behalf of those two *pujonggas* but did so frivolously, with false stories of Puspawilaga's adventures and claiming untruthfully to have met Puspawilaga. In fact, Puspawilaga had gone to Europe and returned to Java without mishap. Both Wignya Panitisrastra and Abulatip should heed the advice of Kyai Kerata. He didn't know whether the elderly *kyai* was right or not about Puspawilaga's dreams, but he thought that perhaps the old *kyai* liked telling jokes to amuse others.

Abdulatip was not yet done. In the same issue of the paper,⁵² he responded to Danasatata. If the latter's purpose was to bring the disagreement between Abdulatip and Wignya Panitisrastra to an end, then he should use rather more refined (*alus*) words (a somewhat ironic comment coming from Abdulatip, we may note). Everything Danasatata wrote was wrong. It was only Wignya Panitisrastra who had questioned the abilities of Ronggawarsita and Puspawilaga, whereas he, Abdulatip, had only come to the assistance of those two *pujonggas* who had been criticised without being at fault. Danasatata

50. Ibid.

51. BM 17 Jan. 1867.

52. Ibid.

asked whether he was of Hindu descent or had been a *dhalang* because he used the exclamation “*i i i iya jagad dewa bathara*,” but this was nonsense, for not only Hindus and *dhalangs* knew this phrase. Mobilising his own sarcasm, Abdulatip wrote that indeed he was of Hindu descent and had been a *dhalang* and wished to be a *pandhita*, astrologer and magician, so was Danasatata not now afraid to disagree with him? It was Danasatata whose words were crude and he understood nothing of what Abdulatip was expressing. All of this was expressed at excessive length and was, we may guess, for the readers of *Bramartani* of rapidly declining interest. Nevertheless, Abdulatip closed by promising that there was more to come.

At this late stage a professional scribe (*juru sērat*) intervened, one Jayakarsa.⁵³ He asked Wignya Panitisrastra to demonstrate his wisdom (*kawignyan*) by solving the riddles that he posed – riddling being a favourite game among Javanese. He ended by saying of Puspawilaga and Ronggawarsita, “those two *priyayis* are regarded as experts in literature. Period.” A week after that, Wignya Panitisrastra struck back at Jayakarsa.⁵⁴ He should read the letters again, for he probably hadn’t understood what was being said – by now a common accusation hurled in all directions in this squabble.

Another *kyai* now published a letter, one named Srēdajanma (another curious name) of Surakarta.⁵⁵ He was responding to the letter from his fellow *kyai* Kerata of Panaraga and may have been of equally questionable sanity. He was delighted, he said, for there had been terrible floods in Surakarta in which he had lost his uncle who had fled to some unknown destination, had not been heard from for a year and was feared drowned. This uncle was named Kyai Kerata and Srēdajanma believed that he was now rediscovered through the pages of *Bramartani*. (Given the rather odd, at least fictional and joking tone, and perhaps madness, of the rest of the letter, this is not to be taken seriously.) He and his family – including, we may note, a son who he said was named Danasatata – were well, he reported to his supposed long-lost uncle. He approved Kerata’s efforts to calm the useless argument between Wignya Panitisrastra and Abdulatip. He then wrote as if the latter two were brothers who had often been in conflict, whose youth names he claimed to know, and who were his nephews. He admonished the two, using *ngoko* (“low javanese,” as one would use to children). Wignya Panitisrastra, he said, had not devoted himself to Javanese literature as much as his brother Abdulatip, who had also studied writing Dutch with a Dutch soldier. Abdulatip was also admonished to behave in a brotherly fashion: what would he gain by winning this argument? Being treated like children and admonished in *ngoko* by this *kyai* can hardly have brought much pleasure to Abdulatip or Wignya Panitisrastra.

53. Ibid. Jayakarsa described himself as *juru sērat Kawadanan Kumisi Bogormas*.

54. BM 24 Jan. 1867.

55. Ibid.

Not yet done, Abdulatip responded to Danasatata for the last time.⁵⁶ He accused him of frivolity and, of course, did so at some length. A week later he responded to Kyai Srēdajanma,⁵⁷ whom he indulged by addressing as “uncle” (*paman*), but he was mystified that Srēdajanma thought Wignya Panitisrastra and himself to be brothers. “Grandfather” (*ēmbah*) Kyai Kerata also thought this, Abdulatip wrote, but he was astonished that Kyai Kerata could think anything of the sort, and indicated his own inclinations for the correspondence to come to an end.

The first item to appear in the issue of 7 February was a statement from the editor F.W. Winter, who was by now evidently more able to deal with his grief over his son’s death and wished to reassert control over his newspaper:

The editor of the newspaper *Jurumartani* [=Bramartani] informs the *priyayis* who have had disagreements published in *Jurumartani*, i.e. Mas Wignya Panitisrastra, Abdulatip, Danasatata, Kyai Kerata, Raden Panji Puspawilaga, Raden Laraitēm, Sumanggengkarsa, Tanpawignya, Jayakarsa, Kyai Srēdajanma, and the other *priyayis* whose conflicting letters have not yet been published, that from here on I will not publish the letters of these *priyayis* in *Jurumartani*, because I think that to be without benefit.

The 1866-1867 debate was over and the newspaper was again mainly filled with news. Readers’ hearts may have sunk on discovering that there was another contribution in this same issue from Abdulatip, but it was about *elmu kodrat* (natural science).⁵⁸ In coming years, Abdulatip continued to be a contributor to *Bramartani*, illuminating its pages with an often-fierce judgmentalism.

Hybridity was at the core of this debate about literature, in two senses, for there were two new kinds of literature in dispute. The first was the sort of storytelling, pretty much free of the traditions and conventions of previous forms of Javanese literature, including using prose, which was exemplified in the writings of Ronggawarsita and Puspawilaga. The second was the newspaper itself. In fact, the dispute about Ronggawarsita and Puspawilaga became almost secondary to the real source of fuel for this fire, which was about how Javanese *priyayis* should write in the new medium of a newspaper. Some had clearly absorbed what Termorshuizen describes as the “tropical style” of the Dutch colonial press, characterised by “Engagement and combativeness [...] A specific sort of language went along with this. This being often very emotional, the press developed a specific ‘tropical style,’ [...] [a] vigorous and animated style.”⁵⁹ But if this was a style that suited colonial Europeans, at least some Javanese gentlemen found it distasteful, an issue that lingered

56. Ibid.

57. BM 31 Jan. 1867.

58. BM 7 Feb. 1867.

59. Gerard Termorshuizen, with collaboration of Anneke Scholte, *Journalisten en heethoofden: Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905* (Amsterdam: Nijgh & van Ditmar; Leiden: KITLV Uitgeverij, 2001), p. 21.

around the rather equivocal and never entirely clear references to “Dutch thinking” in the debate we have seen above.

In this transitional time, when there was not yet a clearly articulated, generally accepted and truly hybrid style of elite conduct in the realm of literature and publication, it seems that there was opportunity for cultural code-switching. The elderly Puspawilaga – publicly battered, insulted and evidently exhausted as the price he paid for helping a friend by filling pages in *Bramartani* with stories – explained the formula clearly enough: “If I write in Javanese, of course I use Javanese thinking and if I write in Dutch indeed I use Dutch thinking. The same with Javanese and Dutch customs: I have to use them both.”⁶⁰ But what was one to do in a Javanese-language but Dutch-style literary form like a newspaper? And how was one to respond to Ronggawarsita- or Puspawilaga-style innovations in Javanese writing? It is clear from the exchange of correspondence surveyed here that these were still hotly – indeed rudely – contested issues in 1866–1867.

In Ronggawarsita’s last year of life, in 1873, his name again arose in a controversy in the pages of *Bramartani*.⁶¹ A feisty debate about the meaning of works of Javanese literature, conducted by correspondents using various pseudonyms, went on for some time. “It is my accusation that Carik Langēnarja is wrong in his interpretation of *Niti Surti*,” wrote one Pothet Umarmaya. This work had been published two years before by Ronggawarsita.⁶² Pothet Umarmaya went on to debate what it meant to be a *pujongan* in that more modern age. He delivered this devastating judgment:

I confirm that nowadays the Raden Ngabei [Ronggawarsita] is called a *pujongan*, but if he is compared with the students at the teacher-training school [in Surakarta] who can understand arithmetic, Javanese, Malay and some Dutch, geography, natural history, astronomy and other things that are useful to the government, [...] then truly the Raden Ngabei will be left with his standing as *pujongan* rather shaky. But it is still appropriate to honour and praise him, for in an age when everyone slept, the Raden Ngabei arose by himself. Alas he did not stand up and take steps to expand the intellectual realm because there wasn’t any intellectual guide.⁶³

60. BM 20 Dec. 1866.

61. Nancy Florida analyses this controversy in her paper provisionally entitled “Living in a time of madness: The last days of Java’s last prophetic poet,” forthcoming in *History and Theory*.

62. BM 4 Sept. 1873. On the 1871 edition of *Niti Surti*, see Poerwasoewignja and Wirawangsa, *Javaansche bibliographie gegrond op de boekwerken in die taal, aanwezig in de boekerij van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen / Pratélan kawontenaning boekoe-boekoe Basa Djawi (tjítakan) ingkang kasimpen wonten ing gedong boekoe (Museum) ing pasimpenan (bibliothek)* XXXIII (Batavia: Bataviaasch Genootschap, 1920, 2 vols), vol. 1, p. 405, which describes the language of the text as *kawi madya*. I have not examined this work myself.

63. BM 4 Sept. 1873.

Two weeks later, two other pseudonymous writers commented, on the basis of what they had heard from their elders:

The responsibilities of a *pujongga* in the Surakarta court are restricted to *kawi* words, for *kawi* words can be called the language of *pujonggas*. Second, they are responsible for old stories and to hold in high regard the stories that are needed within the court. But a European *pujongga* probably has to be competent with regard to greater knowledge, such as natural history and astronomy, arithmetic and vocabulary from their literary fellows. Although they are both *pujonggas*, their responsibilities cannot be compared. So that appellation depends upon the different ways they are regarded. So Pothet Umarmaya has no difficulty in saying that Raden Ngabei Ronggawarsita's standing as a *pujongga* is shaky, because he is outdone by the students at the teacher-training school.⁶⁴

It is clear from a later correspondent's letter that, as one would expect, Ronggawarsita had read this exchange in the pages of *Bramartani*.⁶⁵ We do not know what he really felt about the doubts that had been raised as to whether he was truly a *pujongga* in the 1860s and again in his twilight year of 1873. But it is hard not to wonder whether this sort of public discussion played a role in the composition of his most famous poem, *Sērat Kalatidha*, "A poem on the time of darkness."⁶⁶ Nancy Florida has described *Kalatidha* as being "among the most celebrated of Javanese poems" and writes that it is "generally accepted" that Ronggawarsita wrote this in 1873, near the time of his death in late December of that year.⁶⁷ This laments the "crazy" (*edan*) times through which he lived. He, "the man of letters" (*ponang parameng kawi*), described his heart as being "wrapped in sorrow." He hoped to find patience and to enter the mystical state of transport known in Javanese as "to die within life" (*mati sajroning urip*), a "dying to oneself" which is also a "living in oneness with God's being," as Zoetmulder puts it.⁶⁸ Florida observes that in the final line of the poem, Ronggawarsita refers to his approaching death using words that again constitute his name as an acrostic, but in this case he further displayed his word-playing dexterity by hiding the acrostic in the second, rather than the first, syllable of each word.⁶⁹ Had Nancy Florida not pointed to this, I would not have noticed it myself.

64. BM 18 Sept. 1873. The letter is signed *katandhan kalih Wanda Ngajeng Singa akalih Wanda Wingking Singa Mangrēti*.

65. See the letter from Raden Mas Taya in *BM* (16 Oct. 1873) about his visit to Seh Betaljēmur, another name used by Ronggawarsita.

66. For a text, translation and discussion, see J. Joseph Errington, "To know oneself the troubled times: Ronggawarsita's *Serat Kala Tidha*," in A.L. Becker (ed.), *Writing on the tongue* ([Ann Arbor:] Michigan Papers on South and Southeast Asia, Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1989), pp. 95-138.

67. Nancy Florida, "Kalatidha, Serat," pp. 142-143 in Kate Fleet et al. (eds.), *The Encyclopaedia of Islam Three*: part 2018-4 (Leiden & Boston: Brill, 2018).

68. P.J. Zoetmulder, *Pantheism and monism in Javanese suluk literature: Islamic and Indian mysticism in an Indonesian setting* (ed. and transl. M.C. Ricklefs, KITLV Translation series 24, Leiden: KITLV Press, 1995), pp. 172-173.

69. Florida, "Kalatidha," p. 142; idem, "Living in a time of madness." The last line of the poem reads (with the elements in the acrostic underlined): *Borong angga suwarga mesi martaya*.

Although Ronggawarsita probably composed *Kalatidha* as his death approached, it was not published until several years later. Its lament about the times in which he lived no doubt reflects, as Errington points out, Ronggawarsita's disappointment at not having achieved the high court positions enjoyed by his illustrious literary ancestors Yasadipura I and II; "he counted his own life a failure in some ways," having never reached the high rank of *bupati*.⁷⁰ But his lament may also reflect the public questioning of his standing, of the very value of his contribution, in the pages of *Bramartani*, a newspaper read by Java's literate elite. In the ranks of that elite could be found both respect for tradition and hunger for modernity. Ronggawarsita's problem was probably that he fell somewhere in between those two things: works such as *Paramayoga* and *Pustakaraja Purwa* were a long way from the standards of traditional Javanese verse literature, yet they could hardly be thought to be modern in the European fashion then attracting interest in colonial Java.

Many decades after the *Bramartani* arguments described here, Ronggawarsita's contribution was still disputed. In 1952, Poerbatjaraka dismissed *Pustakaraja Purwa* as a miscellaneous collection of stories rewritten however Ronggawarsita wished, which constituted the author's "empty prattle" (*omong-kosongipun R. Ng. Ranggawarsita*). All of the sources mentioned in the work had never even existed, wrote Poerbatjaraka.⁷¹ Yet Ronggawarsita's reputation as a great *pujingga* among aficionados of Javanese literature has continued.

Thus were the perils of hybrid literary endeavour faced by Ronggawarsita, with poor old Puspawilaga getting thoroughly bruised on the sidelines. Ronggawarsita was rudely attacked for his innovations and his reputation cannot have been undamaged. This must have meant deep personal affront to his core identity and self-evaluation, for Ronggawarsita was by profession a writer: this was his only public role, the task to which he was devoted and by which he was judged. Judgments about his writing thus touched upon a central aspect of his existence. Below, in the Postscript, we will consider the different example of Purwalēlana's innovative writings, which constitute a valuable source for understanding 19th-century Java. Ronggawarsita, the innovative poet and courtier who failed to rise to the rank that he thought he deserved, was fair game for personal attack in that transitional, hybrid "time of darkness," that age that, on the verge of death, he saw as a time of craziness.

Postscript: Purwalēlana's comparative and very different experience of hybridity

In the 20 December 1866 issue of *Bramartani*, Abdulatip brought into the discussion another literary innovator, the *Bupati* of Kudus Condranēgara V (c. 1836-1885), better known as Purwalēlana (the first traveler). C. 1858

70. Errington, "To know oneself," p. 101.

71. Poerbatjaraka, *Kapustakan Djawi* (Djakarta/Amsterdam: Penerbit Djambatan, 1952), p. 15.

he undertook four trips throughout Central and East Java and to Batavia. He wrote a prose account of these travels which had just been published in two volumes over 1865-1866.⁷² Not only was the travelogue with its accounts of contemporary society a new genre for Javanese literature, but Purwalēlana also introduced an innovation by dividing Javanese words one from another while still in Javanese script, in which words were (and still are) not normally so divided. Abdulatip was greatly pleased that someone Javanese was writing about contemporary circumstances and prayed that others would follow this example. But he was astounded to see Javanese words divided from one another, a departure from established practice. Abdulatip commented that Purwalēlana hoped thereby to make it easier to read Javanese, but this way of dividing words had not been done since ancient times. So Abdulatip advised Purwalēlana that, even though he had done this with good intentions, few *priyayis* would endorse this innovation. Indeed, it wouldn't make reading easier but would rather confuse readers. He had tried this out on some others and it had made them laugh. Javanese script should continue to be written as it always had been. When Kyai Kerata joined the literary fray in *Bramartani* (3 Jan. 1867), he said that he was inclined to agree with Abdulatip's criticism of Purwalēlana (about dividing words in Javanese script). Purwalēlana did not reply to this criticism, although he was, as one would expect, among *Bramartani*'s readers, for a letter from him about several pre-Islamic antiquities in Gunung Kidul was published in the paper in 1869.⁷³

Whereas Ronggawarsita's literary innovations, reputation and personal identity were rudely attacked and – possibly because of that – he failed to achieve the status he thought rightly to be his, Purwalēlana / Condranēgara V had no grounds for concern about his standing in the eyes of Javanese society or of the colonial government. His two-volume *Lampah-lampahipun*, with their innovative descriptive travelogue format, after their initial publication in 1865-1866, were republished in 1877 and 1880. Others also followed him in writing travelogues. But the idea of trying to separate Javanese words flopped and Purwalēlana dropped this innovation in the second edition of his travelogues.⁷⁴ Throughout this time, his bureaucratic career prospered. He

^{72.} Purwalēlana [pseud. for Condranagara V], *Cariyos bab lampah-lampahipun Raden Mas Arya Purwalēlana* (2 vols; Batavia: Landsdrukkerij, 1865-1866). These volumes were published again in Sēmarang in 1877 and in Batavia in 1880; see further Ricklefs, *Polarising Javanese society*, pp. 144-145. For authoritative studies and translations, see Marcel Bonneff (transl.), *Pérégrinations javanaises : Les voyages de R.M.A. Purwa Lelana : Une vision de Java au XIX^e siècle (c. 1860-1875)* (Paris: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1986); and Judith E. Bosnak, and Frans X. Koot, with the assistance of Revo A.G. Soekatno (ed. and transl.), *Op reis met een Javaanse edelman: Een levendig portret van koloniaal Java in de negentiende eeuw (1860-1875); De reizen van Radèn Mas Arjo Poerwolelono* (Zutphen: Walburg Pers, 2013).

^{73.} BM 7 Oct. 1869.

^{74.} Bosnak, Koot and Soekatno, *Op reis met een Javaanse edelman*, p. 43 n. 5. See also Willem

was from a distinguished family of north coastal *bupatis*. After serving as the highest Javanese official (the *bupati*) of Kudus from 1858 to 1880, he went on to be *bupati* of Brébés from 1880 to his death in 1885. But he won no comparable literary distinction. Among most Javanese who are familiar with older literature, Ronggawarsita is still thought of as the last of the great *pujonggas*; one rarely hears the name Purwalēlana. While Ronggawarsita's works – above all his *Sérat Kalatidha* – are frequently republished, after the 1880 edition no one republished *Cariyos bab lampah-lampahipun Raden Mas Arya Purwalēlana* in Javanese for well over a century, so far as I am aware. A serious scholarly study of his work had to await the attention of Marcel Bonnef in 1986. This was followed in 2013 by the edition and translation by Bosnak, Koot and Soekatno.

Purwalēlana's travelogues were remarkable and remain a valuable source for understanding 19th-century Java. His *Lampah-lampahipun* were, however, a secondary activity beside his core role as a top-level Javanese official within the Dutch colonial state. His essential realm of activity and his identity were those of a *bupati*. No doubt this status as a *bupati* made him a difficult target for some people to attack. Ronggawarsita was fair game but Purwalēlana / Condranēgara V was too grand a figure in the Javanese colonial hierarchy to be subjected to rude denunciations in the pages of *Bramartani*. Not for him was this a “time of darkness.”

van der Molen, “Tulisan Jawa,” in Henri Chambert-Loir (ed.), *Sadur: Sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Popular Gramedia), École française d’Extrême-Orient, Forum Jakarta-Paris, Pusat Bahasa, Universitas Padjadjaran, 2009), p. 324. I am grateful to Willem van der Molen for locating these references for me at a time when illness prevented me from consulting my own research materials.

NAWIYANTO¹

Nature Conservation in a Frontier Region of Java during the Colonial and Early Post-Colonial Periods

Introduction

The concern for environmental protection in Indonesia is not new. The later decades of nineteenth century Java saw the adoption of conservation policy². The underlying force behind the concern was the idea that special measures needed to be taken to protect the wealth of the Indies environment from irreparable losses and long-term deterioration resulting from demographic and socio-economic processes. This development had features that set themselves clearly apart from the longstanding measures that reserved parts of the environment for power-holders. The conservationists believed that the importance of nature protection was not only linked to economic values, but scientific, aesthetic, and moralistic ones as well.³

The conservation movement in the Netherlands Indies was part of a broader phenomenon emerging as a response to the ongoing deterioration of nature and wildlife occurring on other continents.⁴ With origins in Euro-American thought, conservationist ideas spread and were adopted in colonial policies through the agency of botanists and other natural scientists, who with their long-standing scientific networks, were able to generate a sense of environmental crisis.⁵ The

1. Department of History, Faculty of Cultural Science, University of Jember, East Java, Indonesia.

2. Boomgaard 1999, p. 264.

3. Dammerman 1929, pp. 21-22; Westermann 1945, p. 417.

4. Westermann 1945, p. 417; Mo 1957, pp. 160-161.

5. Grove 1995, pp. 484-485; Grove et al. 1998, p. 16.



Fig. 1 – Mountainous Landscape of the Besuki Region (Photog.: Nawiyanto 2018)

growing sense of environmental crisis led to the emergence of an awareness of the need for conservation. Emerging as state business, the conservation measures represented what conservationists thought to be good for the interests of the people, but often not in the same ways as the people did themselves. Consequently, conservation projects were also a subject of contest over wealth and power, especially between the state and the people.⁶

This article aims at examining the development of nature conservation in the Residency of Besuki. This residency was situated in Java's Eastern Salient and during most of its existence, it consisted of four regencies: Panarukan (later, Situbondo), Bondowoso, Jember, and Banyuwangi. This region was often referred to as the *Oosthoek* during the Dutch colonial period, and long constituted a contested political frontier among major centres of political power in Java and Bali.⁷ After obtaining the region in 1743 from the Susuhunan Pakubuwana II of Surakarta,⁸ the Dutch officially established the Residency of Besuki in 1814 and its definitive administrative territory was acquired in 1882 with the incorporation of Banyuwangi Regency.⁹

The region of Besuki has a mountainous landscape. Tomé Pires describes it as a mountainous country.¹⁰ In the northwest of the region, the Hyang Mountains—with the extinct Argapuro volcano soaring at their apex—stretch from Probolinggo to northern Jember. To the northeast, the Hyang Mountains are connected with the Ringgit volcano in Panarukan. In the northeast lie the Ijen Mountains with the soaring Raung and Merapi volcanoes, described by L. van Vuuren as “one of the most remarkable volcanic areas in the world.”¹¹

6. Peluso 1992.

7. Sri Margana 2012.

8. Lombard 1996, vol. 3, p. 46; Ricklefs 1998, p. 306.

9. Cribb 2000, p. 125.

10. Cortesão 1967, vol. I, p. 198.

11. Van Vuuren 1929, p. 14.

The slopes of the region's two mountain ranges merge and form the Bondowoso highlands, while in the south, the range of Watangan, Mandiku, Meru and Betiri hills separates the lowland of Jember from Banyuwangi.¹²

Another striking element to the environment of Besuki was forest. Tombe, a French ship captain traveling by land from the north coast of Banyuwangi to Surabaya, reported in 1805 that the route still took the form of footpaths running through jungles.¹³ The largest part of Besuki forest was categorized as non-teak forest.¹⁴ Rather than being covered by rainforest vegetation as found in the western part of Java, Besuki is characterised by a predominantly monsoon forest. Donner classifies it as deciduous monsoon forest, naturally developing in areas with small quantities of rainfall and a prolonged dry season. Compared with many other parts of Java, Besuki has less rainfall and a seasonally dry climate.¹⁵ In a broader context, the vegetation of the Besuki region reflects a trend of decreasing rainfall from west to east across the island of Java.¹⁶

There are two main rivers that cut across the Besuki region. Originating in the Hyang Mountains, Kali Sampean flows north to the Madura Strait at Tanjung Pacinan through the Bondowoso and Panarukan regencies. Meanwhile, Kali Bedadung emerges from several streams that flow south from the Hyang and the Ijen Mountains, and passes through the Jember regency to the Indian Ocean in the Puger district.¹⁷ A number of small streams also flow to the surrounding seas in a different direction. Kali Banyuputih flows from the Ijen Mountains to Panarukan before entering the strait of Madura. Kali Mayang originates in the Ijen Mountains and flows to the ocean after merging with Kali Ambulu and Kali Sanen. With their springs in the Ijen Mountains, Kali Baru cuts across the area of Banyuwangi and flows to the Indian Ocean, whereas Kali Setail flows to the Bali Straits.¹⁸ These rivers and streams formed fertile alluvial soils by bringing mud and volcanic materials in valleys and coastal plains.

Mostly consisting of young volcanic soils, Besuki generally has good soils as one major foundation for agriculture. The region's population engaged in both irrigated field (*sawah*) and dry field (*tegalan*) cultivations. On irrigated fields different crops could be grown throughout the year. Rice was the most important food crop. During the dry season, secondary food crops (*palawija*) were also grown on irrigated lands. Dry fields, by contrast, were characterised by the absence of irrigation and were closely linked to crops that call for less water, including maize, cassava, vegetables, and later also tobacco. Apart from smallholder agriculture, in

12. Veth 1903, pp. 572-577.

13. Lombard 1983, p. 264.

14. Poerwokoesoemo 1956, p. 35.

15. Whitten, Soeriaatmadja and Afiff 1996, p. 122.

16. Donner 1987, pp. 106-107.

17. Hageman 1868, pp. 252-253, 280-281.

18. Schulze 1890, pp. 286-287.

the region of Besuki there was also plantation agriculture developed by European plantation enterprises. This sector began to develop from the 1830s onwards and has rapidly expanded since the 1870s. A variety of export-oriented estate crops—especially coffee, sugar, tobacco, and rubber—were cultivated and have altered the natural environment of the Besuki region.

The choice to focus on the Besuki Residency was made because the region showed a strikingly contrastive feature, in environmental and socio-economic terms. On the one hand, the region had the largest conservation areas on the island of Java during the colonial and post-colonial eras. On the other hand, it experienced great transformations especially from around 1870. As a result, in 1912 Besuki was described as “an emerging region.”¹⁹ It shifted from one of sparse population—the least densely populated in the whole of Java—to a more densely populated area. Between 1890 and 1930, for example, the population density of Besuki increased by 125%, whereas the population density of Java only increased by 70%.²⁰ From an economically minor region, Besuki was also transformed into a leading centre of agricultural production. Besuki was among the three highest-producing places in the Netherlands Indies for export tobacco. During 1926–1930, for example, 25% of tobacco exports from Java originated in Besuki, while the region constituted only 7.5% of Java’s total land surface.²¹

These two contrasting features indicated that Besuki’s natural environment was increasingly pushed back by socio-economic transformations. There was a growing concern about the increasing risk of irreversible natural loss that required immediate response and action. Nature conservation in Besuki reflected the implementation of policy adopted by the government through a centralized means, without taking the local people’s interests into consideration. It is argued that there was a continuity between colonial and early post-colonial nature conservation. Nature conservation was very much part of government circles, accommodating mostly the Europeans during the colonial period and Indonesian officials during the post-colonial one. Challenges to nature conservation were not only due to the continuing contests over resources between the state and the people, but also to internal issues within the government itself. The policies and problems existing in the implementation of nature conservation both during the colonial and post-colonial periods seem to have remained much unchanged.

Short Historiographical Survey

Studies of nature conservation in Indonesia have been produced by scholars with various backgrounds, both natural and social scientists. Early works came mainly from natural scientists especially botanists, zoologists, and foresters.

19. Broersma 1912.

20. Boomgaard and Gooszen 1991, pp. 217–218.

21. Clemens, Lindblad and Touwen 1992, p. 63; Boomgaard and Gooszen 1991, p. 217.

More recently, there have been a growing number of works on the subject by anthropologists, historians, and other social scientists. With their varying backgrounds, scholars on nature conservation in Indonesia approach the subject in different ways. For the purpose of our discussion, it might be useful to broadly categorize the existing literature into two major approaches: nation-wide policy approach and case-study/regional conservation practice approach.

Many works dealing with nature conservation in Indonesia employ a nation-wide policy approach. Most of them argue that nature conservation is desirable, even if it is at the expense of the people's direct interests. In their view, nature conservation is vital not only for economic values but scientific and aesthetic ones as well, and all these values should be preserved for the interest of future generations too.²² Uncontrolled forms of natural resource use is regarded as bringing on changes that could cause irreparable damage to nature's original state and environmental crisis.²³ They also develop the argument that the making of colonial conservation policy and the promulgation of conservation regulations were necessary and constituted significant progress in preventing the presence of human activities.²⁴ Some authors argue that the process was inseparable from the involvement of particular individuals, groups and interests, bringing all issues related to nature conservation into the political agenda and policy-making process.²⁵

Many of the early nation-wide policy oriented conservation publications have largely focused on conservation during the Dutch colonial era, partly due to the fact that they were produced during the colonial era. Consequently, little is known about nature conservation during the early decades following independence. One important exception is Arnscheidt's work presenting a discourse analysis of nature conservation in Indonesia as manifested in policy, law and practice with a long-term time perspective from the pre-colonial period to the present.²⁶ But most authors, including Arnscheidt, have not taken a full look at the regional dynamics of nature conservation implementation. This shortcoming is also found in literature appearing in the post-colonial era that looks at nature conservation from a broad, nation-wide perspective.²⁷ Without going into further detail, some merely cursory remarks have indicated that conservation measures were not easy to implement in the field and the outcomes often did not materialize as expected.²⁸

22. Dammerman 1929; Steenis 1939; Westermann 1945; Lught 1933.

23. Eshuis 1939; Dammerman 1929.

24. Dammerman 1929; Sandbergen 1932; Kiès 1936; Eshuis 1939; Hoogerwerf 1953.

25. Westermann 1945; Boomgaard 1999; Cribb 1988, 1997; Yudistira 2014.

26. Arnscheidt 2009.

27. Situmorang 2013; Groves 1977; Yuwono 2013.

28. Hoogerwerf 1954; Schuitemaker 1950.

An abundant literature representing a case-study/regional conservation practice approach has been produced on the basis of field observations or site visits to the nature and wildlife reserves. Part of the writings come from the Dutch colonial period, for example on Hyang Highlands, Poerwo, and Baluran.²⁹ The writings usually contain a report on the state of the visited reserves regarding the populations of plant and wild game species in the protected area they visited. Based on their observations, recommendations have been on how to improve the management of the nature and wildlife reserves. More conservation literature in the second group restricts the discussion to the New Order and Reform eras. Many have argued that there is a contestation between the interests of local people and conservationists leading to the destruction of protected areas.³⁰ Focusing too much on more recent periods can easily lead to the misconception that nature conservation in post-colonial Indonesia only emerged as an issue during the New Order era, as if nothing had happened in the field during earlier decades.

Three major shortcomings prevail in the existing nature conservation literature. One is a neglect of the importance of the early decades of the independence era in the development of nature conservation due to excessive focus on the New Order and Reform eras. Another major shortcoming is a lack of accounts of the regional dynamics of nature conservation implementation during the colonial and early post-colonial periods. There is a strong impression that the early two decades of the independence era, which have also often been called the decolonization period, form a hiatus in the historiography of nature conservation in Indonesia. Therefore, the present article seeks to bridge the gap in our knowledge in these issues by discussing nature conservation in the region of Besuki during the colonial and early post-colonial periods. This will be done through a combined analysis of nature conservation policy and regulations, and the implementation of conservation measures in the form of nature reserves in the region. The aim is to offer new insight into what occurred and has changed or remained the same in nature-conservation practice between the two periods under consideration, generally thought of as strikingly different in political and social terms, but perhaps, as may be shown, much less so in conservation terms.

Method

This article draws upon a great variety of historical source materials. The primary sources include archival materials, official and private organisation publications, and contemporaneous newspapers. Among the archival materials figure memoranda of transfer of duties (*Memories van Overgave*, 1913-1938)

29. Groneman 1902; Ledeboer 1934; Appelman 1939.

30. For example Myers and Muhajir 2015; Siburian 2008, 2010; Hoogerwerf 1974; Kadri et al. 1981/1982.

written by Residents of Besuki during their period of administration. Some of these memoranda have been translated and published as *Memori Serah Jabatan 1921-1930* (ANRI 1978) and *Kenang-Kenangan Pangreh Praja Belanda 1920* (Wal 2001). Other archival materials include General Secretariat (*Algemeene Secretarie*, 1919-1920). Most archival materials were obtained from the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), Jakarta.

A number of official and private organisation publications originate from various places. There are valuable materials from the National Library of the Republic of Indonesia (PNRI) in Jakarta, including: Annual Reports of the Forestry Service (*Verslagen van den Dienst van het Boschwezen*), private organisation reports produced by the Netherlands Indies Society for the Protection of Nature, which provide useful information relating to conservation issues. Also from this library, most contemporaneous newspapers and magazines were also examined, including *Trompet Masjarakat* and *Malang Post* newspapers. A number of organisational publications provide quite specific information. Valuable publications for the discussion of forest and nature protection include *Tectona* (later, *Rimba Indonesia*), *Tropische Natuur* (later, *Pengemar Alam*), and *Gema Perhutani*. Part of these publications are kept in the Library of the Faculty of Forestry, Gadjah Mada University, Yogyakarta. A valuable guidebook for the region's natural environment is *The Ecology of Java and Bali* produced by Tony Whitten et al. (1996). There are also a number of unpublished reports kept in the library of *Balai Konservasi Sumber Daya Alam* (Jember).

Nature Conservation and its regulations

The early conservation approach in Netherlands Indies, including Besuki, was closely connected with the economic interests in agriculture. The connection could easily be seen from the expected outcomes of the conservation regulations. The Government Decree (*Gouvernementsbesluit*) of 1873 and the Clearance Ordinance (*Ontginningsordonnantie*) of 1874 required both Europeans and locals running agricultural operations on sloping areas to take anti-erosion measures. This stipulation primarily rested on the idea that upland agricultural outputs were in decline due to the washing away of fertile soils following the removal of forest cover.³¹ Terracing was encouraged in order to protect soils and to maintain agricultural production, a measure highly recommended in Java by K. F. Holle, an agriculture expert working in the colonial administration. Informed by the agriculture-induced soil fertility destruction in the United States of America, Holle was the first (in 1866) to warn about the danger of erosion.³²

31. Donner 1987, p. 120.

32. Holle 1866, pp. 122-131.

More significant progress in conservation was reflected in the 1884 Forest Ordinance, stipulating the preservation of watershed-protecting forests. According to this ordinance, no tree felling was allowed in montane forest above 4,000 feet in Eastern and Central Java.³³ The underlying idea in this stipulation was to protect water catchment areas, a sensible action advocated earlier by the German naturalist Franz Junghuhn on Java around the mid-nineteenth century.³⁴ This stipulation was closely linked to the sponge theory, suggesting that forest cover was the best regulator of water regimes.³⁵ Uncontrolled agricultural expansion towards montane peaks was seen as a serious threat to the very existence of agriculture as it would seriously affect water flows and irrigation supply. Therefore, for the sake of agricultural sustainability, such expansion should be stopped.

It came as no surprise that strong proponents of watershed forest protection were found among engineers working in the colonial irrigation service.³⁶ Some support also came from a number of officials at the Forest Service such as J.W.H. Cordes, S.P. Ham, A. de Jong and G.S. de Graaf.³⁷ Between 1915 and 1930 there had been a wide debate among Dutch scientists concerning the hydrological values of montane forest. Despite the inconclusive scientific evidence, the proponents of the sponge theory won over the other group of scientists putting forward the idea that hydrological regimes were a function of geological formations and soil properties. Since then the sponge theory has shaped forest policy regarding natural forest management, and only quite recently has its scientific validity come under attack again.³⁸

In the Besuki region, protecting the water catchment forest area was also a major issue, given the region's mountainous landscape and expanding agricultural operations. A.J.M. Ledebuur stated that the existence of 13 sugar industries in Besuki and Probolinggo, rice fields in Kraksaan and Bondowoso and all rice fields in Jember, which were also used for estate tobacco cultivation, depended for their irrigation on water originating from the Hyang Highlands.³⁹ As elsewhere in the Netherlands Indies, the activities of shifting cultivation (*ladang*) were regarded by the colonial authority in Besuki as a major threat to the hydrology-regulating montane forest.⁴⁰ In order to protect water catchment

33. Boomgaard 1999, p. 262.

34. Cribb 1988, p. 10; Steenis 1972, p. 4.

35. Potter 2003, p. 38.

36. Boomgaard 1996, p. 21.

37. Goor and Kartasubrata 1982, pp. 528-529.

38. Smiet 1990, p. 298; Smiet 1987, pp. 156-157.

39. Ledebuur 1934, pp. 5-6.

40. ANRI, *MvO Besuki*, 1931-1934.

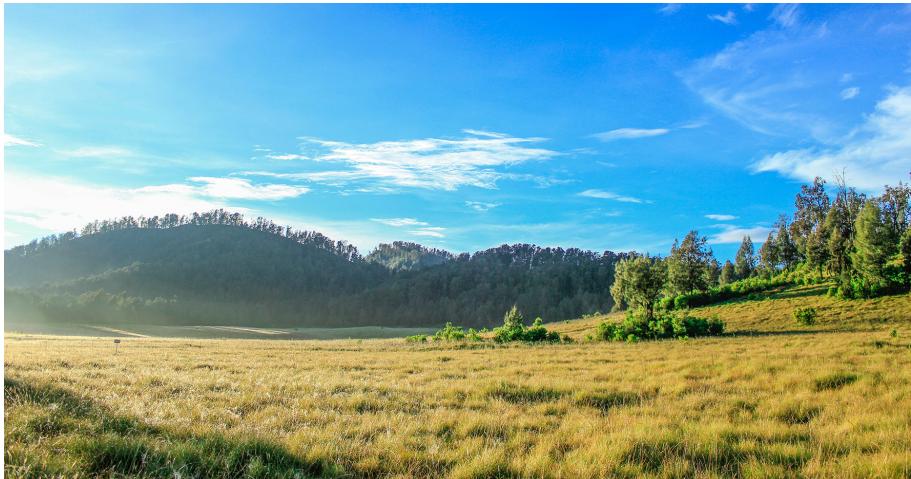


Fig. 2 – Hyang Highlands, Argapuro (Photog.: Nawiyanto 2018)

areas, forest clearing in the Hyang mountain complex was prohibited from 1913 and from 1922 long leases (*erfpacht*) of land for mountain estates were no longer granted.⁴¹

Around 1900, a new trend also developed in the conservation movement. It aimed at protecting wild fauna, flora and natural landscapes. The primary reasons were their aesthetic and scientific values.⁴² The concerns about wild fauna protection were greatly motivated by the commercial hunting of birds of paradise on the outer islands of the Archipelago,⁴³ and of other species such as rhinoceros and wild ox on the densely populated island of Java. The concerns were voiced among others by P.J. van Houten and M.C. Piepers in the 1890s.⁴⁴ In the Besuki Residency, the Ledebuur brothers were particularly concerned with the alarming decline in the population of deer in the Hyang Highlands.⁴⁵ The first legal achievement was the enactment of the Protection of Wildlife Ordinance (1909), providing protection for all wild animals, except the harmful ones.⁴⁶

The 1910s saw significant progress in the conservation movement. There were two major events which marked this decade. In 1912 the first organisation dealing with nature conservation, the Netherlands Indies Association for Nature

41. OMV 1908; ANRI 1978, p. xixc.

42. Dammerman 1929, p. 1; Broersma 1937, p. 228.

43. Cribb 1997, pp. 379-408.

44. Piepers 1896, pp. 38-42; Cribb 1997, p. 3; Boomgaard 1999, p. 264.

45. Franck 1937, p. 34.

46. Sandbergen 1932, p. 439; Kiës 1936, p. 13.



Fig. 3 – Baluran Nature Reserve (Photog.: Nawiyanto 2018)

Protection (Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming), was established, with forester botanist Sijfert Hendrick Koorders as its chairman.⁴⁷ Significant achievements in the field of conservation matters, both in legal and practical terms, can be credited to this association.⁴⁸ The second significant event was the enactment of the Protection of Natural Wealth Regulation in the Netherlands Indies (1916), governing the creation of nature monuments.⁴⁹ In Besuki this regulation provided a legal basis for nine nature conservation areas established in 1919 and 1920. With the exception of authorized scientific purposes, any form of human intervention in these areas—such as collecting botanical specimens, hunting wild animals, setting fires, and herding livestock—was completely prohibited.⁵⁰

The idea behind the prohibition was a belief that human activities in such areas would bring changes and could cause damage to the original state of nature, which was considered very valuable and to be preserved for scientific or aesthetic reasons. An important improvement was the enactment of the Natuurmonumenten- en Wildreservaten-ordonnantie (Nature Monuments

47. Steenis 1939, p. 150.

48. Eshuis 1939, p. 292.

49. Pluygers 1952, pp. 40-41.

50. Dammerman 1929, pp. 67-68; Eshuis 1939, p. 299.

and Wildlife Reserve Ordinance) in 1932.⁵¹ Under the new ordinance human intervention was tolerated to a certain degree, especially for the sake of habitat management. This ordinance facilitated the establishment of an extensive wildlife reserve. In Besuki the result was the establishment of the Baluran wildlife reserve in 1937, based on the Governor General's Decree dated 25 September 1937, No. 9 (Stbl./1937/No. 544).⁵²

Several regulations were issued as regards wild game protection. This development partly resulted from external pressures, especially from Britain and North America as the major destinations for the animal-products trade from the Netherlands Indies.⁵³ The market of animal products for export was made up of bird feathers, crocodile skins, tiger skins, rhino horns, ivory, turtle eggs, and various animal specimens, for example.⁵⁴ The result was the Game Protection and Hunting Ordinance (*Dierenbescherming- en Jachtordonnantie*) of 1924. Applied only in Java and Madura, this regulation contains stipulations regarding the introduction of a hunting season restricted to a certain period of time, the requirement of a hunting license obtained from the authorities for a fee, and the list of animal species under protection.⁵⁵ This regulation was revised through the Game Protection Regulation and Hunting Ordinance of 1931. Apart from individually listing protected animals in the Netherlands Indies, a new provision stipulates a total ban on the trade of dead and living protected animals, as protection was ineffective without export prohibition.⁵⁶ In order to overcome problems linked to the various regulations from one locality to another, the following year, the 1931 ordinance was extended to the whole Archipelago.⁵⁷

In Besuki, hunting activities were subject to a set of rules and conditions. Hunters were required to equip themselves with the appropriate legal documents issued by the colonial authorities and they had to undertake their activity only during the designated period. It was reported that 86 hunting permits and 214 hunting licenses were issued by the authorities in Besuki in 1934.⁵⁸ Other regulations were also occasionally enforced. The hunting of wild ox, deer, and antelope was prohibited in 1937 and 1938.⁵⁹ In general, the primary reason behind such measures was to give sufficient time to the species

51. Pluygers 1952, p. 45.

52. Hoogerwerf 1948, pp. 33-35; Sedhana 1982, p. 4.

53. Dammerman 1929.

54. Yuwono 2013, pp. 130-149; MacKinnon 1986, p. 263.

55. Kiës 1936, p. 18.

56. Appelman and Endert 1936, pp. 176-177.

57. Kiës 1936, p. 18.

58. Hoogerwerf and Steenis 1935, pp. 78-79.

59. Rengers Hora Siccam 1940, p. 85.

to rejuvenate their populations. In order to increase big game populations,⁶⁰ in 1941, on the basis of his observations in the forest of Banyuwangi, L. Berczy urged the government to provide a bounty on wild dogs (*ajak*).⁶¹ He believed that the declining number of big game populations was caused by the excessive number of wild dogs and that the adoption of the bounty system would draw more people to get involved in the extermination of this predator.

Despite broadening conservation ideas during the Dutch colonial period, the entire conservation movement had one major constant. The movement was still confined to government circles, rather than involving ordinary people. This feature was reflected in the fact that for the entire period of its existence, members of the Netherlands Indies Association for Nature Protection were almost exclusively Europeans, with a few local aristocrats.⁶² Its membership was a mixture of people with different backgrounds, such as professional naturalists working in public services, ordinary nature lovers, and estate owners/hunters.

The chairman of the association, S.H. Koorders (1863-1902), was born in Bandung. After obtaining degrees in natural science, botany and forestry in the Netherlands and Germany, he went to the Netherlands Indies in 1884. He worked for 12 years for the Dutch government and was posted in various locations: Bogor Botanic Gardens, the forest districts of Jepara, Semarang, Probolinggo-Besuki and to Bogor Herbarium. There Koorders researched plants in Java and other parts of the Archipelago. He pursued a doctoral program at Bonn University and obtained his degree in 1897. In 1903 Koorders returned to the Netherlands Indies and was appointed as head of the forest district of Bagelen, Purworejo. Concerned about the damage inflicted upon nature by human activities related to the use of forest resources, Koorders took the initiative to set up the Netherlands Indies Association for Nature Protection in 1912 and acted as its chairman until his death in 1919.⁶³

Planters on large estates from the Besuki region were also members of the association, including Teun Ottolander and A.J.M. Ledebur. Teun Ottolander (1854-1935), was born in Boskoop, the Netherlands. He started his career as an assistant on chicona and coffee estates in Central Java in 1879 and was later promoted to estate manager in East Java. In 1909 he established a coffee plantation in Tamansari Banyuwangi. Apart from being a planter, Ottolander once served as the president of the Netherlands Indies Agricultural Syndicate. He also had a strong interest in nature protection and collected plants in the region of Besuki, for example in Bayelor (1901), Pancur (1901), Raung-Ijen (1902), and Prajekan-Situbondo (1908). Since 1903 Ottolander had preserved a plot of forest which was the habitat of rare plant species on his estate in the Raung

60. Mo 1957, pp. 171-172.

61. Berczy 1941, p. 243.

62. Pluygers 1952, p. 45.

63. Yudistira 2014, pp. 6-15.



Fig. 4 – Hyang Highlands, Argapuro (Photog.: Nawiyanto 2018)

Mountains.⁶⁴ A.J.M. Ledebuur and his brother, B. Ledebuur, were passionate big-game hunters and estate owners. A.J.M. Ledebuur in particular was known as a fanatical tiger hunter. He claimed to have killed around 100 Javan tigers between 1910 and 1940. He lived in Wadung, near Glenmore, Banyuwangi. The Ledebuur brothers recorded good achievements in protecting deer populations in the Hyang Highlands by adopting strict and systematic measures and were thus successful in reviving the Hyang Highlands as a deer paradise.⁶⁵

Nature conservation appears never to have attracted special interest from the nationalist movement, although its significance was not denied. The local representatives in the Council of the People (*Volksraad*) certainly endorsed that body's unanimous vote to urge the government to establish more wildlife reserves and to strictly prohibit the hunting and trading of certain wild game species and their products.⁶⁶ But among the nationalist organisations, including those with popular support in Besuki, conservation issues were hardly voiced. The major focus of their concerns was more socio-economic and political in nature.

During the early decades of the independence era, the need for nature conservation was raised by a number of figures. A few of them were European conservationists who stayed on in Indonesia. A leading figure was Andries Hoogerwerf, a Dutch naturalist and conservationist who worked at the Bogor

64. Hoogerwerf and Steenis 1935, pp. 79-80; Koning 1928, pp. 104-106.

65. Kiës 1936, p. 16.

66. Kiës 1936, p. 16; Westermann 1945, p. 420.

Botanical Gardens until 1957. Hoogerwerf was the Head of the Division of Nature Protection and Hunting, Bogor Botanical Gardens. He was perhaps the most productive author publishing articles on nature and wildlife conservation in the 1950s (Hoogerwerf 1953; Hoogerwerf 1954; Hoogerwerf 1974). A growing number of Indonesians also appeared in the conservation movement. A notable name was Soepardi, an Indonesian forester, who worked for the Forest Planology Section and who wrote valuable books on the forests of Java in the 1950s. Other important figures were Koesnoto Setijodiwirijo and Koesnadi Partosatmoko. Setijodiwirijo was the Director of the Bogor Botanical Gardens.⁶⁷

Apart from the worsening condition of the natural environment during the 1940s, the sense of crisis and the urgent need for nature conservation were also raised by international networks of organisations, as well as growing interest in conservation issues in many countries. During its congress held in Brussels in 1950, the International Union for Nature Protection and Natural Resources (IUCN) expressed growing concerns about the status of threatened species to the Indonesian government. The following visit to Indonesia of the vice-president of the organisation, H.J. Coolidge, who also represented the Pacific Science Association and Standing Committee on Pacific Conservation, increased the global concerns about the alarming situation of particular wild game species in the country.⁶⁸ The push grew stronger around the mid-1960s, after the IUCN launched its South East Asia Conservation Project, formulated in its meeting held in Nairobi in 1963.⁶⁹

To show its commitment to conservation matters, Indonesia joined the International Union for Nature Protection in 1954, and its membership was represented by the Central Institute for Nature Research of the Indonesian Botanic Gardens (Bogor).⁷⁰ This was followed by the enactment of conservation regulations, mostly inherited from the Dutch era. The Nature Protection Ordinance of 1941 was readopted after independence, based on the Decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Affairs No. 110/Um/1957. The Forest Ordinance of 1967, a revised version of the 1927 and 1932 forest ordinances, provided further legal framework, governing four types of conservation areas: nature reserves, game reserves, hunting reserves, and recreation reserves.⁷¹ A decree by the Minister of Agriculture issued in 1970 extended legal protection—previously given to 36 wild animal species under the Wildlife Protection Regulation of 1931—to another 14 species,

^{67.} Setijodiwirijo 1957.

^{68.} Satmoko 1953, pp. 406-407.

^{69.} Talbot and Talbot 1968, p. 15.

^{70.} Setijodiwirijo 1957, p. 7.

^{71.} Nasution 1968, pp. 13, 20; Hutabarat 1972, p. 10; Boer et al. 1978, p. 27.

reaching a total of 50 wild animal species⁷². Similarly, various regulations concerning hunting permits and licences, restrictions and hunting seasons, were established.

In Besuki, the Dutch-created nature reserves were recognized under the newly established Indonesian state. But the colonial regulations supporting their existence were regarded as no longer valid in an independent state. In order to secure the existing nature reserves, a new legal framework needed to be issued under the national legal system. The regulation governing the Nusa Barung Nature Reserve was renewed with a decree by the Minister of Agrarian Affairs No. 110/VIII/1957.⁷³ The Baluran game reserve was legally renewed with the Decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Affairs, No. Sk/11/PA/1962.⁷⁴ In the late 1960s, Commission III of the Forestry Department Workshop, led by Moerdijanto, further proposed to the government to designate the reserve as a national park.⁷⁵ New regulations were also issued concerning the nomination of the Meru-Betiri forest area as a nature reserve, stipulated in the Decree of the Minister of Agriculture, No. Kep.31/12/'66 and its designation in 1972 as a game reserve by the Decree of the Ministry of Agriculture No. 276/Kpts/Um/6/1972.⁷⁶ Another new regulation was the Decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Affairs No. 12/PA/1962, stipulating the creation of the Hyang Highlands game reserve⁷⁷ on territory previously held by the Ledeboer brothers as leased land.

During the early independence period however, the conservation movement remained limited to government circles and lacked mass support. The political parties mushrooming in the 1950s, with all their grass-roots support, never used environmental arguments, but rather adopted socio-political and agrarian issues in their struggle (*Trompet Masjarakat*, 5 December 1958). The Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), for example, maintained that the roots of political grievances in Jember, Banyuwangi, and Bondowoso were economic pressures stemming from the domination of foreign estates over land resources, supported by federalists and Dutch collaborators working in the bureaucracy.⁷⁸ Although in 1957 nature-lover organisations were established in four places in Java, membership numbers remained low.⁷⁹ No such organisation was found in Besuki, nor did university student-linked conservation organisations exist, partly because no higher-education institution was established in Besuki until

72. Nasution 1971, p. 5.

73. Sastrawidjaja et al. 1986, p. 5.

74. Sedhana 1982, pp. 4-5; Hoogerwerf 1948, pp. 33-34.

75. Sinaga 1970, p. 13.

76. Departemen Kehutanan 1985, p. 5; Groves 1977, p. 17.

77. Santoso et al., n.d., p. 3.

78. *Trompet Masjarakat*, 10 Feb. 1951.

79. Setijodiwirijo 1957, p. 8.

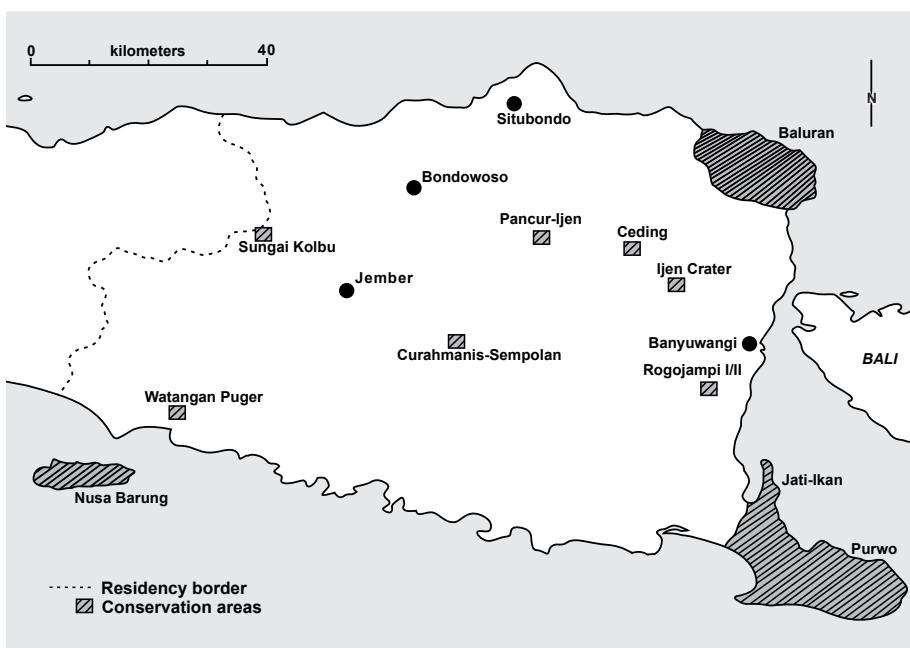


Fig. 5 – Conservation Areas in Besuki (Adapted from Eshuis 1939, p. 302)

around the mid-1960s. Only a few individuals had conservation concerns, and among them were David Hadikesuma, director of the Sukamade Baru estate and Lucas Hadiwinoto, director of the Bande Alit estate (Hoogerwerf 1974; Ted 1974). Their concerns seem to have been nurtured by contact with foreign conservationists who were interested in nature and game protection in the region.

Executing Conservation Measures

The major conservation measure in colonial Indonesia was the establishment of nature and wildlife reserves. The first conservation areas in Besuki were established in 1919, including Sungai Kolbu (Situbondo), Watangan-Puger I/V, Curahmanis-Sempolan I/VIII (Jember), Rogojampi I/II (Banyuwangi), and Pancur-Ijen I/II (Bondowoso). Altogether they covered an area of around 60 hectares. Five more nature reserves followed in 1920: Ceding and Ijen Crater (Bondowoso regency), Nusa Barung (Jember regency), Jati-Ikan and Purwo or Blambangan (Banyuwangi Regency). In terms of acreage, they were larger than those established a year before, except Ceding. This represented a structural shift from the protection of small, scenic sites to the idea of protecting larger ecosystems. The largest reserve was the Purwo reserve, covering an area of around 40,000 hectares, followed by the Nusa Barung reserve with



Fig. 6 – Ijen Crater-lake (Photog.: Nawiyanto 2018)

approximately 6,100 hectares. The sizes of the Jati Ikan and Ijen crater reserves were respectively 1,950 hectares and 2,560 hectares.⁸⁰ Another large conservation area was the 25,000-hectare Baluran wildlife reserve established in 1937.⁸¹ By the end of colonial rule, Besuki had more than 75,000 hectares of conservation areas, the most in Java, whereas in Banten, by comparison, the four conservation areas did not exceed 58,000 hectares.⁸²

Each conservation area in Besuki had special values, either aesthetic or scientific, which became the basis for its protection. The reasons behind the protection of the Ceding nature reserve were its travertine basin, with beautiful surroundings built up by microscopic blue algae. The reasons for protecting the Ijen crater included its marvellous greenish-milky coloured crater-lake, volcanic records, and beautiful old casuarina forest. Meanwhile, the Nusa Barung nature reserve was established because the area housed unique insular flora and fauna and in order to keep the reserve in its original state. Also remaining untouched by human activities, the Jati Ikan-Purwo reserve was designated as a sanctuary for the East Java plant and wild animal species.⁸³ The 20,000 hectares of savannah west of Purwo were included as part of the reserve in order to strengthen its role in preserving large mammals, and its inclusion was primarily credited to the Dutch forester, F.J. Appelman.⁸⁴

80. ANRI, *AlgSec*, 83 BT 11 July 1919 and 46 BT 9 Oct. 1920d.

81. Voogd and Rengers Hora Siccama 1939, p. 98; Hoogerwerf 1948, p. 35.

82. Eshuis 1939, p. 305.

83. Dammerman 1929, pp. 30-32, 52-53; Lam 1923, pp. 20-21.

84. Hoogerwerf 1974, p. 19.

Partly different from the Jati-Ikan-Purwo reserve, the primary reason for the Baluran conservation area was to protect the big game population from extinction.⁸⁵ The underlying reason for the Curahmanis-Sempolan reserve was its richness in flora, considered a representation of the East Java forest ecosystem biodiversity, while its surroundings had been converted into a more homogenous production forest.⁸⁶

Tabl. 1 – List of Nature Reserves in Besuki (Source: Pluygers 1952: Appendix)

No	Name	Regency (<i>afdeeling</i>)	Total Area (ha)	Year of establishment	Reasons for establishment
1	Nusa Barung	Jember	6,100	1920	botany, fauna
2	Watangan Puger I/V	Jember	15	1919	botany, prehistory
3	Ceding	Bondowoso	2	1920	botany, geology
4	Sungai Kolbu	Bondowoso	9	1919	fauna, landscape
5	Kawah Ijen	Bondowoso	2,560	1920	botany, geology, landscape
6	Baluran	Situbondo	25,000	1937	fauna
7	Pancur-Ijen I/II	Banyuwangi	4	1919	landscape
8	Rogojampi I/II	Banyuwangi	25.5	1919	botany, fauna
9	Jati Ikan-Purwo	Banyuwangi	62,000	1920	botany, fauna
10	Curahmanis-Sem- polan I/VIII	Banyuwangi	2	1919	fauna

The creation of the conservation areas, however, was only part of the larger picture of conservation measures. Another part of the story was their execution in the field, which often presented a more complicated task. The complexity was due to a set of interconnected factors including personnel, equipment, budget, and the social context within which conservation measures were implemented. Conflicts over resource-use often characterized the conservation measures. As the conservation projects were predominantly state-centred initiatives, the emerging conflicts primarily took the form of ruler-versus-ruled. But they were not the only form of conflict. As a matter of fact, conflicts also occurred among state agencies. All these factors seem to have affected the degree to which the conservation measures and desired outcomes could be achieved. In other words, the creation of conservation areas in Besuki and their supporting legal framework were surely an important step towards protecting and preserving wild life and nature. But other things were also of importance, especially the ways in which the conservation projects were managed and supervised.

85. Sinaga 1970, p. 3.

86. Santoso et al., n.d., p. 13.

In regard to the latter issues, there were intentions that did not materialize as expected. Both internal and external problems were encountered. One of the major internal problems was the lack of officials in charge of carrying out conservation measures.⁸⁷ In Besuki, Resident H.A. Voet reported in 1926 that there were 42 officials working in the region's Forestry Service.⁸⁸ Most of them seem to have worked towards exploitation of the forests rather than its conservation. From 1924 military patrols aided in the supervision tasks, but encroachments on reserves were impossible to prevent because there seem to have been many unpatrolled tiny entrances leading culprits to the protected areas from the sea and along the Asembagus-Banyuwangi road.⁸⁹ In some places, the absence of roads created an extra obstacle for supervision and consequently, violations remained uncontrolled.⁹⁰ In Baluran, the problem was exacerbated by the presence of estate lands in Bajulmati,⁹¹ which made it easier for intruders to enter the protected area.

Closely linked to the first problem was a lack of budget. The allocated budget for conservation matters in the Netherlands Indies was extremely limited.⁹² In 1931 Appelman lamented that only 8,000 guilders were assigned to nature protection, completely insignificant compared with Belgium's allocation of 0.5 million francs (around 25,000 guilders) or 1 million francs (around 50,000 guilders) allocated for the Albert reserve in the Congo.⁹³ Even over the last three years before the Japanese invasion, the total conservation budget in the Netherlands Indies was only 22,000 guilders.⁹⁴ With such a limited budget, there was hardly any proper management or regular supervision undertaken in most conservation areas.

There was certainly a quality problem too. The Resident of Besuki described the enforcement apparatus from the district level downward as incompetent.⁹⁵ Consisting of forest police, district and sub-district heads, and village officials, the major task of the enforcement apparatus was in the field of policing. The task was primarily translated into two main activities: patrolling protected areas and raiding villages suspected of harbouring offenders.⁹⁶ There is little evidence to suggest that propaganda and public education of the villagers were important in preventing conservation offences. Even though such educational

^{87.} Schuitemaker 1950, p. 81; Hoogerwerf 1954, p. 196.

^{88.} ANRI, *MvO Besuki*: Resident Voet, 1922-1925.

^{89.} Appelman 1937, p. 55.

^{90.} Wijnmaalen 2001, p. 206.

^{91.} ANRI, *MvO Besuki*, Resident van Romondt, 1935-1938.

^{92.} Hoogerwerf 1974, p. 43.

^{93.} Anonim 1931, p. 481.

^{94.} Coomans de Ruiter 1948-1949, p. 148.

^{95.} ANRI, *MvO Besuki*, 1931-1934.

^{96.} Meyier 1903, pp. 711-713; Warno 1929, pp. 131-132.

efforts probably existed, the scale and intensity were certainly not comparable to what was done in the fields of agriculture and public health. In general, the use of a policing approach with “confrontational tactics” seems to have been more common.⁹⁷ In 1930, Appelman recommended a reward system to stimulate enforcement personnel, particularly forest police, to improve duty performance.⁹⁸ It is unclear whether his recommendation was actually implemented, but the problem persisted. Reports on the forest districts of Jember and Banyuwangi around the mid-1930s revealed that numerous offences continued to occur with authorities unable to act.⁹⁹

It came as no surprise that the enforcement of conservation regulations was generally said to be poor and few results were achieved. The conservation authorities were said to have lacked awareness and technical knowledge on how to execute their tasks or how important their tasks were.¹⁰⁰ Similar observations were made by G.F.H.W. Rengers Hora Siccama and R.T.A. Soeria Nataatmadja, members of the Volksraad and the Netherlands Indies Society for Nature Protection. In their views, a major weakness in the field of nature and wildlife protection was that the enforcement apparatus did not act firmly against the culprits.¹⁰¹ Enforcement against illegal hunting was said to have only been in name only.¹⁰² Illegal hunting and wood stealing appear to have been among the major environmental crimes, which the authorities found more difficult to prevent than other forms of offence such as illegal grazing and tuber roots collection. In the case of hunting, the difficulty stemmed primarily from the mobile nature of the activity, combined with the use of firearms and the collective dimension of the endeavour. Meanwhile, wood stealing was not easily prevented because such an offence was often also undertaken collectively. In many cases the lack of personnel and the fear of violent revenge made forest police either reluctant or unable to act firmly against the offenders.¹⁰³

The enforcement problem was compounded by other factors. First, although many offences were reported, only a small number of cases was said to have been followed up with legal actions. Moreover, among the few cases legally processed, there were complaints the punishments imposed on culprits were too light.¹⁰⁴ Such measures were deemed ineffective to prevent offences from being repeated either by the same culprits or other parties. Second,

97. Peluso 1992, p. 147; Manuputty 1953, p. 486.

98. Appelman 1931, pp. 86-87.

99. Voogd and Rengers Hora Siccama 1939, p. 80.

100. Groeneveldt 1937, p. 5.

101. Rengers Hora Siccama 1940, pp. 87-88.

102. V. d. V. 1941, p. 252.

103. Warno 1929, p. 132.

104. Voogd and Rengers Hora Siccama 1939, pp. 103-104.

in the broader context of the colonial bureaucracy, not all state agencies demonstrated high appreciation of the value of nature and wildlife reserves. In 1936, for example, the Prison Service of the Home Affairs Department proposed the conversion of one fourth of the Nusa Barung reserve into a detention facility, as had happened to the island of Nusa Kambangan.¹⁰⁵ Third, as the conservation responsibility involved both forest and civil officials, there were also problems of work regulations and work equipment.¹⁰⁶ In the field, the relationship between forest police and civil officials from the district level downward was not always harmonious. There often were suspicions that village officials did nothing to prevent villagers from violating forest and conservation regulations, which led to appeals for a more intensive cooperation between the two parties.¹⁰⁷

Aside from internal problems, serious external obstacles originated from society at large. Violations of the conservation regulations were common as reflected in the figures on forest offences. In 1926, Resident H.A. Voet reported that the number of forest offences was 1,173 in 1922, 1,025 in 1923, and 1,817 in 1924.¹⁰⁸ Considering the problem of supervision, the actual number of offences must have been higher than reported. Especially during times of hardship, an increase in the number of offences often occurred as more people saw nature and game reserves as the easiest way of escaping subsistence crises.¹⁰⁹ Unfortunately, there are no further details regarding the nature of the offences. Illegal hunting, timber stealing and forest clearing were among the most frequently mentioned cases, but other offences such as illegal grazing, forest burning, charcoal making, and tuber collection occurred as well. Illegal hunting was reported to have been rife in the Nusa Barung reserve, Baluran reserve, and also Purwo reserve, where cases of timber, bamboo, and rattan stealing were quite common also.¹¹⁰ One report revealed that the offences were mostly committed by locals, but some of them by Europeans, Chinese, and Japanese¹¹¹ as well.

There were two major roots of violations of the conservation regulations. The first was linked to the fact that the populations of the region traditionally had access to forest resources. The inhabitants of Puger, for example, were reported to have traditionally undertaken collective deer hunting and other resource uses on the island. But such activities were banned by the colonial authorities and were considered illegal with the designation of Nusa Barung

105. Appelman and Rengers Hora Siccam 1939, p. 291.

106. Lught 1933, pp. 195-198.

107. Odang 1937, p. 123; Waro 1929, p. 132.

108. ANRI, *MvO Besuki*, Resident Voet, 1922-1925.

109. Odang 1937, p. 116.

110. Appelman 1939, p. 298; Soepandar 1941, p. 27; Leefmans 1932, p. 39.

111. Appelman and Rengers Hora Siccam 1939, p. 291

Island as a nature reserve.¹¹² The continuous hunting and resource use by the locals might have been in part an indication of rejection of colonial claims and of a continuing contest over resources. It did not necessarily mean that the culprits were always and only locals, poor villagers who were forced to commit crimes in order to survive. The fact that non-locals were also among the culprits might suggest another root of the offences, representing a new development which the colonial authorities tried to stop. Besides individual actions, it is likely that behind some offences there were well-organized professionals who manipulated local villagers and made a living through crime. The fact that part of the stolen items were sold outside Besuki might be seen as evidence of this: highly valued carving wood (*sawo kecik*) to Bali and charcoal to Surabaya.¹¹³

By the 1940s, following the Japanese invasion, the situation worsened. Instead of strictly enforcing conservation measures, the Japanese did the opposite. For the sake of meat procurement, the Japanese were reported to have shot around 10,000 deer in the Hyang Highlands.¹¹⁴ In other areas, as well, similar actions seem to have been carried out, especially in the Baluran game reserve. The consequence was a steep decline in game populations in the Baluran reserve, especially wild oxen and deer.¹¹⁵ For the sake of food production, extensive forest clearing also occurred, not only at the initiative of locals, but under government sponsorship as well.¹¹⁶ In Jember, Japanese authorities provided financial support amounting to f 4,500 and rewards were promised to those who worked hard on establishing agricultural fields.¹¹⁷ Even war detainees were employed for clearing.¹¹⁸ Many violations against conservation regulations continued in the late 1940s as practically no effective control was in force and this had deep repercussions throughout the following decades.

The core problems of conservation in the 1950s and 1960s broadly remained the same, but increased in scale and became more intense. Despite the enormous conservation tasks to perform, the available resources to carry out the jobs across the country remained the same or even declined. The lack of personnel was still a major obstacle. Although there is no data for Besuki, in general there was a wide gap between the available and the required number of personnel to handle conservation matters. Many more personnel were actually needed, but in 1955 there were only about 250 personnel employed on conservation tasks

^{112.} Ibid., p. 290.

^{113.} Appelman 1939, p. 298.

^{114.} De Voogd 1946, p. 53; Hoogerwerf 1946, p. 52; Pluygers 1952, p. 49.

^{115.} Rappard 1949, p. 243; Effendi & Santosa 1984/1985, p. 29.

^{116.} Kartasubrata et al. 1986, p. 7.

^{117.} *Soeara Asia*, 16 Dec. 1943.

^{118.} *Warta Besoeki Shuu*, 20 Sept. 1944.

throughout the whole of Indonesia.¹¹⁹ Since 1961 there have been attempts at overcoming the personnel deficit, including a wildlife course at the Forestry Police School in Salatiga, followed by nature conservation courses in the Forest School, Bogor (1963), and in the Academy of Agriculture in Bogor (1964), the Academy of Architecture and Landscaping in Jakarta (1964), and the College of Biology at Padjajaran University, Bandung (1965).¹²⁰ Despite these efforts, the number of conservation personnel has remained in deficit. In 1971, the forestry personnel active in conservation numbered only 5 in the high ranks (30 were required), 50 in the middle ranks (250 were required), and 350 in the lower ranks (1,500 were required).¹²¹ More recently, the lack of personnel was still to blame for the failure to stop illegal hunting and timber stealing in the Nusa Barung nature reserve.¹²² The situation of the region's other reserves was not much different, and adding personnel has still been considered an important part of improvements.¹²³

A closely related issue to lack of personnel is the budget. Adding staff was always hard due to the limited financial capacity of the Indonesian government in the 1950s and 1960s. The budget assigned to conservation matters appears to have been far from sufficient to regularly supervise the reserves, scattered widely across the country. In 1955, nature protection in Indonesia was described as encountering "chronic financial shortage."¹²⁴ Under such circumstances, only a few reserves were well-managed, especially the Gede-Pangrango reserve (West Java). Many others, by contrast, were ill-funded and in many cases were inadequately managed by the authorities.¹²⁵ Appelman suggested that the problem of funds might be mitigated by collecting and assigning revenue—generated from hunting licenses, firearms fees, export and import taxes on various plant and animal products, and a few other sources—to nature protection rather than using it for other purposes.¹²⁶ There was dissatisfaction about the fact that the collection of revenue from reserves was under the control of the Department of Home Affairs and also the Police, while the Forest Service (Department of Agriculture and Agrarian Affairs) bore the management tasks and their incurred costs.¹²⁷

119. Nasution 1968, p. 18.

120. Taman 1968, p. 235.

121. Nasution and Taruminkeng 1971, pp. 148-151.

122. Kadri et al. 1981/1982, p. 41.

123. Beudels and Kurnianto 1982, p. 29.

124. Appelman 1955, p. 232.

125. Went 1945, p. 403; Hoogerwerf 1954, p. 197.

126. Appelman 1955, p. 232.

127. Satmoko 1955, p. 200.

In the 1950s, Hoogerwerf lamented that the bureaucrats in charge of conservation regulation enforcement often had little knowledge or a poor appreciation of the values of nature conservation, and were inclined to ignore violations.¹²⁸ In the 1950s, in Besuki, for example, a *mantri* managing the Gintingan forest of Jember illegally leased forest plots for agriculture and wood extraction.¹²⁹ A further obstacle was the fact that even within the Forestry Service there was a battle of interests. A big blow hit the conservationists in 1954, with a withdrawal of about 20,000 hectares from the Purwo wildlife reserve and its conversion into a commercial forest, producing teak and mahogany. This development seriously debilitated the reserve's role in preserving large mammals because the excised area was in fact open terrain, an essential part of their living habitat.¹³⁰ Full support was not always obtained from other state bodies. In the Baluran wildlife reserve in the 1960s, violations against the conservation regulations were in fact also committed by the armed forces in the form of hunting and conversion of part of the reserve into a military training centre.¹³¹

But serious obstacles also emerged from society at large, as a result of the contest over resources, especially between state agencies and the people when conservation measures were in force. In Jember, a conservation plan in 1951 for afforestation of 500 hectares of cleared forest lands situated in Silo-Mandiku, which was expected to reduce flood threats in the Mayang and Wirolegi areas, led to a conflict between the Forestry Service and the farmers who had been exploiting the area since the Japanese occupation.¹³² The Forestry Service was also in conflict with farmers occupying 34 hectares of land in Puger.¹³³ In Pasanggaran (Banyuwangi Regency), afforestation measures by the Forestry Service were also opposed by farmers of Kesilir village.¹³⁴ No further details regarding these cases are available, but it is certain that the contest over resources made reforestation measures hard to carry out without compromises and time-consuming negotiations. Tensions emerged when the Forestry Service demanded the return of 296 hectares of the former Pringgodani forest located in Alasbuluh, which was to be reforested. Only through a series of negotiations could the conflict eventually be settled. The farmers agreed to return the lands in exchange for the Forestry Service's willingness to cede 50 hectares for their interests.¹³⁵

128. Hoogerwerf 1954, pp. 196-197.

129. *Trompet Masjarakat*, 11 Oct. 1957.

130. Beudels and Kurnianto, 1982, pp. 4-5.

131. Sedhana 1982, p. 22.

132. *Trompet Masjarakat*, 9 June 1951.

133. *Trompet Masjarakat*, 2 Oct. 1953.

134. *Trompet Masjarakat*, 24 March 1954.

135. *Trompet Masjarakat*, 4 Aug. 1958.

While conflicts over forest lands in several places were gradually solved, encroachments on the nature and wildlife reserves continued unabated, stimulated by rising demographic pressures and limited employment opportunities. As partly indicated by recent observations, in Baluran the offences took on a variety of forms, such as timber stealing and collection of other forest products, livestock grazing, setting of fires, and temporary settlement construction by milkfish fry poachers.¹³⁶ The other reserves, too, suffered more or less from the same forms of illegal activities. If more recent observations are any indication, in the Meru Betiri area, cases of timber, bamboo and rattan stealing, sugar-palm tapping, and swidden farming by the nearby villagers have also been common. In particular, parts of the conservation areas next to settlements have been reported to have been seriously damaged, and together with estates, the adjacent settlements have continued to exert enormous pressure on the reserves.¹³⁷

The Indonesian government certainly did not turn a blind eye to the problems. Especially from the late 1960s onward, the government displayed a more serious attitude to nature conservation. At the macro level, a bigger budget was allocated to improve nature-protection management, from around US \$ 27,000 in 1969 to US \$ 250,000 in 1970.¹³⁸ In Besuki, this positive attitude was reflected by the decision made in 1968 to transfer the area previously withdrawn from the South Banyuwangi reserve used for commercial forest from Perhutani to the Direktorat PPA.¹³⁹ Unlike how bringing the area back for conservation functions on paper, doing this in the field seems to have been difficult to achieve and consumed more time for enforcement for several reasons, especially technical details regarding the existing commercial forest and the workers employed for its establishment.¹⁴⁰ But the fact that this agreement was made at all was a landmark, reflecting stronger interest in conservation matters. At around the same time, government-financed afforestation was also carried out. The regent of Jember claimed in 1973 that around 4,100 hectares of degraded areas had been reforested.¹⁴¹ Commission IV of the People's Representative Council also indicated it had fulfilled the 1970/1971 afforestation target in East Java, reaching 21,000 hectares.¹⁴²

136. Siswanto 1959, pp. 21-22.

137. Daryadi et al. 1979, pp. 26-27.

138. Boer et al. 1978, p. 149.

139. Beudels and Kurnianto 1982, pp. 5, 13.

140. Handojono 1974, p. 28.

141. Hadi 1973, Appendix 1.

142. Sekretariat DPR 1972, p. 4.

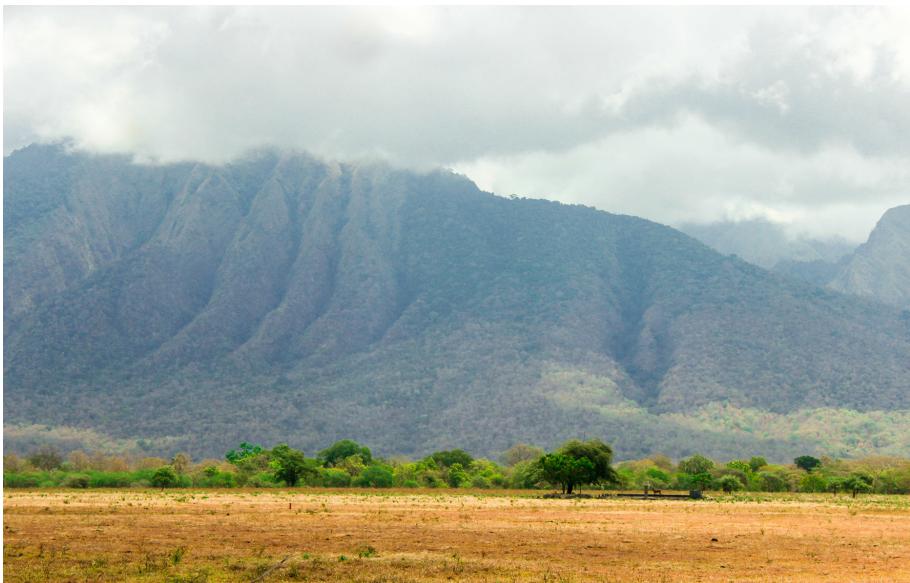


Fig. 7 – Baluran Nature Reserve (Photog.: Nawiyanto 2018)

Appeals and support from international organisations, especially the World Wildlife Fund (WWF) and the UNDP/FAO, contributed significantly to the changing attitude of the government towards nature conservation. From 1965 the WWF was already active in Indonesia and granted financial assistance to carry out conservation activities, mostly in the Ujungkulon reserve (West Java). In 1968 the WWF also provided financial support to improve the management of the Baluran game reserve.¹⁴³

Given the enormous challenges to bring about improvements, in his official visit in 1971, the WWF president directly urged President Soeharto to personally issue a statement expressing his strong concerns with flora and fauna protection to all authorities within the bureaucracy, from the Minister of Agriculture down to the regent (*bupati*).¹⁴⁴ In the 1970s, a number of conservation projects were undertaken. The Meru Betiri reserve became a WWF project in 1973, designed especially to save the endangered Javan tiger.¹⁴⁵ With a donation of US \$ 22,130 the Meru Betiri conservation project was part of the WWF international programme broadly called “Operation Tiger,” which had also been undertaken elsewhere in Asia, particularly in India.¹⁴⁶

143. Treep 1974, pp. 59-60.

144. Ibid., pp. 64-65.

145. Seidensticker and Suyono 1980.

146. Treep 1974, pp. 59-60.

Conclusion

Conservation politics were not something new to post-1970 Indonesia, and Besuki was an important element of colonial and post-colonial conservation politics. Besuki had the largest and greatest number of nature and game reserves in Java. The reasons for this were in part its position as a frontier region and its later socio-economic development compared with many other areas of Java. But the region's conservation politics were hardly unique. What happened in Besuki was a reflection of trends and processes taking place in a broader context. As elsewhere in Java, Besuki experienced the broadening conservation movement from hydrology- and soil-linked conservation for the sake of agriculture to aesthetic- and scientific-linked conservation, speaking on behalf of nature and future generations. The legal framework and measures regarding conservation put in place in Besuki were greatly credited to the colonial conservationists affiliated with the Netherlands Indies Society for Nature Protection and from a long term perspective, nature protection in Besuki clearly suggested strong colonial origins.

In the two periods, the primary problems for nature protection lay mostly in enforcement, rather than in the legal framework. A significant attempt was made by colonial authorities to improve conservation regulations. But lack of budget and qualified personnel posed serious obstacles to the enforcement of conservation regulations. Moreover, within the colonial government itself, contests over resource use were also present. Independence did little to solve the problems and the situation even worsened as illustrated by the removal of an extensive part of the Purwo and Jati-Ikan reserves to become commercial forests in the early 1950s. Another setback was reflected in the conversion of part of the Baluran game reserve into a military training area, and the involvement of some state officials in violations of conservation regulations.

Externally, the conservation regulations and measures also faced a significant challenge. Part of the challenge arose from the longstanding traditional activities linked to forest land and forest resource use, which continued to take place despite the fact they were banned under conservation regulations. Another challenge emerged from a group of individuals making a living through crimes, partly through cooperation with the local people. The fact that conservation measures often restricted direct advantages traditionally enjoyed by locals, helped to explain the unpopularity of conservation issues among Indonesians. Unsurprisingly, both the nationalist movement during colonial times and the mass-based political parties in post-colonial times hardly used nature conservation issues in their struggle. This reality also explained why, until around 1970, nature conservation in Besuki and elsewhere in colonial and post-colonial Indonesia remained very much part of government circles, state-centred, and with a stronger international thrust, rather than relying on popular support. Only from the mid-1970s did the role of non-governmental

organizations and media groups in conservation begin to grow. This is another direction for further research.

References

Archives

ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), Jakarta, Archief van Algemeene Secretarie 1918-1920, abbreviated as *AlgSec*; Memorie van Overgave Resident Besoeki 1918-1938, abbreviated as *MvO Besuki*.

Unpublished papers, reports

- Hadi, Abdul, 1973. "Gelora pembangunan daerah kabupaten Jember," *Paper*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Beudels, R.C. and Kurnianto, 1982. "Blambangan nature reserve management plan," *Field Report* (40). Bogor: UNDP/FAO National Parks Development Project.
- De Boer, I.J., N.A. Joncheere, C.S. van Beunigen, and J.M.A. van de Velde, 1978. *Report on a Study-Tour on Nature Conservation in Iran, India, Thailand, Malaysia and Indonesia*. Wageningen: Department of Nature Conservation and Wildlife Management, Agricultural University of Wageningen.
- Daryadi, Lukito, et al., 1979. "Laporan Survai Inventarisasi dan Identifikasi Flora di Suaka Margasatwa Meru Betiri Jawa Timur," *Research Report*. Bogor: Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam.
- Departemen Kehutanan, 1985; "Penilaian potensi zona penyangga taman nasional Meru Betiri. *Research Report*," Jember: Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Jawa Timur II.
- Effendi, Sulaiman and Yanto Santosa, 1985/1986. "Sistem pembinaan habitat banteng di taman nasional Baluran," *Research Report*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan.
- Handojono, Sudarto, 1974. "Suaka margasatwa Meru-Betiri," *Survey Report*. Bandung: Lembaga Ekologi Universitas Padjajaran.
- Kadri, Wartono, et al. 1981/1982. "Laporan Survai Inventarisasi Fauna di Cagar Alam Pulau Nusa Barung di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur," *Research Report*. Bogor: Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam.
- Sastrawidjaja, Kosasih, et al., 1986. "Laporan penilaian potensi cagar alam pulau Nusa Barong," *Research Report*. Malang: Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV.
- Sedhana, Made, 1982. "Kondisi ekologik taman nasional Baluran," *Research Report*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Sinaga, Walman, 1970. "Suaka margasatwa Baluran," *Research Paper*. Bogor: Direktorat Pembinaan Hutan Dinas Perlindungan dan Pengawetan Alam.

Publications

- Anonim, 1931. "Debat over prae-advies Ir. F.J. Appelman," *Tectona* 24, pp. 469-487.
- ANRI, 1978. *Memori serah jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 10.
- Appelman, F.J., 1931. "De Taak van den boschbeheerde ten aanzien van de bescherming van het wild," *Tectona* 25, pp. 77-87.
- Appelman, F.J., 1937. "De Baloeran," In: *Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch-Indië*, in C.G.G.J. van Steenis (ed.), *3 jaren Indisch natuur leven*. Batavia: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, pp. 49-56.

- Appelman, F.J., 1939. "Het schiereiland Poerwo: bosch en wild in Java's zuidoost-hoek," in C.G.G.J. van Steenis (ed.), *3 jaren Indisch natuur leven*. Batavia: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, pp. 293-298.
- Appelman, F.J. 1955. "Natuurbescherming," *Tectona* 43, pp. 218-219.
- Appelman, F.J. and F.H. Endert, 1936. "Voornaamste wettelijke bepalingen inzake dierenbescherming, jacht, en natuurnonumenten en wildreservaten," *Natuur Bescherming in Indie gedurende het jaar 1935: tiende verslag van de Nederlandsch Indische vereeniging tot natuurbescherming*. Buitenzorg: Archipel.
- Appelman F.J. and G.F.H.W. Rengers Hora Siccama, 1939. "Noesa Baroeng: Natuurmonument tegenover Besoeki's Zuidkust," in C.G.G.J. van Steenis (ed.), *3 jaren Indisch natuur leven*. Batavia: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, pp. 289-292.
- Arnscheidt, J., 2009. *Debating Nature Conservation: Policy, Law, and Practice in Indonesia*. Leiden: Leiden University Press.
- Berczy, L., 1941. "Adjaks," *De Nederlandsch Indische Jager* 11(10), p. 243.
- Boomgaard, P., 1996. *Changing Economy in Indonesia, Forest and Forestry 1823-1941*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Boomgaard, P., 1999. "Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia," *Environment and History* 5(3), pp. 257-292.
- Boomgaard, P. and A.J. Gooszen, 1991. *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 11: *Population Trends 1795-1942*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Broersma, R., 1912. *Besoeki: Een Gewest in opkomst*. Amsterdam: Scheltema and Holkema.
- Broersma, R., 1937. "Vijf en twintig jaar natuurbescherming in Indië," *Koloniaal Tijdschrift* 26, pp. 226-232.
- Clemens, A., J. Th. Lindblad, and J. Touwen, 1992. *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 12b: *Regional Patterns in Foreign Trade 1911-1940*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Coomans de Ruiter, L., 1948-1949. "Natuurbescherming in Nederlandsch-Indië," *Indonesië* 2, pp. 140-162.
- Cortesão, A. 1967. *The Suma Oriental of Tomé Pires and the Book of Francisco Rodrigues*. Nendeln: Kraus Reprint, 2 vols.
- Cribb, R., 1988. "The Politics of Environmental Protection in Indonesia," *Working Paper No. 48*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Cribb, R., 1997. "Birds of Paradise and Environmental Politics in Colonial Indonesia, 1890-1931," in P. Boomgaard, F. Colombijn and D. Henley (ed.), *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia*. Leiden: KITLV Press, p. 379-408.
- Cribb, R., 2000. *Historical Atlas of Indonesia*. Singapore: New Asian Library.
- Dammerman, K.W., 1929. *Preservation of wild life and nature reserves in the Netherlands Indies*. Weltevreden: Emmink.
- Donner, W., 1987. *Land use and environment in Indonesia*. London: C. Hurst.
- Eshuis, W., 1939; "Protection of wild life in the Netherlands Indies," *Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam* 4, pp. 201-207.
- Franck, P.F., 1937. "Het Hiang-plateau als natuurreervaat. In: *Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch-Indië*," in C.G.G.J. van Steenis (ed.), *3 jaren Indisch natuur leven*. Batavia: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, pp. 33-41.
- Van Goor, C.P. et al., 1982. *Indonesian Forestry Abstracts: Dutch Literature until about 1960*. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation.
- Groeneveldt, W., 1937. *De Natuurbescherming in Nederlandsch-Indië*. Batavia: De Unie.
- Groneman, I., 1902. *Op het Jang Gebergte in Oost Java*. Zutphen: W.J. Thieme & Cie.
- Grove, R.H., 1995. *Green imperialism: colonial expansion, tropical island Edens and the origins of environmentalism, 1600-1860*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Grove, R.H., V. Damodaran, and S. Sangwan, 1998. "Introduction," in R.H. Grove, V. Damodaran, and S. Sangwan (ed.), *Nature and the Orient: Environmental History of South and Southeast Asia*. Delhi: Oxford University Press, pp. 1-26.
- Groves, C.P., 1977. "Wildlife Reserves in Indonesia," *Indonesia Circle* 14, pp. 13-20.
- Hageman, J., 1868. "Over het Rijzen der Kusten van Oostelijk Java en Madoera," *Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 30, pp. 248-284.
- Holle, K.F., 1866. "Een groot gevaar dat sluipend nadert," *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie* 12, pp. 122-131.
- Hoogerwerf, A., 1946. "Game and Nature Protection," *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift voor Nederlandsch Indie* 102(3), p. 52.
- Hoogerwerf, A., 1948. "Het wildreservaat Baloeran," *Tectona* 38, pp. 33-49.
- Hoogerwerf, A., 1953. "Perlindungan alam dan pemburuan di Indonesia," *Almanak Pertanian*. Jakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian.
- Hoogerwerf, A., 1954. "Perlindungan alam dan pemburuan di Indonesia," *Almanak Pertanian*. Jakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian.
- Hoogerwerf, A., 1974. "Report on a Visit to Wildlife Reserves in East Java, Indonesia (August to November 1971)," *Mededelingen* (21). Austerlitz: Netherlands Commission for International Nature Protection, pp. 1-51.
- Hoogerwerf, W. and C.G.G.J. van Steenis, 1936. "Berichtgeving omtrent Natuurbescherming in 1935," in *Natuur Bescherming in Indie gedurende het jaar 1935: tiende verslag van de Nederlandsch Indische vereeniging tot natuurbescherming*. Buitenzorg: Archipel, pp. 4-104.
- Hutabarat, A.A., 1972. "Suaka alam dan pembinaannya," *Gema Perhutani* 41(11-12), pp. 10-16.
- Kartasubrata, et al., 1986. *Sejarah kehutanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Kiès, C.H.M.H., 1936. "Nature Protection in the Netherlands Indies," *Special Publication* (8). Cambridge: American Committee for International Wild Life Protection.
- Koning, J., 1928. "Na Vijftig Jaren Tropenarbeid: een Gemoedelijk Praatje met een Gemoedelijk Man," *Eigen Haard* 54(6), pp. 104-106.
- Lam, H.J., 1923. "Verslag van den 1sten Secretaris Nederl. Indische Vereeniging tot Natuurbescherming," *Verslag over 1920-1922*. Buitenzorg: Archipel.
- Ledeboer, A.J.M., 1934. *Natuurbescherming door particulieren, het Jang-plateau Oost-Java Nederlandsch-Indië*. s.l.: s.n.
- Leefmans, S., 1932. "Verslag der Jaarvergadering op 29 Maart 1931 Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming," *Verslag over de jaren 1929-1931*. Buitenzorg: Archipel.
- Lombard, D., 1983. "Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Hutan," in M. Bonneff et al., *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, p. 262-278.
- Lombard, D., 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya*, Vol. 3: *Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Lught, C.S., 1933. "De natuurbescherming in Nederlandsch-Indië," *Tectona* 26, p. 186-198.
- MacKinnon, K., 1986. *Alam Asli Indonesia: Flora, Fauna, dan Keserasian*. Jakarta: PT Gramedia.
- Manuputty, 1953. "Pemakaian tanah yang tidak syah dalam hutan di Djawa," *Rimba Indonesia* 2(10-12), pp. 485-489.
- De Meyier, J.E., 1903. "Het boschwezen en de Politie," *De Indische Gids* 25(1), pp. 709-715.
- Mo, T.T., 1957. "Kebuasan manusia terhadap binatang liar harus dihindarkan," *Rimba Indonesia* 6(3-5), pp. 107-176.
- Myers, R., and Mumu Muhajir, 2015. "Searching for Justice: Rights vs 'Benefits' in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia," *Conservation and Society* 13(4), pp. 370-381.

- Nasution, Hasan Basjarudin, 1968. "Recent Development in the Field of National Park, Nature Reserve and Natural Areas," *Rimba Indonesia* 13(1-4), pp. 12-29.
- Nasution, Hasan Basjarudin 1971. "Perlindungan alam dan pembinaan margasatwa suaka alam dan hutan wisata," *Warta Pertanian* 12, pp. 4-8.
- Nasution, Hasan Basjarudin and T.C. Taruminkeng, 1971. "Nature Conservation Education in Indonesia," *IUCN Publication* 20, pp. 148-151.
- Odang, R., 1937. "Iets over boschpolitie," *Het Bosch* 4, pp. 115-123.
- OMV, 1908. *Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera*, Vol. 7 (14): *samentrekking van de afdeelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoeken naar de Irrigatie in de residentie Besoeki*. Batavia: Albrecht.
- Peluso, Nancy-Lee, 1992. *Rich forests, poor people: resource control and resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Piepers, M.C., 1896. "Door welke maatregelen kan tot eene rationele bescherming der inheemsche dieren-en plantenwereld in Nederlandsch Indië worden gekomen?," *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië* 25(1), pp. 38-72.
- Pluygers, L.A., 1952. *Natuurbescherming en wildbeheer, special met betrekking tot Indonesië*. Djakarta: B. Wolters.
- Poerwokoesoemo, Soepardi, 1956. *Jati Jawa (Tectona grandis Linn.)*. Jakarta: No publisher.
- Potter, L., 2003. "Forests versus Agriculture: Colonial Forest Services, Environmental Ideas and the Regulation of Land-Use Change in Southeast Asia," in L. Tuck-Po, W. de Jong, and A. Ken-ichi (ed.), *The political ecology of tropical forests in Southeast Asia: historical perspective*. Kyoto: Kyoto University, pp. 29-71.
- Rappard, F.W., 1949. "Verband in een Oost-Javaanse Bantengkunde," *Chronica Naturae* 105 (10), pp. 243-247.
- Rengers Hora Siccamo, G.F.H.W., 1940. "Berichtgeving omtrent Natuurbescherming over 1936-1938: Onderwerpen van Algemeen Aard," *Het Bosch* 7(1), pp. 84-98.
- Ricklefs, M.C., 1998. *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749*. St. Leonards: Allen and Unwin.
- Sandbergen, F.J.W.H., 1932. "Natuurbescherming," *Koloniaal Tijdschrift* 21, pp. 433-459.
- Santoso, Trio et al., n.d., *Buku informasi kawasan konservasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II*. Jember: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II.
- Satmoko, Koesnadi P., 1953. "Arti perburuan sekarang," *Rimba Indonesia* 2(10-12), pp. 405-412.
- Satmoko, Koesnadi P., 1955. "Tugas Perlindungan Alam/Margasatwa Djawatan Kehutanan," *Rimba Indonesia* 4(3-5), pp. 405-412.
- Schuitemaker, J.P., 1950. *Bos and bosbeheer in Java*. Djakarta: Groningen.
- Schulze, L.F.M., 1890. *Fuhrer auf Java: Ein Handbuch für Reisende*. Leipzig: Grieben's Verlag.
- Seidensticker, J. and Suyono, 1980. *The Javan tiger and the Meru Betiri reserve: A plan for management*. Gland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
- Sekretariat DPR. 1972. *Laporan penindjauan komisi IV (departemen pertanian, departemen tenaga kerja, dan departemen transmigrasi dan koperasi.) D.P.R.-R.I. pada masa reses persidangan ke-III tahun sidang 1971-1972*. Djakarta: Sekretariat DPR Republik Indonesia.
- Setijodiwirjo, Koesnoto, 1957. "Masalah perlindungan alam di Indonesia," *Insinjur Indonesia* 4(17-18), pp. 4-12.
- Siburian, Robert, 2008. "Taman Nasional Kuai dan Perebutan Sumberdaya Alam," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 10(2), pp. 89-116.
- Siburian, Robert, 2010. "Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusarung dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12(1), pp. 119-144.
- Siswanto, 1959. "Nener dan suaka margasatwa," *Berita Perikanan* 11(2), pp. 21-22.

- Situmorang, Abdul Wahib, 2013. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia 1968-2011*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smiet, A.C., 1990. "Forest Ecology on Java: Conversion and Usage in a Historical Perspective," *Journal of Tropical Forest Science* 2(4), pp. 286-302.
- Smiet, F., 1987. "Tropical Watershed Forestry under Attack," *Ambio* 16(2-3), pp. 156-157.
- Soepandar, 1941. "Een banteng onder de rook van Banjoewangi," *Het Bosch* 8(1), pp. 25-27.
- Sri Margana, 2012. *Perebutan Hegemoni Blambangan: Ujung Timur Jawa 1763-1813*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Van Steenis, C.G.G.J., 1939. "Natuurbescherming in Netherlands-Indië van botanist standpunt," *Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 99, pp. 148-163.
- Van Steenis, C.G.G.J., 1972. *The mountain flora of Java*. Leiden: E.J. Brill.
- Talbot, L.M., and M.H. Talbot, 1968. Editors' introduction. *IUCN Publications New Series* (10), pp. 15-17.
- Taman, I.M., 1968. "Training for Effective Careers in Conservation in Indonesia," *IUCN Publications New Series* 10, pp. 235-236.
- Ted, 1974. "Dimana engkau banteng," *Gema Perhutani* Special Edition, pp. 94-98.
- Treep, L., 1974. "On the tiger in Indonesia (with special reference to its status and conservation)," *A.L.H. Report* (164). Wageningen: Department of Nature Conservation and nature Management, Agricultural University.
- V. d. V. 1941. "Onbezoldigde politie-ambtenaren," *De Nederlandsch Indische Jager* 11(12), p. 252.
- Van Vuuren, L., 1929. "Geographical Aspect of the Netherlands East Indies," in L.M.R. Rutten (ed.), *Science in the Netherlands East Indies*. Amsterdam: De Bussy, pp. 1-37.
- Veth, P.J., 1903. *Java: Geographisch, Etnologisch, Historisch*, Vol. 3. Haarlem: Bohn.
- De Voogd, C.N.A., 1946. "Rechtlijnen voor een Doeltreffende Jachtregeling en Natuurbescherming in Nederlands-Indië," *Tectona* 36, pp. 41-58.
- De Voogd, C.N.A., and G.F.H.W. Rengers Hora Siccama, 1939. "Onderwerpen van Lokalen Aard: Residentiegewijs Gerangschikt," in C.G.G.J. van Steenis (ed.), *3 jaren Indisch natuur leven*. Batavia: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, pp. 49-154.
- Van der Wal, S.L. (ed.), 2001. *Kenang-kenangan pangreh praja Belanda 1920-1942*. Jakarta: Jambatan and Perwakilan KITLV.
- Warno, 1929. "Perloe diketahoei (bagi kita polisi hoetan)," *Soeara Boschwezen* 6(5-6), pp. 131-132.
- Went, F.W., 1945. "The Tjibodas Biological Station and Forest Reserve, a Naturalist Paradise," in Pieter Honig and Frans Verdoorn (ed.), *Science and Scientists in the Netherlands Indies*. New York City: Board for the Netherlands Indies, Surinam and Curaçao, p. 403.
- Westermann, J.H., 1945. "Wild Life Conservation in the Netherlands Empire, its National and International Aspects," in Pieter Honig and Frans Verdoorn (ed.), *Science and Scientists in the Netherlands Indies*, New York City, Board for the Netherlands Indies, Surinam and Curaçao, pp. 417-424.
- Whitten, T., R.E. Soeriaatmadja, and S.A. Afiff, 1996. *The Ecology of Java and Bali*. Singapore: Periplus Editions.
- Wijnmaalen, H.J., 2001. "Ambtenar BB di Jawa Timur, 1926-1932," in S.L van der Wal (ed.), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda, 1920-1942*. Jakarta: Perwakilan KITLV and Djambatan, pp. 190-214.
- Yudistira, Pandji, 2014. *Sang Pelopor: Peranan Dr SH Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Kementerian Kehutanan.
- Yuwono, Harto, 2013. *Sejarah Konservasi Alam di Indonesia*. Kapuas: Balai Taman Nasional Danau Sentarum.

TÉMOIGNAGES

SALMIAH CHANAFIAH PANE

Mon père

(Traduit et introduit par Henri Chambert-Loir)

Le texte ci-dessous est tiré des mémoires d'un couple d'intellectuels indonésiens d'orientation socialiste, qui terminèrent leur vie en exil : *Perjalanan Jauh: Kisah Kehidupan Sepasang Pejuang* (Un long voyage : la vie d'un couple de combattants), de Ali Chanafiah et Salmiah Chanafiah Pane (Bandung : Ultimus, 2010)¹. Le texte original constitue le chapitre 4 du livre et s'intitule « Padang Sidempuan », parce que tous les chapitres portent un nom de ville.

Le livre a été principalement écrit par le mari, mais la femme a rédigé quelques chapitres (trois sur vingt-et-un), qui portent la marque d'une sensibilité distincte. Il est significatif qu'elle ait choisi de dresser le portrait de son père, alors qu'aucun autre de leurs parents n'a droit à ce privilège. Elle emploie le mot *toba* *ompung* (grand-mère) comme substitut du pronom personnel « je », de même que Ali Chanafiah emploie, lui, le mot javanais *eyang* (grand-père), parce que tous deux écrivent, à un âge avancé, pour leurs petits-enfants. Traduire (ci-dessous) par « je » est réducteur parce que le pronom ignore la connotation familiale, à la fois intime et distante, du mot *ompung*, mais il était impossible de traduire : « Mamie ne sait pas au juste quelle fut l'éducation de son père ».

Eyang et Ompung ont donc rédigé ce livre comme un document réservé à leur famille (« Nous n'avons pas écrit ces mémoires pour le public, mais pour nos petits-enfants, et leurs propres enfants et petits-enfants à leur tour », p. 426), comme c'est

1. Nous remercions M. Kadri Chanafiah de nous avoir autorisé à publier la traduction française d'un extrait des mémoires de ses parents.

le cas d'autres mémoires d'exilés ou d'anciens *tapol*, mais leurs enfants ont décidé de le publier, et l'on peut s'en féliciter, car il s'agit d'un témoignage passionnant sur deux acteurs de la vie sociale et politique, dans l'Indonésie du XX^e siècle, en même temps que sur divers sujets relatifs à cette période, notamment sur le personnage qui est le sujet du chapitre traduit ci-dessous et sur Bengkulu dans les années 1920-1930 (le cinéma ; le théâtre *bangsawan* ; le *rebaaker* [Rabu akhir], fête du dernier mercredi du mois de Syawal ; le *tabot*, fête du 10 Muharam ; ou encore le séjour de Soekarno en exil, en 1938).

Ali Chanafiah et Salmiah Pane se sont rencontrés à Yogyakarta, où ils étudiaient tous les deux. Il est né en 1916, elle un an plus tard. Tombés amoureux à l'adolescence, ils se marièrent à 20 et 19 ans respectivement, au moment où ils s'installaient à Bengkulu pour ouvrir une branche du Taman Siswa.

Lorsqu'elle relate le mariage de ses parents, Salmiah Pane utilise l'expression « *kawin lari* », qui signifie littéralement « mariage par fugue » ou « par enlèvement », ce qui existe effectivement dans quelques régions d'Indonésie (Lampung, Bali, Bugis, etc.), mais qui représente, à Tapanuli, une coutume totalement différente : il s'agit bien d'un cas de transgression de la norme coutumière, mais une transgression prévue et codifiée par la coutume. L'expression *kawin lari* est traduite ci-dessous par « mariage par contrainte » ; au contraire du « mariage forcé », dans lequel les parents imposent leur choix aux mariés, ce sont ici les mariés qui imposent leur choix à leurs parents, et le procédé est assez surprenant.

À la génération suivante, Ali Chanafiah et Salmiah Pane présentèrent un cas similaire de différences sociales contraires aux conventions maritales : il était d'origine noble, elle roturière ; il était javanais, elle batak ; ils étaient résolument modernistes et réglèrent le problème en se mariant, en 1936, sans attendre le consentement de la famille d'Ompung. Ils fixèrent le montant de la dot à la somme minumum autorisée, deux *ringgit*, et encore « deux *ringgit* par dette », car ils ne possédaient même pas cette somme.

C'était une époque d'engagement total et inconditionnel à une cause sociale et donc politique, une époque de privation, de dévouement et de sacrifice passionné. Ils furent socialistes, marhanéistes, communistes ; lui devint membre du Comité central du Parti communiste et membre du parlement provincial. Le récit de leur action à Bengkulu est exemplaire ; il rappelle par certains points l'atmosphère du roman de Suwarsih Djojopuspito, *Buiten het gareel* (Hors du joug, 1940). Mais le rôle enivrant d'éducateurs que connaît le couple durant les années cruciales précédant l'indépendance et pendant le gouvernement de Soekarno se termine dramatiquement en 1965. Lui a été nommé ambassadeur à Colombo l'année précédente. Ils doivent bientôt se rendre à l'évidence : ils n'ont plus le droit de vivre en Indonésie (le passage relatant l'entrevue que Soeharto accorda à Ali Chanafiah, en novembre 1965, p. 285, est un morceau d'anthologie).

Après quatorze années d'exil à Moscou, ils s'installent en Suède. Onze ans plus tard, ils visitent l'Indonésie en tant que citoyens d'un pays européen. Ils y retourneront à plusieurs reprises et mourront à Jakarta, en 2002 et 2007 respectivement. Ce livre est l'histoire d'une tragédie indonésienne, l'histoire d'idéaux d'équité sociale et de démocratie soldés par l'opprobre et l'exil.

Le chapitre que Salmiah Pane dédie à son père dresse le portrait d'un homme exceptionnel dans une période de transition, un homme que son énergie inépuisable et ses idéaux politiques conduisirent à créer une entreprise après l'autre dans le but de développer la société dans laquelle il vivait. Après une carrière d'instituteur, et donc de petit fonctionnaire dans l'administration coloniale, qui l'amena à travailler dans diverses villes du nord de Sumatra, il se lança, de sa propre initiative, dans toutes sortes d'activités inattendues, qui lui attirèrent souvent la désapprobation de sa famille ou de l'administration.

Il écrivit et publia lui-même des poèmes didactiques (des *syair*, poèmes narratifs faisant partie des genres traditionnels de la littérature malaise) et des manuels d'apprentissage de la lecture. Le passage sur les vendeuses du marché de Padang Sidempuan qui psalmodient des *syair* en attendant le chaland mériterait de figurer dans les histoires de la littérature malaise. Il récolta et enregistra sur disque des chansons populaires de sa région. Il se fit imprimeur ; il publia un journal d'inspiration sociale et nationaliste, qui fut plusieurs fois interdit ; il eut un rôle de premier plan dans le développement à Sumatra Nord de la Muhammadiyah (l'organisation musulmane réformiste créée à Java en 1912) ; il se mêla également de politique, en faveur des partis Partindo (parti nationaliste créé en 1931 pour succéder au PNI, Partai Nasional Indonesia, de Soekarno) et Gerindo (Gerakan Rakyat, dont l'un des dirigeants était Adnan Kapau Gani, cité ci-dessous comme « Dr. Gani »).

Puis il s'installa à Java, successivement à Jakarta et à Yogyakarta, où il créa de nouvelles sociétés. Au moment de partir pour Java, il avait deux assistants, on ne sait à quel titre, qui allaient tous deux se faire un nom : Bakri Siregar et Todung Harahap. Bakri Siregar (1922-1994), d'origine acihaise, se fit connaître comme écrivain et membre du LEKRA (l'Institut de la culture populaire créé en 1950 par les dirigeants du Parti communiste) ; il enseigna en Pologne et en Chine, et il passa douze années en prison après 1965. Todung Harahap (1896-1966), plus connu sous le nom de Todung Sutan Gunung Mulia, d'origine batak angkola, participa à la création du Partai Kristen Indonesia, en 1945, et fut brièvement ministre de l'Education dans le Cabinet Sjahrir, en 1945-1946.

Personnage exceptionnel, en constante résonnance avec son temps, Sutan Pangurabaan fait partie de ces obscurs acteurs sociaux, innombrables, qui n'ont pas de place dans l'histoire nationale, bien qu'ils aient massivement contribué au développement de la société. L'auteure cite deux fois les escales de son père à Bengkulu, lors de voyages entre Sumatra et Java, parce que c'est là qu'elle habitait à l'époque, de sorte que, bien qu'elle ne le raconte pas, ce furent pour elle des occasions de le revoir.

Ce texte, d'une simplicité et d'une modestie émouvantes, contient une très grande quantité d'informations sur un homme au destin peu ordinaire, mais aussi sur un milieu, la société batak Toba de Sumatra Nord, et sur une époque, la période, entre 1910 et 1945, de l'action nationaliste, de la naissance de grandes organisations de masse religieuses et de partis politiques, et ses prolongements jusqu'en 1955, date de la mort du personnage.

Cet aventureur de l'esprit, qui déménagea constamment d'une ville à une autre, présente encore un autre intérêt, d'un ordre totalement différent : il est le père de trois figures bien connues de l'histoire indonésienne contemporaine : Sanusi, Armijn et Lafran Pane. Lafran Pane (1922–1991), professeur de sciences politiques à l'université Gadjah Mada et à l'université islamique de Yogyakarta, s'est rendu célèbre en participant à la création, en 1947, du Himpunan Mahasiswa Islam (Association des étudiants musulmans), dont il est aujourd'hui considéré comme le fondateur. Il a été nommé Héros national (*pahlawan nasional*) tout récemment, en novembre 2017. Mais ce sont surtout ses frères aînés, Sanusi et Armijn, qui ont marqué l'histoire intellectuelle des débuts du XX^e siècle : auteurs de romans, nouvelles, pièces de théâtre, poèmes et essais, dont certains textes en néerlandais, ils ont participé au « débat sur la culture » (*polemik kebudayaan*) des années 1930 et ont contribué au développement de la langue indonésienne comme organe littéraire de la nation en devenir. Les notices biographiques les concernant ignorent leur père, et les Indonésiens qui ont appris leur nom à l'école ne s'imaginent certainement pas ce père mystérieux sous les traits de Sutan Pangurabaan, dont on va lire le parcours biographique.

*
**

PADANG SIDEMPUAN

Le hameau de Pangurabaan à Sipirok

D'après ce que j'ai entendu, on l'appelait Sutan Pangurabaan. Ce n'était pas le nom que lui avaient donné ses parents lors de sa naissance, mais son titre. Dans notre région, en effet, il était de coutume de donner un titre à un homme lors de son premier mariage. Avec le temps, les gens évitaient de plus en plus d'employer le prénom d'une personne et préféraient l'appeler par son titre. La raison en était que, la personne prenant de l'âge, il aurait été impoli pour ses cadets de l'appeler par son prénom. Il pouvait aussi être objet de respect. Dans le cas de mon père, c'est surtout le respect qui poussait les gens à utiliser son titre.

Ce titre venait du nom d'un hameau de la bourgade de Sipirok : Pangurabaan, dont tous les hommes portaient le nom du clan Pane. Les enfants suivaient le clan de leur père. Les femmes appartenaient à d'autres clans parce que la coutume n'autorisait pas le mariage entre gens du même clan. Les femmes du clan Pane épousaient des hommes d'autres clans et allaient habiter le village de leur mari.

Les chefs de famille de ce hameau étaient tous plus ou moins apparentés. C'est là que mon père est né et a été élevé. Quand est-il né, je ne le sais pas, et pas non plus quand a eu lieu son premier mariage. À l'époque, il était inconvenant de poser des questions sur nos parents. Et puis, depuis l'enfance, j'ai pour ainsi dire vécu séparée de mon père.

D'après ce que m'a dit ma sœur aînée, mon père était fils unique. Son père était mort avant d'avoir eu d'autres enfants, et sa mère ne s'était pas remariée. Elle avait entretenu son fils en cultivant un lopin de terre et en filant de la laine. Tissage et filage étaient les moyens de subsistance des femmes du village.

Mes parents se marient par contrainte

Mon père avait épousé, en premières noces, une jeune fille du clan Siregar, ma mère. Toujours d'après ma sœur, notre mère se maria par contrainte parce que sa famille désapprouvait son choix, et cela pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle appartenait à une famille noble de Sipirok ; mon père n'était pas un roturier, mais la famille de ma mère le considérait comme inférieur. D'autre part, mon père était orphelin et pauvre.

Le mariage par contrainte, dans ma région, ne se passait pas comme à Sumatra Sud, par exemple, où les fiancés se présentent devant l'imam, l'uléma local ou le chef coutumier et demandent à être mariés. Chez moi, la jeune fille, accompagnée d'une ou deux femmes plus âgées, se rend à la maison du garçon, généralement dans la soirée. La famille du garçon les reçoit, mais celui-ci ne se montre pas, bien qu'il ait organisé lui-même la rencontre.

Le parti de la jeune fille s'installe dans la salle de réception, et elle y dort jusqu'au terme de la négociation, qui peut durer des semaines. Le premier soir, la famille du garçon se réunit. Les anciens du village demandent au parti de la jeune fille quelles sont ses intentions. Les échanges se font en général à l'aide de mots poétiques, de pantouns et de métaphores. L'une des accompagnatrices répond en langage fleuri que la visite de la jeune fille a pour but de rencontrer la famille de... (elle cite le nom du garçon), afin d'être acceptée comme une des leurs.

Les anciens promettent de régler la question avec la famille de la jeune fille. Une concertation a lieu pour désigner les émissaires qui seront chargés de mener la discussion. Parfois, la négociation entre les deux parties traîne en longueur, voire échoue; parfois, elle est aisée. Lorsque les parents de la jeune fille ont nommé un représentant, le mariage peut avoir lieu. À partir de cet instant, la jeune fille est membre de la famille. Elle a droit à une place dans la maison et à vivre avec son mari. Elle a également le devoir d'aider à accomplir toutes les tâches nécessaires à la vie quotidienne.

La cérémonie traditionnelle de mariage a lieu après les formalités. À ce que je sais, les parents de ma mère refusèrent catégoriquement la demande de mon père. Les frères aînés de ma mère lui rendirent visite à plusieurs reprises pour la persuader de renoncer à son projet et de rentrer à la maison. Ma mère

fut inflexible. Finalement, ce sont ses parents qui cédèrent.

Mon lieu de naissance

Je ne sais pas au juste quelle fut l'éducation de mon père. Il semble qu'il ait été formé à l'enseignement dès sa sortie de l'école primaire. Il fut longtemps instituteur, depuis le grade d'assistant jusqu'à devenir directeur d'une Tweede Inlandsche Kweekschool (École normale indigène secondaire), qui était familièrement appelée « école malaise de deuxième classe ». Par la suite, mon père reçut une pension du gouvernement néerlandais.

Il y avait à l'époque ce qu'on appelait l'École de village, qui durait trois ans et avait simplement pour but de former des petits fonctionnaires qui ne soient pas analphabètes. Il y avait aussi des écoles primaires de six ans, comme celle que dirigeait mon père. On n'y enseignait pas le néerlandais. L'objectif se limitait à satisfaire les besoins de l'administration en clercs et secrétaires. Les lauréats pouvaient poursuivre leurs études dans des écoles techniques : infirmerie, agriculture, etc. Il y avait encore des écoles primaires de sept années, appelées Hollands-Inlandse School (HIS, École indigène néerlandaise). Les lauréats pouvaient entrer dans le cycle secondaire et le cycle supérieur.

Mon père fut d'abord instituteur à Sipirok. Peu après son mariage, il fut muté à Padang. C'est là que naquit leur premier enfant, une fille du nom de Siti Angat Pane. Mon père fut ensuite muté à Muara Sipangi, une bourgade de Tapanuli Sud, à la limite de la résidence de Sumatra Ouest. Il y enseigna longtemps. Ma mère donna naissance à ses deuxième, troisième et quatrième enfants dans cette ville. Les deux premiers sont les garçons qui seraient plus tard connus, en Indonésie et dans plusieurs pays étrangers, comme hommes de lettres : les deux frères Sanusi Pane et Armijn Pane. Le quatrième était une fille, que l'on nomma Siti Asmah Pane. Par la suite, mon père fut muté à Padang Sidempuan, le lieu de ma naissance, moi, le cinquième enfant et la troisième fille. Je suis née le 28 août 1917 et reçus le nom de Siti Zalmiah Pane.

Au moment de ma naissance, mon père fut promu directeur d'école. Alors que j'étais sur les bancs de la HIS, je lus dans le journal un article sur mon père à l'époque où il enseignait à Padang Sidempuan. On y disait qu'il aidait volontiers les élèves incapables de payer les frais de scolarité. Il en logeait plusieurs chez lui, parmi lesquels certains firent de bonnes études et obtinrent une bonne situation dans l'administration. Dans toutes les localités où il a travaillé, il ne bornait pas son activité d'enseignant et d'éducateur à sa salle de classe. En dehors des horaires de l'école, il fréquentait les élèves et organisait des activités éducatives. Les enfants, d'ailleurs, considéraient sa maison comme celle de leurs parents.

En tant que fonctionnaire, mon père devait être prêt à être muté à tout instant. De Padang Sidempuan, il fut transféré à Sumatra Nord, dans la ville de Labuhan Bilik. Auparavant, mes parents marièrent leur fille aînée à un vétérinaire du

clan Siregar, lui aussi originaire de Sipirok. Seuls quatre enfants les suivirent donc à Labuhan Bilik, où naquit ma dernière sœur cadette, Siti Zahara Pane. Au bout de quelques années, mon père fut à nouveau muté à Tapanuli, au hameau de Panyabungan. Ce nom est aussi le prénom de mon père. Mes aînés ne le suivirent pas dans cette nouvelle affectation. Sanusi Pane et Armijn Pane poursuivirent leurs études à Sibolga, puis à Bukittinggi et à Padang, et plus tard encore à Batavia. Ma sœur aînée était à la HIS de Sipirok et vivait chez ma grand-mère maternelle. Elle aussi partit à Batavia après avoir fini la HIS. Seules ma sœur cadette et moi-même étions chez nos parents.

Ma mère et ma sœur nous quittent

Peu après notre installation à Panyabungan, Zahara et moi tombèrent malades. Je me rétablis, mais ma petite sœur nous quitta. À partir de ce moment, ma mère fut constamment malade. Peut-être était-elle accablée par une tristesse irrépressible, à moins qu'elle n'ait attrapé la malaria – les deux, peut-être. Elle était alors enceinte, et mon père décida de nous conduire toutes les deux au village [de Pangurabaan]. C'est là que ma mère donna naissance à son septième enfant, un garçon, mais son mal ne diminua pas et ne fit même qu'empirer. Sa vue devint trouble, et elle était si faible qu'elle ne pouvait pas s'occuper de mon petit frère. Ma grand-mère fut obligée de le prendre chez elle, de s'occuper de lui et de l'élever. Mon père l'appela Lafran Pane, du nom du médecin qui avait découvert le moustique anophèle porteur de la malaria. Plus tard, Lafran serait connu comme professeur à Yogyakarta et fondateur du HMI (Himpunan Mahasiswa Islam, l'Union des étudiants musulmans).

Tel était apparemment le sort de ma mère, de souffrir durant la fin de sa vie. Comme tout le monde, elle ne put échapper au destin. Elle retrouva santé et énergie, mais sa vue continua de se détériorer. Elle apprit que mon père s'était remarié, à Panyabungan, avec une femme divorcée qu'elle connaissait, la sœur cadette d'une collègue et amie. Elle refusa tout d'abord d'y croire : ce n'étaient que ragots. Mais l'enquête de ses frères et sœurs l'obligea à faire face à l'amère vérité. Elle eut beaucoup de mal, semble-t-il, à accepter la réalité, d'autant plus que mon père avait agi à son insu, en secret. Toutes sortes d'émotions l'assaillirent, qui lui oppressaient la poitrine : triste d'avoir perdu un enfant, affligée que son mari ait pris une deuxième femme, découragée par la maladie de ses yeux, que sais-je encore. N'ayant jamais été autonome, ayant toujours dépendu de son mari, que pouvait-elle faire sinon pleurer, pleurer sans trêve ?

Ses enfants adultes étaient tous loin d'elle. Pour une raison obscure, elle ne retourna pas chez ses parents, qui étaient âgés, mais toujours vivants. Elle avait également des frères et des sœurs. Peut-être était-elle immobilisée par la coutume, qui interdisait à une femme non divorcée de rentrer chez ses parents. Mon père, quant à lui, ne pouvait la répudier alors qu'elle était malade. Peut-être aussi ma mère poursuivait-elle la logique de son mariage par

contrainte d'autrefois : elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre en subisse les conséquences. À ce qu'on dit, ses yeux ne présentaient aucun défaut, mais ses nerfs ne fonctionnaient plus, et elle devint totalement aveugle.

Dès qu'elle était tombée malade, mon père avait demandé son transfert à Sipirok. Il ne l'obtint qu'après avoir épousé sa seconde femme. Ma mère ne pouvait pas ignorer qu'il s'était installé en ville avec sa nouvelle épouse. L'obscurité absolue sans le moindre éclat de lumière, les ténèbres caverneuses sans l'ombre d'un espoir, furent apparemment au-dessus de ses forces. Elle mourut dans l'isolement, dans la maison de ses beaux-parents, à Pangurabaan, après être restée deux journées sans se montrer.

À l'annonce de la funèbre nouvelle, ma sœur aînée, qui habitait alors à Kandangan, à Kalimantan, vint à Sipirok avec ses enfants. Il se trouve que son mari fut, à cette époque, muté à Lhokseumawe, à Aceh. Mon père dut alors subir une attaque en règle de sa fille aînée sur sa conduite envers sa femme et ses enfants. Il en résulta un tel ressentiment qu'ils ne se virent pas pendant des années. Mon père refusa de nous confier, moi et mes cadets, à notre sœur aînée, comme elle le demandait.

Elle demeura longtemps chez nous avec sa famille. Elle prévoyait de m'emmener à Aceh, mais mon père fit tout pour s'y opposer. Il demanda au directeur de mon école de ne pas me donner un permis de déménager. Il déclara qu'il avait le droit de s'occuper de moi et de prendre des décisions jusqu'à ma sortie de la HIS. Ma sœur, bien sûr, ne pouvait avoir gain de cause. Je retournai donc, ainsi que ma sœur cadette, vivre chez mon père et ma belle-mère. Mon père fut transféré à Barus, une bourgade du sud de Tapanuli. Peu après, ma sœur aînée revint avec ses enfants, son mari étant envoyé aux Pays-Bas pour quatre ans, afin de poursuivre ses études. J'eus donc la chance de pouvoir habiter chez elle jusqu'à la fin de l'école. Mon père ne demeura pas longtemps à Barus ; il rentra à Sipirok avec droit à la retraite.

Vendeur de livres au marché

Une fois libéré de la discipline des fonctionnaires, mon père put développer à loisir son goût pour l'écriture et pour l'action sociale. Il publia bientôt plusieurs livres d'histoires relatives à la coutume, la religion et l'histoire, ainsi que des *syair* et des pantouns. Des marchés avaient lieu, une fois par semaine, à Sipirok, Padang Sidempuan et dans d'autres petites villes. Les marchands des villes et des villages alentour s'y pressaient. Les jours différaient d'une bourgade à l'autre, si bien que les commerçants pouvaient porter leurs marchandises dans les divers lieux à tour de rôle, et mon père profitait de ces occasions pour diffuser ses livres. Il les vendait lui-même, au milieu du marché, criant et apostrophant les gens de façon très personnelle. À qui lui demandait pourquoi il les vendait lui-même, il répondait : « N'importe qui ne peut pas vendre des livres. Il y a une façon de faire. Ce n'est pas comme

vendre du poisson ou des légumes. »

Selon lui, un retraité avait besoin d'une occupation, sans quoi il se perdrat dans ses pensées en attendant le jour de la mort. Afin de développer son activité, il éprouva le besoin d'acheter une imprimerie à Padang Sidempuan. La ville avait une position stratégique sur la route reliant Sumatra Nord à Sumatra Ouest. Il s'y installa donc et se consacra à l'édition. Il se lança aussi dans le monde de l'alphabétisation, en rédigeant des manuels pour ceux qui apprenaient l'alphabet, ceux qui pouvaient déjà lire des phrases simples, et ceux qui voulaient s'exercer à la lecture, tout ceci conçu de sorte que les gens puissent apprendre par eux-mêmes. Si je me suis personnellement occupée d'alphabétisation dans le contexte de l'Indonésie indépendante, mon père, lui, fut actif dans ce domaine durant la période coloniale, avant l'indépendance.

Mon père connaissait apparemment le succès dans ses entreprises. Pas sur le plan matériel, certes, mais d'un point de vue moral et spirituel, et c'est cela qu'il escomptait. Quiconque passait devant les échoppes du marché, en particulier dans la partie la moins fréquentée, comme celle des marchands de batik, pouvait entendre les vendeuses lire à haute voix les *syair* de mon père, afin de lutter contre la solitude et contre le sommeil. Il faut dire que les radios étaient encore rares. Il m'est arrivé de fuir les boutiques de vêtements, à Padang Sidempuan, parce que, dans chaque échoppe, quelqu'un lisait un *syair* de mon père en le psalmodiant. On disait que ses livres avaient du succès dans les autres villes aussi, pas seulement à Tapanuli, mais également à Sumatra Ouest et Sumatra Nord.

La plupart des habitants de Padang Sidempuan vivaient du commerce. Sur le côté de leur maison, un peu en contrebas, ils avaient une pièce fermée par un volet. Celui-ci était baissé et verrouillé la nuit, et relevé pendant la journée. C'est là qu'ils disposaient leurs marchandises. Quand on passait dans la rue, on pouvait entendre des femmes en train d'apprendre à lire dans pratiquement toutes les maisons. J'ai entendu un jour mon père dire à sa femme : « Il ne faut pas juste compter l'argent. Le plaisir d'entendre les femmes apprendre à lire ne se mesure pas en argent. »

À son retour des Pays-Bas, mon beau-frère fut affecté à Padang Sidempuan. En tant que vétérinaire formé dans la métropole coloniale, il appartenait à l'élite de la ville. Ma sœur considérait comme déshonorant le fait que notre père vendait des livres au marché, et cela ajoutait à sa vindicte envers lui. Plusieurs personnes demandèrent à mon père de mettre fin à cette honteuse activité, mais il répondait en riant : « Honteuse ou non, c'est une affaire de point de vue. » Il exerçait, selon lui, une activité respectable.

Durant tout le temps que son mari fut en poste dans la ville, ma sœur ne voulut jamais faire ses courses au marché. Un jour que j'étais assise avec elle dans la véranda de notre maison, elle fit état de son embarras, car elle avait le sentiment qu'une de ses amies se moquait d'elle parce que notre père

vendait des livres au marché. Or celui-ci descendit soudain d'une calèche, devant la maison. Ma sœur, le visage renfrogné, refusa de le saluer. Notre père ne s'en formalisa pas et il m'adressa la parole : où étaient ses petits-enfants ? demanda-t-il. Ma sœur sortit de son mutisme. D'une voix irritée, elle lui demanda s'il revenait du marché. « Oui, à l'instant », dit-il en riant. « Je viens partager mes gains avec mes petits-enfants. » La remarque prit ma sœur au dépourvu. Je pouvais deviner le sourire qu'elle dissimulait.

Mon père avait même l'ambition de publier un journal. « Ton père a beaucoup de rêves », me dit un jour ma belle-mère. « Ce ne sont pas des rêves », rétorqua mon père, « mais des idéaux – qui peuvent se réaliser le temps venu, à la différence des rêves. »

Afin de réaliser cet idéal-là, il transporta son imprimerie à Sibolga, capitale de Tapanuli, et c'est là que parut le journal *Surya*. Son esprit populiste, plus ou moins imprégné de nationalisme, se reflétait bien sûr dans la publication. Au point qu'il fut, à plusieurs reprises, rappelé à l'ordre par la Sécurité nationale et qu'il fut même, dit-on, interdit un temps de publication.

En plus de tout cela, il fut également actif dans la Muhammadiyah, qui venait juste d'être créée au niveau national. Il fut à la tête de la création des branches de Padang Sidempuan et Sipirok et il fit longtemps partie du comité de direction. En tant qu'organisation nouvelle représentant un nouveau courant de la religion musulmane, elle subit l'hostilité des tenants du courant traditionnel. Des confrontations physiques se produisirent fréquemment, parce que chaque parti voulait défendre sa propre existence, tandis que les sbires du gouvernement colonial nageaient en eau trouble dans leur propre intérêt. Il m'est arrivé de voir des gens lancer des pierres contre le bâtiment où mon père tenait une réunion, et même de croiser la moto de la police emmenant mon père dans le side-car, afin, m'a-t-on dit, de l'emprisonner quelques jours en rapport avec la visite de Muhammad Yamin et Gatot Mangkupraja, deux personnages célèbres qui faisaient campagne pour le Partindo. Mon père avait, semble-t-il, organisé leur accueil durant leur tournée à Tapanuli.

Ma belle-mère m'a raconté qu'Adam Malik, alors président du Partindo de Pematang Siantar, est venu rendre visite au siège du parti à Sipirok, ceci à une époque où le parti avait été interdit de réunion. Le gouvernement avait fait de ce parti un épouvantail pour le peuple, notamment en exilant Soekarno à Flores, mais cela n'empêcha pas mon père d'accueillir Adam Malik chez lui et de le mettre à l'abri des actes de provocation. À cette époque, Adam Malik était sous le coup d'une interdiction de réunion, si bien qu'il fut interné à Sipirok pendant un mois et astreint à des travaux forcés.

Dr. Gani a rapporté que, lorsqu'il fit une tournée pour promouvoir le Gerindo, en 1940, c'est mon père, encore une fois, qui s'occupa de le recevoir : il lui offrit le gîte et le couvert dans sa propre maison et lui procura une voiture pour parcourir la région.

Sibual-buali

On retrouve l'empreinte de mon père également dans les arts. Il fonda une organisation chargée de rechercher, recueillir et faire chanter les chansons populaires de la région de Sipirok, qui furent même enregistrées sur microsillons.

Pour une raison obscure, il décida aussi de créer une entreprise de transport par autocars, qu'il appela *Sibual-buali*, du nom du volcan de Sipirok. Ceci vers 1936. Peut-être l'idée lui vint-elle alors qu'il voyageait en autocar de ville en ville, afin de vendre ses livres. Il fut nommé directeur de la compagnie, qui se révéla prospère. À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement des Indes néerlandaises s'engagea à offrir plus d'opportunités aux autochtones compétents pour créer des entreprises. Cette promesse, bien sûr, avait pour but de séduire la population. Mon père la mit à profit pour obtenir que le transport du courrier postal entre Pematang Siantar et Bukittinggi soit confié à *Sibual-buali*. Il était auparavant aux mains d'entrepreneurs chinois.

Un peu avant 1940, mon père s'arrêta à Bengkulu au retour d'un voyage à Bandung. Il racontait qu'il était allé à Bandung voir le directeur des PTT et lui demander de confier aux autochtones le transport du courrier. Le directeur en question promit de mettre la charge aux enchères. Dans ces cas-là, les Chinois l'emportaient généralement. Mohammad Husni Thamrin soutenait l'idée de mon père et la soumit au Conseil populaire (Volksraad). Mon père envisagea aussi d'étendre l'activité de sa compagnie jusqu'à Lubuk Linggau.

La situation, entre-temps, était devenue critique, après qu'ait éclaté la Guerre du Pacifique. En 1942, les Japonais parvinrent à renverser le gouvernement des Indes, et l'Indonésie se retrouva à la merci de l'armée d'occupation nippone. Celle-ci prit le contrôle de toutes les entreprises importantes. *Sibual-buali* fut démantelée. Mon père fut giflé par un militaire fasciste japonais à je ne sais quelle occasion. Il tomba malade. Quand il fut à peu près guéri, il décida de partir pour Java.

Jakarta

En 1944, il fit étape à Bengkulu sur la route de Jakarta. Il était accompagné de ma belle-mère et de deux enfants adultes, un garçon et une fille, ainsi que de Bakri Siregar et Todung Harahap, qui étaient ses assistants. Lorsque le gouvernement républicain installa son siège à Yogyakarta, mes frères Sanusi Pane et Armijn Pane s'y établirent également, de même que mon père et sa famille. À Yogyakarta, il ouvrit une fabrique de matériel scolaire principalement destiné aux élèves de l'école primaire : ardoises, craies, crayons et règles.

En outre, il s'occupa de rassembler les retraités dans une organisation appelée l'Union des retraités d'Indonésie. Il fut désigné comme président à vie. Lorsque Jakarta devint la capitale de la République fédérale d'Indonésie, il quitta Yogyakarta et s'y installa. Le siège de l'Union des retraités le suivit. À Jakarta, il eut encore une autre idée : il prospecta la possibilité d'ouvrir une

fabrique d'huile alimentaire, à Depok et Banten, pour servir d'activité aux retraités. Tant qu'il habita Jakarta, il remplit aussi le rôle de chef du protocole traditionnel lors de mariages de gens de Tapanuli.

En février 1955, eut lieu le Congrès des retraités d'Indonésie, sous sa présidence. Il fut à nouveau élu directeur. Une fois le congrès terminé, une partie des participants, en particulier ceux venus d'îles hors de Java, attendaient à l'hôtel le moment de prendre leur avion de retour. Mon père leur rendait visite tous les jours, afin de leur tenir compagnie et de régler des tâches diverses. Une nuit qu'il était à l'hôtel, il ressentit un malaise. Il rentra chez lui en cyclo-pousse. Il avait, semble-t-il, demandé au conducteur de l'emmener rue Batanghari. Le trajet était court, et il y avait peu de maisons dans cette rue. Lorsque le conducteur lui demanda le numéro de la maison, il s'aperçut que mon père avait perdu connaissance. Il cria, au milieu de la rue, qu'un homme âgé s'était évanoui dans son pousse-pousse. On appela un médecin, qui ne put cependant être daucun secours. Mon père était décédé, et ses activités prirent fin avec lui.

COMPTES RENDUS

Ming chaoben “Yingyai shenglan” jiaozhu 明鈔本《瀛涯勝覽》校注. By Ma Huan 馬歡. Edited by Wan Ming 萬明. Guangzhou: Guangdong renmin chubanshe, 2018. 2 + 60 + 2 + 285 pages. ISBN 978-7-218-12608-1.

Ma Huan's *Yingya shenglan* (now *YYSL*) is a key source for the history of maritime Southeast Asia and some of the countries and ports along the northern sections of the Indian Ocean. European historians are familiar with this book through the detailed studies by Paul Pelliot, J.J.L. Duyvendak and the full English version by J.V.G. Mills. The latter, called *The Overall Survey of the Ocean's Shores* (Cambridge, 1970), is based on an annotated edition prepared by Feng Chengjun 馮承鈞. Besides these works there are many studies on individual sections of the text, including some partial translations, and there is also a full Japanese version. Finally, in 2005 Wan Ming came out with a new annotated Chinese edition of the *YYSL* (see my discussion in *Archipel* 71 [2006], pp. 240-244). This edition is in short characters, but bears the same title as the work under review here, i.e., *Ming chaoben “Yingyai shenglan” jiaozhu*. In China, Wan Ming's edition of 2005 has largely substituted the older one by Feng Chengjun, although several scholars still prefer to use Feng's text.

The present book of 2018 (p. 14) lists two further items that came out since 2005: an annotated edition simply called *YYSL*, again prepared by Wan Ming (published by Shangwu yinshuguan, Zhongguo lüyou chubanshe, 2016), and a traditionally bound photo-mechanic reprint of an old version found in the Fujian Provincial Library (Fujian sheng tushuguan 福建省圖書館). Internet entries refer to this last item, edited by Fujian sheng difangzhi bianzuan weiyuanhui 福建省地方志編纂委員會 and the said library (and also dated 2016), under two different titles: *Dan shengtang chaoben Yingya shenglan* 淡生堂鈔本瀛涯勝覽, and *Yingya shenglan, Dan shengtang chaoben*. So far, both these works have remained fairly unknown, modern secondary sources rarely mention them, and the present author must admit that he also has not seen them. Regarding the “Dan shengtang” text, one may add that Wan Ming has

included this version of the *YYSL*, with punctuation marks, as one appendix in her book of 2005.

The item under review here is the latest edition of the *YYSL*. It is printed in long characters, but the overall arrangement largely follows the one already used for the version that came out in 2005. However, there are some essential differences as well. One point concerns the introductions which summarize the editorial history of Ma Huan's text. The one to the present book contains many more details than the one of 2005. Although the new presentation has become very complex, it is clear and easy to follow. This time Wan Ming lists a total of 29 editions / translations. She also confirms what we already know through her first book, namely that the “*Jilu huibian*” 紀錄彙編 version of the late Ming period was essential in modern historiography. A further point concerns Zhang Sheng 張昇, Guo Chongli 郭崇禮 and other Ming scholars involved in the early stages of the editorial process. These men receive more attention now than in the account of 2005. In this context one may state as well: Wan Ming considers the *Xiyang fanguo zhi* 西洋番國志 as one version of Ma Huan's text and not as a separate book.

Another important point is this: Wan Ming's works focus on the so-called *chaoben* 彙本 (copied / manuscript sources) of the Ming period and not on the *keben* 刻本 (printed texts). She thinks the “*Sanbao zhengyi ji*” 三寶征夷集 *chaoben* (now “*Sanbao*”) is closest to Ma Huan's *chu gao ben* 初稿本 (earliest draft), now lost. That also explains why she selected the “*Sanbao*” text as the basic work (*diben* 底本) for her book of 2005. In that book she presents an improved version of the “*Sanbao*” version together with copious notes. There are two kinds of such annotations: one type (*zhushi* 注釋) concerns factual information (for example, explanations of toponyms, local products, commodities used in trade, non-Chinese terms, etc.), a second kind (*jiaokan* 校勘) draws attention to textual modifications and variant readings in three other *chaoben*: the so-called (a) “*Guochao diangu*” 國朝典故, (b) “*Shuoji*” 說集, and (c) “*Dan shengtang*” versions. Only on rare occasions did Wan Ming cite further sources in the *jiaokan* parts.

The new edition of 2018, reviewed here, also takes the “*Sanbao*” *chaoben* as its basis, but this time the textual modifications introduced by Wan Ming differ from those in the 2005 book – certainly not everywhere, but in a substantial number of cases. The principal reason is that besides consulting versions (a), (b) and (c), she now also looked up two other texts more systematically: (d) a fourth *chaoben*, known as the “*Yihai huahan*” 藝海彙函 version, and the (e) “*Jilu huibian*” edition, already mentioned above. Finally, a detailed comparison between the so-called *fanli* 凡例 part (explanations / guide to the annotations) of the book published in 2005 and the *fanli* part in the one of 2018 reveals further differences, mostly of a technical nature.

Other differences between both books concern the following points: The work of 2005 has seven appendices. These contain the texts of several *chaoben* versions, the so-called *Zheng He hanghai tu* 鄭和航海圖 (Zheng He map, taken from the *Wu bei zhi* 武備志), and other items. The book of 2018 carries eight appendices, five of which present the full texts of (a), (b), (c), (d) and (e). Furthermore, the relevant country segments in *Da Ming yitong zhi* 大明一統志 (originally associated with [b] in the book of 2005) now form a separate appendix. Besides that, there are sections with various prefaces and postscripts to the *YYSL* and some comparative tables. Regarding the *Zheng*

He hanghai tu, this is also included in the work of 2018 – however, not as a simple appendix, but rather in the form of a long foldable map at the beginning of the book.

As was said, both books use the “Sanbao” *chaoben* as a base text, but some readings vary and there are minor variations in the punctuation. One example may be found on p. 69 of the 2018 work. From note 8 in the *jiaokan* part we learn that a short phrase was added to the original “Sanbao” text, following the “Jilu huibian” edition. In the work of 2005, the relevant phrase does not appear (p. 74) and, more generally, the *jiaokan* section is much shorter. A second example takes us to the description of Lambri. In the book of 2005, p. 50, *jiaokan* note 3, Wan Ming says that she altered the text by following version (a); in the work of 2018, p. 46, *jiaokan* note 3, she prefers the reading in text (d). Regarding the *zhushi* notes, these also differ between the earlier and the later book. As a rule, the later one gives more details. Thus, in the first *zhushi* note to the entry on Lambri, the work of 2005 (p. 50) refers to the *Lingwai daida* 嶺外代答, *Zhufan zhi* 諸番志, *Daoyi zhilüe* 島夷志略 and *Yuan shi* 元史, where different forms of the name Lambri appear. The work of 2018 (p. 45) refers to these texts as well and then cites additional records.

In both the earlier and the later book, the style and manner of the *zhushi* notes follow Chinese conventions. This means that one mainly encounters references (usually without chapter and page numbers) to traditional sources and not so much to modern secondary works. No doubt, scholars will greatly profit from Wan Ming’s explanations and editorial efforts, but in some cases European historians may still wish to look up specialized studies and the standard works by Pelliot, Mills and others. A further point that caught my attention is this: There are minimal variations in the presentation of the different *chaoben* in the relevant appendices of both books. These variations mostly concern punctuation marks and occasional textual corrections. Clearly, that may not matter very much, but it shows how careful one has to be when dealing with old sources. Finally, both works contain finding lists of the *zhushi* notes and there is also a bibliographical section in each case. Of course, the version of 2018 lists more titles than the earlier account.

When reviewing the book of 2005 for *Archipel*, I gained the impression that this was a finely prepared work. The same applies to the new version of 2018. In fact, both items are valuable contributions to the field of Asian maritime history. Therefore, if possible, one should use them together, along with other relevant sources. Generally, the version of 2018 provides more details and in cases of doubt may offer better solutions, but there may be exceptions as well. Furthermore, as was already stated, in China the 2005 version (combining the “Sanbao” *chaoben* with three other *chaoben*) has largely substituted the annotated text by Feng Chengjun (dominated by the “Jilu huibian”); the question is whether the book of 2018 (combining the “Sanbao” *chaoben* with four other *chaoben* and the “Jilu huibian”) will gradually substitute the one of 2005.

Of course, we cannot totally exclude the possibility that librarians and collectors will eventually unearth hitherto unknown manuscripts or prints of the YYSL. The evolution of the YYSL is an extremely complex theme as Wan Ming has so brilliantly shown in both her introductions. That involves meticulous comparisons, fact-finding and even some guess work. Future discoveries may still require certain modifications of the present “story.” Notwithstanding, Wan Ming, so it seems to me, has established a safe structure or frame for the editorial history of the text, and that structure will

serve many needs. This is why the present book is an important item that should be acquired by scholars working in different branches of history.

RODERICH PTAK

Suma Oriental, by Tomé Pires, edited by Rui Manuel Loureiro. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau and Fundação Jorge Álvares; Macau: Fundação Macau, 2017, 335 pages, bibl., index. ISBN 978-972-8586-52-2.

Historians of maritime Asia, and especially of Southeast Asia, are most familiar with the *Suma Oriental* by Tomé Pires (c. 1470 – c. 1527). Pires' book is a key source for our understanding of how commercial exchange within the large space that extends from Egypt to the coasts of China was functioning during the late medieval period and at the time when the Portuguese took hold of such coastal locations as Goa and Melaka. Besides recording trade goods and the flow of commodities, Pires also tells us something on different ethnic groups, local customs, rulers and institutions, geographical settings, trade routes, and many other phenomena. Furthermore, as is well known, the *Suma Oriental* constituted the basis for several modern works on maritime Asia; the monumental account by Vitorino Magalhães Godinho and the study by M.A.P. Meilink-Roelofsz, to mention just two examples, heavily rely on the observations made by Pires.

Today, there are three versions of the *Suma Oriental*. (1) The longest version is a manuscript source in the Bibliothèque de l'Assemblée Nationale, Paris. In 1944, Armando Cortesão published this text for the Hakluyt Society; since then it has been cited in thousands of books and articles. This edition, in two volumes, contains an English translation of the text, with copious notes, and the Portuguese "original" itself. In 1978, the latter also appeared in Coimbra, as part of the series "Acta Universitatis Conimbrigensis", and again with many notes. Both the two volumes issued for the Hakluyt Society and the Coimbra monograph also include the so-called book of Francisco Rodrigues, conserved together with the *Suma Oriental*. (2) The second version, found in Lisbon, is much shorter; indeed, several parts are missing. An annotated edition of that manuscript, prepared by Rui Manuel Loureiro, came out under the title *O manuscrito de Lisboa da "Suma Oriental" de Tomé Pires (Contribuição para uma edição crítica)* in the series "Memória do Oriente," published by the Instituto Português do Oriente, Macau, 1996. (3) A third copy reached Italy already in the late 1520s. Shortly thereafter, in the mid-sixteenth century, an Italian translation of this text appeared in Giovanni Battista Ramusio's collection *Navigationi e Viaggi*. Today the Ramusio version, which is also shorter than the one in Paris, is accessible, for example, through the edition by Marcia Milanesi (6 vols; Torino: Einaudi, 1978-1988).

The transmission of Pires' manuscript from Asia to Europe and its circulation inside Europe was, of course, a complex affair as shall be explained below. Historians have made some efforts to reconstruct the *Suma Oriental's* trajectory through time but many

details remain unknown. The introductory parts to items (1) and (2), in particular, contain useful information on all this. That also applies to the book under review here, which includes an even more advanced article on Pires' account, its different versions, and some of the persons (possibly) involved in its early uses and circulation.

What, in fact, is Loureiro's new book about? – It is an annotated edition of the Paris manuscript, in full length, but without translations. Several considerations encouraged Loureiro to prepare his work: (a) Cortesão's presentations, we learn from Loureiro's long introduction, contain some doubtful readings. Clearly, this has to do with the fact that many passages in the Paris manuscript are extremely difficult to decipher. Loureiro, who is an experienced editor of handwritten documents, and especially of sixteenth century-manuscripts, suggests several new interpretations of single words, names or even entire phrases. (b) Secondly, he decided to improve the "graphical" presentation of the text. The original contains a large number of abbreviations, as well as many unnecessary capital initials at the beginning of words, occasionally even in the middle of certain expressions. Above all, there are practically no punctuation marks. Cortesão, in his modern Portuguese editions of the manuscript, has tried to follow the original in these regards as closely as possible; needless to state, this makes it very difficult to understand the printed Portuguese texts. Loureiro disentangled all the abbreviations, adding commas and full stops, and he also standardized many other things, for example recurrent variations between individual letters, especially i/j, u/v and c/ç, while maintaining all ancient spellings that pose no major problem to modern users. (c) Furthermore, occasionally Loureiro refers to the Lisbon manuscript in his notes, thus offering comparisons between both extant Portuguese versions. This is very helpful because in a number of cases the Lisbon version is definitely much easier to understand. (d) A fourth point concerns the internal arrangement of the Paris manuscript. Ages ago, when the manuscript went to the bookbinder, the latter somehow messed up the logical sequence of the extant folios. Cortesão, trying to be faithful to his source, maintained the confused sequence for the Portuguese parts of his editions, while altering it for the English translation. Naturally, this has caused some irritation, especially with regard to the segments dealing with China. Thus, while the Paris manuscript spreads these parts over two different sections, unduly separated from each other through the descriptions of other locations, Loureiro has rejoined the Chinese chapters in a single block (livro IV). A second example concerns the short part on Sri Lanka. In the original manuscript the relevant entry appears after the section on Sumatra / Moluccan Islands; in Loureiro's edition (just as in Cortesão's English translation) the Sri Lankan "chapter" precedes the segments on Bengal, which makes more sense. – Loureiro's new book, one may add, contains a very useful table (on p. 291) which summarizes the segmentation of the Paris manuscript and the segmentations adopted in its published versions. These and other formal points suggest that Loureiro's edition will make it definitely much easier now to also make efficient use of Pires' Portuguese text, side by side with Cortesão's celebrated English translation.

Already in his introduction to the Lisbon version, Loureiro pointed out that the extant Paris manuscript should be a copy of an earlier version, close to the original text. The latter, so it seems, is now lost. In the introduction to the present book, he adds that the Paris copy was probably made by Francisco Rodrigues (see pp. 33, 34), who had met Pires in India. Earlier, Cortesão had already expressed a similar view.

The full title of the Paris version, in Loureiro's reading (p. 55), is *Somma orientall que trata do maar Roxo athee os chīs copilada por Thome Pirez* (Pires' name appears as *Piz*). The Lisbon manuscript, again following Loureiro's transcription, bears the title *Soma horiemtall que trata do mar Roxo ate os chims* (see item 2, above, p. 57). The divergent spellings are remarkable indeed, as this example shows. One may attribute these differences to the assumption that neither of these two texts is identical with the earliest manuscript(s) now lost.

Loureiro thinks that there were four such original copies. (1) One copy, offered to the Portuguese king, remained in the royal library until the mid-eighteenth century. (2) A further copy, originally owned by Afonso de Albuquerque, apparently reached Brás de Albuquerque, Afonso's son. Possibly, it later formed the basis for an abbreviated version, which in turn served as the starting-point for Ramusio's translation and the extant Lisbon text. (3) A third copy was in Pires' hands. Presumably, Pires died in China and one does not know what happened to this text. (4) The fourth copy was the one used by Francisco Rodrigues. – Some of these observations derive from references to Pires' work in other early material. They make it quite clear that a reconstruction of the original text is no longer possible; one could at best verify the shape of certain words and sentences, or perhaps some paragraphs, but many parts of the text would remain open to divergent philological views.

However, historians dealing with maritime Asia's past may not be too interested in philological trifles and the difficulties of defining the correct spelling of certain words and terms. Rather, what counts more is the rich factual data contained in the book. The parts on Melaka, Sumatra and Java in particular are of great importance for studies related to maritime Southeast Asia. Besides that, the Chinese sections have also attracted much interest. There is a recent work – Pascale Girard *et al.* (introduction, translations), *Prisonniers de l'Empire Céleste. Le désastre de la première ambassade portugaise en Chine (1517-1524)* (Paris: Chandeneige, 2013) – which makes use of these sections. The French translation (by João Viegas) of the relevant passages contain various notes which combine evidence drawn from Chinese sources and early European material to explain some of the descriptive elements found in Pires' account. Although this is an excellent book, many points still pose questions, for example Pires' references to the garments and footwear then used in China. Similar problems pertain to many other segments of the *Suma Oriental*. Therefore, Loureiro is quite right when alluding to the necessity of initiating more research on this text.

Another point briefly addressed by him concerns the sources used by Pires. The accounts by Marco Polo and John de Mandeville are two candidates. Evidently, Pires was also familiar with mythology. Finally, he probably had access to some local texts, possibly even including an early predecessor of the *Sejarah Melayu*, if one follows Loureiro's suggestion (p. 30). However, nothing is certain. Again, we need further research on these and similar issues, just as on the question to what extent Pires had deliberately emphasized, exaggerated or even falsified certain things. Historians have addressed this concern on some occasions, but never in a systematic way. Recently Jorge M. dos Santos Alves suggested that Pires, while staying in Melaka, received information through some of the merchants associated with the Melaka-Brunei-Luzon trade axis; at the same time, he probably was in touch with Javanese informants. More specifically, one of Alves' assumptions is that the image of China as a military

weakling (see Loureiro, pp. 150, 155) could go back to Javanese (and Malay) “propaganda” ultimately accepted by Pires for whatever reason (see Alves’ article in Francisco Roque de Oliveira, *Percepções europeias da China dos séculos XVI a XVIII. Ideias e imagens na origem da moderna Sinologia* [Lisbon: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa; [Mafra:] Palácio Nacional de Mafra, 2017]). Needless to state, such ideas are apt to pave the way for fresh investigation.

To round off my remarks: Loureiro’s presentation of the Paris manuscript – jointly with his work on the Lisbon version – will help us to gain a better understanding of the *Suma Oriental*. The punctuation of the text itself greatly facilitates its reading. The technical arrangement is straightforward and very clear. The notes are not as copious and complex as the bulky comments prepared by Cortesão; rather, Loureiro has limited his explanations to essential observations. Moreover, unlike Cortesão he gives no references to secondary sources in the notes. There is a simple reason for this: Experts are familiar with the relevant material anyway; also, secondary works abound and one can hardly consider all possible sources in each case. Put differently, Loureiro’s book does not push readers into a philological labyrinth; it is arranged in such a way that both specialists and historians with general interests will be able to digest Pires’ account. Finally, the introduction is very informative and contains a well-balanced bibliography. There is also a detailed and reliable index at the end of the book. In sum: Libraries and historians dealing with maritime Asia ought to acquire this item for their collections.

RODERICH PTAK

Sher Banu A.L. Khan, *Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641-1699*. Singapore, NUS Press, National University of Singapore, 2017, 318 p., gloss., bibl. index. ISBN 978-981-4722-20-9

Sher Banu A.L. Khan, assistant professor at the Malay Studies Department, National University of Singapore, begins by pointing out that although the reigns of the four sultanah of Aceh, ranging from 1641 to 1699 (Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah – r. 1641-1675, Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah - r. 1675-1678, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah - r. 1678-1688, Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah, r. 1688-1699), have been amply commented upon, so far this period has never been the focus of an in-depth study devoted to the origin, nature and impact of these reigns. Yet the contrast between nineteenth and twentieth centuries scholarly opinions on the one hand —neutral at best—, and a number of contemporary positive comments on these reigns on the other hand, raises numerous questions, in particular regarding the socio-economic context in 1641, the reasons leading to an unprecedented succession of four sultanahs, the authority of each in relation to Islam and adat, how they related to a predominantly male economic and political elite, their diplomatic roles and strategies, as well as the reasons which led to the interruption of the experience in 1699.

The main sources used are VOC archival records (manuscripts and published materials), followed by EIC archival records (manuscripts and published materials), contemporaneous accounts of foreigners who sojourned in Aceh for varying lengths of time, as well as Malay sources (manuscripts and published materials). After the VOC shut down its Aceh factory in 1663, documentation became scarcer, leading to a study focused on the reign of the first sultanah. Moreover EIC records from Indian ports, as well as Portuguese, French, and Danish sources have not yet been exploited. In addition to this, Sher Banu A.L. Khan has made use of about 300 published studies.

The first chapter is devoted to the context in which the first sultanah acceded to power. The author notably raises the question of the existence of a debate about the legacy of female rule in Aceh following the death of Iskandar Thani. Stressing that no such debate is mentioned in contemporaneous foreign accounts, she observes that a number of present-day Acehnese historians state that the period of three days between the death of the sultan and the crowning of the sultanah should be interpreted as an indication of a problem related to the prohibition of female rule in Islam, a problem solved by the acceptance of Sufiatuddin as temporal ruler only without religious authority. Yet Sher Banu A.L. Khan notes that these historians offer no evidence to support this hypothesis, and that the first sultanah assumed the title of *khalifah*. She rather points to reasons explaining a peaceful succession: firstly, a section of the *Taj us-Salatin*, a political treatise written in Aceh in 1603, which explicitly mentions the legitimacy of female rule in the absence of a male heir and in order to prevent a crisis in the kingdom, secondly a passage of the *Bustan us-Salatin*, a chronicle of the sultanate written between the end of the 1630s and the beginning of the 1640s, describing Sufiatuddin as enthroned the very day of the previous ruler's death. In the absence of any written rules of succession, both texts would reflect a localised interpretation of Islamic leadership doctrine, based on a non-gendered approach, taking into account the existence of female rulers in the region well before the beginning of the seventeenth century. The first sultanah clearly benefited from a favourable initial context due to the serious political crisis initiated by the unexpected death of Iskandar Thani as well as the absence of any male heir. Moreover, as Iskandar Muda's daughter, she was a native-born royal, and through the combination of neutrality and legitimacy she obtained the consent and support of the majority of the *orang kayas* and *ulamas*.

It is rather surprising that in this first chapter, Sher Banu A.L. Khan refers only to old scholarly studies, especially Djajadiningrat, Lombard and Stutterheim, when it comes to her reflections on the rulers of the northern tip of Sumatra up until 1641. Yet recent studies by Claude Guillot and Ludvik Kalus (cf. the book *Les monuments funéraires et l'histoire du Sultanat de Pasai à Sumatra*, Paris, Association Archipel, Cahier d'Archipel 37, 2008; the articles published in *Archipel* between 2009 and 2017), as well as Willem van der Molen (*BKI* 163 -2/3, 2007) on the epigraphy of funerary monuments provide new insights on the political history of the Pasai and Aceh sultanates.

In the second chapter, Sher Banu A.L. Khan analyses two accomplishments during the early years of Sultanah Sufiatuddin's reign, in order to demonstrate her effective authority, her organisational aptitudes, and her diplomatic skills. They are her husband's burial, Iskandar Thani, who had several enemies at his court, and the "Jewel Affair" also inherited from her husband. Based on the *Bustan us-Salatin* and

Nicolaus de Graaf's account, the author argues that Safiatuddin "managed to organise one of the grandest funerals the kingdom had ever witnessed." The "Jewel Affair" refers to the VOC officials' attempts to pressure the sultanah and her *orang kayas* to accept and pay for some very expensive jewels ordered by the late Iskandar Thani. This issue gives Sher Banu A.L. Khan the opportunity to comment on the sultanah's strategies to manage the constantly shifting main factions at court, pro- and anti-Iskandar Thani factions on the one hand, pro- and anti-Dutch factions on the other. In addition, the "Jewel Affair" highlights the general misunderstanding between Aceh and the Dutch regarding the nature of agreements signed between Europeans and local rulers. In fact, Acehnese rulers did not see the need to recognise agreements signed by their predecessors. Unlike the authoritarianism practised by her predecessors, Sultanah Safiatuddin reached a collaborative and consensual decision-making process with her elites in order to accommodate the Dutch. Her practical and pragmatic style aimed at maintaining good relations with the VOC, at a time when the strength of the company was increasing in the Straits of Malacca.

Chapters 3 and 4 are focused on Sultanah Safiatuddin's diplomatic action regarding dominated territories. They explore especially the dynamics between the sultanah, her *orang kayas* and the VOC officials relating to Perak and the pepper and gold ports on the southwest coast of Sumatra in the first two decades of her rule. Her position and life were then threatened as the VOC became increasingly audacious in its demand for tin from Perak and pepper from the southwest coast of Sumatra. Aceh conquered Perak in 1620, placed a chosen ruler on the throne, and reaped the profits of the lucrative tin trade. After the conquest of Malacca in 1641, the Dutch wanted to ensure that they inherited what they believed were Portuguese rights on Perak tin, precisely half of its production at a fixed price. Sher Banu A.L. Khan argues convincingly that her strategy to act as a useful counterweight to the different factions led to a situation in which she was recognised as a source of stability for the kingdom, while no faction was strong enough to place one of its own candidates on the throne and support him by force. Moreover, despite the blockade of Perak and the massacre of VOC officials there in 1651, she was the only one able to deal with the Dutch and maintain friendship with the VOC.

Contrary to the commonly accepted idea that the rule of Sultanah Safiatuddin resulted in the decline of Aceh and the loss of her vassal states, Sher Banu A.L. Khan argues that a closer examination of the events that unfolded between Aceh, Perak and the VOC, discloses a dynamic of resilience as well as stronger and more binding overlord-vassal ties than is commonly believed. Regarding the southwest coast of Sumatra, Iskandar Muda managed to control Pasaman, Priaman, Tiku, and Padang, by appointing Acehnese *panglimas*. When Sultanah Safiatuddin came to power, she faced a company increasingly interested in obtaining pepper, especially on the southwest coast of Sumatra. The author argues that Aceh's control over her vassals there had begun to weaken before Sultanah Safiatuddin's reign. By the time of her death in 1675, Aceh's political and commercial control of the southwest coast of Sumatra had weakened, but the kingdom managed to keep spiritual and cultural ties to the region, whereas the VOC's influence was restricted to commerce. More importantly, Aceh's continued independence was ensured, and independence maintained by her successor, Sultanah Zakiatuddin.

In chapter 5, the author examines the practice of Islam at the court and the relations between female rulers and *ulamas*, arguing that Muslim notions of piety and “the just ruler” formed the basis of their power and authority. She compares royal letters since Iskandar Muda’s reign to show the contrast between the modesty, humility and religious tolerance of the first sultanah and the emphasis on the possession of material goods and the depiction of power of the previous two male rulers. She also compares the administration of law, often at the discretion of the male ruler, with many cases of cruel punishments reported by foreigners, and a greater institutionalisation of justice with penalties checked by moral and religious values under the female rulers. Sultanah Sufiatuddin moved towards deferring to the *ulamas* and the Islamic courts for arbitration. She welcomed religious scholars to Aceh but never supported any *ulama* faction, contrary to her predecessors, and her generosity is praised in several local and foreign sources. Sher Banu A.L. Khan ends this chapter with a discussion of the visibility of the queens. Without being secluded or invisible, they probably did not take part in religious festivals and festivities as manifestations of pageantry, material wealth and prowess.

In chapter 6, the author discusses the style of leadership and royal-elite relations under the sultanahs. She again emphasises the opposition between previous reigns marked by coercion and fear, and the peaceful and protective attitude of the sultanahs, which resulted in Aceh’s longest period of peace and prosperity. Regarding the internal administration of the sultanate, Sher Banu A.L. Khan illustrates the authority of the queens and their collaboration with the nobility through examples of land redistribution, appointments and institutionalisation of the *sagi*, a territorial jurisdiction. She argues that during the seventeenth century Aceh evolved from a despotic monarchy into a monarchy in which the decision-making process was based on consensus, leading to a stronger political system and greater stability, as the queens were able to keep the various factions in check. Sultanah Sufiatuddin also managed to build a network of powerful women and eunuchs to assist her and act as intermediaries with the male elites. As regards trade, Sultanah Sufiatuddin strived to protect royal wealth and her *orang kayas’* interests while welcoming foreign traders and managing their various demands. She notably successfully protected the strategic elephant trade from foreign interference.

This section would have benefited from a more detailed analysis of the economic situation during the second half of the seventeenth century, especially as regards Aceh and the Indian Ocean trade. Several events and tendencies had an impact on trade in the sultanate at the time.

Thus, except for the conquest of Malacca by the VOC in 1641, the 1640s saw in several regions of India an increasing involvement of ruling elites in trade with maritime Southeast Asia, the revival of the long distance trade in Bengal, the shifting of the textile industry from Gujarat to Coromandel, the treatise between the VOC and Mataram in 1646. Another turning point occurs around 1660 with the reopening of Banten to international trade, the end of the blockade of Aceh by the VOC, the rise of Johor, the withdrawal of the Moghols from the high-seas trade, and finally the fall in the consumption and prices of spices from the Moluccas in India and Europe. The treaty of Painan signed in 1663 between several ports on the southwest coast of Sumatra and the VOC, which secured the monopoly for pepper purchases there, probably had a greater impact on the economy of Aceh than that assumed by Sher

Banu A.L. Khan. Aceh may have lost major appeal to South Asian traders, in that by losing access to the pepper ports on the southwest coast, it lost its dual function as pepper supplier and main entrepot for Indian textile traders active along this west coast. However Aceh was not completely deserted and the most active traders then were the Kelings from Porto Novo and Nagapattinam. But Indian traders were increasingly attracted by Banten and Johor. Following the conquest of Banten by the VOC in 1682, the Chuliahs remained the only South Asian traders to maintain a significant presence and role in maritime Southeast Asia until the end of the century at least. They certainly took advantage of the Gujeratis' withdrawal to increase their market shares, not only in the Malay Peninsula, but also in ports such as Aceh, where the transaction volume remained attractive enough and where they appear to enjoy some influence at the highest level of the administration. Lastly, the annexation of Golconde and Bijapur by the Moghols in 1686-87 led to the disappearance of ships owned by the former ruling elites in both sultanates. The new power withdrew from maritime transportation. Connections between the political and merchant worlds were thus broken apart, as well as the links between both states and their former "partners" in maritime Southeast Asia. In Bengal, the withdrawal of the elites from all activities related to maritime transportation towards maritime Southeast Asia became dramatically confirmed a few years later, leading to a traffic collapse.

Chapter 7 deals with the last sultanah and the reason for her removal in 1699. The author suggests the influence of foreign-born Arabs as a possible explanation for this decision. Opposition to female rule became more pronounced in the 1680s and the death of the moderate local *ulama*, Abdul Rauf al-Singkel, in 1693, followed by the arrival of a letter from Mecca stating that female rule was against Islam, led to the replacement of Sultanah Kamalat Syah by an individual of Arab descent. However, Sher Banu A.L. Khan argues that the real reason for her deposition was more political than religious, as a group hostile to female rule had become powerful, notably because of the marriage of the sultanah to a man of Arab descent.

In a general reflection on this 59-year-long run of female rulers in Aceh, the author argues that following the successful experiment with the first sultanah, the three other sovereigns were chosen because they were female. Female rule created an environment where cooperation between nobility and royalty primed over conflict, but the final say lay in the sultanah's hand. Aceh remained an independent and important kingdom through their good governance and skilful diplomacy. She concludes that the common view according to which royal power declined under female rule and precipitated Aceh's decline is not supported by contemporaneous foreign and indigenous sources.

In reading this effort to provide a counterweight to all previous scholarly opinions about female rule in Aceh during the seventeenth century, one may have the impression that Sher Banu A.L. Khan, who characterises the reigns of the sultanahs as "the real golden age in Acehnese history" (p. 22), has swung the pendulum too far to the positive side, especially as regards the economic record. But, as the first in-depth study on the topic, this book has the great merit of opening up an entirely new perspective on a so far neglected period in the political history of the Aceh sultanate. More generally, it suggests new perspectives for the study of female roles in the political sphere in Muslim Southeast Asia at the time.

DANIEL PERRET

Corbey, Raymond. *Raja Ampat Ritual Art: Spirit priests and ancestor cults in New Guinea's far West*. C. Zwartenkot Art Books. Leiden. 2017. 163 p., bibl., illus. ISBN 978-90-5450-018-6

Dans ce livre, Raymond Corbey, philosophe et anthropologue néerlandais, s'intéresse aux « arts rituels » de l'archipel de Raja Ampat, situé entre les îles Moluques et la Nouvelle-Guinée. Cette enquête est une étude de cas faisant partie d'une recherche plus générale pour comprendre « (...) how and why (...) indigenous ritual objects-on-the-move which reached the West in tens of thousands during the colonial era began their journey from their place of origin. » (p. 3).

Il s'appuie sur une documentation diverse — récits et créations artistiques de voyageurs et d'administrateurs coloniaux, littérature missionnaire, avis de collectionneurs d'arts, dessins de chamans, documentaire vidéo — produite durant les deux derniers siècles, et cela à deux fins. Tout d'abord, pour reconstituer l'histoire de *l'autel de la baie de Mayalabit* — un ensemble de dix statuettes anthropomorphes représentant un groupe de personnes en train de prier — acquis en 1929 par le Musée des Tropiques (Tropenmuseum) d'Amsterdam. Ensuite, afin de rendre compte de la signification anthropologique des « arts rituels » pour les insulaires de Raja Ampat et, dans une moindre mesure, celle valant pour les Européens.

À Raja Ampat, la morphologie des fétiches en bois contraste fortement avec celle des insulaires qui les honorent. En effet, ces Papous placent les âmes de leurs ancêtres dans des sculptures, les *mon* et les *korwar*, représentant des personnes du Sud-est asiatique (p. 134).

Les *mon*, inspirés de figurines similaires provenant des îles Moluques, sont des créations originales et autochtones à Raja Ampat. Ils sont des ancêtres mythiques qui fédèrent des villages entiers. Un chaman les invoque durant les périodes d'incertitude ou de détresse pour clarifier les incompréhensions du passé et prophétiser l'avenir (p. 25-28). Les *mon* sont toujours andromorphes et mesurent en moyenne soixante centimètres. Ils sont debout, les bras écartés et les paumes tournées vers le ciel. En plus d'être habillés de tissus de coton, deux des trois *mon* de *l'autel de Mayalabit* se caractérisent par un morion, le casque des conquistadors espagnols, sculpté au sommet de leur tête. D'après l'auteur, le morion n'est pas la trace d'un premier contact entre des insulaires de Raja Ampat et des Européens. Il rappelle plutôt l'influence exercée par les îles Moluques où des danseurs portent désormais ces casques européens durant les cérémonies de transmission d'un héritage (p. 134). Quant aux sept autres statuettes de l'autel, il s'agit de *korwar*.

Les *korwar* ont été introduits à Raja Ampat par des migrants papous venus de Nouvelle-Guinée durant ces derniers siècles. Andromorphe ou gynomorphe, le *korwar* contient toujours l'âme-ombre d'une personne décédée. Des offrandes répétées (nourriture, tabac, objets allochtones) lui sont faites pour obtenir son aide dans diverses entreprises : pêche, soins aux malades, ou pour mener à bien un raid guerrier (p. 22-24). Il est directement révéré par les proches du défunt et généralement sans faire appel à un chaman. Leur taille varie d'une petite amulette à quelque 50 cm. Six des sept *korwar* de *l'autel de Mayalabit* sont gynomorphes — trait identifiable par le peigne sculpté dans leurs cheveux — et mesurent 10 à 40 centimètres. Ils sont en position assise, leurs mains sont également tournées vers le ciel, mais avec les bras

simplement posés sur leurs genoux. Le septième *korwar*, andromorphe, n'a pas de tête sculptée, car le crâne d'un défunt a été placé directement sur le buste en bois.

Grâce aux écrits du missionnaire néerlandais Freerk C. Kamma, ethnographe majeur de Raja Ampat où il fut posté durant l'entre-deux-guerres, Raymond Corbey reconstitue l'histoire de l'*autel de la baie de Mayalabit*. Cet ensemble provient de Linsok, un lieu-dit jadis situé dans l'est de la baie de Mayalabit, au centre de Waigeo, la plus grande île de l'archipel de Raja Ampat. Avant d'être acquis par les Néerlandais, probablement dans les années 1920, ce groupe de *mon* andromorphes et de *korwar* gynomorphes symbolisait une alliance matrimoniale mythique entre autochtones de Linsok et étrangers de Nouvelle-Guinée. Ce mythe reflèterait l'alliance historique ayant permis d'établir les deux clans patrilinéaires exogames de Linsok, qui depuis lors continuent les intermariages. L'ethnographie de ce culte de fétiches révèle l'importance qu'y prennent les influences extérieures. On la retrouve sur le premier autel observé et figuré dans une aquarelle peinte par un Français, membre d'une expédition de Duperrey, qui a fait escale en 1823 dans la baie de Fofak, au nord de Waigeo (cf. Chapitre 4). Similaires à l'*autel de Mayalabit*, les statuettes de celui de Fofak étaient déjà syncrétiques comme en attestent le morion de l'une d'entre elles et les traces d'islamisation remarquées sur une autre qui porte le nom d'imam. Toutes les sources connues portent donc à croire que ce culte est résolument tourné vers l'ouest.

L'auteur révèle qu'entre le début du XIX^e siècle et les années 1920, les *mon* et les *korwar*, alors placés dans des « maisons des esprits », étaient facilement observables par les Européens de passage. Une multitude de rites, telle la cérémonie spectaculaire *wor* rassemblant des centaines de personnes chantant et dansant en cercle pendant des jours, étaient accomplis publiquement durant la construction de ces fétiches (p. 21-25). Jusqu'à la fin du XIX^e siècle, les insulaires éprouvaient des difficultés à se séparer de leurs *korwar* et encore plus de leurs *mon*. Ce n'est qu'au tournant du XX^e siècle, période marquée par des vagues de (re)conversions — au christianisme, à l'islam et aux cultes du cargo — qu'ils commencèrent à s'en séparer. Puis, dans les années 1920, les statuettes qui n'avaient pas été cédées spontanément par les indigènes furent de plus en plus souvent confisquées ou détruites par le régime colonial néerlandais qui ordonna également la disparition des « maisons des esprits » (p. 44). Néanmoins, ces rituels ne disparurent pas. De nouveaux *korwar* et *mon* furent sculptés et cachés dans des cavernes où les chamans allaient discrètement honorer Manseren Nànggi, la divinité suprême à Raja Ampat. Après la Seconde Guerre mondiale, avec l'expansion des monotheismes, les traces de ce culte fétichiste vont se raréfier. Ce n'est qu'en 1962, avec les tensions accompagnant la décolonisation, qu'un *mon* réapparaît publiquement au moment où il est offert à un représentant des Nations Unis venu assurer le maintien de la paix. À partir de ce cas précis, Raymond Corbey propose une hypothèse intéressante sur le don des *mon* aux Européens de passage. Selon lui, sur les dix *mon* de Raja Ampat référencés dans le monde, plusieurs seraient en fait des reproductions successives d'une même statuette originelle. En effet, quand un *mon* était donné aux Européens, l'âme-ombre de l'ancêtre ne partait pas avec le fétiche et l'on devait alors sculpter un nouveau *mon* pour l'y reloger (p. 28, 56, 151). Ce cycle de reproduction aurait perduré jusque dans les années 1980 et 1990, une nouvelle statuette étant encore systématiquement refaite dès qu'un *mon* était acquis par un collectionneur d'art. Les insulaires justifiaient cette pratique en expliquant qu'ils

espéraient ainsi pouvoir rester en bon terme avec les esprits ancestraux (p. 152).

Corbey conclut son propos sur l'actualité des *mon* à partir d'un extrait du documentaire « Waigeo, Island of Sorcerers », réalisé en 2003 par Thomas Schultze-Westrum sur la déforestation de l'île de Waigeo (p. 149-151). Désormais délaissé dans une grotte, on y voit un *mon* qui ne serait plus consulté qu'en de rares occasions. Comme autrefois lors des périodes de doutes et de bouleversements, l'incertitude contemporaine quant à l'avenir de leur forêt justifierait de se tourner à nouveau vers ce culte.

La rareté des sources relatives à Raja Ampat n'a pas facilité la recherche de Raymond Corbey. Il semble même qu'aucune enquête ethnographique n'y ait été menée depuis l'entre-deux-guerres. Si l'on se fait malgré tout une idée générale de l'histoire et de l'anthropologie des arts rituels de Raja Ampat, l'articulation entre les nombreuses anecdotes, très détaillées, donne au propos un caractère rhapsodique et peu clair.

Plus précisément, la reconstitution historique concernant *l'autel de Mayalabit* n'est pas totalement convaincante. D'abord, parce que toute l'argumentation de Corbey, basée sur les écrits du missionnaire F.C. Kamma, ne parvient pas à justifier comment on en est arrivé à proposer Linsok comme le lieu originel de l'autel (p. 44). De plus, suivant encore Kamma, Corbey déconsidère trop rapidement les quelques informations accompagnant l'autel depuis 1929. Particulièrement lorsqu'il réfute l'indication, pourtant précise, signalant que la statue *mon* principale est Manseren Nànggi, le dieu suprême à Raja Ampat. D'après Kamma, c'est impossible car, dans les autels de Raja Ampat, le *mon* principal représente toujours Korano Wammurmi, le chef des esprits et des vents de l'est, médiateur entre les humains et Manseren Nànggi. Les humains feraient une offrande au *mon* représentant Korano Wammurmi pour que, dans le monde des esprits, celui-ci la transmette à son supérieur Manseren Nànggi. Considérant ces informations, Corbey juge que le *mon* principal de l'autel ne peut être Manseren Nànggi, mais qu'il est forcément Korano Wammurmi (p. 56).

On fera deux objections au caractère absolu de la suprématie de Manseren Nànggi. D'une part, concernant la figuration du soleil dans les dessins de chamans, Corbey dit d'abord que celui-ci est associé à Manseren Nànggi (p. 55). Plus loin, le soleil est subordonné à Korano Wammurmi (p. 117, 134). Non discuté par Corbey, ces observations suggèrent que Korano Wammurmi pouvait être parfois supérieur à Manseren Nànggi. D'autre part, même en présupposant que Manseren Nànggi était supérieur à toute autre divinité, on s'étonne que Corbey n'ait pas fait une autre hypothèse liant cet autel à la conversion au christianisme, à une nouvelle vague d'islamisation ou à l'émergence d'un culte du cargo, précédent l'arrivée de Kamma. Dans ce cas, les insulaires auraient tenté de reformuler leur cosmologie pour représenter Manseren Nànggi, leur ancien dieu suprême, désormais prêt à se soumettre à un nouvel arrivant : Dieu ou Allah.

Enfin, on regrettera que l'anthropologue se soit davantage attaché à prouver l'origine matérielle d'objets particuliers (de *l'autel de Mayalabit*, du *mon Hollandia* ou de celui de l'université de Groningen), plutôt que s'intéresser aux questions anthropologiques soulevées par la circulation de ces « *indigenous ritual objects-on-the-move* » entre les insulaires avant qu'ils ne passent entre les mains des Européens. Si l'on suppose que les sources permettant de retracer précisément cette partie de la vie des objets sont manquantes, pour autant, dans sa conclusion, reprenant les propos de Kamma, Corbey mentionne clairement qu'ils avaient tendance à circuler entre les

indigènes. En effet, l'ancêtre représenté dans une effigie n'était pas nécessairement vénéré par ses propres descendants : un fétiche pouvait toujours être acheté auprès d'une tribu tierce (p. 147).

SOLENNE COUPPÉ

Muhammad Haji Salleh, *Pantun: The poetry of passion*, Kuala Lumpur, University of Malaya Press, 2018, 108 p. + x, ill.. ISBN: 9789831009765

As an oral literary genre, *pantun* is a type of traditional Malay poetry that may come in two, four, eight or twelve lines. Observable on *YouTube*, the four-line *pantun* has become the customary verbal exchange in a Malay wedding (or engagement) ceremony, especially as part of the culturally sanctioned greetings between the representatives of the bridegroom and the bride upon their arrival at the bride house (cf. Abdul Rahim Hashim, 2012). Based on this ceremonial function, it is apt for the subtitle of this book to classify *pantun* as the poetry of passion. The book informs us that *pantun* is one the oldest verse forms from the Southeast Asian Archipelago. Muhammad tells us that this poetic verse has been recorded from Kalimantan to Java, via the island of Celebes (Sulawesi) as well as in Nusa Tenggara and Papua. It is pointed out that the existence of *pantun* predates the use of the *Rencong Ka Nga Ga* script in southern Sumatra (p. 2).

Notably, the significance of *pantun* as a definitive Malay oral heritage may be traced to the phrase, “*rendang kayu kerana daun, terpandang Melayu kerana pantunnya*,” “the tree is shady because of its foliage, the Malay is admired because of his *pantuns*” (p. 3). The definitions of *pantun* collected in the second chapter suggest that *pantun* as an oral tradition is typically defined as a four-line Malay quatrain. It has been a popularly transacted verse in verbal interaction among the Malay peoples in the region for such a long time because of its simplicity, structured composition of parallel lines and a rhyme scheme (p. 14). The alternating rhyme patterns in a typical *pantun* underwrite the sound aesthetics typical of Asian cultural grammar (Sew, 2015). Rhyming in *pantun* may be perceived as a hierarchical culmination at the discourse level, originating from the mimetic design of onomatopoeia at the Malay lexical level, as elaborated in Wilkinson (1936).

There are many ways whereby *pantun* has spread across the world. Muhammad notes that the migration of Malays as immigrants and/or laborers to Christmas Island, the Cocos, Sri Lanka, South Africa, the Netherlands and Suriname has resulted in the composition and use of *pantun* in performing traditional and new functions (p. 27). Interestingly, through the use of flora and fauna, the content of nature may be exploited in the composition of Malay *pantun*. Since the world is at one's disposal, the creative spectrum in *pantun* offers its maker a vast space of emotional expression. Through the selection of natural resources as specific metaphorical references one may allude to complex feelings such as angst, desire, fear, passion, worry, etc. Among the Malay flora, *padi* (paddy) is a valuable choice often incorporated into the *pantun* creation. Muhammad posits the rhyming potential with *budi* (kindness) and *hati* (heart) as the reason for *padi*'s

becoming a typical metaphor in *pantun*. Another flora that makes a clever allusion of discontent is *limau manis* (sweet lime) as in the following *pantun* (p. 33):

*Limau manis condong ke paya,
Boleh buat sampaian kain;* (punctuation, mine)
*Mulut manis kepada saya,
Hati kasih kepada yang lain.*

The sweet lime stands inclined,
May we use it as a clothes line?
Sweet words to me you announced,
But to another your heart is inclined.

According to Muhammad, poetic Malay genres such as *syair*, *gurindam* and *talibun* lacked the qualities of *pantun*, as these genres have been overtaken by contemporary technologies (p. 46). Readers may find it heartening to read that *pantun* remains robust on the Internet. It is the only poetic Malay verse that can find new life in the cyber world. As a matter of fact, if we watch the popular Malay animation *Upin Ipin*, which is searchable from *YouTube*, a two-line *pantun* such as “*hadiah manis kukur kelapa; hari ini aku nak makan apa?*” could be incorporated into the Malay conversation among the cartoon characters towards a comical outcome (Qonny Q, 2013).

In explaining the magic of the Malay *pantun*, Muhammad offers some cultural viewpoints. The world comes with things that are paired which results in the messages of *pantun* represented in two-part codification. If one appreciates this idea, a *pantun* may become a Malay universe containing reflections of mirror images of two occurrences, parallel in varying scales along similar points. However, readers may find it a bit difficult to follow the alignment in his example that describes *padi* (paddy) as the external expression of *hati* (heart) (p. 93). Perhaps, *budi* (kindness) makes a better external expression of *hati*. Logically, one’s intention is expressed in one’s behaviors.

Muhammad has devoted a significant amount of effort to discussing the many aspects of Malay *pantun* in the book. The illustrations and photographs offer vivid glimpses of the cultural artefacts related to Malay *pantun*. Additionally, the inclusion of *pantun* examples in different languages of the Southeast Asian Archipelago offer insights into the design of *pantun* in their original forms. This is a valuable project that contributes to the understanding of Malay *pantun* for interested readers. The book supplies precious information for *pantun* lovers to further reflect on this oral tradition.

References

- Abdul Rahim Hashim. (2012). Pantun majlis akad nikah Umar Abdul Aziz.mp4. *YouTube*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=vr7JITsLvRo>
- Qonny Q. (2013). Upin Ipin S7 - Usahawan muda (3). *YouTube*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=R-q91IpBUy8>
- Sew, J.W. (2015). Cultural literacy in Chinese and Malay. *WORD* 61(2), pp. 165-177.
- Wilkinson, R.J. (1936). Onomatopoeia in Malay. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 14, pp. 72-88.

JYH WEE SEW

RÉSUMÉS – ABSTRACTS

Pierre Labrousse, Professeur honoraire, Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

Adolphe Combanaire (1859-1939). La gloire de l'explorateur

Adolphe Combanaire (1859-1939) est surtout connu pour sa traversée de Bornéo en 1898 dans des conditions périlleuses et rocambolesques. Il illustre un type particulier d'explorateur, qui se développe à la fin du XIX^e siècle sur le vecteur des entreprises coloniales. Mais alors que la plupart des voyageurs se protègent par des missions de la Société de géographie ou de l'Instruction publique, Adolphe Combanaire, lui, s'est entiché de la *gutta percha* qui commence à manquer dramatiquement pour les câbles téléphoniques. Il explore seul l'Asie du Sud-Est en joignant avec succès l'entreprise à l'aventure. Mais en même temps il veille soigneusement à sa réputation d'intrépidité par la publication du récit de ses aventures de Bornéo à Saïgon dans le *Journal des voyages*. Le dernier chapitre de ce parcours mouvementé se déplace sur le front de la Grande Guerre où il perd un bras. La fin de sa vie à Châteauroux est consacrée à ferrailler dans la politique locale, pour la défense des Poilus.

Adolphe Combanaire (1859-1939). The glory of the explorer

Adolphe Combanaire (1859-1939) is best known for his journey through Borneo in 1898 under dangerous and incredible conditions. He represents a particular type of explorer that developed in the late nineteenth century in the wake of colonial companies. But while most travelers operated through missions organized under auspices of the Society of Geography or the Ministry of Public Education, Adolphe Combanaire took a shine to the *gutta percha*, which began to run out dramatically in the making of telephone cables. He explored Southeast Asia alone, successfully combining business and adventure. But at the same time he carefully made sure to maintain his reputation for fearlessness by publishing the story of his adventures from Borneo to Saigon in the *Journal des voyages*. The last chapter of this turbulent journey shifted to the front lines of the First World War, during which he lost an arm. Near the end of his life, he lived in Chateauroux crossing swords in local politics in defense of the *Poilus*.

Daniel Perret, Directeur d'études, École française d'Extrême-Orient, Université PSL.

Jules Claine chez les Batak (1891) : un récit controversé

En septembre 1891, la communication d'un explorateur français tout juste rentré d'une expédition au nord de Sumatra, fit sensation au congrès des orientalistes de Londres. Quelques mois plus tard, ce retentissement était sérieusement mis à mal par l'un des membres de l'expédition. Cet article tente de retracer le parcours de vie de l'explorateur en question, Jules Claine, en particulier le contexte et les raisons qui ont vu naître cette polémique probablement

unique dans l'histoire de l'exploration de Sumatra à l'époque coloniale. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur la biographie d'un personnage dont le milieu d'origine semble bien loin de présager un tel destin. Enfin, l'auteur retourne sur les pas de l'explorateur dans une région où ce dernier n'y reconnaîtrait sans doute que les volcans.

Jules Claine among the Batak (1891): a controversial account

In September 1891, the presentation of a French explorer who had just returned from an expedition to the north of Sumatra caused a sensation at the Congress of Orientalists in London. A few months later, this impact was seriously undermined by one of the members of the expedition. This article attempts to trace the life course of the explorer in question, Jules Claine, in particular the context and the reasons that gave rise to this controversy, which was probably unique in the history of the exploration of Sumatra in the colonial era. It is also an opportunity to examine the biography of an individual whose background does not at first glance lead us to expect such a destiny. Finally, the author shall walk in the footsteps of the explorer in a region where the latter would probably recognize only the volcanoes.

Majid Daneshgar, Freiburg Institute for Advanced Studies, University of Freiburg, Germany.

New Evidence on the Origin of the *Hikayat Muhammad Hanafiyah*

Many scholars have studied the contribution of the *Hikayat Muhammad Hanafiyah* to Malay Islamic literature. Some of them, including Van Ronkel, Winstedt, Braginsky, and, especially, Brakel, have paid particular attention to the structure and content of the story. These scholars have all suggested that this *hikayat* was copied from an unidentified Persian manuscript and that the Malay version includes some sections not found in the Persian one.

In this study, several manuscript copies of a Persian text, preserved in various libraries around the world, are examined in order to investigate whether this text could be the original source of the Malay version of the *Hikayat Muhammad Hanafiyah*. In order to follow up on and test some previous scholarly conclusions, this study highlights the similarities and differences between both the content and the structure of the Malay and Persian versions on the basis of Brakel's edition of the text.

Nouvelles preuves sur l'origine de l'*Hikayat Muhammad Hanafiyah*

NOMBREUX SONT LES CHERCHEURS À AVOIR ÉTUĐIÉ LA CONTRIBUTION DE L'*Hikayat Muhammad Hanafiyah* À LA LITTÉRATURE ISLAMIQUE MALAISE. UNE PARTIE D'ENTRE EUX, NOTAMMENT VAN RONKEL, WINSTEDT, BRAGINSKY, ET, PLUS SPÉCIALEMENT, BRAKEL, SE SONT PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS À LA STRUCTURE ET AU CONTENU DE L'HISTOIRE. TOUS CES CHERCHEURS ONT SUGGÉRÉ QUE CET *hikayat* A ÉTÉ COPIÉ D'UN MANUSCRIT PERSAN NON IDENTIFIÉ ET QUE LA VERSION MALAISE COMPREND DES PASSAGES NE FIGURANT PAS DANS LE TEXTE PERSAN.

DANS CETTE ÉTUDE, PLUSIEURS COPIES MANUSCRITES D'UN TEXTE PERSAN, CONSERVÉES DANS DIVERSES BIBLIOTHÈQUES DU MONDE ENTIER, SONT EXAMINÉES AFIN DE VOIR SI CE TEXTE POURRAIT ÊTRE LA SOURCE ORIGINELLE DU *Hikayat Muhammad Hanafiyah*. AFIN DE POURSUIVRE ET DE TESTER CERTAINES CONCLUSIONS SAVANTES ANTÉRIEURES, CETTE ÉTUDE MET EN LUMIÈRE LES SIMILITUDES ET LES DIFFÉRENCES ENTRE LE CONTENU ET LA STRUCTURE DES VERSIONS MALAISE ET PERSANE SUR LA BASE DE L'ÉDITION DU TEXTE RÉALISÉE PAR BRAKEL.

M.C. Ricklefs, Professor Emeritus, The Australian National University.

The perils of hybridity in 19th-century Java: Ronggawarsita's reputation, animated debates in *Bramartani*, and the probable origins of Javanese acrostics; with a postscript on Purwalēlana

In 1866-1867, a controversy in the Javanese newspaper *Bramartani* raised questions as to whether the writer Ronggawarsita was really a great Javanese *pujongga* (poet). The correspondents – all from Java's tiny literate class – stooped to extraordinary rudeness towards each other in the midst of withering criticism of Ronggawarsita, until the newspaper's editor brought the correspondence to an end. This lively correspondence revealed not only divisions about what, in the new colonial age in Java, constituted good literature, but also about what, in the pages of the new medium of a newspaper, constituted proper manners. It probably also suggests how the Javanese use of acrostics may have found its origins in a popular Dutch song. With Ronggawarsita's reputation under attack – which occurred again in his final year of life, 1873 – the very different experience of the innovative writer Purwalēlana is also considered.

Les périls de l'hybridité au XIX^e siècle à Java : la réputation de Ronggawarsita, les débats animés de *Bramartani* et l'authenticité des origines des acrostiches javanais ; avec un post-scriptum sur Purwalēlana

En 1866-1867, une controverse dans la revue javanaise *Bramartani* remit en question la notoriété au titre de grand *pujongga* (poète) de l'auteur Ronggawarsita. Les correspondants —appartenant tous à la minuscule classe lettrée de Java — s'abaisserent à une extraordinaire grossièreté les uns envers les autres au milieu de la critique mordante de Ronggawarsita, jusqu'à ce que le rédacteur en chef de la revue mette fin à la correspondance. Animée, cette dernière révéla non seulement des désaccords sur ce qui constituait une bonne littérature durant le nouvel âge colonial de Java, mais aussi ce qui, dans les pages du nouveau média qu'était une revue, constituait les bonnes manières. Cette correspondance suggère probablement aussi comment l'usage javanais d'acrostiches a pu trouver ses origines dans une chanson populaire hollandaise. En contrepoint à la mise en cause de la réputation de Ronggawarsita — qui resurgit au cours de la dernière année de sa vie, en 1873 — l'expérience très différente de l'écrivain novateur Purwalēlana est également abordée.

Nawiyanto, Department of History, Faculty of Cultural Science, University of Jember, East Java, Indonesia.

Nature Conservation in a Frontier Region of Java during the Colonial and Early Post-Colonial Periods

Given the changing environmental realities under colonial rule, Java was believed to have come close to a time of ecological crisis. Drawing upon a number of historical sources, this paper examines the development of nature conservation in a frontier region of Java called the Besuki Residency. It is argued that nature conservation in the region was a reflection of trends in a broader context. The challenges for nature conservation were not only due to the continuing contests over resources between the state and the people, but also to internal issues within the government. Up until around 1970 nature conservation remained very much state-centred and with a strong international thrust, rather than relying on popular support, and the primary problems were mostly encountered in the enforcement of the laws, rather than in the absence of a legal framework. The problems existing in the implementation of nature conservation both during the colonial and post-colonial periods essentially remained very much the same.

Protection de la nature dans une région périphérique de Java au cours des périodes coloniale et post-coloniale

Compte tenu de l'évolution des réalités environnementales à l'époque coloniale, Java aurait été proche d'une période de crise écologique. S'appuyant sur un certain nombre de sources historiques, cet article examine l'évolution de la protection de la nature dans une région périphérique de Java, la Résidence de Besuki. Il y est suggéré que la préservation de la nature dans la région reflétait les tendances dans un contexte plus large. Les défis pour cette protection n'étaient pas seulement dus aux conflits permanents entre l'État et la population pour l'accès aux ressources, mais également liés aux problèmes internes au sein du gouvernement. Jusque vers 1970, la protection de la nature est restée essentiellement centrée sur l'État et reposait sur une forte pression internationale, plutôt que sur le soutien populaire, et les principaux problèmes rencontrés concernaient surtout l'application des lois, plutôt que l'absence de cadre juridique. Les problèmes posés par la mise en œuvre de la protection de la nature pendant les périodes coloniale et postcoloniale sont restés essentiellement les mêmes.

SÉRIE : CAHIERS D'ARCHIPEL

N° 1	D. LOMBARD	
	<i>INTRODUCTION À L'INDONÉSIEN (3^e ÉDITION RÉVISÉE)</i> , 1991	27,45
N° 2	R. JONES	
	<i>ARABIC LOAN WORDS IN INDONESIAN</i> , 1978	épuisé
N° 3	P. LABROUSSE	
	<i>MÉTHODE D'INDONÉSIEN, VOLUME N° 1 (2^e ÉDITION RÉVISÉE)</i> , 1994	(voir série : Autres publications)
N° 4	P. LABROUSSE	
	<i>MÉTHODE D'INDONÉSIEN, VOLUME N° 2, 1978</i>	(voir série : Autres publications)
N° 5	F. SOEMARGONO	
	<i>Exercices structuraux d'indonésien</i> , 1978	épuisé
N° 6	Cl. SALMON & D. LOMBARD	
	<i>LES CHINOIS DE JAKARTA, TEMPLES ET VIE COLLECTIVE</i> , 1977	(voir série : études insulindiennes n° 1)
N° 7	F. PECORARO	
	<i>Essai de dictionnaire taroko-français</i> , 1977	épuisé
N° 8	G. HOOYKAASS	
	<i>INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE BALINAISE</i> , 1979	7,60
N° 9	F. SOEMARGONO	
	<i>LE « GROUPE DE YOGYA » (1945-1960) – LES VOIES JAVANAISES D'UNE LITTÉRATURE INDONÉSIENNE</i> , 1979	épuisé
N° 10	U. SIRK	
	<i>LA LANGUE BUGIS (CÉLÈBES-SUD)</i> , 1979	épuisé
N° 11	H. CHAMBERT-LOIR	
	<i>SASTRA : INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE INDONÉSIENNE CONTEMPORAINE</i> , 1980	épuisé
N° 12	PRAMOEDYA ANANTA TOER	
	<i>CORRUPTION</i> , 1981	épuisé
N° 13	N. PHILLIPS & KHAIMIR ANWAR (ed.)	
	<i>PAPERS ON INDONESIAN LANGUAGES AND LITERATURES</i> , 1981	épuisé
N° 14	G. MOUSSAY	
	<i>LA LANGUE MINANGKABAU</i> , 1981	épuisé
N° 15	P. LABROUSSE	
	<i>DICTIONNAIRE GÉNÉRAL INDONÉSIEN-FRANÇAIS</i> , 1984	59,45
N° 16	P. LABROUSSE	
	<i>DICTIONNAIRE DE POCHE INDONÉSIEN-FRANÇAIS</i> , 1985	9,15
N° 17	P. CAREY (ed.)	
	<i>VOYAGE À DJOCJA-KARTA EN 1825 DE A.A.J. PAYEN</i> , 1988	14,50
N° 18	F. SOEMARGONO & W. ARIFIN	
	<i>DICTIONNAIRE GÉNÉRAL FRANÇAIS-INDONÉSIEN</i> , 1991	59,45
N° 19	Cl. SALMON (ed.)	
	<i>LE MOMENT « SINO MALAIS » DE LA LITTÉRATURE INDONÉSIENNE</i> , 1992	18,30
N° 20	CHANATIP KESAVADHANA (ed.)	
	<i>Chulalongkorn, Roi de Siam. Itinéraire d'un voyage à Java en 1896</i> , 1993	22,55
N° 21	M. BONNEFF (ed.)	
	<i>L'INDONÉSIE CONTEMPORAINE. UN CHOIX D'ARTICLES DE LA REVUE PRISMA (1971-1991)</i> , 1994	24,40
N° 22	H. CHAMBERT-LOIR (ed.)	
	<i>LA LITTÉRATURE INDONÉSIENNE. UNE INTRODUCTION</i> , 1994	18,30
N° 23	M. ABAZA	
	<i>ISLAMIC EDUCATION. PERCEPTION AND EXCHANGES: INDONESIAN STUDENTS IN CAIRO</i> , 1994	25,60

N° 24	M. ZAINI-LAJOUBERT <i>L'IMAGE DE LA FEMME DANS LES LITTÉRATURES MODERNES INDONÉSIENNE ET MALAISE</i> , 1994	25,60
N° 25	PHAN HUY LÊ, CL. SALMON & TA TRONG HIẾP <i>UN ÉMISSAIRE VIÉTNAMEIN À BATAVIA. PHAN HUY CHÚ. « RÉCIT SOMMAIRE D'UN VOYAGE EN MER » (1833)</i> , 1994	25,60
N° 26	L. HUSSON <i>LA MIGRATION MADURAISE VERS L'EST DE JAVA</i> , 1995	36,60
N° 27	G. MOUSSAY <i>DICTIONNAIRE MINANGKABAU-INDONÉSIEN-FRANÇAIS, 2 VOLUMES</i> , 1995	94,50
N° 28	A. FEILLARD <i>ISLAM ET ARMÉE DANS L'INDONÉSIE CONTEMPORAINE</i> , 1995	33,55
N° 29	N. LANCRET <i>LA MAISON BALINAISE EN SECTEUR URBAIN</i> , 1997	28,20
N° 30	C. GUILLOT (SOUS LA DIRECTION DE) <i>HISTOIRE DE BARUS. LE SITE DE LOBU TUA, VOLUME N° 1</i> , 1998	30,50
	<i>HISTOIRE DE BARUS. LE SITE DE LOBU TUA, VOLUME N° 2</i> , 2003	30,50
	<i>HISTOIRE DE BARUS. VOLUMES N° 1 & 2</i> ,	PRIX SPÉCIAL 50,00
N° 31	J. CUISINIER <i>JOURNAL DE VOYAGE, MALAISIE (1933), INDONÉSIE (1952-55), EXTRAITS ÉDITÉS PAR DANIEL PERRET</i> , 1999	épuisé
N° 32	S. VIGNATO <i>ÀU NOM DE L'HINDOUISME. RECONFIGURATION ETHNIQUE CHEZ LES TAMOULS ET LES KARO EN INDONÉSIE</i> , 2000	38,10
N° 33	J.-M. DE GRAVE <i>INITIATION RITUELLE ET ARTS MARTIAUX. TROIS ÉCOLES DE KANURAGAN JAVANAIS</i> , 2001	29,70
N° 34	J.-B. PELON <i>DESCRIPTION DE TIMOR OCCIDENTAL ET DES ILES SOUS DOMINATION HOLLANDAISE (1771-1778)</i>	17,00
	TEXTE ÉTABLI, PRÉSENTÉ ET ANNOTÉ PAR ANNE LOMBARD-JOURDAN, 2002	
N° 35	J.-L. MAURER <i>LES JAVANAIS DU CAILLOU</i> , 2006	30,00
N° 36	M.-F. DUPOIZAT <i>CATALOGUE OF CHINESE STYLE CERAMICS OF MAJAPAHIT. TENTATIVE INVENTORY</i> , 2007	29,00
N° 37	C. GUILLOT & L. KALUS (ED.) <i>LES MONUMENTS FUNÉRAIRES ET L'HISTOIRE DU SULTANAT DE PASAI À SUMATRA</i> , 2008	38,00
N° 38	D. PERRET & H. SURACHMAN (ED.) <i>HISTOIRE DE BARUS III : REGARDS SUR UNE PLACE MARCHANDE DE L'OCÉAN INDIEN (XII^e - MI-XVII^e S.)</i> , 2009	38,00
N° 39	CHRISTIAN PELRAS <i>EXPLORATIONS DANS L'UNIVERS DES BUGIS. UN CHOIX DE TRENTÉ-TROIS RENCONTRES</i> , 2010	35,00
N° 40	LUDVIK KALUS & CLAUDE GUILLOT (TRADUIT ET ANNOTÉ DU TCHÉQUE PAR) <i>PAVEL DURDIK. UN MÉDECIN MILITAIRE À SUMATRA. RÉCITS DE LA GUERRE D'ATJEH</i> , 2010	19,00
N° 41	PAUL WORMSER <i>LE BUSTAN AL-SALATIN DE NURUDDIN AR-RANIRI</i> , 2011	35,00
N° 42	D. PERRET & H. SURACHMAN (ED.) <i>HISTORY OF PADANG LAWAS I. THE SITE OF SI PAMUTUNG (9th CENTURY – 13th CENTURY AD)</i> , 2014	40,00
N° 43	D. PERRET (ED.) <i>HISTORY OF PADANG LAWAS II. SOCIETIES OF PADANG LAWAS (MID-9th – 13th CENTURY CE)</i> , 2014	35,00
N° 44	M. PICARD <i>KEBALIAN, LA CONSTRUCTION DIALOGIQUE DE L'IDENTITÉ BALINAISE</i> , 2017	25,00

SÉRIE : ÉTUDES INSULINDIENNES / ARCHIPEL

N° 1	CL. SALMON ET D. LOMBARD <i>LES CHINOIS DE JAKARTA. TEMPLES ET VIE COLLECTIVE</i>	ÉPUISÉ
------	--	--------

N° 2	M. BONNEFF ET AL. <i>PANCASILA. TREnte ANNÉES DE DÉBATS POLITIQUES EN INDONÉSIE</i>	16,75
N° 3	CL. SALMON <i>LITERATURE IN MALAY BY THE CHINESE OF INDONESIA. A PROVISIONAL ANNOTATED BIBLIOGRAPHY</i>	épuisé
N° 4	C. GUILLOT <i>L'AFFAIRE SADRACH. ÉTUDE SUR LE CHRISTIANISME À JAVA AU XIX^e SIÈCLE</i>	épuisé
N° 5	M. CHARRAS <i>DE LA FORÊT MALÉFIQUE À L'HERBE DIVINE</i>	16,75
N° 6	F. RAILLON <i>LES ÉTUDIANTS INDONÉSIENS ET L'ORDRE NOUVEAU</i>	25,15
N° 7	M. BONNEFF <i>PÉRÉGRINATIONS JAVANAISES. LES VOYAGES DE R.M.A. PURWA LELANA</i>	25,15
N° 8	CH. VULDY <i>PEKALONGAN : BATIK ET ISLAM DANS UNE VILLE DU NORD DE JAVA</i>	21,35
N° 9	B. SELLATO <i>NOMADES ET SÉDENTARISATION À BORNÉO</i>	27,45
N° 10	M. FRANCK <i>QUAND LA RIZIÈRE RENCONTRE L'ASPHALTE...</i>	29,00

SÉRIE : AUTRES PUBLICATIONS

• D. LOMBARD <i>LE CARREFOUR JAVANAIS (3 VOLUMES)</i>	79,00
• C. GUILLOT <i>THE SULTANATE OF BANTEN</i>	14,50
• OUVRAGE COLLECTIF <i>BABOUIN ET AUTRES NOUVELLES DE MALAISIE</i>	14,95
• F. SOEMARGONO ET W. ARIFIN <i>DICTIONNAIRE DE POCHE FRANÇAIS-INDONÉSIEN</i>	19,05
• P. LABROUSSE <i>MÉTHODE D'INDONÉSIEN (NOUVELLE ÉDITION)</i>	28,20
• CL. SALMON, W. FRANKE & A.K. SIU <i>CHINESE EPIGRAPHIC MATERIALS IN INDONESIA (JAVA) VOL. 2 – PART N° 1 & N° 2 (2 VOLUMES)</i>	57,95
• M.O. SCALLIET <i>ANTOINE PAYEN : PEINTRE DES INDÉS ORIENTALES – VIE ET ÉCRITS D'UN ARTISTE DU XIX^e S.</i>	44,20

PRIX ÉTABLIS EN EUROS, FRAIS DE POSTE EN PLUS
ENVOI PAR POSTE, PAIEMENT À RÉCEPTION DE LA FACTURE

ASSOCIATION ARCHIPEL
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
54 BOULEVARD RASPAIL – 75006 PARIS – FRANCE
e-mail : archipel@ehess.fr

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Nous vous recommandons de bien vouloir nous fournir votre article sous forme d'un document imprimé (en deux exemplaires), accompagné d'un support informatique comportant les polices correspondantes (le document informatique peut également être joint à un message électronique à l'adresse suivante : ARCHIPEL@ehess.fr).

Il est préférable que votre article ne dépasse pas 80 000 signes (Times New Roman), soit 25 pages imprimées. Le nom de l'auteur, son appartenance institutionnelle et l'adresse complète doivent figurer en page de garde.

Il est nécessaire de joindre un résumé de l'article d'une dizaine de lignes. En français, si celui-ci est rédigé en anglais, et en anglais s'il est en français.

Tous les articles proposés à la rédaction seront soumis au comité de lecture d'*Archipel*, le comité de rédaction se réservant le droit d'apporter des modifications mineures aux articles sur l'épreuve définitive, sans consulter à nouveau l'auteur, pour des raisons de délais de fabrication. La publication des articles fera l'objet d'un contrat avec cession de droits.

L'auteur reçoit un exemplaire du numéro de la revue, et une copie pdf de son article.

Les manuscrits ne seront pas renvoyés aux auteurs.

RECOMMENDATIONS FOR AUTHORS

We recommend that you send us your article in the form of a printed document (two hard copies) along with its soft copy including the corresponding font (the digital document may also be attached to an e-mail to the following address: ARCHIPEL@ehess.fr).

It is preferable that your article not be longer than 80,000 characters (Times New Roman), that is 25 printed pages. The author's name, the institution or organization to which he or she belongs and the complete address should appear on the title page.

The article should be accompanied by an abstract of about 10 lines, in French if the article is in English, in English if the article is in French.

All articles proposed for publication will be submitted to the Archipel editorial board, the editors reserving the right to make small changes in the final proofs of the articles without consulting the author, because of publication deadlines.

Publication of the articles will be the subject of a contract with cession of rights.

The authors will receive a copy of the issue of the review, and a pdf file of their articles.

Manuscripts will not be returned to their authors.

La revue *Archipel* est référencée à ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters).

Elle figure dans *Art & Humanities Citation Index* et dans *Current Contents/Arts & Humanities*.

Elle est également référencée dans **Index to the Study of Religion Online** (www.brill.nl/isro).

Archipel is indexed in ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters): Arts & Humanities Citation Index and Current Contents/Arts & Humanities.

Archipel is indexed in the Index to the Study of Religion Online (www.brill.nl/isro).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La publication de la revue Archipel est assurée par l'Association Archipel régie par la loi de 1901. Les statuts de celle-ci prévoient le service de la revue aux membres associés qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle.

Toutes les personnes ou institutions qui auront réglé leur souscription pour l'année sont inscrites *ipso facto* comme « membre associé », et peuvent participer à l'Assemblée générale de l'Association, avec voix consultative.

La prochaine Assemblée générale aura lieu à l'EHESS au 54, boulevard Raspail, 75006 Paris, le **17 janvier 2019 à 16 h.**

Le présent avis tient lieu de convocation.